



# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
TAHUN 2025 - 2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

ny



**RPJMD**  
2023 - 2029







BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
dan  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN: ...

W

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

14. Indikator ...

ny



14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan RPJMD ini terdiri dari:
  - a. untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah; dan
  - b. untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025-2029.
- (2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
  - a. untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program-program prioritas pembangunan di Daerah;
  - b. sebagai pedoman dan acuan bagi PD dalam menyusun Renstra PD dan RKPD tahun 2025-2029; dan

c. menjadi ...

- c. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Daerah.

## BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

### Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
  - c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
  - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Daerah; dan
  - e. Bab V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

### Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 6 ...

M



#### Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

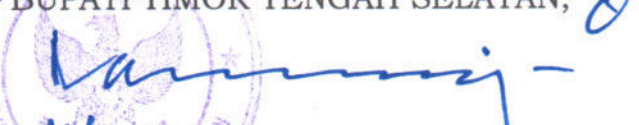
#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal *20 Agustus 2025*

 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,  
  
EDUARD MARKUS LIOE

Diundangkan di Soe  
pada tanggal *20 Agustus 2025*

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 

 SEPERIUS E. SIPA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025  
NOMOR **3** .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: **03 / 2025.**

PENJELASAN...



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, adil, dan merata. Perencanaan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah agar terarah, terpadu, efisien dan efektif serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Rencana pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah pada setiap periode penyusunan dan penerapannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup dan menjamin keadilan dan tata kelola yang mampu menjaga kualitas hidup generasi berikutnya. Perencanaan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang memiliki peran sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjabarkan tahapan perencanaan pembangunan nasional diantaranya: a) penyusunan rencana; b) penetapan rencana; c) pengendalian pelaksanaan rencana; dan d) evaluasi pelaksanaan rencana. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Tahun 2025-2029 untuk menjamin sinkronisasi perencanaan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten maka RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 berpedoman juga pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan dokumen RTRW Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012-2032. Tahapan penyusunan dokumen RPJMD ini sejalan dengan tahapan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman bagi para pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mengingat ...





Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan yang mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya serta merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 serta Dasa Cita yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Timor Tengah Selatan, Eduard Markus Lioe, S.IP., SH., MH dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Johny Army Konay, SH., MH adalah dokumen rencana pembangunan lima tahunan periode pertama dari RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045. Karena itu, RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Timor Tengah Selatan yang berintegritas, kreatif, maju, berbudaya, sejahtera dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Se jauh ini berbagai capaian pembangunan sebagaimana tampak pada sejumlah indikator kunci pembangunan, seperti pembangunan manusia, di mana angka gizi buruk, angka kematian bayi, dan laju pertumbuhan ekonomi belum memberikan hasil yang signifikan. Karena itu, dalam pembangunan lima tahunan periode terakhir RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045, harus diupayakan akselerasi atau lompatan besar, agar terjadi perubahan atau kemajuan yang signifikan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 mengikuti tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. persiapan Penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. konsultasi rancangan awal;
- d. penyusunan rancangan;
- e. musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- f. perumusan Rancangan Akhir;
- g. rewiu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- h. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD;
- i. pembahasan Ranperda;
- j. evaluasi Ranperda; dan
- k. penetapan Ranperda.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4 ...

Pasal 4  
Cukup Jelas.  
Pasal 5  
Cukup Jelas.  
Pasal 6  
Cukup Jelas.  
Pasal 7  
Cukup Jelas.  
Pasal 8  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH  
SELATAN NOMOR 3 .





## Daftar Isi

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Daftar Isi                                                                           | i          |
| Daftar Tabel                                                                         | ii-iv      |
| Daftar Gambar                                                                        | iv-vi      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                             | <b>1</b>   |
| 1.1. LATAR BELAKANG                                                                  | 1          |
| 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN                                                          | 4          |
| 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN                                                          | 10         |
| 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN                                                               | 12         |
| 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN                                                           | 13         |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH</b>                                                   | <b>15</b>  |
| 2.1 Aspek Geografi dan Demografi                                                     | 15         |
| 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat                                                   | 55         |
| 2.3 Aspek Daya Saing Daerah                                                          | 77         |
| 2.4 Aspek Pelayanan Umum                                                             | 88         |
| 2.5 Aspek Kerjasama Daerah                                                           | 114        |
| 2.6 Gambaran Keuangan Daerah                                                         | 115        |
| 2.7 Permasalahan dan Isu Strategis                                                   | 125        |
| <b>BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>                   | <b>151</b> |
| 3.1. Visi                                                                            | 151        |
| 3.2. Misi                                                                            | 152        |
| 3.3. Keselarasan Visi Dan Misi                                                       | 153        |
| 3.4. Tujuan Dan Sasaran                                                              | 158        |
| 3.5. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah               | 165        |
| <b>BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b> | <b>185</b> |
| 4.1. Program Perangkat Daerah                                                        | 185        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                 | <b>249</b> |
| 5.1. Kaidah Pelaksanaan                                                              | 249        |
| 5.2. Pengendalian dan Evaluasi                                                       | 252        |
| 5.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan                                             | 252        |
| 5.4. Komitmen Pencapaian Pembangunan                                                 | 253        |





## Daftar Tabel

|            |                                                                                                     |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. | Nama Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten TTS .....                          | 15 |
| Tabel 2.2. | Suhu udara di Kabupaten TTS Tahun 2023-2024 .....                                                   | 19 |
| Tabel 2.3  | Jumlah Curah Hujan Tahun 2023-2024 .....                                                            | 20 |
| Tabel 2.4  | Daftar Sumber Air Yang Digunakan (Eksisting) .....                                                  | 23 |
| Tabel 2.5  | Tutupan Lahan Tahun 2023 .....                                                                      | 24 |
| Tabel 2.6  | Potensi Bahan Galian di Kecamatan dalam Kabupaten TTS .....                                         | 27 |
| Tabel 2.7  | Populasi Ternak Unggulan Kabupaten TTS Tahun 2020-2024 .....                                        | 28 |
| Tabel 2.8  | Luas Lahan Pertanian Kab. TTS Tahun 2024 .....                                                      | 29 |
| Tabel 2.9  | Produksi Jagung Kabupaten TTS Tahun 2019-2023 .....                                                 | 30 |
| Tabel 2.10 | Produksi Jeruk Keprok dan Alpukat Kabupaten TTS Tahun 2020-2024 .....                               | 30 |
| Tabel 2.11 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Kab.Timor <a href="#">Tengah Selatan</a> Tahun 2020-2024 .....           | 33 |
| Tabel 2.12 | Produksi Perikanan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023 ..                                                 | 34 |
| Tabel 2.13 | Kinerja Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023..... | 35 |
| Tabel 2.14 | Kondisi Akses Sumber Air Minum Layak Kabupaten TTS Tahun 2020-2024 .....                            | 40 |
| Tabel 2.15 | Jumlah Sarana Persampahan di Kota SoE Tahun 2024 ..                                                 | 42 |
| Tabel 2.16 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 .....           | 44 |
| Tabel 2.17 | Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten TTS Tahun 2019 – 2024 .....                   | 45 |
| Tabel 2.18 | Asumsi Proyeksi Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045.....                        | 47 |
| Tabel 2.19 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 .....           | 49 |
| Tabel 2.20 | Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten TTS Tahun 2019 – 2024 .....                   | 50 |
| Tabel 2.21 | Asumsi Proyeksi Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045.....                        | 52 |







|            |                                                                                                      |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.22 | PDRB Kab. TTS Tahun 2020-2024 .....                                                                  | 56  |
| Tabel 2.23 | PDRB Per Kapita Indonesia, Provinsi NTT Kabupaten TTS dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2020-2024 ..... | 57  |
| Tabel 2.24 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kab. TTS Tahun 2021-2024 .....                       | 69  |
| Tabel 2.25 | Perkembangan Indikator IPP Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020-2024.....                       | 76  |
| Tabel 2.26 | Tingkat Ketergantungan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020-2024 .....                          | 77  |
| Tabel 2.27 | Nilai IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 – 2024 .....                          | 79  |
| Tabel 2.28 | Indeks Inovasi Daerah (IID) .....                                                                    | 80  |
| Tabel 2.29 | Nilai Investasi dan Jumlah Investor Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020-2024 .....             | 82  |
| Tabel 2.30 | Indikator Kinerja Utama yang mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Kabupaten TTS Tahun 2025-2026 .....  | 83  |
| Tabel 2.31 | Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024.....                      | 85  |
| Tabel 2.32 | Indeks Desa Membangun di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021-2024.....                         | 85  |
| Tabel 2.33 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020-2024.....                  | 93  |
| Tabel 2.34 | Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024 ...  | 117 |
| Tabel 2.35 | Neraca Daerah Kabupaten TTS Tahun 2019-2024 .....                                                    | 122 |
| Tabel 2.36 | Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026-2030 .....     | 124 |
| Tabel 2.37 | Rumusan Kesimpulan Isu Strategis Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 .....                | 147 |
| Tabel 3.1. | Keselarasan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 dengan SDG's Tahun 2015-2030.....   | 156 |
| Tabel 3.2. | Tujuan dan sasaran Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030 .....          | 160 |
| Tabel 3.3. | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....                                                    | 166 |
| Tabel 3.4. | Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026-2030 .....                     | 172 |
| Tabel 3.5. | Pemetaan Misi dengan Prioritas Daerah .....                                                          | 173 |
| Tabel 3.6. | Lokus Pengembangan .....                                                                             | 176 |





|            |                                                                             |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.7. | Program Prioritas RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026-2030..... | 179 |
| Tabel 4.1  | Program Perangkat Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2026-2030 ..... | 186 |
| Tabel 4.2. | Indikator Kinerja Utama Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030..... | 237 |
| Tabel 4.3. | Indikator Makro Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030 .....        | 240 |
| Tabel 4.4. | Indikator Kinerja Daerah Kab. TTS Tahun 2025-2030....                       | 241 |
| Tabel 4.5. | Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030..... | 242 |

### *Daftar Gambar*

|             |                                                                                        |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1. | Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain.....          | 11 |
| Gambar 2.1. | Peta Relief Ketinggian Kabupaten TTS .....                                             | 18 |
| Gambar 2.2  | Peta Geologi Kabupaten TTS Menurut Kecamatan.....                                      | 21 |
| Gambar 2.3  | Peta Tutupan Lahan Kabupaten TTS.....                                                  | 25 |
| Gambar 2.4  | Rasio Elektrifikasi Kabupaten TTS Sampai Dengan Februari 2025 .....                    | 38 |
| Gambar 2.5  | Indeks Ketahanan Pangan.....                                                           | 39 |
| Gambar 2.6  | Nilai IKLH Kabupaten TTS Tahun 2021-2024.....                                          | 40 |
| Gambar 2.7  | Nilai IKA, IKU dan IKL Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021-2024 .....            | 41 |
| Gambar 2.8  | Nilai IRB Kabupaten TTS Tahun 2019-2023.....                                           | 43 |
| Gambar 2.9  | Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten TTS Tahun 2024.....              | 46 |
| Gambar 2.10 | Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045 ..... | 48 |
| Gambar 2.11 | Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten TTS Tahun 2024.....              | 51 |
| Gambar 2.12 | Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045 ..... | 53 |
| Gambar 2.13 | Piramida Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045..                                      | 54 |







|             |                                                                                                                                    |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.14 | Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 .....                                                                  | 55 |
| Gambar 2.15 | Perkembangan Pilar Pembentuk Nilai IPEI Kabupaten TTS dan Provinsi NTT Tahun 2019-2021 .....                                       | 58 |
| Gambar 2.16 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 – 2024 .....                                              | 59 |
| Gambar 2.17 | Indeks Gini Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 – 2024 .....                                                      | 60 |
| Gambar 2.18 | Angka Kemiskinan Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2024 .....                                                 | 60 |
| Gambar 2.19 | Kemiskinan Ekstrem Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2022 .....                                               | 61 |
| Gambar 2.20 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 – 2024 .....                                     | 62 |
| Gambar 2.21 | Perkembangan Indikator Pembentuk IKS Kabupaten TTS Tahun 2020-2023 .....                                                           | 62 |
| Gambar 2.22 | Prevalensi Stunting Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2024 .....                                              | 63 |
| Gambar 2.23 | Usia Harapan Hidup Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2024 .....                                               | 64 |
| Gambar 2.24 | Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2024 ..... | 65 |
| Gambar 2.25 | Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022-2024 .....                                                   | 66 |
| Gambar 2.26 | Nilai IPLM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024 .....                                                         | 67 |
| Gambar 2.27 | Nilai ILD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022 .....                                                               | 68 |
| Gambar 2.28 | Nilai IMDI Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2023 .....                                                         | 69 |
| Gambar 2.29 | Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2024 .....                                              | 70 |
| Gambar 2.30 | Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2023 .....                                               | 71 |
| Gambar 2.31 | Nilai IPA, IPHA dan IPKA Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024 .....                                           | 72 |
| Gambar 2.32 | Nilai IPG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2023 .....                                                          | 74 |





|             |                                                                                                                                   |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 2.33 | Nilai IDG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024 .....                                                         | 74  |
| Gambar 2.34 | Nilai IKG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024 .....                                                         | 75  |
| Gambar 2.35 | Nilai IPP Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2023 .....                                                                        | 76  |
| Gambar 2.36 | Nilai Angka Ketergantungan Kab. Timor Tengah Selatan Tahun 2020-2024 .....                                                        | 78  |
| Gambar 2.37 | Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....                                                                               | 79  |
| Gambar 2.38 | TPAK Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024 .....                                                              | 81  |
| Gambar 2.39 | Transformasi Digital Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2023 .....                                                             | 84  |
| Gambar 2.40 | Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten TTS Tahun 2020-2024 .....                                                                 | 86  |
| Gambar 2.41 | Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB di Kabupaten TTS Tahun 2020-2024 .....                                                           | 87  |
| Gambar 2.42 | Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024 .....                                          | 88  |
| Gambar 2.43 | Nilai SPBE Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2024 .....                                                        | 88  |
| Gambar 2.44 | Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024 .....                                                                                  | 90  |
| Gambar 2.45 | Nilai IDSD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2024 .....                                                        | 92  |
| Gambar 3.1. | Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 .....      | 154 |
| Gambar 3.2. | Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN (Asta Cita) ..... | 155 |







# R P J M D

2023 - 2029



B  
A  
B  
I





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, adil, dan merata. Perencanaan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah agar terarah, terpadu, efisien dan efektif serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Rencana pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah pada setiap periode penyusunan dan penerapannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup dan menjamin keadilan dan tata kelola yang mampu menjaga kualitas hidup generasi berikutnya. Perencanaan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang memiliki peran sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjabarkan tahapan perencanaan pembangunan nasional di antaranya: a) penyusunan rencana; b) penetapan rencana; c) pengendalian pelaksanaan rencana; dan d) evaluasi pelaksanaan rencana.







Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Tahun 2025-2030. Untuk menjamin sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten maka RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 berpedoman juga pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan dokumen RTRW Kabupaten TTS Tahun 2012-2032. Tahapan penyusunan dokumen RPJMD ini sejalan dengan tahapan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman bagi para pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten TTS.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan yang mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya serta merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas dan 8 (delapan) program hasil terbaik cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 serta Dasa Cita yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Timor Tengah Selatan, Eduard Markus Lioe, S.IP., SH., MH dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Johny Army Konay, SH., MH adalah dokumen





rencana pembangunan lima tahunan periode pertama dari RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045. Karena itu, RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Timor Tengah Selatan yang berintegritas, kreatif, maju, berbudaya, sejahtera dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Sejauh ini berbagai capaian pembangunan sebagaimana tampak pada sejumlah indikator kunci pembangunan, seperti pembangunan manusia, di mana angka gizi buruk, angka kematian bayi, dan laju pertumbuhan ekonomi belum memberikan hasil yang signifikan. Karena itu, dalam pembangunan lima tahunan periode terakhir RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, harus diupayakan akselerasi atau lompatan besar, agar terjadi perubahan atau kemajuan yang signifikan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 mengikuti tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Konsultasi Rancangan Awal;
4. Penyusunan Rancangan;
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
6. Perumusan Rancangan Akhir;
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
8. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD;
9. Pembahasan Ranperda;
10. Evaluasi Ranperda;
11. Penetapan Ranperda.







## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);





6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);







9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);





15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);
17. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);







22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);





29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0138);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0136);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Nomor 1);







35. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1. 55.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Dokumen RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran serta terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dokumen perencanaan dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen jangka panjang menjadi rujukan bagi







sebagai dasar penyusunan Renja tahunan Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten TTS juga sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dari Renja Perangkat Daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten TTS sehingga terjalin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah yang sejalan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 antara lain RTRW Provinsi NTT, RTRW Kabupaten TTS, maupun dokumen terkait lainnya. Penyusunan RPJMD yang berpedoman pada RTRW hendaknya menyelaraskan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten.

#### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 juga dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Kabupaten TTS dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025-2030.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keselarasan dan mensinergikan program-program pembangunan di daerah;
2. Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2025-2029;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN, berisi pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunannya, dasar hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen lain, maksud dan tujuan penyusunan dokumen serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.
- BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH, berisi tentang kondisi aspek geografi (wilayah) dan demografi (kependudukan), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum dan aspek kerja sama daerah. Selain itu juga memuat tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2019-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2030 serta permasalahan pembangunan daerah Kabupaten TTS berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah.
- BAB III. VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan daerah dan program-program prioritas daerah Tahun 2025-2030.







BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, berisi tentang program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB V. PENUTUP, memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.





**R P J M D**  
2025 - 2029



*B*

*A*

*B*

*II*





## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAERAH

#### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten TTS merupakan salah satu dari Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dan terletak di Pulau Timor. Secara geografis, terletak diantara 9° 26'-10° 10' LS dan 124° 49' 01"-124° 04' 00" BT. Dilihat dari geostrategis, Kabupaten TTS terletak di bagian tengah Pulau Timor dan terletak di jalur utama yang menghubungkan Kota Kupang, Kota Kefa, Belu dan Negara Timor Leste sehingga menjadi titik penting dalam lalu lintas transportasi dan perdagangan di Pulau Timor. Secara administrasi, batas-batas Kabupaten TTS adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Timor Tengah Utara
- ❖ Sebelah Selatan : Laut Timor
- ❖ Sebelah Timur : Kabupaten Malaka
- ❖ Sebelah Barat : Kabupaten Kupang

Kabupaten TTS terdiri dari 32 kecamatan, 12 kelurahan dan 266 desa dengan luas wilayah 3.955,36 km<sup>2</sup> dan memiliki garis pantai sepanjang 101,86 km dan terdapat 6 kecamatan yang wilayah daratannya berbatasan dengan laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 2.1.  
Nama Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan  
dan Luas Wilayah Kabupaten TTS

| Kecamatan        | Jumlah Desa/ Kelurahan |      | Luas Total Area<br>(Km <sup>2</sup> /Sq.Km) |
|------------------|------------------------|------|---------------------------------------------|
|                  | Kelurahan              | Desa |                                             |
| 1. Mollo Utara   | 0                      | 18   | 208,22                                      |
| 2. Fatumnasi     | 0                      | 5    | 198,65                                      |
| 3. Tobu          | 0                      | 8    | 98,89                                       |
| 4. Nunbena       | 0                      | 6    | 134,49                                      |
| 5. Mollo Selatan | 0                      | 7    | 147,18                                      |





| Kecamatan                   | Jumlah Desa/ Kelurahan |            | Luas Total Area<br>(Km <sup>2</sup> /Sq.Km) |
|-----------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                             | Kelurahan              | Desa       |                                             |
| 6. Polen                    | 0                      | 11         | 250,29                                      |
| 7. Mollo Barat              | 0                      | 5          | 165,14                                      |
| 8. Mollo Tengah             | 0                      | 6          | 99,69                                       |
| 9. Kota Soe                 | 11                     | 2          | 28,08                                       |
| 10. Amanuban Barat          | 0                      | 8          | 114,30                                      |
| 11. Batu Putih              | 0                      | 7          | 102,32                                      |
| 12. Kwatnana                | 0                      | 8          | 141,22                                      |
| 13. Amanuban Selatan        | 0                      | 10         | 326,01                                      |
| 14. Noebeba                 | 0                      | 7          | 186,02                                      |
| 15. Kuanfatu                | 0                      | 13         | 136,52                                      |
| 16. Kualin                  | 0                      | 8          | 195,84                                      |
| 17. Amanuban Tengah         | 1                      | 10         | 87,71                                       |
| 18. Kolbano                 | 0                      | 12         | 108,70                                      |
| 19. Oenino                  | 0                      | 7          | 154,96                                      |
| 20. Amanuban Timur          | 0                      | 10         | 149,26                                      |
| 21. Fautmolo                | 0                      | 7          | 46,34                                       |
| 22. Fatukopa                | 0                      | 7          | 65,59                                       |
| 23. Kie                     | 0                      | 13         | 162,78                                      |
| 24. Kot'olin                | 0                      | 8          | 58,94                                       |
| 25. Amanatun Selatan        | 0                      | 13         | 82,64                                       |
| 26. Boking                  | 0                      | 7          | 94,58                                       |
| 27. Nunkolo                 | 0                      | 9          | 69,09                                       |
| 28. Noebana                 | 0                      | 5          | 49,63                                       |
| 29. Santian                 | 0                      | 5          | 48,17                                       |
| 30. Amanatun Utara          | 0                      | 9          | 105,84                                      |
| 31. Toianas                 | 0                      | 9          | 103,95                                      |
| 32. Kokbaun                 | 0                      | 6          | 34,32                                       |
| <b>Timor Tengah Selatan</b> | <b>12</b>              | <b>266</b> | <b>3.955,36</b>                             |

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025







Data pada tabel 2.1, dapat diketahui bahwa Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Amanuban Selatan yang memiliki 10 desa dengan luas wilayah adalah 326,01 Km<sup>2</sup> (8,24%), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota SoE dengan 11 kelurahan dan 2 desa seluas 28.080 Km<sup>2</sup> (0,71%). Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Mollo Utara sebanyak 18 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Fatumnasi, Mollo Barat, Noebeba, dan Santian, dimana masing-masing memiliki 5 desa.

Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi kabupaten yang secara geografis mendapatkan posisi strategis karena menjadi daerah transit dan berada tepat di tengah kabupaten sadaratan Timor sehingga mendapatkan jalur trans timor. Kabupaten Timor Tengah Selatan dilalui oleh jaringan jalan Negara yang menghubungkan Kota Kupang dengan Kota Atambua, Kota Betun dan Kota Kefamenanu sehingga jalur transportasi ini juga menghubungkan dengan negara tetangga Timor Leste.

#### **2.1.1.1 Topografi**

Kondisi topografi wilayah Kabupaten TTS meliputi daerah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah termasuk daerah pantai dengan ketinggian yang beragam dari permukaan laut (dpl). Kota SoE memiliki ketinggian 450-900 m dpl. Berdasarkan elevasi, maka wilayah Kabupaten TTS dibagi ke dalam 4 kelompok yaitu:

- ✓ Ketinggian 0-500 m dpl yaitu: seluas 256.697,31 Km<sup>2</sup> atau 64,91%
- ✓ Ketinggian 501-1.000 m dpl yaitu: 118.402,18 Km<sup>2</sup> atau 29,94%
- ✓ Ketinggian 1.001-1.500 m dpl yaitu: 18.306,60 Km<sup>2</sup> atau 4,63%
- ✓ Ketinggian 1.501-2.000 m dpl yaitu: 2.041,61 Km<sup>2</sup> atau 0,52%



Gambar 2.1.  
Peta Relief Ketinggian Kabupaten TTS



Sumber: RTRW Kabupaten TTS Tahun 2012-2032

Kecamatan dengan letak paling tinggi adalah Kecamatan Fatumnasi, terutama Desa Fatumnasi dan Kuanobel dengan luas 1.304,95 Ha. Sedangkan Kecamatan Amanuban Selatan merupakan kecamatan terluas pada kelas ketinggian terendah, dengan luasan 31.296,89 Ha.

#### 2.1.1.2.1. Iklim

Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 mdpl di garis pantai sampai dengan 2.477 mdpl yaitu di puncak Gunung Mutis. Suhu udara dan curah hujan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dipengaruhi oleh kondisi topografi, posisi geografi yang berada di dekat Samudera Hindia serta kondisi iklim tropis. Berdasarkan kondisi tersebut, maka berikut ini akan diberikan gambaran Kabupaten TTS berdasarkan kondisi suhu udara dan curah hujan.

##### a) Suhu Udara

Suhu udara mencerminkan tingkat panas dan dingin di atmosfer, dan bervariasi tergantung lokasi serta waktu di permukaan bumi. Suhu udara di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2022-2023 yang meliputi suhu minimum, maksimum, rata-rata perbulan serta kelembaban dapat dilihat dalam gambar berikut ini.





Tabel 2.2.  
Suhu udara di Kabupaten TTS  
Tahun 2023-2024

| Bulan     | Suhu       |               |      |               | Kelem<br>Baban | Suhu       |               |      |               | Kelem<br>Baban |
|-----------|------------|---------------|------|---------------|----------------|------------|---------------|------|---------------|----------------|
|           | Tahun 2023 |               |      |               | Rata-<br>Rata  | Tahun 2024 |               |      |               | Rata-<br>Rata  |
|           | Min        | Rata-<br>Rata | Maks | Rata-<br>Rata |                | Min        | Rata-<br>Rata | Maks | Rata-<br>Rata |                |
| Januari   | 24,9       | 27,8          | 31,2 | 85            |                | 24,2       | 29,13         | 35,2 | 84,04         |                |
| Februari  | 24,7       | 27,1          | 30,7 | 89            |                | 24         | 28,44         | 33,8 | 86,33         |                |
| Maret     | 24,2       | 27,3          | 31,7 | 87            |                | 20,4       | 28,27         | 34,6 | 87,69         |                |
| April     | 23,9       | 27,2          | 32,1 | 85            |                | 22,8       | 28,64         | 35,4 | 80,59         |                |
| Mei       | 23,2       | 27,2          | 32,3 | 75            |                | 23,1       | 28,72         | 35,3 | 75,98         |                |
| Juni      | 22,3       | 26,6          | 32,8 | 77            |                | 19,6       | 27,09         | 34,6 | 76,84         |                |
| Juli      | 23         | 26,6          | 32,3 | 76            |                | 18,7       | 26,83         | 35,3 | 73,63         |                |
| Agustus   | 22,6       | 27            | 33,8 | 67            |                | 19,6       | 26,87         | 35,6 | 70,25         |                |
| September | 21,7       | 27            | 34   | 57            |                | 20,6       | 27,99         | 36,8 | 73,59         |                |
| Oktober   | 22,8       | 28,4          | 33,3 | 72            |                | 22,2       | 29,43         | 37   | 72,11         |                |
| November  | 24,9       | 29,8          | 34,6 | 73            |                | 24         | 29,81         | 37,9 | 75,02         |                |
| Desember  | 24,9       | 29,3          | 34,6 | 82            |                | 22,4       | 28,27         | 33,5 | 85,95         |                |

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2024-2025

Berdasarkan tabel 2.2, suhu udara minimum tahun 2024 adalah 19,6 derajat dan bila disandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh SNI 03-6572-2001 tentang tingkatan temperatur yang nyaman untuk orang Indonesia, maka Kabupaten TTS termasuk dalam tingkatan sejuk nyaman (20,5°C-22,8°C) dan nyaman optimal (22,8°C-25,8°C), kecuali pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2024 suhu udara minimum berada di bawah tingkat sejuk nyaman. Kelembaban udara di Kabupaten TTS bila disandingkan dengan kelembaban udara relatif di daerah tropis yang dianjurkan pada daerah beriklim tropis adalah 40%-60%, kelembaban udara sepanjang tahun 2024 berada di atas ambang nilai yang dianjurkan sehingga dapat berpengaruh pada Kesehatan dan masalah-masalah lainnya.





b) Curah Hujan

Jumlah curah hujan merupakan volume air yang terkumpul di permukaan bumi selama periode tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah curah hujan di Kabupaten TTS tahun 2022-2024 dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut

Tabel 2.3  
Jumlah Curah Hujan Tahun 2023-2024

| Bulan     | Tahun 2023              | Tahun 2024              |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
|           | Jumlah Curah Hujan (Mm) | Jumlah Curah Hujan (Mm) |
| Januari   | 150                     | 161,4                   |
| Februari  | 640,5                   | 215,8                   |
| Maret     | 344,1                   | 378                     |
| April     | 192,9                   | 35,4                    |
| Mei       | 1                       | 1,3                     |
| Juni      | 8,5                     | 0                       |
| Juli      | 2,5                     | 0                       |
| Agustus   | -                       | 0                       |
| September | -                       | 61                      |
| Oktober   | -                       | 3                       |
| November  | 31,5                    | 177,3                   |
| Desember  | 219,8                   | 412,9                   |

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2024-2025

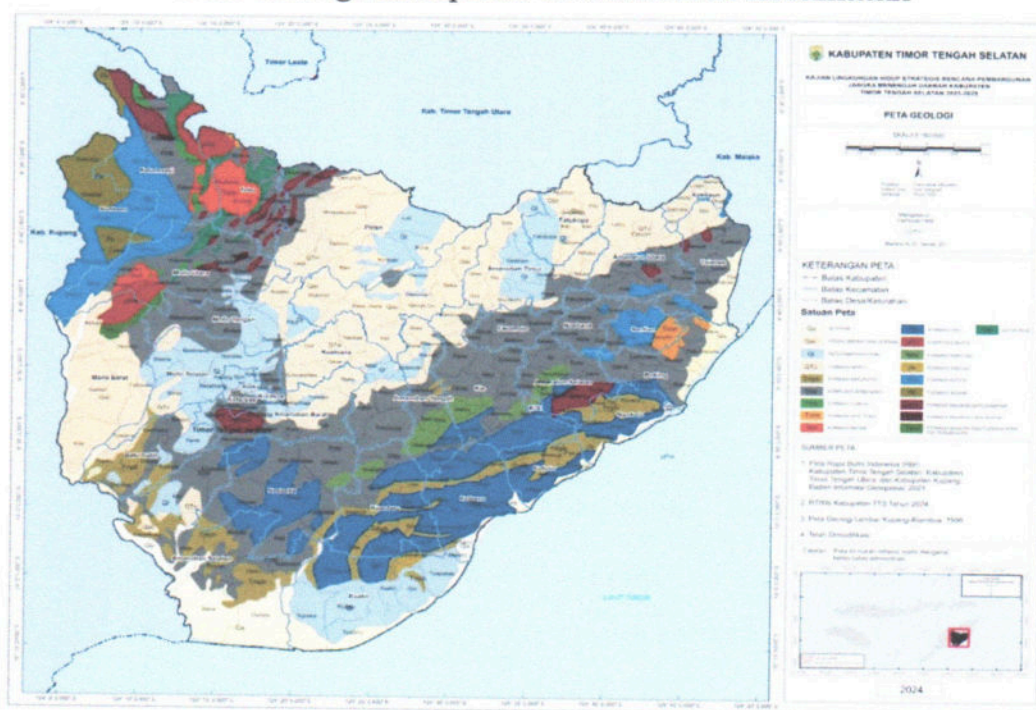
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2023 di bulan Februari dan Tahun 2024 di bulan Desember. Memperhatikan jumlah curah hujan dan hari hujan maka dapat diketahui bahwa musim penghujan dimulai dari bulan November sampai dengan bulan maret.



### 2.1.1.3 Geologi

Secara fisiografi daerah Timor Barat digolongkan dalam 5 satuan fisiografi (Rosidi dkk, 1979) yaitu : pegunungan kasar, dataran tinggi, pegunungan bergelombang, Fatu (istilah untuk gunung/batu yang dipakai oleh Rosidi dkk, 1979) dan Dataran rendah. Unsur-unsur struktur yang dominan di pulau Timor ialah lipatan ketat, sesar naik dan mendatar, sedangkan sesar turun kurang begitu dominan. Kondisi Geologi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilihat pada Peta berikut ini:

Gambar 2.2  
Peta Geologi Kabupaten TTS Menurut Kecamatan



Sumber: Dokumen RTRW Kab.TTS Tahun 2012-2032

Berdasarkan Peta yang ada, kondisi Geologi tersusun dari berbagai formasi dengan berbagai jenis batuan dan secara struktur terdiri dari Formasi Bisane (Pb), Formasi Aitutu (TRa), Formasi Wailuli (Jw), Formasi Nakfunu (Kna), Formasi Ofu (Tko), Formasi Noiltoko (Tmn), Formasi Cablac (Tmc), Formasi Batuputih (Tmptb), Formasi Noelle (QTn), Batugamping koral (Ql), Konglomerat dan Kerakal (Qac) serta Aluvium (Qa), Kompleks Mutis (pPm), Formasi Maubisse (TPmv/TRPml),



Formasi Haulasi dan noni tak teruraikan (Tkhn), Formasi Noni (Kno), Formasi Haulasi (TPmh), Formasi Metan (Tem), Diorit Kuarsa (Ted), Formasi Manamas (Tmm), Batuan Ultra Basa (Ub) dan Komplek Bobonaro (Tmb).

#### **2.1.1.4 Geohidrologi dan Hidrologi**

Kabupaten TTS terdapat 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Noelmina dan DAS Benanain serta 6 (enam) Sub DAS, yaitu Sub DAS Fail, Sub DAS Muke, Sub DAS Siu, Sub DAS Tuke, Sub DAS Menu dan Sub DAS Tumutu. DAS Mina memiliki tangkapan air seluas 273.300 Ha dan memiliki aliran utama, yaitu sungai Noelmina sepanjang 97 km. DAS Noelmina mencakup 12 kecamatan dan 72 desa/kelurahan di Kabupaten TTS. Sedangkan DAS Benanain memiliki tangkapan seluas 97.750 ha dengan aliran utamanya adalah sungai Benanain sepanjang 135 km. DAS Benanain mencakup 17 kecamatan dan 119 desa/kelurahan di Kabupaten TTS.

Sumber air untuk memenuhi kebutuhan air minum maupun pertanian di Kabupaten TTS berasal dari air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Air permukaan yang dimanfaatkan bersumber dari air sungai dan mata air. Sementara air bawah tanah diperoleh dari sumur-sumur bor yang terbangun. Pada daerah-daerah tertentu yang tidak mempunyai sumber air, kebutuhannya dipenuhi melalui pembangunan embung maupun mendatangkan air dari daerah-daerah di sekitarnya. Kabupaten TTS memiliki potensi mata air dan sungai yang dapat dikembangkan sebagai sumber air bersih bagi penduduk, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Sumber air yang sudah dimanfaatkan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten TTS dapat dilihat pada tabel berikut





Tabel 2.4  
Daftar Sumber Air Yang Digunakan (Eksisting)

| No | Nama Mata Air | Jangkauan Layanan | Debit (Lt/det) |
|----|---------------|-------------------|----------------|
| 1  | MA Oesoe      | Kota SoE          | 2,00           |
| 2  | MA Bisuaf     | Kota SoE          | 3,00           |
| 3  | MA Bonleu     | Kota SoE          | 50,00          |
| 4  | MA Oenasi     | Kota SoE          | 10,00          |
| 5  | MA Nifuhuki 1 | Kota SoE          | 10,00          |
| 6  | MA Nifuhuki 2 | Kota SoE          | 5,00           |
| 7  | MA Kesetnana  | Kota SoE          | 5,00           |
| 8  | SMTF          | Kota SoE          | 5,00           |
| 9  | MA Oepotoh    | Mollo Utara       | 3,00           |
| 10 | MA Manumetan  | Mollo Selatan     | 3,00           |
| 11 | MA Oe Siet    | Amanuban Selatan  | 7,00           |
| 12 | MA Oe Tunu    | Amanuban Tengah   | 3,00           |
| 13 | MA Oe Uki     | Amanatun Selatan  | 3,00           |
| 14 | MA Sonbilo    | Amanuban Timur    | 20,00          |
| 15 | MA Oetfo      | Oenino            | 3,00           |
| 16 | MA Oebiloe    | Boking            | 5,00           |
| 17 | MA Baat       | Kualin            | 10,00          |

Sumber: Dokumen Review Rispm Kab. TTS, Tahun 2023

Untuk pemenuhan layanan air minum diambil dari 17 sumber mata air yang saat ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kabupaten TTS, terutama di Kecamatan Kota SoE, Molo Utara, Amanuban Selatan, Amanuban Tengah, Amanatun Selatan, Amanuban Timur, Oenino, Boking dan Kualin. Untuk kondisi eksisting, mata air dengan debit terbesar adalah mata air Bonleu dengan 50 Liter/detik yang telah melayani lintas kecamatan dan dikelola langsung oleh PERUMDA TTS serta mata air Sonbilo di Kecamatan Amanuban Timur dengan 20 Liter/detik. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan juga mengupayakan pelayanan air minum dari mata-mata air yang berada di desa lewat beberapa program pekerjaan air minum yang berasal dari sumber dana APBD 2, APBD 1, APBN, DAK maupun kolaborasi dengan pihak LSM/NGO.





Selain pemanfaatan sumber mata air, sumber air permukaan berupa sungai juga sudah dimanfaatkan untuk peruntukan pertanian dan SPAM yaitu sungai Bonleu, Tuasene, Noemuke, Noeleke dan Noebesi. Dan juga sumber air permukaan lain berupa embung sebanyak 107 buah, danau sebanyak 5 dan 1 bendungan yaitu bendungan Temef yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih, peternakan, pertanian, perikanan dan wisata Bahari di beberapa wilayah yang tidak memiliki sumber air.

#### 2.1.1.5 Penggunaan Lahan

Merujuk pada data Balai Pementapan Kawasan Hutan dan Tata lingkungan diketahui tutupan lahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan terbagi menjadi 15 tipe tutupan lahan yaitu Belukar Rawa, Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Sekunder, Hutan Tanaman, Pemukiman, Pertambangan, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur, Savana, Sawah, Semak/Belukar, Tambak, Tanah Terbuka, dan Tubuh Air. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5  
Tutupan Lahan Tahun 2023

| No | Tutupan Lahan                 | Luas (ha)  | %     |
|----|-------------------------------|------------|-------|
| 1  | Belukar Rawa                  | 784,07     | 0,20  |
| 2  | Hutan Lahan Kering Primer     | 16.069,31  | 4,06  |
| 3  | Hutan Lahan Kering Sekunder   | 99.271,96  | 25,10 |
| 4  | Hutan Mangrove Sekunder       | 699,01     | 0,18  |
| 5  | Hutan Tanaman                 | 330,24     | 0,08  |
| 6  | Pemukiman                     | 22.676,56  | 5,73  |
| 7  | Pertambangan                  | 50,78      | 0,01  |
| 8  | Pertanian Lahan Kering        | 7.786,13   | 1,97  |
| 9  | Pertanian Lahan Kering Campur | 129.460,43 | 32,74 |
| 10 | Savana                        | 47.178,54  | 11,93 |
| 11 | Sawah                         | 16.586,76  | 4,19  |
| 12 | Semak/Belukar                 | 43.475,98  | 10,99 |
| 13 | Tambak                        | 307,46     | 0,08  |
| 14 | Tanah Terbuka                 | 774,66     | 0,20  |
| 15 | Tubuh Air                     | 10.015,30  | 2,53  |

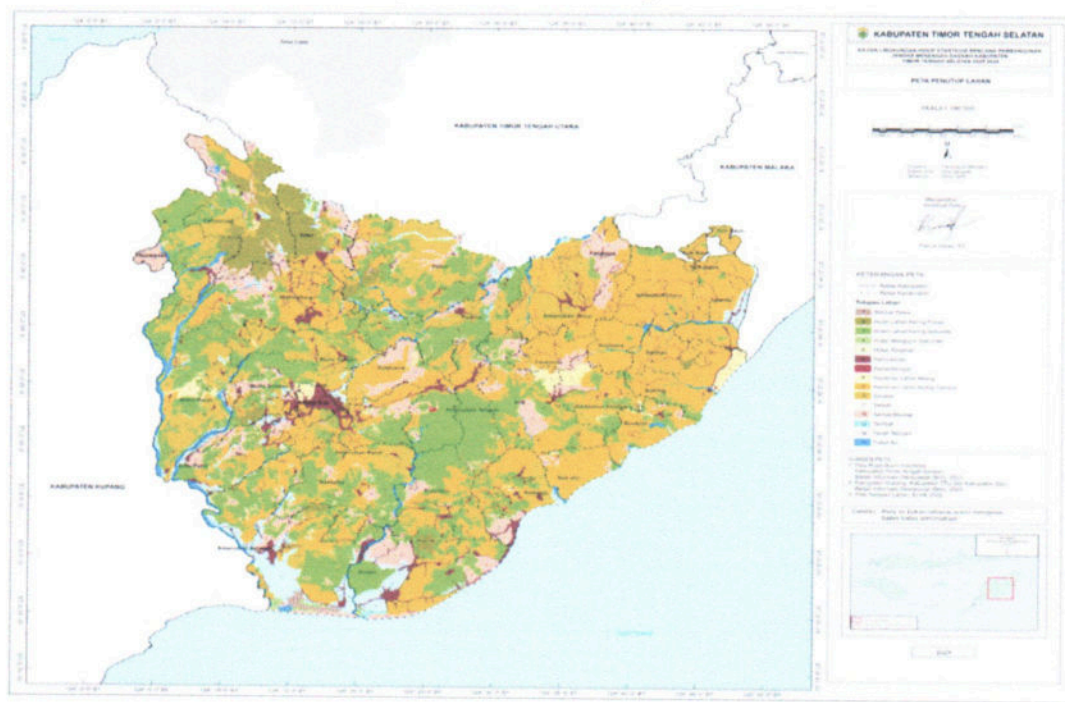
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kab. TTS 2025-2029, Tahun 2024





Luas tutupan lahan di Kabupaten TTS berdasarkan data KLHS RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 seluas 395.467,19 Ha dengan area terluas adalah pertanian lahan kering campur seluas 129.460,43 Ha (32,74%) dan area terkecil yaitu wilayah pertambangan seluas 50,78 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.3  
Peta Tutupan Lahan Kabupaten TTS



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2029, Tahun 2024

## 2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

### A. Hutan

Luas kawasan hutan di Kabupaten Timor Tengah Selatan terbaru setelah ada Taman Nasional seluas 156,705 Ha dengan perincian hutan lindung dengan luas sebesar: 22.488 Ha, hutan produksi dengan luas sebesar: 97.597 Ha, hutan produksi terbatas dengan luas sebesar: 4.005 Ha dan kawasan konservasi dengan luas sebesar: 32.615 Ha.



Potensi sumber daya alam di bidang kehutanan adalah berupa hutan bonsai ampupu dengan luasan 30.777 kilometer persegi. Desa Fatumnasi dengan koleksi hutan bonsai ini masuk ke dalam kawasan Taman Nasional. Desa Fatumnasi berada pada ketinggian 1.480 m dpl serta memiliki potensi flora berupa spesies Lumut Jenggut (*Usnea sp*) sebagai daerah dengan tingkat kelembaban tinggi di Pulau Timor dan terdapat juga tanaman lainnya seperti pohon Hau Besi (*Ilex odorata*), Tune (*Podocarpus imbricata*), Ajaob (*Casuarina aquisetifolia*), Hau Solalu (*Podocarpus pilgeri*), pohon-pohon Kasuari (*Casuarina equisetifolia*), Ampupu (*Eucalyptus urophylla*) dan kebun bonsai yang telah berumur ratusan bahkan ribuan tahun dan potensi fauna berupa satwa kuda, sapi, dan Rusa Timor (*Cervus timorensis*). Selain potensi kawasan hutan sebagai wisata alam, kawasan hutan lainnya juga menghasilkan hasil hutan non kayu seperti di sekitar kawasan hutan di Desa Adat Boti, terdapat 5 jenis tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pewarna alami tenun ikat yaitu Mengkudu (*Morinda citrifolia*) 182,49%, Loba (*Symplocos sp.*) 147,56% memiliki potensi banyak sehingga harus dipertahankan terus. Sedangkan jenis Tarum (*Indigofera tinctoria*) 51,77%, Arbila (*Phaseolus lunatus L.*) 34,57% dan Kunyit (*Curcuma longa*) 20,30% sesuai dengan syarat tumbuh. Namun dilihat dari pertumbuhannya sampai tingkat semai sehingga potensinya semakin berkurang maka harus dibudidayakan kembali.

#### B. Tambang

Pembangunan pertambangan terutama dilakukan melalui penganekaragaman hasil tambang dan pengelolaan usaha pertambangan secara efisien. Terdapatnya bahan galian di suatu tempat erat kaitanya dengan kondisi geologi daerah tersebut. Kondisi geologi yang dimaksud adalah posisi lempeng kulit bumi, baik lempeng samudera maupun lempeng benua yang saat ini dapat dilihat dari rekaman stratigrafi. Kabupaten TTS termasuk kabupaten dengan potensi tambang yang cukup banyak tetapi







belum diolah dengan baik. Potensi hasil tambang dan energi di Kabupaten TTS pada dapat dilihat sebarannya di tabel berikut:

Tabel 2.6  
Potensi Bahan Galian di Kecamatan dalam Kabupaten TTS

| Potensi Bahan Galian Dan Lokasi |              | Kecamatan                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logam                           | Non Logam    |                                                                                                           |
| Nikel                           | Marmer       | Mollo Utara, Fatumnasi, KiE, Mollo Selatan, Polen, Noebeba                                                |
|                                 |              | Mollo Utara, Mollo Selatan, Fatumnasi Polen                                                               |
|                                 | Batugamping  | Seluruh Kecamatan                                                                                         |
|                                 | Batu Hias    | Amanuban Tengah, Kolbano                                                                                  |
|                                 | Pasir Kuarsa | Amanatun Selatan, Mollo Barat                                                                             |
|                                 | Pasir        | Mollo Selatan, Batuputih, Mollo Barat, Mollo Utara, Tobu, Polen, Oenino, Amanuban Timur, Toianas, Noebana |
|                                 | Sirtu        | Seluruh Kecamatan                                                                                         |
|                                 | Dolomit      | Amanatun Utara                                                                                            |
|                                 | Lempung      | Seluruh Kecamatan                                                                                         |
|                                 | Utrabasa     | Mollo Utara                                                                                               |
| Mangan (Mn)                     |              | Amanuban Selatan, Amanuban Tengah, Kota SoE, Kuatnana, Polen                                              |
| Emas                            |              | Polen                                                                                                     |
| Besi                            |              | Amanuban Barat                                                                                            |
|                                 | Batu Warna   | Kotolin, Nunkolo, Kolbano, Kualin                                                                         |
|                                 | Batu Lempung | Mollo Utara, Fatumnasi, KiE, Mollo Selatan, Batu Putih                                                    |
|                                 | Batu Pasir   | Fatumnasi, Amanatun Utara, Amanuban Tengah                                                                |

Sumber: Potensi bahan galian industri Kab. TTS, Dinas Pertambangan dan Energi Kab. TTS Tahun 2006

Berdasarkan data pada tabel yang disajikan dapat diketahui bahwa potensi bahan tambang pada beberapa wilayah telah dikelola secara baik dan berkelanjutan seperti pasir dan sirtu akan tetapi ada beberapa potensi tambang yang telah dieksploitasi seperti mangan dan Marmer tapi belum dilakukan secara maksimal. Untuk marmer belum dapat dieksploitasi dikarenakan pertimbangan masalah sosial sedangkan untuk Emas belum dikelola dengan baik.





### C. Peternakan dan Pertanian

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat 2 (dua) sektor utama yang memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah, dan dikerjakan oleh sebagian besar penduduk Kabupaten TTS sebagai kegiatan utama dan atau sampingan. Adapun 2 sektor dimaksud adalah:

#### 1. Peternakan

Jenis usaha peternakan yang paling umum dikerjakan oleh peternak di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sapi potong dan babi. Pada tahun 2023-2024 populasi ternak sapi potong dan babi Kabupaten TTS menduduki posisi pertama terbesar secara provinsi. Data populasi dan jenis ternak dimaksud pada dari 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7  
Populasi Ternak Unggulan Kabupaten TTS  
Tahun 2020-2024

| No | Uraian                             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023    | 2024      |
|----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1  | Populasi Ternak Sapi Kabupaten TTS | 210.053   | 215.516   | 228.447   | 110.679 | 112.843   |
|    | Populasi Ternak Sapi Provinsi NTT  | 1.176.317 | 1.173.504 | 1.243.918 | 581.918 | 593.636   |
|    | % Terhadap Populasi Provinsi       | 17,86     | 18,36     | 18,36     | 19,01   | 19,00     |
| 2  | Populasi Ternak Babi Kabupaten TTS | 208.087   | 213.377   | 236.848   | 143.900 | 148.606   |
|    | Populasi Ternak Babi Provinsi NTT  | 2.352.441 | 2.103.259 | 2.325.020 | N/A     | 1.052.208 |
|    | % Terhadap Populasi Provinsi       | 8,85      | 10,14     | 10,18     | N/A     | 14,12     |

*Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025*







Data pada tabel menunjukkan bahwa populasi sapi naik 2.164 ekor dari tahun 2023-2024 dan populasi babi naik 4.706 ekor dari tahun 2023-2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak) mendapatkan kuota antar pulau sapi paron ditahun 2025 sebanyak 12.000 ekor meningkat dari tahun 2024 sebanyak 11.750 ekor. Untuk data jumlah ternak sapi dan babi yang dipotong di RPH tahun 2024 sebanyak 586 ekor sapi dan 842 ekor babi.

## 2. Pertanian

Usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat meliputi pertanian lahan kering, pertanian lahan basah dan pengembangan tanaman hortikultura. Adapun luasan lahan pertanian lahan kering dan lahan basah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8  
Luas Lahan Pertanian Kab. TTS Tahun 2024

| No. | Potensi Lahan | Luas Lahan (Ha) |            |                                |
|-----|---------------|-----------------|------------|--------------------------------|
|     |               | Potensial       | Fungsional | Sisa Lahan Yang Belum Dikelola |
| 1   | Basah         | 10.339          | 7.540      | 2.779                          |
| 2   | Kering        | 207.528         | 146.390    | 61.138                         |

Sumber: Dinas TPHP Kab. TTS, Tahun 2025

Memperhatikan data potensi lahan maka dapat diketahui bahwa masih terdapat lahan yang belum dikelola secara maksimal oleh masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan luasan yang ada maka apabila dapat dikelola secara maksimal maka dapat menunjang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jenis tanaman/komoditi pertanian yang dikembangkan masyarakat antara lain: jagung, padi, ubi-ubian, pisang, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk tanaman pangan khususnya tanaman yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan adalah jagung. Untuk lebih jelasnya





perihal produksi jagung di TTS dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9  
Produksi Jagung Kabupaten TTS Tahun 2019-2023

| Uraian                              | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | Peringkat Provinsi Tahun 2022-2023 | 2023    |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|---------|
| Produksi Jagung Kabupaten TTS (Ton) | 235.323 | 213.654 | 210.816 | 308.595 |                                    | 155.980 |
| Produksi Jagung Provinsi NTT        | 951.251 | 834.067 | 777.051 | 835.881 |                                    | 648.305 |
| % Terhadap Produksi Provinsi        | 24,74   | 25,62   | 27,13   | 36,92   | <b>Peringkat 1</b>                 | 24,06   |

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2020-2024 (diolah)

Merujuk data pada tabel yang ada maka diketahui bahwa Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan Kabupaten yang jumlah produksi jagung terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini apabila dimaksimalkan produksi dan penjualannya maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan petani secara khususnya.

Dari sektor hortikultura terdapat 2 komoditi unggulan yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu jeruk keprok/siam dan alpukat. Kedua komoditi ini bahkan sudah memiliki “*brand*” dalam pemasaran di Indonesia yang lazim disebut sebagai jeruk keprok SoE dan alpukat mentega SoE. Data produksi Alpukat dan Jeruk Keprok SoE dari tahun 2020-2024 untuk Kabupaten TTS dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10  
Produksi Jeruk Keprok dan Alpukat Kabupaten TTS  
Tahun 2020-2024

| Uraian                                        | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    |
|-----------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Produksi Jeruk Keprok Kabupaten TTS (Kuintal) | 107.644 | 8.004  | 228.451 | 91.351  | 269.236 |
| Produksi Jeruk Keprok Provinsi NTT            | 548.670 | 18.454 | 464.737 | 163.581 | 335.141 |
| % Terhadap Produksi Provinsi                  | 19,62   | 43,37  | 49,16   | 55,84   | 80,33   |
| Produksi Alpukat Kabupaten TTS (Kuintal)      | 18.615  | 17.024 | 39.900  | 37.653  | 48.705  |





| Uraian                        | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produksi Alpukat Provinsi NTT | 111.186 | 342.837 | 223.824 | 140.851 | 156.652 |
| % Terhadap Produksi Provinsi  | 16,74   | 4,97    | 17,83   | 26,73   | 31.09   |

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Untuk jeruk keprok dan alpukat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan merujuk pada data tabel yang ada maka menjadi komoditi yang sangat baik untuk dikembangkan secara maksimal dilihat dari persentase terhadap produksi tingkat provinsi. Untuk jeruk keprok memiliki persentase 80,33% terhadap produksi provinsi sedangkan alpukat memiliki persentase 31,09% terhadap produksi provinsi. Jeruk keprok SoE sudah memiliki Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Produk Pertanian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor ID G 000 000 050. Sertifikat IG ini memberikan perlindungan hukum terhadap nama geografis asal produk dan jaminan keaslian asal suatu produk. Sedangkan untuk komoditi alpukat, pada tahun 2022 Kementerian Pertanian RI telah mengeluarkan Tanda Daftar Varietas Tanaman untuk 3 komoditi alpukat yaitu Alpukat Mentega SoE 1 dengan Nomor Varietas Lokal 1877/PVL/2022, Alpukat Mentega SoE 2 dengan Nomor Varietas Lokal 1876/PVL/2022 dan Alpukat SoE 3 dengan Nomor Varietas Lokal 1880/PVL/2022.

#### D. Pariwisata

Wilayah Kabupaten TTS termasuk dalam salah satu dari 5 Destinasi Pariwisata Provinsi dan termasuk dalam 18 Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (Kawasan Kupang – TTS dan sekitarnya) serta termasuk dalam 22 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Oetune – TTS dan sekitarnya). Dalam pengembangan pariwisata *estate* Provinsi NTT, salah satu fokus pengembangan di Kabupaten TTS adalah Fatumnasi. Potensi wisata di kabaupten TTS antara lain Wisata budaya, Wisata alam, Wisata Rohani dan wisata





Buatan. Berdasarkan RIPPARDA Kabupaten TTS, terdapat 5 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) di Kabupaten TTS yaitu :

1. KSPD A

Wisata unggulan pada KSPD A adalah: Situs Air Berubah Menjadi Anggur di Kecamatan Kota SoE, Taman Rekreasi Bu'at di Kecamatan Mollo Selatan, Air Terjun Oehala di Kecamatan Mollo Tengah, Panorama alam Oelbubuk di Kecamatan Mollo Tengah dan Perkampungan adat Oeleu di Kecamatan Toianas.

2. KSPD B

Wisata unggulan pada KSPD B adalah: Fatunausus, Fatukolen, Sonaf Ajaobaki di Kecamatan Mollo Utara, Gunung Mutis, Cagar Alam Mutis-Timau di Kecamatan Fatumnasi, Sonaf Sonbai Fatumnutu Kecamatan Polen.

3. KSPD C

Wisata unggulan pada KSPD C adalah: Benteng None, Nifu Supul, Benteng Tefa Betty, Benteng Faot di Kecamatan Kuatnana, Sonaf Amanuban di Kecamatan Amanuban Tengah, Situs Kerajaan Banam Tunbes, Perkambangan Adat Boti, Fatuulan di Kecamatan KiE.

4. KSPD D

Wisata unggulan pada KSPD D adalah: Air terjun Oemaman, Pantai Oetune di Kecamatan Kualin, Monumen/tugu Perang Kolbano, Tangga Seribu Haunobenak, Pantai Kolbano di Kecamatan Kolbano

5. KSPD E

Wisata unggulan pada KSPD E adalah: Situs Benteng Seki Tafuli Kecamatan Amanatun Utara, Sonaf Nunkolo dan Sonaf Banunaek di Menu, Pantai Lapon dan Fatutun'am di Kecamatan Nunkolo.







Memperhatikan pengembangan pariwisata di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka diketahui wisatawan yang berkunjung di objek wisata adalah wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara dengan jumlah hari kunjungan wisatawan adalah 2 hari. Untuk lebih jelasnya perihal jumlah kunjungan wisatawan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11  
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kab.TTS  
Tahun 2020-2024

| Wisatawan   | Tahun  |        |        |       |       |
|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  |
| Mancanegara | 35     | 0      | 3      | 98    | 75    |
| Domestik    | 13.331 | 22.501 | 21.247 | 6.702 | 4.345 |

Sumber: Dinas Pariwisata Tahun 2025

Berdasarkan data 5 tahun terakhir, jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Kabupaten TTS berfluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah total wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten TTS sejumlah 61.195 jiwa kemudian turun secara signifikan menjadi 13.366 jiwa pada tahun 2020 akibat pandemi Covid 19 dan pasca pandemi Covid19 jumlah wisawatan Kembali naik tetapi belum mencapai jumlah wisatawan sebelum pandemi Covid 19.

#### E. Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten TTS. Kabupaten TTS memiliki panjang garis Pantai 101,86 Km yang terbentang dari Desa Bena Kecamatan Amanuban Selatan sampai Desa Baus Kecamatan Boking. Potensi kelautan Kabupaten TTS berada pada pesisir selatan Laut Timor yang mencakup 6 kecamatan pesisir (Kecamatan Amanuban Selatan, Kualin, Kolbano, Kot'olin, Nunkolo dan Boking). Sesuai peraturan perundang-undangan, Kabupaten TTS memiliki kewenangan wilayah laut seluas 4 mil atau sebesar 755 Km<sup>2</sup> (75.000 Ha) dengan jumlah nelayan sebanyak 1.028 orang. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya terdapat di Kecamatan Mollo Selatan,





Mollo Utara, Tobu, Fatumnasi, Polen, Amanatun Selatan, Kualin, Amanuban Selatan dan Batu Putih. Sampai dengan tahun 2023, sebaran perikanan budidaya di wilayah Kabupaten TTS telah dikembangkan pada 176 desa di 32 kecamatan. Untuk lebih jelasnya perihal produksi perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12  
Produksi Perikanan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023

| Uraian                                   | Tahun  |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                          | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Produksi perikanan tangkap dan PUD (ton) | 392,80 | 395,40 | 392,70 | 420,10 | 648,20 | 708,40 |
| Produksi perikanan budidaya (ton)        | 401,60 | 401,40 | 556    | 560    | 562    | 570,20 |

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten TTS Tahun 2025 (diolah)*

### 2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT)

#### 1. Daya Dukung Pangan

Kinerja dan sebaran daya dukung pangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilihat dari hasil perhitungan daya dukung pangan menggunakan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras dan setara beras. Daya dukung lahan merupakan ukuran kemampuan produksi tanaman pangan (padi) dan/atau tanaman pangan lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah. Penentuan status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan. Status DDLH indikatif dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu. DDLH penyediaan pangan tiap Kecamatan di Kabupaten TTS tersaji pada tabel di bawah ini:







Tabel 2.13  
Kinerja Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan  
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023

| No  | Kecamatan        | Ketersediaan Pangan Setara Beras (Ton/tahun) | Kebutuhan Pangan Setara Beras (Ton/tahun) | Daya Dukung Pangan | Indikatif               |
|-----|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.  | Mollo Utara      | 7.876,30                                     | 2.938,46                                  | 2,68               | Tidak Terlampaui        |
| 2.  | Tobu             | 3.751,87                                     | 1.297,17                                  | 2,89               | Tidak Terlampaui        |
| 3.  | Fatumnasi        | 1.170,75                                     | 874,89                                    | 1,34               | Tidak Terlampaui        |
| 4.  | Nunbena          | 3.228,86                                     | 716,95                                    | 4,50               | Tidak Terlampaui        |
| 5.  | Mollo Selatan    | 3.969,48                                     | 2.264,84                                  | 1,75               | Tidak Terlampaui        |
| 6.  | Mollo Barat      | 4.271,03                                     | 937,95                                    | 4,55               | Tidak Terlampaui        |
| 7.  | Mollo Tengah     | 1.947,02                                     | 1.006,75                                  | 1,93               | Tidak Terlampaui        |
| 8.  | Polen            | 4.894,52                                     | 1.771,39                                  | 2,76               | Tidak Terlampaui        |
| 9.  | Kota SoE         | 1.103,97                                     | 5.199,17                                  | 0,21               | Terlampaui              |
| 10. | Amanuban Barat   | 6.320,82                                     | 3.318,28                                  | 1,90               | Tidak Terlampaui        |
| 11. | Kuatnana         | 6.211,13                                     | 2.152,84                                  | 2,89               | Tidak Terlampaui        |
| 12. | Batuputih        | 5.458,89                                     | 1.764,52                                  | 3,09               | Tidak Terlampaui        |
| 13. | Amanuban Selatan | 14.735,27                                    | 3.153,59                                  | 4,67               | Tidak Terlampaui        |
| 14. | Noebeba          | 3.278,90                                     | 1.615,31                                  | 2,03               | Tidak Terlampaui        |
| 15. | Kuanfatu         | 4.827,61                                     | 2.559,13                                  | 1,89               | Tidak Terlampaui        |
| 16. | Kualin           | 7.983,44                                     | 2.621,69                                  | 3,05               | Tidak Terlampaui        |
| 17. | Amanuban Tengah  | 4.474,72                                     | 2.082,29                                  | 2,15               | Tidak Terlampaui        |
| 18. | Oenino           | 4.428,88                                     | 1.529,54                                  | 2,90               | Tidak Terlampaui        |
| 19. | Kolbano          | 4.428,79                                     | 2.504,94                                  | 1,77               | Tidak Terlampaui        |
| 20. | Amanuban Timur   | 5.556,06                                     | 2.070,55                                  | 2,68               | Tidak Terlampaui        |
| 21. | Fautmolo         | 2.162,03                                     | 966,29                                    | 2,24               | Tidak Terlampaui        |
| 22. | Fatukopa         | 3.509,24                                     | 789,86                                    | 4,44               | Tidak Terlampaui        |
| 23. | KiE              | 8.281,87                                     | 3.045,59                                  | 2,72               | Tidak Terlampaui        |
| 24. | Kot'olin         | 3.132,97                                     | 1.335,13                                  | 2,35               | Tidak Terlampaui        |
| 25. | Amanatun Selatan | 3.817,54                                     | 2.368,09                                  | 1,61               | Tidak Terlampaui        |
| 26. | Nunkolo          | 4.840,68                                     | 1.723,19                                  | 2,81               | Tidak Terlampaui        |
| 27. | Boking           | 1.592,65                                     | 1.237,99                                  | 1,29               | Tidak Terlampaui        |
| 28. | Noebana          | 1.675,59                                     | 618,93                                    | 2,71               | Tidak Terlampaui        |
| 29. | Amanatun Utara   | 5.510,99                                     | 2.068,18                                  | 2,66               | Tidak Terlampaui        |
| 30. | Kokbaun          | 1.873,96                                     | 386,19                                    | 4,85               | Tidak Terlampaui        |
| 31. | Toianas          | 3.021,84                                     | 1.524,67                                  | 1,98               | Tidak Terlampaui        |
| 32. | Santian          | 3.423,02                                     | 770,64                                    | 4,44               | Tidak Terlampaui        |
|     |                  |                                              |                                           | <b>2,41</b>        | <b>Tidak Terlampaui</b> |

Sumber: KLHS RPJMD Kab. TTS Tahun 2025-2029, Tahun 2024







Daya dukung lingkungan hidup untuk penyedia pangan Kabupaten Timor Tengah Selatan secara umum tidak terlampaui atau dalam kondisi surplus dengan nilai indeks daya dukung pangan (DDP) sebesar 2,41. Terdapat satu wilayah kecamatan di Timor Tengah Selatan yang daya dukung penyediaan pangan dalam kondisi terlampaui atau defisit, yaitu Kota SoE dengan nilai DDP 0,21. Terdapat 18 wilayah kecamatan yang nilai DDP > 2,47, yaitu Kecamatan Kokbaun (4,85), Amanuban Selatan (4,67), Mollo Barat (4,55), Nunbena (4,50), Fatukopa (4,44), Santian (4,44), Batuputih (3,09), Kualin (3,05), Oenino (2,90), Tobu (2,89), Kuantana (2,89), Nunkolo (2,81), Pollen (2,76), KiE (2,72), Noebana (2,71), Mollo Utara (2,68), Amanuban Timur (2,68), dan Amanatun Utara (2,66). Ke-18 wilayah tersebut mampu berswasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Sementara, 13 wilayah lainnya juga memiliki daya dukung pangan dalam kondisi tidak terlampaui namun wilayah tersebut mampu swasembada pangan tetapi belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya dengan nilai DDP berkisar 1,29-2,35. Ke-13 wilayah kecamatan tersebut adalah Kot'olin (2,35), Fautmollo (2,24), Amanuban Tengah (2,15), Noebaba (2,03), Toianas (1,98), Mollo Tengah (1,93), Amanuban Barat (1,90), Kuanfatu (1,89), Kolbano (1,77), Mollo Selatan (1,75), Amanatun Selatan (1,61), Fatumnasi (1,34), dan Boking (1,29). Untuk menjaga DDLH penyediaan pangan agar tetap aman atau tidak terlampaui daya dukungnya dapat dilakukan dengan dua skenario, yaitu: (1) Berupaya untuk mengubah pola konsumsi masyarakat dan meningkatkan teknologi yang dapat mendukung ketersediaan sumber daya alam dan (2) Menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung, memperbaiki kualitas jasa dari lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan, serta meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim.





#### **2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan**

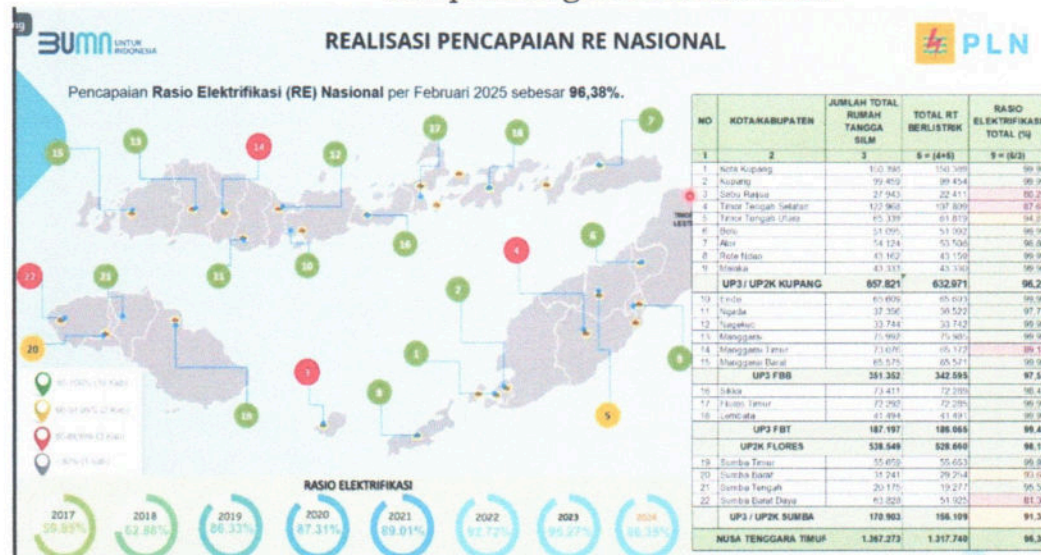
Hubungan antara ketahanan air, energi dan pangan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) berarti bahwa ketahanan air, ketahanan energi dan ketahanan pangan saling terkait erat satu sama lain, yang berarti bahwa tindakan di satu area tertentu sering kali dapat berdampak pada satu atau kedua area lainnya.

##### **a. Ketahanan energi**

Peranan energi sangat penting dalam pembangunan. Salah satu bentuk energi yang lebih dominan digunakan adalah energi listrik. Kebutuhan energi listrik di wilayah Kabupaten TTS sebagian besar disediakan oleh PT PLN (Persero). Rasio elektrifikasi Kabupaten TTS termasuk pada kategori rendah. Berdasarkan data sampai dengan Februari 2025, rasio elektrifikasi total Kabupaten TTS adalah 87,679% (atau 107.809 Rumah Tangga). Ini berarti sampai tahun 2025 per bulan Februari masih terdapat 15.159 Rumah Tangga yang belum memiliki akses Listrik dan terdapat enam (6) wilayah desa yang belum terakses jaringan PLN yaitu: Dusun Punuf di Desa Fatumnasi, Dusun Maun'ana di Desa Taneotob, Dusun Ne'ut Desa Nuannoel, Desa Nenas, Desa Mutis dan Desa Nuapin. Wilayah yang belum terakses jaringan PLN merupakan daerah enklave yang dibatasi oleh kawasan hutan konservasi sehingga pemenuhan akses Listrik oleh PLN belum dapat dipenuhi. Selain PLN upaya penyediaan listrik juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan juga pihak swasta dalam penyediaan listrik untuk masyarakat berupa PLTS Sehen. Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai potensi pelayanan listrik menggunakan tenaga angin (bayu) dengan lokasi berada pada Kecamatan Nunkolo dan Kecamatan Mollo Tengah. Untuk lebih jelasnya mengenai Rasio Elektrifikasi dapat dilihat pada Gambar 2.4



Gambar 2.4  
Rasio Elektrifikasi Kabupaten TTS  
Sampai Dengan Februari 2025



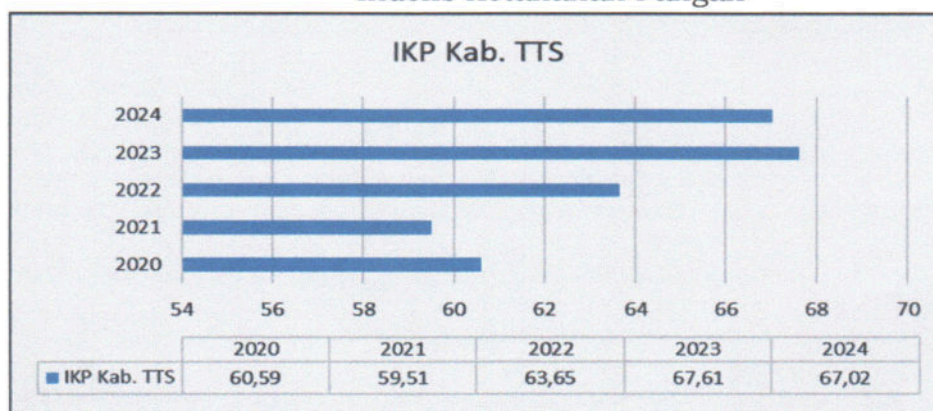
Sumber : Dinas ESDM Provinsi NTT Tahun 2025

## B. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. IKP menggunakan beberapa indikator untuk menghasilkan skor yang mencerminkan kondisi ketahanan pangan secara keseluruhan di suatu wilayah. IKP memberikan gambaran tentang bagaimana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, mencakup aspek-aspek seperti: ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan. Untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan data yang ada masuk dalam kategori Tahan sedang dengan nilai Indeks Tahun 2024 sebesar 67,02. Untuk lebih jelasnya perihal Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 2.5  
Indeks Ketahanan Pangan



Sumber: Badan Pangan Nasional Tahun 2020-2024

### C. Kapasitas Daya Dukung Air

Air minum adalah salah satu kebutuhan vital masyarakat. Dengan jumlah penduduk sebanyak 460.642 jiwa maka kebutuhan air minum adalah 921.284 Liter/hari, jika diasumsikan kebutuhan air setiap orang dalam 1 hari adalah sebanyak 2 Liter . Untuk Kebutuhan air total untuk Kabupaten TTS adalah sebesar 736,22 juta  $m^3$ /tahun, sementara potensi ketersediaannya sebesar 1.073,49 juta  $m^3$ /tahun, sehingga statusnya surplus sebesar 337,27 juta  $m^3$ /tahun. Secara administratif, kebutuhan air terbesar terdapat di Kecamatan Kota SoE sebanyak 65,34 juta  $m^3$ /tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Kokbaun sebesar 4,83 juta  $m^3$ /tahun. Ketersediaan air terbesar terdapat di Kecamatan Amanuban Selatan yaitu 77.11 juta  $m^3$ /tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Kokbaun sebesar 0.90 juta  $m^3$ /tahun. Terdapat 11 kecamatan yang status potensi daya dukung airnya telah terlampaui di tahun 2022, yaitu Amanatun Utara, Amanuban Tengah, Fautmollo, Amanuban Barat, KiE, Amanatun Selatan, Kuanfatu, Nunkolo, Kot'olin, Kota SoE dan Kokbaun. Sementara, 9 kecamatan memiliki daya dukung air yang aman (*sustain*) adalah Kecamatan Mollo Barat, Nunbena, Fatumnasi, Pollen, Fatukopa, Mollo Tengah, Amanuban Timur, Noebeba dan Oenino. Selanjutnya, terdapat 12 wilayah yang status



daya dukung airnya dalam kondisi aman bersyarat, yaitu Kecamatan Amanuban Selatan, Kualin, Tobu, Mollo Utara, Mollo Selatan, Batu Putih, Boking, Toianas, Santian, Kuatnana, Kolbano dan Noebana. Penduduk Kabupaten TTS yang mengakses air minum layak selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2024 sebanyak 289.685 Jiwa (59,04%).

Tabel 2.14  
Kondisi Akses Sumber Air Minum Layak Kabupaten TTS  
Tahun 2020-2024

| Uraian                                 | Tahun   |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Penduduk dengan sumber air minum layak | 198.428 | 248.015 | 277.192 | 278.860 | 285.161 | 289.685 |

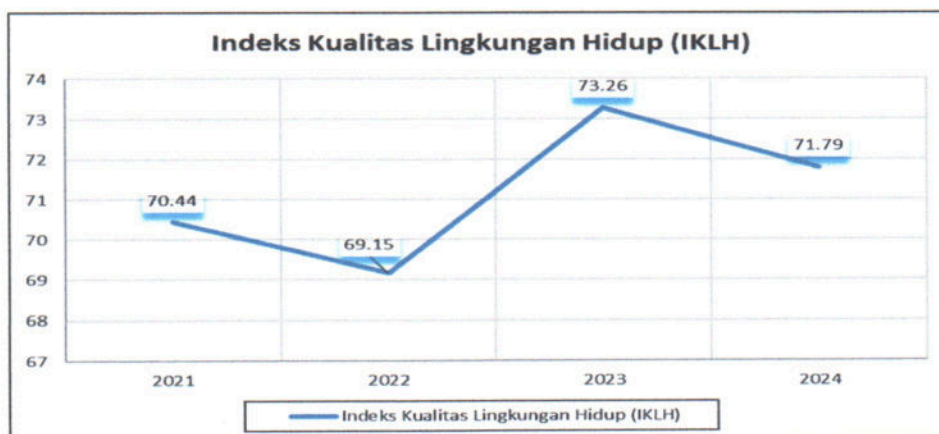
Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2025

### 2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

#### A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perubahan iklim berpengaruh terhadap lingkungan di Kabupaten TTS. Kondisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten TTS dapat terlihat dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKLH Kabupaten TTS tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.6  
Nilai IKLH Kabupaten TTS Tahun 2021-2024



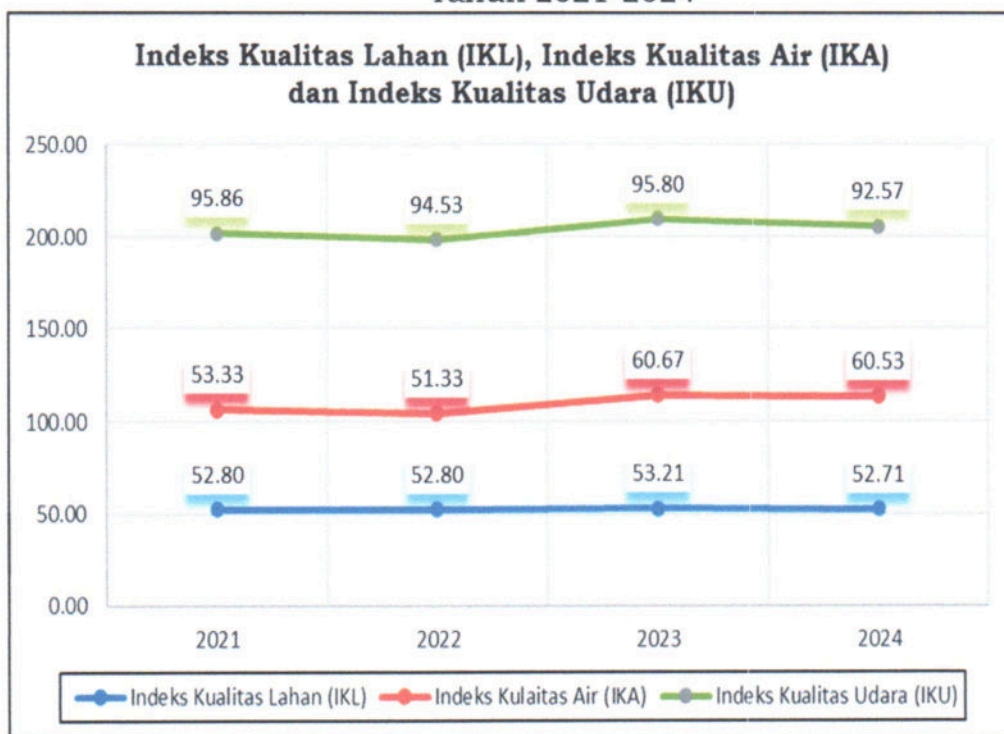
Sumber: [ppkl.menlhk.go.id](http://ppkl.menlhk.go.id) Tahun 2025 (diolah)

Ky



Berdasarkan data, nilai IKLH Kabupaten TTS pada tahun 2021 berada pada kategori Baik, sedangkan pada tahun 2022 nilai IKLH mengalami penurunan dan berada pada kategori Sedang. Pada tahun 2024 nilai IKLH kembali meningkat dan berada pada kategori Baik. Nilai IKLH dibentuk dari 3 nilai indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian IKA, IKU dan IKL Kabupaten TTS Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.7  
Nilai IKA, IKU dan IKL Kabupaten TTS  
Tahun 2021-2024



Sumber: [ppkl.menlhk.go.id](http://ppkl.menlhk.go.id) (diolah) Tahun 2025

Data menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten TTS selama 4 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2024 nilai IKA Kabupaten TTS adalah 60,53, termasuk dalam kategori Baik ( $60 < IKA \leq 70$ ). Dari data di atas juga terlihat bahwa nilai IKU Kabupaten TTS selama 4 tahun terakhir berfluktuatif. Pada tahun 2024 nilai IKU Kabupaten TTS adalah 92,57, termasuk dalam kategori Sangat Baik ( $IKU > 91$ ). Peningkatan nilai IKU menandakan semakin bagusnya kualitas udara di suatu wilayah. Sedangkan untuk nilai IKL Kabupaten



TTS perlu menjadi perhatian karena nilai berfluktuatif selama 4 tahun terakhir tetapi nilai IKL Kabupaten TTS berada pada kategori Kurang Baik ( $50 < \text{IKL} \leq 60$ ). Untuk menjaga kualitas udara agar tetap konsisten dari waktu ke waktu, beberapa upaya dapat dilakukan antara lain: pemantauan kualitas udara secara rutin, pengurangan emisi dari berbagai sumber, penerapan teknologi bersih, penanaman pohon dan penghijauan, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

#### B. Akses Sanitasi Aman dan Pengelolaan Persampahan

Data terkait sanitasi menunjukkan sampai dengan tahun 2024, akses sanitasi layak di Kabupaten TTS telah mencapai 53,19% atau 73.126 KK/RT. Angka dimaksud berkaitan langsung dengan ketersediaan prasarana pengelolaan sampah yang meliputi pengelolaan sampah dan penyediaan perangkat keras pengelolaan limbah. Pengelolaan sampah terbagi atas pengumpulan sampah dari rumah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan pengumpulan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten TTS menyediakan 5 unit truk angkut sampah dan 1 unit motor angkut sampah yang akan mengangkut sampah pada 28 unit TPS untuk dikelola di 1 unit TPA dan 1 unit TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Tabel 2.15  
Jumlah Sarana Persampahan di Kota SoE Tahun 2024

| Jumlah Sarana |               |                   | Produksi<br>(Ton/Tahun) | Produksi<br>(Ton/Tahun)<br>sd 2023 | Pengolahan<br>(Ton) |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| TPS<br>(Unit) | TPA<br>(Unit) | TPS<br>3 R (Unit) |                         |                                    |                     |
| 28            | 1             | 1                 | 10.400                  | 42.148                             | 42                  |

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2025

Memperhatikan data dalam tabel yang ada maka diketahui bahwa ketersediaan Tempat Penampungan Sampah dan TPA khusus Kecamatan Kota SoE telah memadai akan tetapi perlu diperhatikan manajemen pengangkutan sampah yang ada. Untuk Pengelolaan persampahan masih terbatas pada Kecamatan Kota SoE dan wilayah sekitarnya sedangkan untuk keseluruhan kecamatan di Kabupaten





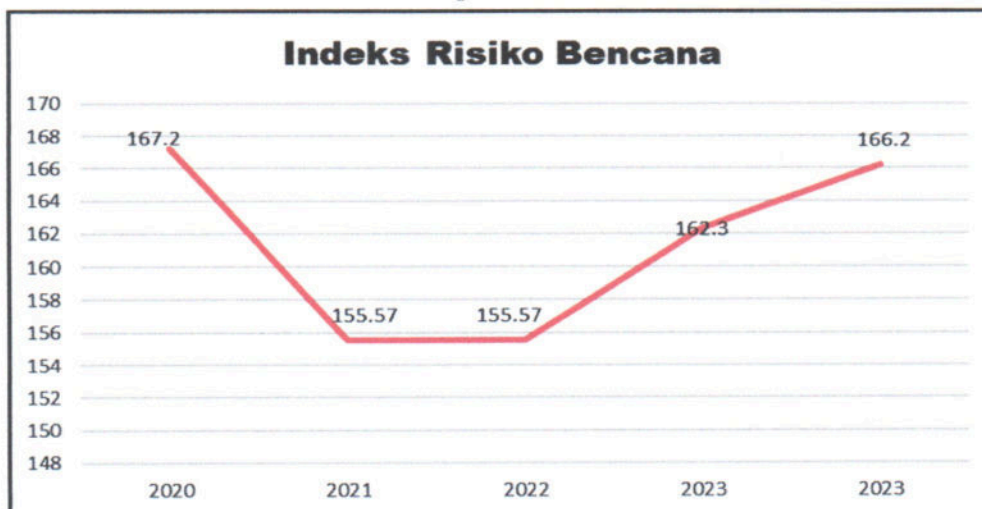


Timor Tengah Selatan masih menggunakan pembuangan sampah dengan metode ini penimbunan sampah di lahan terbuka, pembakaran terbuka, atau pembuangan langsung di lahan kosong.

### 2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana alam merupakan tantangan pembangunan yang tidak bisa dihindari di berbagai daerah termasuk Kabupaten Timor Tengah Selatan. Setiap daerah, memiliki potensi bencana yang berbeda, sesuai dengan tipe, karakteristik dan potensi alam yang ada di wilayah tersebut. Potensi kebencanaan di Kabupaten TTS didominasi oleh bencana alam karena cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir dan kekeringan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana suatu wilayah yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks ini dihitung berdasarkan komponen penyusun bahaya, kerentanan dan kapasitas pemerintah daerah. Data Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten TTS selama tahun 2020-2024 terdapat di bawah ini.

Gambar 2.8  
Nilai IRB Kabupaten TTS Tahun 2019-2023



Sumber: [Inarisk.bnpb.go.id](http://Inarisk.bnpb.go.id) Tahun 2024 (diolah)





Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten TTS termasuk dalam wilayah dengan kategori risiko tinggi untuk kebencanaan. Penanggulangan bencana (mitigasi dan penanganan pasca bencana) perlu menjadi perhatian karena terjadi berulang setiap tahun dan merupakan isu yang erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

### 2.1.7 Aspek Demografi

#### A. Jumlah Penduduk

Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi NTT. Jumlah penduduk Kabupaten TTS tahun 2024 sebanyak 490.642 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.16  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024

| No | Kecamatan        | Jumlah Penduduk |           | Jumlah |
|----|------------------|-----------------|-----------|--------|
|    |                  | Laki-Laki       | Perempuan |        |
| 1  | Mollo Utara      | 12.881          | 12.741    | 25.622 |
| 2  | Fatumnasi        | 3.493           | 3.531     | 7.024  |
| 3  | Tobu             | 5.313           | 5.383     | 10.696 |
| 4  | Nunbena          | 2.811           | 2.777     | 5.588  |
| 5  | Mollo Selatan    | 9.391           | 9.367     | 18.758 |
| 6  | Polen            | 7.360           | 7.489     | 14.849 |
| 7  | Mollo Barat      | 4.169           | 4.159     | 8.328  |
| 8  | Mollo Tengah     | 4.120           | 4.113     | 8.233  |
| 9  | Kota Soe         | 21.064          | 20.958    | 42.022 |
| 10 | Amanuban Barat   | 13.581          | 13.547    | 27.128 |
| 11 | Batu Putih       | 7.475           | 7.436     | 14.911 |
| 12 | Kuatnana         | 8.867           | 8.788     | 17.655 |
| 13 | Amanuban Selatan | 13.266          | 13.335    | 26.601 |
| 14 | Noebeba          | 6.562           | 6.451     | 13.013 |
| 15 | Kuanfatu         | 9.967           | 10.058    | 20.025 |
| 16 | Kualin           | 11.297          | 11.273    | 22.570 |
| 17 | Amanuban Tengah  | 8.539           | 8.807     | 17.346 |
| 18 | Kolbano          | 10.439          | 10.590    | 21.029 |
| 19 | Oenino           | 6.053           | 6.095     | 12.148 |







| No                   | Kecamatan        | Jumlah Penduduk |           | Jumlah  |
|----------------------|------------------|-----------------|-----------|---------|
|                      |                  | Laki-Laki       | Perempuan |         |
| 20                   | Amanuban Timur   | 8.407           | 8.514     | 16.921  |
| 21                   | Fautmolo         | 4.029           | 4.147     | 8.176   |
| 22                   | Fatukopa         | 3.129           | 3.113     | 6.242   |
| 23                   | Kie              | 11.754          | 12.190    | 23.944  |
| 24                   | Kot'olin         | 5.962           | 6.066     | 12.028  |
| 25                   | Amanatun Selatan | 9.411           | 9.946     | 19.357  |
| 26                   | Boking           | 5.360           | 5.506     | 10.866  |
| 27                   | Nunkolo          | 7.142           | 7.291     | 14.433  |
| 28                   | Noebana          | 2.552           | 2.570     | 5.122   |
| 29                   | Santian          | 3.265           | 3.484     | 6.749   |
| 30                   | Amanatun Utara   | 8.226           | 8.803     | 17.029  |
| 31                   | Toianas          | 6.194           | 6.562     | 12.756  |
| 32                   | Kokbaun          | 1.679           | 1.794     | 3.473   |
| Timor Tengah Selatan |                  | 243.758         | 246.884   | 490.642 |

Sumber : Dinas DukCaPil Kab. TTS Tahun 2025

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Kota SoE yaitu 42.022 jiwa dan yang terendah di Kecamatan Kokbaun dengan jumlah penduduk 3.473 jiwa. Penduduk terbesar di Kecamatan Kota Soe karena merupakan Ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan.

#### B. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten TTS digambarkan melalui perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin selama 5 tahun terakhir dan jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun terakhir, yang dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.17  
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
di Kabupaten TTS Tahun 2019 – 2024

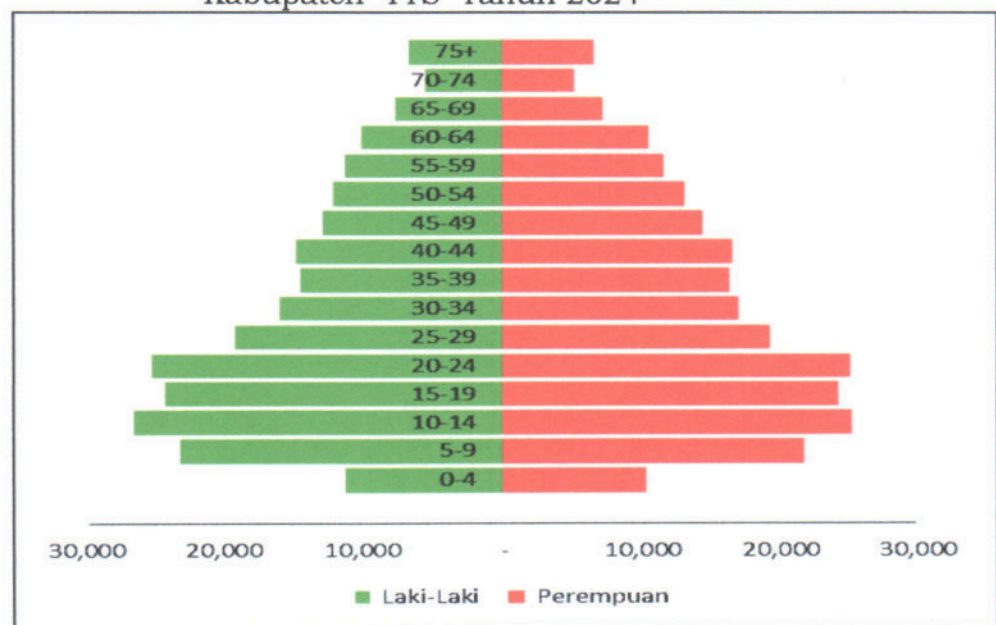
| No    | Jenis Kelamin | Tahun   |         |         |         |         |
|-------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024*)  |
| 1     | Perempuan     | 229.141 | 230.491 | 231.627 | 239.035 | 246.884 |
| 2     | Laki-laki     | 226.269 | 227.467 | 228.489 | 235.486 | 243.758 |
| Total |               | 455.410 | 457.958 | 460.116 | 474.521 | 490.642 |

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025 dan \*) Dinas DukCaPil Kab. TTS Tahun 2025



Berdasarkan data tersebut di atas, penduduk Kabupaten TTS didominasi oleh penduduk perempuan dengan kondisi pada tahun 2024 terdiri dari 50,32% perempuan dan 49,68% laki-laki, sedangkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten TTS pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk kelompok umur 10-14 tahun dan diikuti kelompok umur 15-19 tahun dan yang paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.10  
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di  
Kabupaten TTS Tahun 2024



Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

### C. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk Kabupaten TTS yang disajikan dalam dokumen ini menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik serta dihitung dengan aplikasi Rural Urban Projection (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator Total Fertility Rate (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator Infant Mortality Rate (IMR) dan Umur





Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator Age-Specific Net Migration Rate (ASNMR). Data penduduk dasar yang digunakan bersumber dari penduduk hasil SP2020.

Tabel 2.18  
Asumsi Proyeksi Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

| Parameter                 | 2025   | 2030   | 2035   | 2040   | 2045   |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PENDUDUK</b>           |        |        |        |        |        |
| Laki-laki (000)           | 242,01 | 258,14 | 273,86 | 293,37 | 314,90 |
| Perempuan (000)           | 245,99 | 263,14 | 279,84 | 300,94 | 324,51 |
| Total (000)               | 488,00 | 521,28 | 553,7  | 594,31 | 639,41 |
| Sex Ratio (%)             | 98,38  | 98,10  | 97,86  | 97,48  | 97,04  |
| <b>Komposisi Umur (%)</b> |        |        |        |        |        |
| 0-14                      | 27,42  | 26,85  | 27,86  | 27,49  | 27,09  |
| 15-64                     | 64,76  | 64,55  | 62,85  | 62,38  | 61,87  |
| 65+                       | 7,82   | 8,60   | 9,29   | 10,13  | 11,03  |
| Dependency Ratio (%)      | 54,41  | 54,93  | 59,11  | 60,30  | 61,62  |

Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025

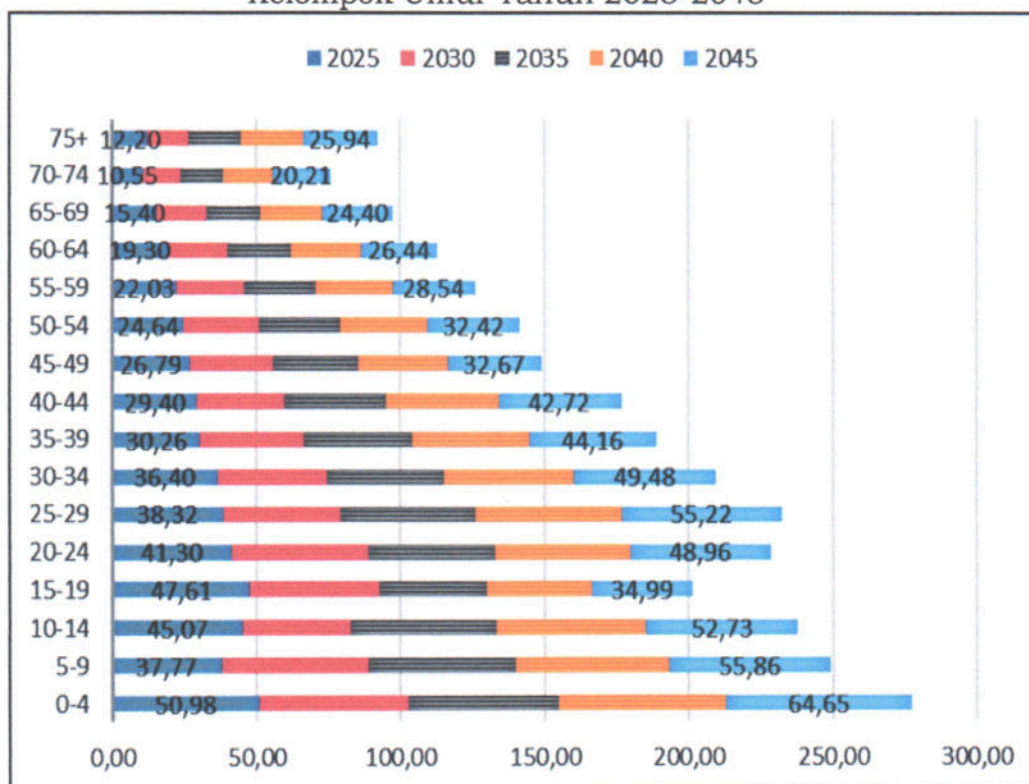
Jumlah penduduk Kabupaten TTS diproyeksikan sebesar 488 ribu jiwa pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 639,41 ribu jiwa pada tahun 2045 dengan kepadatan penduduk meningkat dari 123 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2025 menjadi 162 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2045. Komposisi penduduk perempuan cenderung mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 242,01 ribu jiwa dan perempuan sebesar 245,99 ribu jiwa. Pada tahun 2045, jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 314,90 jiwa, namun lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebesar 324,51 jiwa. Kondisi perubahan komposisi ini juga tergambar dari sex ratio yang cenderung menurun antar periode. Angka sex ratio pada tahun 2025 sebesar 98,38 persen kemudian menurun menjadi 97,04 persen di tahun 2045 menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan cenderung lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Sesuai proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbesar ialah pada usia 0-4 tahun yaitu sebesar 50,98 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 64,65 ribu jiwa pada tahun 2045. Namun, penambahan jumlah penduduk terbesar ialah pada kelompok umur 5-9 tahun. Pada tahun 2025 jumlah



penduduk kelompok ini sebanyak 37,77 ribu jiwa kemudian bertambah sebanyak 18,09 ribu jiwa menjadi 55,86 ribu jiwa pada tahun 2045. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.11  
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Berdasarkan  
Kelompok Umur Tahun 2025-2045



Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025

Penambahan jumlah penduduk perempuan tertinggi selama periode 2025-2045 ialah pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu meningkat sebanyak 8,71 ribu jiwa. Pada penduduk laki-laki, kelompok umur 5-9 tahun mengalami peningkatan tertinggi sebanyak 9,46 ribu jiwa. Berdasarkan hasil proyeksi, terdapat penurunan jumlah penduduk pada kelompok umur 15-19 tahun selama periode 2025-2045 baik penduduk perempuan maupun laki-laki. Pada tahun 2025 jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 23,33 ribu jiwa menurun menjadi 17,46 ribu jiwa, sedangkan untuk penduduk laki-laki dari 24,28 ribu jiwa menurun menjadi 17,53 ribu jiwa.





## 2.1.8 Aspek Demografi

### A. Jumlah Penduduk

Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi NTT. Jumlah penduduk Kabupaten TTS tahun 2024 sebanyak 490.642 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.19  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024

| No | Kecamatan        | Jumlah Penduduk |           | Jumlah |
|----|------------------|-----------------|-----------|--------|
|    |                  | Laki-Laki       | Perempuan |        |
| 1  | Mollo Utara      | 12.881          | 12.741    | 25.622 |
| 2  | Fatumnasi        | 3.493           | 3.531     | 7.024  |
| 3  | Tobu             | 5.313           | 5.383     | 10.696 |
| 4  | Nunbena          | 2.811           | 2.777     | 5.588  |
| 5  | Mollo Selatan    | 9.391           | 9.367     | 18.758 |
| 6  | Polen            | 7.360           | 7.489     | 14.849 |
| 7  | Mollo Barat      | 4.169           | 4.159     | 8.328  |
| 8  | Mollo Tengah     | 4.120           | 4.113     | 8.233  |
| 9  | Kota Soe         | 21.064          | 20.958    | 42.022 |
| 10 | Amanuban Barat   | 13.581          | 13.547    | 27.128 |
| 11 | Batu Putih       | 7.475           | 7.436     | 14.911 |
| 12 | Kuatnana         | 8.867           | 8.788     | 17.655 |
| 13 | Amanuban Selatan | 13.266          | 13.335    | 26.601 |
| 14 | Noebeba          | 6.562           | 6.451     | 13.013 |
| 15 | Kuanfatu         | 9.967           | 10.058    | 20.025 |
| 16 | Kualin           | 11.297          | 11.273    | 22.570 |
| 17 | Amanuban Tengah  | 8.539           | 8.807     | 17.346 |
| 18 | Kolbano          | 10.439          | 10.590    | 21.029 |
| 19 | Oenino           | 6.053           | 6.095     | 12.148 |
| 20 | Amanuban Timur   | 8.407           | 8.514     | 16.921 |
| 21 | Fautmolo         | 4.029           | 4.147     | 8.176  |
| 22 | Fatukopa         | 3.129           | 3.113     | 6.242  |





| No                          | Kecamatan        | Jumlah Penduduk |                | Jumlah         |
|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                             |                  | Laki-Laki       | Perempuan      |                |
| 23                          | Kie              | 11.754          | 12.190         | 23.944         |
| 24                          | Kot'olin         | 5.962           | 6.066          | 12.028         |
| 25                          | Amanatun Selatan | 9.411           | 9.946          | 19.357         |
| 26                          | Boking           | 5.360           | 5.506          | 10.866         |
| 27                          | Nunkolo          | 7.142           | 7.291          | 14.433         |
| 28                          | Noebana          | 2.552           | 2.570          | 5.122          |
| 29                          | Santian          | 3.265           | 3.484          | 6.749          |
| 30                          | Amanatun Utara   | 8.226           | 8.803          | 17.029         |
| 31                          | Toianas          | 6.194           | 6.562          | 12.756         |
| 32                          | Kokbaun          | 1.679           | 1.794          | 3.473          |
| <b>Timor Tengah Selatan</b> |                  | <b>243.758</b>  | <b>246.884</b> | <b>490.642</b> |

Sumber : Dinas DukCaPil Kab. TTS Tahun 2025

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Kota SoE yaitu 42.022 jiwa dan yang terendah di Kecamatan Kokbaun dengan jumlah penduduk 3.473 jiwa. Penduduk terbesar di Kecamatan Kota Soe karena merupakan Ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan.

#### B. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten TTS digambarkan melalui perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin selama 5 tahun terakhir dan jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun terakhir, yang dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.20  
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
di Kabupaten TTS Tahun 2019 – 2024

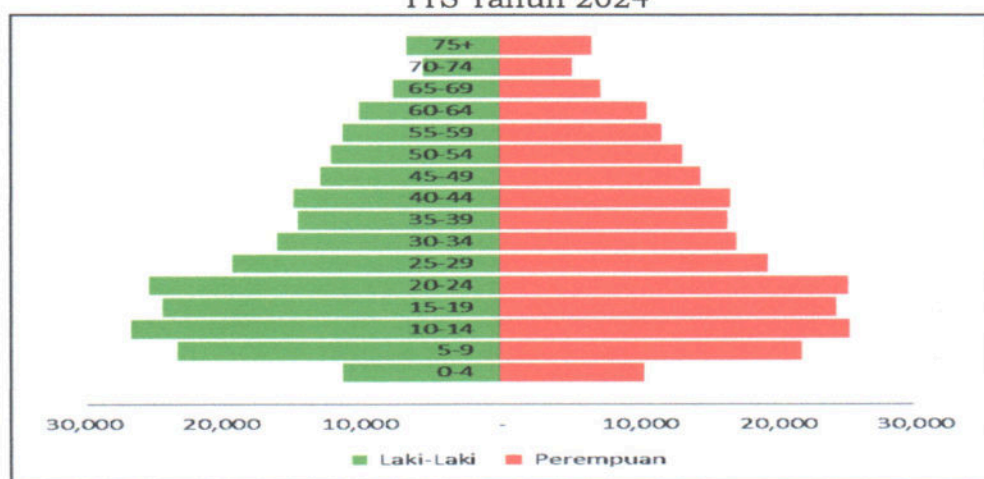
| No           | Jenis Kelamin | Tahun          |                |                |                |                |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |               | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024*)         |
| 1            | Perempuan     | 229.141        | 230.491        | 231.627        | 239.035        | 246.884        |
| 2            | Laki-laki     | 226.269        | 227.467        | 228.489        | 235.486        | 243.758        |
| <b>Total</b> |               | <b>455.410</b> | <b>457.958</b> | <b>460.116</b> | <b>474.521</b> | <b>490.642</b> |

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025 dan \*) Dinas DukCaPil Kab. TTS Tahun 2025



Berdasarkan data tersebut di atas, penduduk Kabupaten TTS didominasi oleh penduduk perempuan dengan kondisi pada tahun 2024 terdiri dari 50,32% perempuan dan 49,68% laki-laki, sedangkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten TTS pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk kelompok umur 10-14 tahun dan diikuti kelompok umur 15-19 tahun dan yang paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.10  
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten TTS Tahun 2024



Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

### C. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk Kabupaten TTS yang disajikan dalam dokumen ini menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR). Data penduduk dasar yang digunakan bersumber dari penduduk hasil SP2020.



Tabel 2.21  
Asumsi Proyeksi Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

| Parameter                   | 2025   | 2030   | 2035   | 2040   | 2045   |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PENDUDUK</b>             |        |        |        |        |        |
| Laki-laki (000)             | 242,01 | 258,14 | 273,86 | 293,37 | 314,90 |
| Perempuan (000)             | 245,99 | 263,14 | 279,84 | 300,94 | 324,51 |
| Total (000)                 | 488,00 | 521,28 | 553,7  | 594,31 | 639,41 |
| <i>Sex Ratio (%)</i>        | 98,38  | 98,10  | 97,86  | 97,48  | 97,04  |
| <b>Komposisi Umur (%)</b>   |        |        |        |        |        |
| 0-14                        | 27,42  | 26,85  | 27,86  | 27,49  | 27,09  |
| 15-64                       | 64,76  | 64,55  | 62,85  | 62,38  | 61,87  |
| 65+                         | 7,82   | 8,60   | 9,29   | 10,13  | 11,03  |
| <i>Dependency Ratio (%)</i> | 54,41  | 54,93  | 59,11  | 60,30  | 61,62  |

Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025

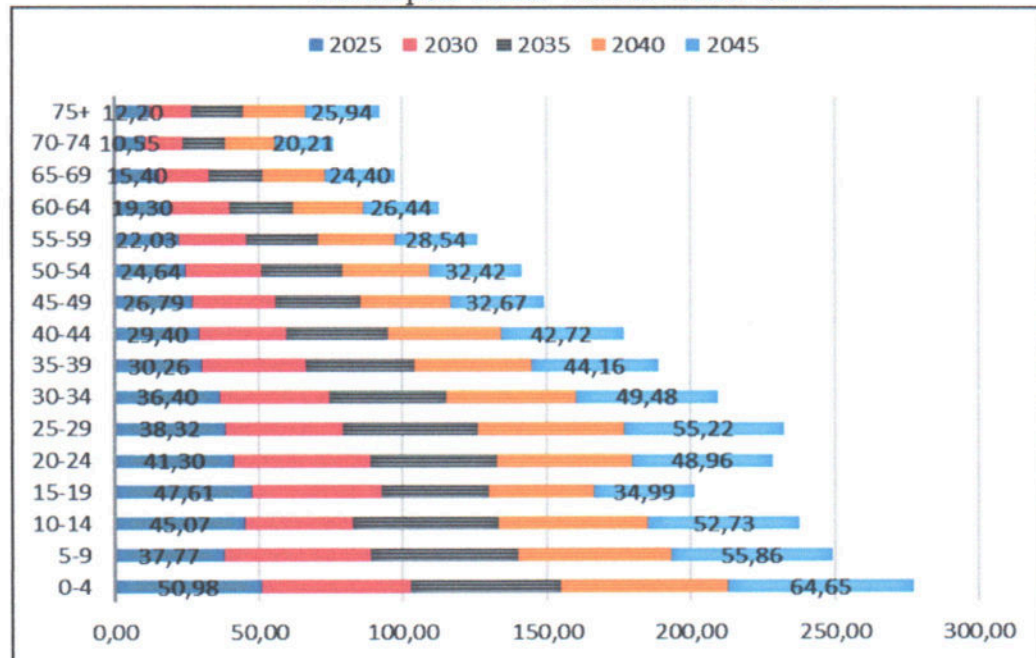
Jumlah penduduk Kabupaten TTS diproyeksikan sebesar 488 ribu jiwa pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 639,41 ribu jiwa pada tahun 2045 dengan kepadatan penduduk meningkat dari 123 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2025 menjadi 162 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2045. Komposisi penduduk perempuan cenderung mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 242,01 ribu jiwa dan perempuan sebesar 245,99 ribu jiwa. Pada tahun 2045, jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 314,90 jiwa, namun lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebesar 324,51 jiwa. Kondisi perubahan komposisi ini juga tergambar dari *sex ratio* yang cenderung menurun antar periode. Angka *sex ratio* pada tahun 2025 sebesar 98,38 persen kemudian menurun menjadi 97,04 persen di tahun 2045 menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan cenderung lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Sesuai proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbesar ialah pada usia 0-4 tahun yaitu sebesar 50,98 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 64,65 ribu jiwa pada tahun 2045. Namun, penambahan jumlah penduduk terbesar ialah pada kelompok umur 5-9 tahun. Pada tahun 2025 jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 37,77 ribu jiwa kemudian bertambah sebanyak 18,09 ribu jiwa menjadi 55,86



ribu jiwa pada tahun 2045. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

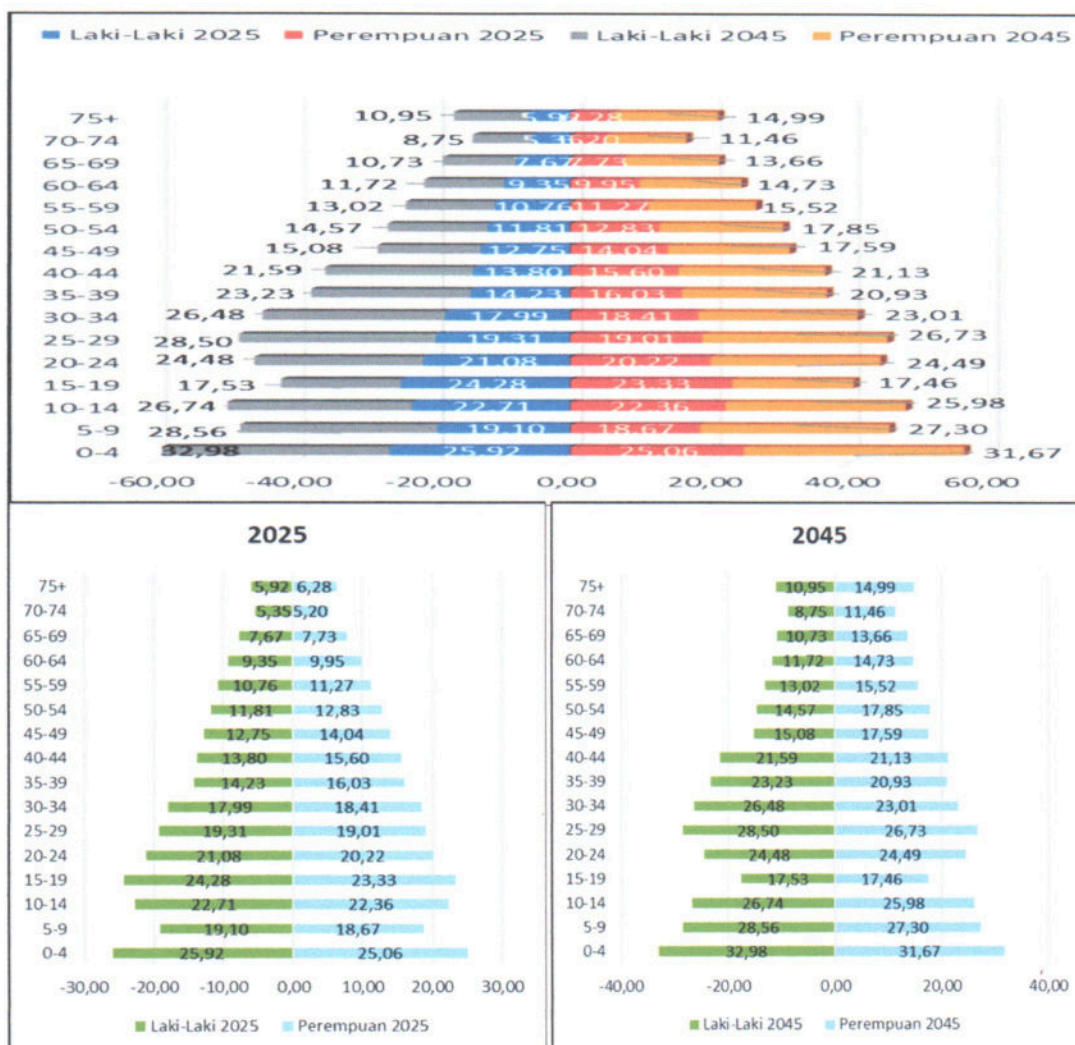
Gambar 2.12  
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Berdasarkan  
Kelompok Umur Tahun 2025-2045



Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025

Penambahan jumlah penduduk perempuan tertinggi selama periode 2025-2045 ialah pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu meningkat sebanyak 8,71 ribu jiwa. Pada penduduk laki-laki, kelompok umur 5-9 tahun mengalami peningkatan tertinggi sebanyak 9,46 ribu jiwa. Berdasarkan hasil proyeksi, terdapat penurunan jumlah penduduk pada kelompok umur 15-19 tahun selama periode 2025-2045 baik penduduk perempuan maupun laki-laki. Pada tahun 2025 jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 23,33 ribu jiwa menurun menjadi 17,46 ribu jiwa, sedangkan untuk penduduk laki-laki dari 24,28 ribu jiwa menurun menjadi 17,53 ribu jiwa.

Gambar 2.13  
Piramida Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045



Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025

Jumlah penduduk kelompok umur 0-14 tahun (di bawah 15 tahun) diproyeksikan bertambah selama periode 2025-2024. Pada tahun 2025, jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 133,82 ribu jiwa, bertambah menjadi 173,24 ribu jiwa pada tahun 2045. Jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) diproyeksikan meningkat selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, penduduk umur 15-64 tahun sebanyak 316,05 ribu jiwa kemudian bertambah menjadi 395,62 ribu jiwa pada tahun 2045. Sedangkan jumlah penduduk lanjut usia atau di atas 64 tahun dari hasil proyeksi menunjukkan peningkatan selama periode 2025-2045.



Pada tahun 2025, jumlah penduduk lansia sebanyak 38,15 ribu jiwa bertambah menjadi 70,54 ribu jiwa pada tahun 2045. Rasio ketergantungan di Kabupaten TTS diproyeksikan meningkat selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan sebesar 54,41 persen, artinya ada sebanyak 54-55 penduduk usia non produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif. Kondisi ini meningkat di tahun 2045 yaitu sebesar 61,62 persen, atau terdapat 61-62 penduduk usia non produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

Gambar 2.14  
Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten TTS  
Tahun 2025-2045



Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

#### 2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data PDRB merupakan salah satu data statistik yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Gambaran PDRB disajikan dalam 2 penilaian yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Harga Berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB Harga Konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur



pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten TTS Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22  
PDRB Kab. TTS Tahun 2020-2024

| No                                    | Lapangan Usaha                                                 | 2020            |               | 2021            |               | 2022            |               | 2023            |               | 2024             |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
|                                       |                                                                | Rp.             | %             | Rp.             | %             | Rp.             | %             | Rp.             | %             | Rp.              | %             |
| A                                     | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 3,504.69        | 44.12         | 3,681.32        | 44.66         | 4,020.79        | 45.64         | 4,361.80        | 45.93         | 4,776.98         | 46.64         |
| B                                     | Pertambangan dan penggalian                                    | 109.45          | 1.38          | 112.12          | 1.36          | 117.31          | 1.33          | 123.34          | 1.30          | 128.61           | 1.26          |
| C                                     | Industri Pengolahan                                            | 49.00           | 0.62          | 49.93           | 0.61          | 55.58           | 0.63          | 62.34           | 0.66          | 67.46            | 0.66          |
| D                                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 3.14            | 0.04          | 3.39            | 0.04          | 3.86            | 0.04          | 4.41            | 0.05          | 4.84             | 0.05          |
| E                                     | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 1.41            | 0.02          | 1.60            | 0.02          | 1.68            | 0.02          | 1.76            | 0.02          | 1.88             | 0.02          |
| F                                     | Konstruksi                                                     | 685.70          | 8.63          | 753.64          | 9.14          | 804.09          | 9.13          | 901.96          | 9.50          | 913.83           | 8.92          |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 474.57          | 5.97          | 504.93          | 6.13          | 566.45          | 6.43          | 638.65          | 6.73          | 726.68           | 7.09          |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 101.68          | 1.28          | 105.50          | 1.28          | 112.10          | 1.27          | 123.91          | 1.30          | 154.52           | 1.51          |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 6.60            | 0.08          | 6.74            | 0.08          | 7.13            | 0.08          | 7.74            | 0.08          | 8.64             | 0.08          |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 573.65          | 7.22          | 597.96          | 7.25          | 626.68          | 7.11          | 639.02          | 6.73          | 642.11           | 6.27          |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 237.76          | 2.99          | 257.84          | 3.13          | 282.58          | 3.21          | 290.94          | 3.06          | 303.37           | 2.96          |
| L                                     | Real Estat                                                     | 192.30          | 2.42          | 192.27          | 2.33          | 213.08          | 2.42          | 238.19          | 2.51          | 265.21           | 2.59          |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan                                                | 4.78            | 0.06          | 4.07            | 0.05          | 4.44            | 0.05          | 5.02            | 0.05          | 6.12             | 0.06          |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,287.21        | 16.21         | 1,251.71        | 15.18         | 1,256.76        | 14.26         | 1,305.51        | 13.75         | 1,388.93         | 13.56         |
| P                                     | Jasa Pendidikan                                                | 522.40          | 6.58          | 519.31          | 6.30          | 531.91          | 6.04          | 565.69          | 5.96          | 603.94           | 5.90          |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 127.61          | 1.61          | 141.86          | 1.72          | 143.57          | 1.63          | 159.20          | 1.68          | 178.18           | 1.74          |
| R,S,T,U                               | Jasa Lainnya                                                   | 60.81           | 0.77          | 59.06           | 0.72          | 62.36           | 0.71          | 66.97           | 0.71          | 71.94            | 0.70          |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b> |                                                                | <b>7,942.76</b> | <b>100.00</b> | <b>8,243.25</b> | <b>100.00</b> | <b>8,810.37</b> | <b>100.00</b> | <b>9,496.45</b> | <b>100.00</b> | <b>10,243.24</b> | <b>100.00</b> |

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025

Memperhatikan tabel diatas maka diketahui pertumbuhan PDRB Kabupaten TTS baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kontribusi terbesar PDRB di Kabupaten TTS (di atas 40%) dan jika dilihat dari nilai kontribusinya dimana peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,50, sektor ini tidak terdampak pandemi Covid-19, walaupun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten TTS pada saat pandemi Covid-19 (tahun 2020) mengalami kontraksi -0,06%. Pada saat pandemi Covid-19 terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan nilai karena pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19 yaitu sektor







konstruksi, perdagangan, real estate dan jasa lainnya. Berdasarkan data pada tabel diatas juga dapat diketahui selama 5 tahun terakhir terdapat 8 sektor yang mengalami kecenderungan peningkatan yaitu: 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Industri Pengolahan, 3) Pengadaan Listrik dan Gas, 4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 5) Informasi dan Komunikasi, 6) Jasa Keuangan dan Asuransi dan 7) Pertambangan dan Penggalan dan 8) Konstruksi.

#### 2.2.1.2 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan perbandingan antara jumlah PDRB dengan jumlah penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai alat pengukur pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, karena lebih menggambarkan mengenai nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh masing-masing individu disuatu daerah. Gambaran PDRB perkapita Indonesia, Provinsi NTT, Kabupaten TTS dan kabupaten sekitarnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 2.23  
PDRB Per Kapita Indonesia, Provinsi NTT Kabupaten TTS dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2020-2024

| Indikator                       | Tahun / (Ribuan Rupiah) |        |        |        |        |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                 | 2020                    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| PDRB Perkapita Indonesia        | 57.289                  | 62.259 | 71.043 | 74.964 | 78.600 |
| PDRB Perkapita Provinsi NTT     | 20.057                  | 20.555 | 21.657 | 23.078 | 24.272 |
| PDRB Perkapita Kabupaten TTS    | 17.452                  | 17.885 | 18.836 | 20.013 | 21.283 |
| PDRB Perkapita Kabupaten Kupang | 20.938                  | 21.621 | 22.733 | 24.332 | 25.954 |
| PDRB Perkapita Kabupaten TTU    | 15.757                  | 16.052 | 16.822 | 17.767 | 18.717 |
| PDRB Perkapita Kabupaten Belu   | 20.946                  | 21.204 | 22.251 | 23.724 | 25.163 |

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025

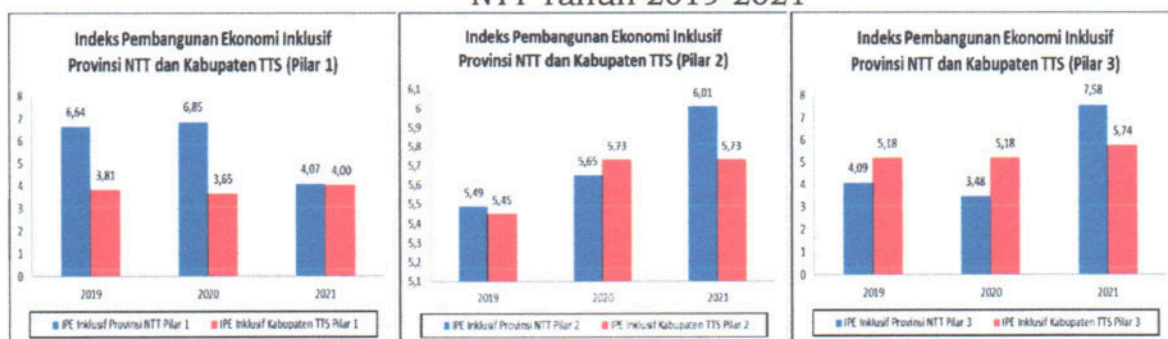


Selama 5 tahun terakhir (2019-2024), PDRB per kapita Kabupaten TTS mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB per kapita sebesar Rp. 16.909.640,23,- kemudian meningkat menjadi Rp. 21.283.000,00 pada tahun 2024 akan tetapi apabila dilakukan pembandingan dengan kabupaten sekitarnya maka perlu ada upaya/terobosan baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 2.2.1.3 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan di suatu wilayah dapat terlihat pada nilai IPEI. Nilai IPEI diukur melalui 3 pilar/aspek yaitu: aspek pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan. Berdasarkan data tahun 2019-2021, nilai pilar 1 sampai 3 Kabupaten TTS cenderung meningkat walaupun tidak signifikan dan masih berada di bawah nilai provinsi.

Gambar 2.15  
Perkembangan Pilar Pembentuk Nilai IPEI Kabupaten TTS dan Provinsi NTT Tahun 2019-2021



Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025

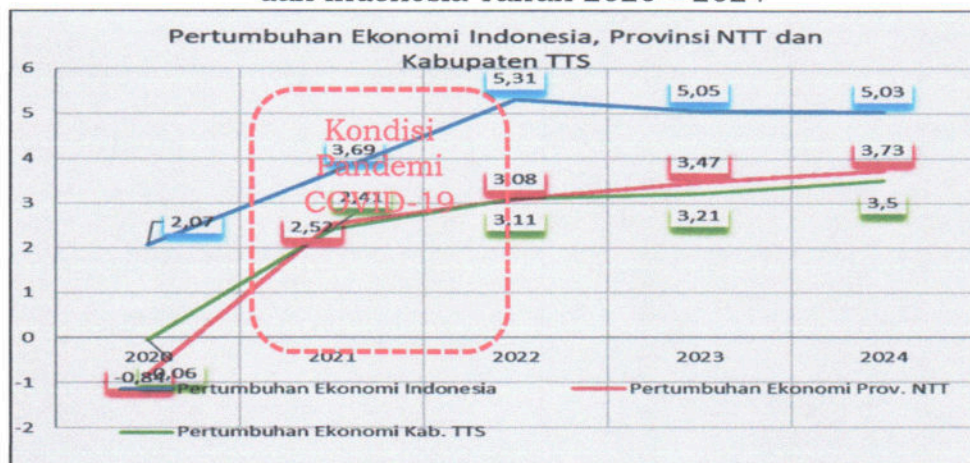
### 2.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi -0,06% akibat dampak pandemi Covid-19. Tahun 2021-2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTS kembali tumbuh positif dan terus mengalami peningkatan pada kisaran 3% walaupun belum mencapai angka pertumbuhan seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh



sebesar 5%. Pertumbuhan ekonomi positif yang terjadi di Kabupaten TTS relevan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT. Rincian pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTS dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.16  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten TTS, Provinsi NTT  
dan Indonesia Tahun 2020 – 2024

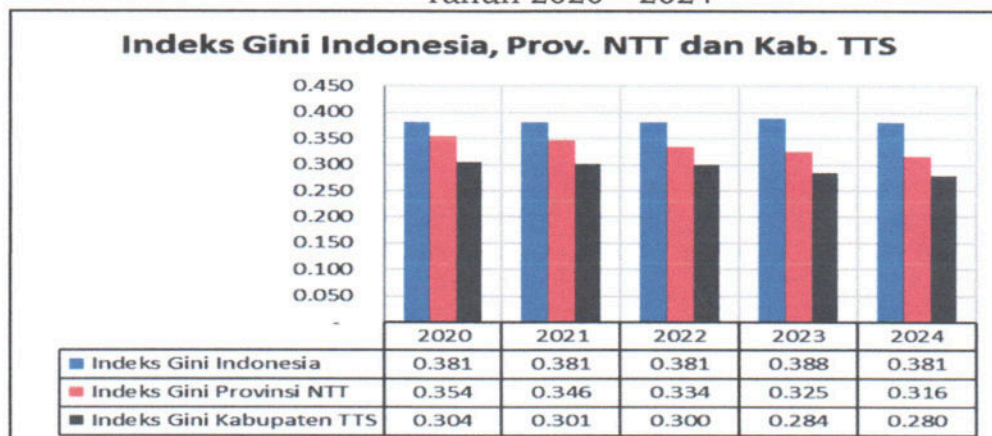


Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025

#### 2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Selama rentang 5 tahun terakhir, nilai indeks gini Kabupaten TTS cenderung menurun. Pada tahun 2020-2022 kondisi ketimpangan pengeluaran Kabupaten TTS berada dalam kategori ketimpangan taraf sedang/moderat (nilai indeks gini antara 0,3-0,5), sedangkan pada tahun 2023, nilai indeks gini adalah 0,284 berada dalam kategori ketimpangan taraf rendah (nilai indeks gini < 0,3).

Gambar 2.17  
Indeks Gini Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2020 – 2024

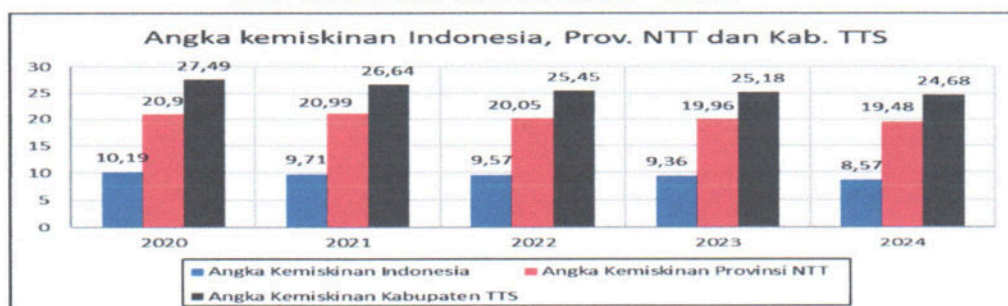


Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025

#### 2.2.1.6 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten TTS tahun 2020-2023 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 2,81% dari tahun dasar 2020 sebesar 27,49% menjadi 24,68% di tahun 2024. Angka kemiskinan Kabupaten TTS menduduki posisi ke 8 tertinggi di Provinsi NTT, tetapi dari sisi jumlah penduduk miskinnya Kabupaten TTS memiliki jumlah miskin tertinggi di Provinsi NTT. Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, kondisi angka kemiskinan Kabupaten TTS berada di atas provinsi dan nasional. Rincian penurunan persentase kemiskinan Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia selengkapnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.18  
Angka Kemiskinan Kabupaten TTS, Provinsi NTT  
dan Indonesia Tahun 2019 – 2024

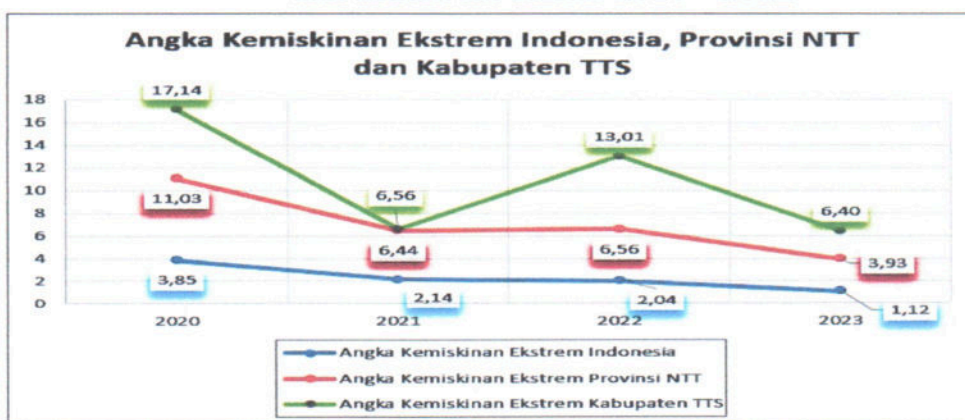


Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025



Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk dengan batasan pendapatan kurang dari US\$ 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten TTS sebesar 17,14% (80.430 jiwa), menurun menjadi 6,56% (30.960 jiwa) di tahun 2021, meningkat kembali di tahun 2022 sebesar 13,01% (61.570 jiwa) dan menurun signifikan pada tahun 2023 menjadi 6,40% (30.380 jiwa). Data kemiskinan ekstrem tahun 2024 belum dirilis secara resmi. Data kemiskinan ekstrem di Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.19  
Kemiskinan Ekstrem Kabupaten TTS, Provinsi NTT  
dan Indonesia Tahun 2020 - 2022

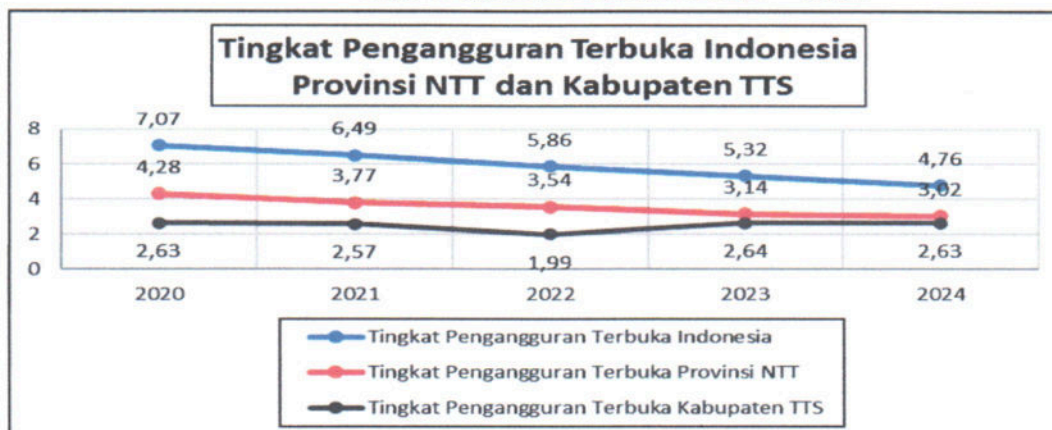


Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2023 dan Satgas Data P3KE (diolah)

#### 2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten TTS dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami penurunan. Secara kumulatif rata-rata per tahun 0,03. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir peningkatan TPT dimulai sejak tahun 2022 karena adanya efek dari pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, angka TPT Kabupaten TTS masih berada di bawah provinsi dan nasional. Rincian angka TPT Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.20  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten TTS, Provinsi NTT  
dan Indonesia Tahun 2020 – 2024



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), <https://ntt.bps.go.id>, <https://timortengahselatankab.bps.go.id> (diolah)

## 2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

### 2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator yang digunakan untuk memperoleh nilai IKS disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.21  
Perkembangan Indikator Pembentuk IKS Kabupaten TTS Tahun 2020-2023

| Indikator                                                                           |                                                             | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|  | Angka Kesakitan                                             | 17,45 | 14,65 | 21,92 | 19,44 |
|  | Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan)                        | 10,5  | 10,69 | 10,1  | 11,05 |
|  | Persentase Perempuan yang Melahirkan di Fasilitas Kesehatan | 73,2  | 74,24 | 82,58 | 79,41 |
|  | Persentase Perempuan Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB |       |       |       |       |
|                                                                                     | ✦ Pernah Menggunakan                                        | 19,16 | 15,02 | 24,6  | 24,8  |
|                                                                                     | ✦ Sedang Menggunakan                                        | 37,9  | 41,96 | 39,8  | 39,6  |
|                                                                                     | ✦ Tidak Pernah Menggunakan                                  | 42,94 | 43,02 | 35,6  | 35,6  |

Sumber: Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045, Tahun 2025



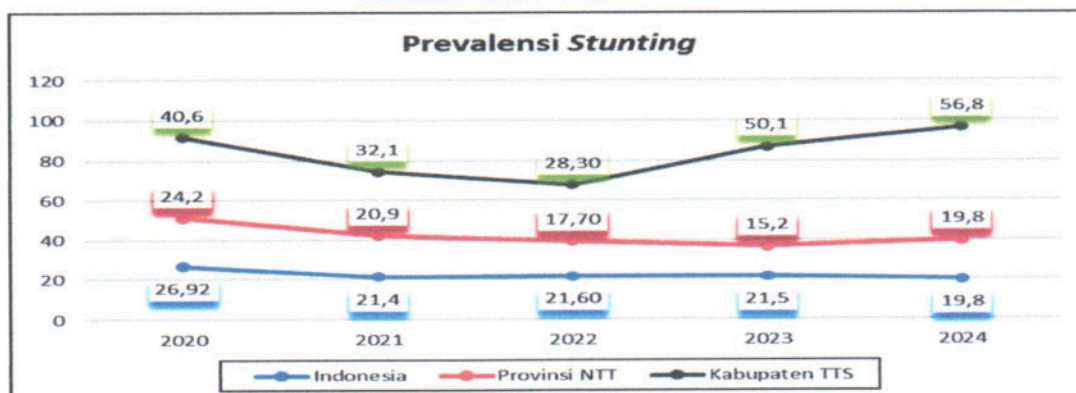


Berdasarkan data selama 4 tahun terakhir angka kesakitan di Kabupaten TTS berfluktuasi. Sedangkan untuk indikator rata-rata lama pemberian ASI, cenderung meningkat dengan durasi pemberian ASI di tahun 2023 sampai dengan 11 bulan. Untuk indikator persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan menunjukkan kecenderungan peningkatan. Sedangkan untuk penggunaan alat kontrasepsi, PUS yang tidak menggunakan alat/cara KB menunjukkan kecenderungan penurunan sedangkan untuk PUS yang sedang menggunakan alat/cara KB cenderung mengalami peningkatan.

#### 2.2.2.2 Prevalensi Stunting

Prevalensi *stunting* merupakan jumlah keseluruhan permasalahan *stunting* yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah. Persentase balita *stunting* di Kabupaten TTS tahun 2020-2023 mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan selama 5 tahun terakhir sebesar 6,5%. Pada tahun 2019 sebesar 48,10% menurun menjadi 28,30% pada tahun 2022, sedangkan tahun 2023-2024 terdapat kenaikan menjadi 56,8 dengan metode survei yang diakui oleh nasional. Prevalensi *stunting* di Kabupaten TTS masih lebih tinggi dibanding provinsi dan nasional. Gambaran data penurunan dan peningkatan presentase *stunting* sangat tergantung dari system yang digunakan dalam perhitungan persentase dimaksud. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.22  
Prevalensi Stunting Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2020 - 2024

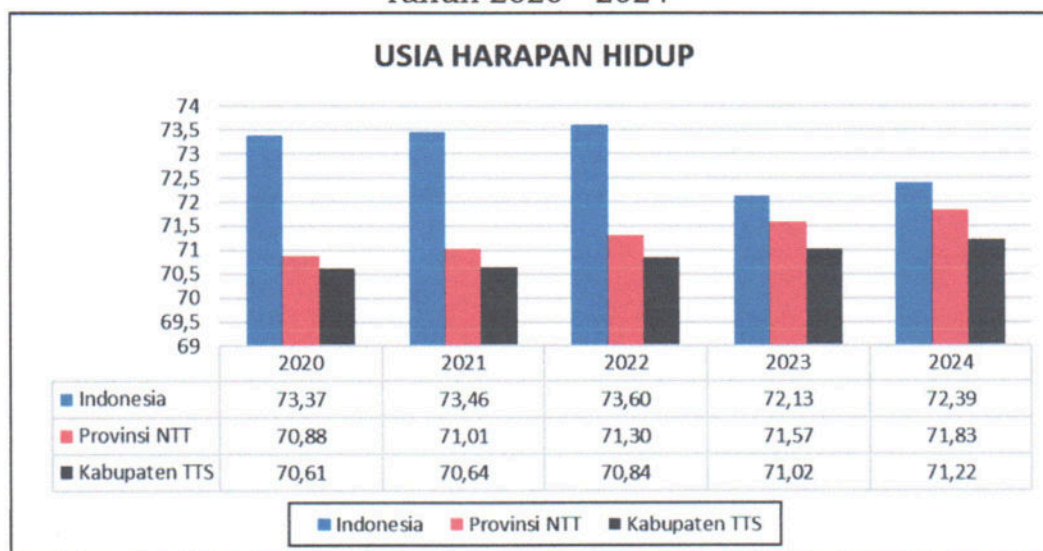


Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), <https://ntt.bps.go.id>, <https://timortengahselatankab.bps.go.id> (diolah)

### 2.2.2.3 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator kunci untuk menilai kualitas kesehatan masyarakat di suatu daerah. UHH menggambarkan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini tetap bertahan sepanjang hidup. Di Kabupaten TTS merujuk pada data dapat diketahui bahwa Usia Harapan Hidup masyarakat meningkat dari tahun 2020 sebesar 70,61 menjadi 71,22 pada tahun 2024. Meningkatnya UHH di Kabupaten TTS perlu diperhatikan karena dapat memicu tantangan baru, yaitu meningkatnya *old age dependency ratio* atau rasio ketergantungan lansia. Rasio tersebut menunjukkan beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk lansia dan penduduk lain yang tidak produktif secara ekonomi.

Gambar 2.23  
Usia Harapan Hidup Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2020 - 2024



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), <https://ntt.bps.go.id>, <https://timortengahselatankab.bps.go.id>

(diolah)

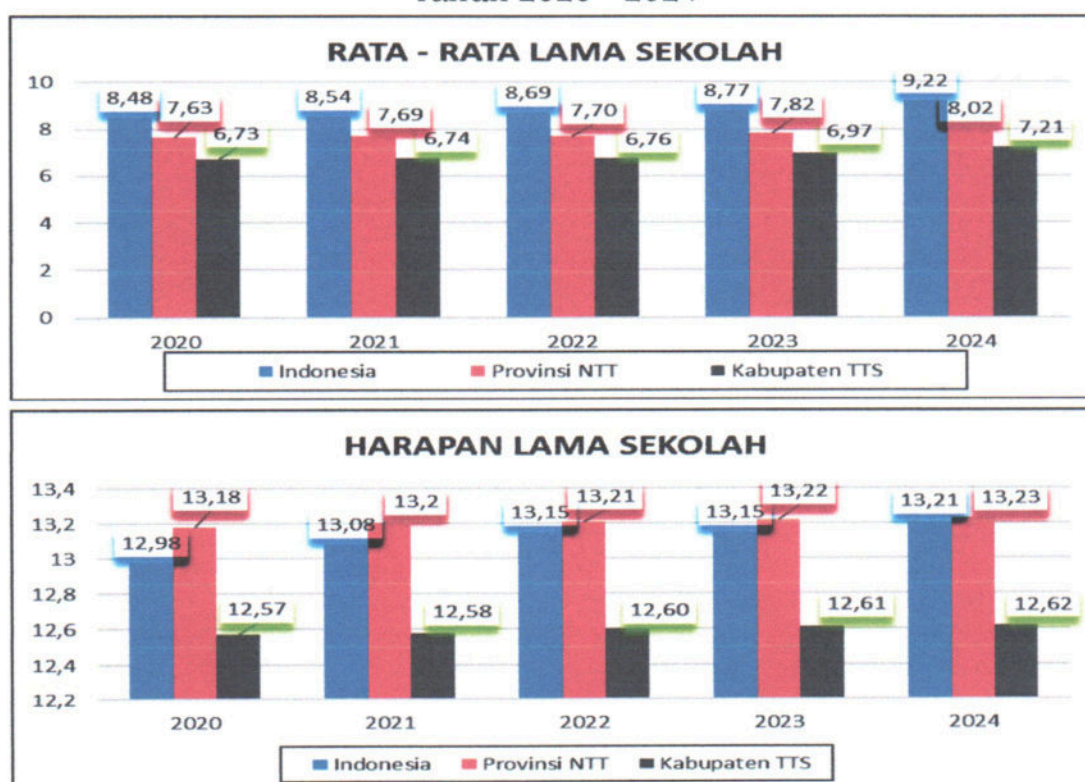


## 2.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata

### 2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah dua indikator penting dalam pendidikan yang menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah. HLS adalah harapan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu, sedangkan RLS adalah rata-rata lama sekolah yang telah dialami oleh penduduk dewasa. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten TTS berdasarkan data yang ada mengalami peningkatan dari 6,73 pada tahun 2020 menjadi 7,21 pada tahun 2024. Masih ada harapan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia dibawah 25 tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.24  
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah  
Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2020 - 2024



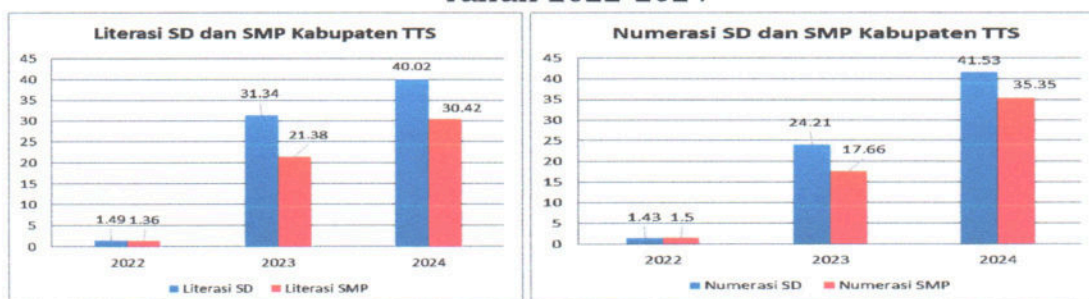
Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), <https://ntt.bps.go.id>, <https://timortengahselatankab.bps.go.id>

(diolah)

### 2.2.3.2 Angka Literasi dan Numerasi

Berdasarkan data pada tahun 2024, terdapat 40,02% peserta didik tingkat SD dan 21,38% peserta didik tingkat SMP di Kabupaten TTS yang telah mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca. Sedangkan untuk kompetensi numerasi, terdapat 41,53% peserta didik tingkat SD dan 35,35% peserta didik tingkat SMP di Kabupaten TTS yang telah mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi. Sesuai kategori tingkat aktivitas literasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud maka nilai angka literasi dan numerasi Kabupaten TTS masuk dalam kategori rendah (20,01 – 40,00). Pengukuran data literasi dan numerasi dilakukan mulai tahun 2022.

Gambar 2.25  
Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten TTS  
Tahun 2022-2024



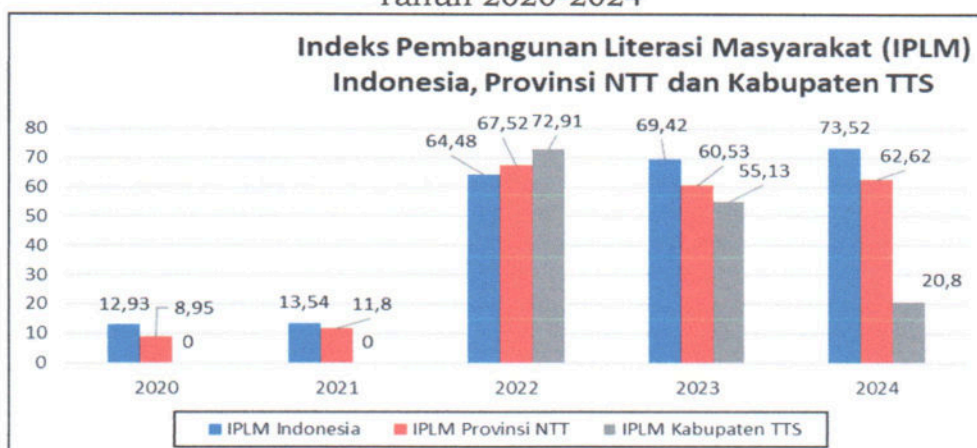
Sumber: Dinas P dan K Kabupaten TTS Tahun 2025 (diolah)

### 2.2.3.3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat yang diukur melalui aspek pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi dan anggota perpustakaan. Untuk lebih jelasnya tentang nilai IPLM Kabupaten TTS dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.26  
Nilai IPLM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2020-2024



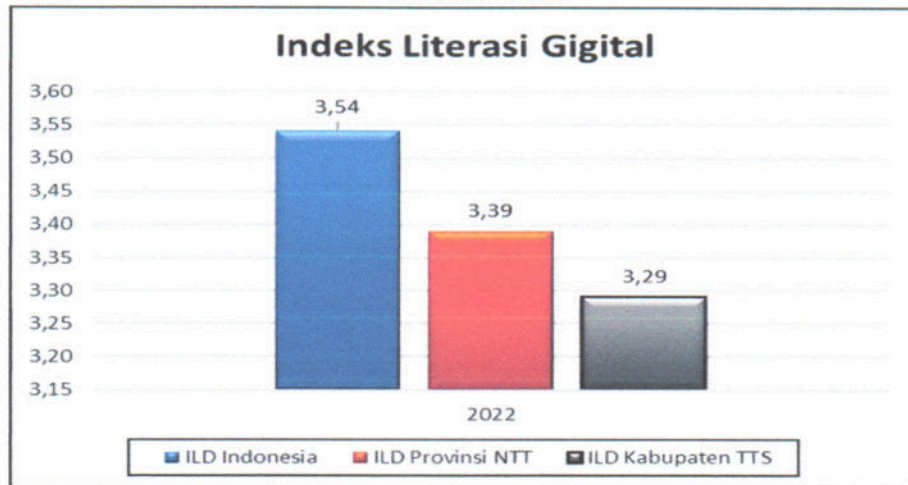
Sumber: Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan data tahun 2022, IPLM Kabupaten TTS berada di atas Provinsi NTT dan nasional yakni 72,91, namun pada tahun 2023 dan 2024 nilai IPLM Kabupaten TTS mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 17,78 poin dan 34,33 berada di bawah nilai provinsi dan nasional karena belum adanya dukungan anggaran dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar. Untuk data tahun 2020-2021 belum dapat disajikan karena tidak dilakukan pengukuran.

#### 2.2.3.4 Indeks Literasi Digital (ILD)

Literasi digital berhubungan dengan kecakapan (*life skill*) karena tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan meliputi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan kompetensi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI baru merilis ILD untuk level kabupaten pada tahun 2022 secara khusus untuk kabupaten 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Data tahun 2022 menunjukkan ILD Kabupaten TTS adalah 3,29 dan masih berada di bawah provinsi dan nasional. Literasi digital sangat dipengaruhi oleh kecepatan internet, jumlah operator seluler yang beroperasi di wilayah, kestabilan sinyal dan wilayah keterjangkauan WIFI/*fiber optic*.

Gambar 2.27  
Nilai ILD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2022



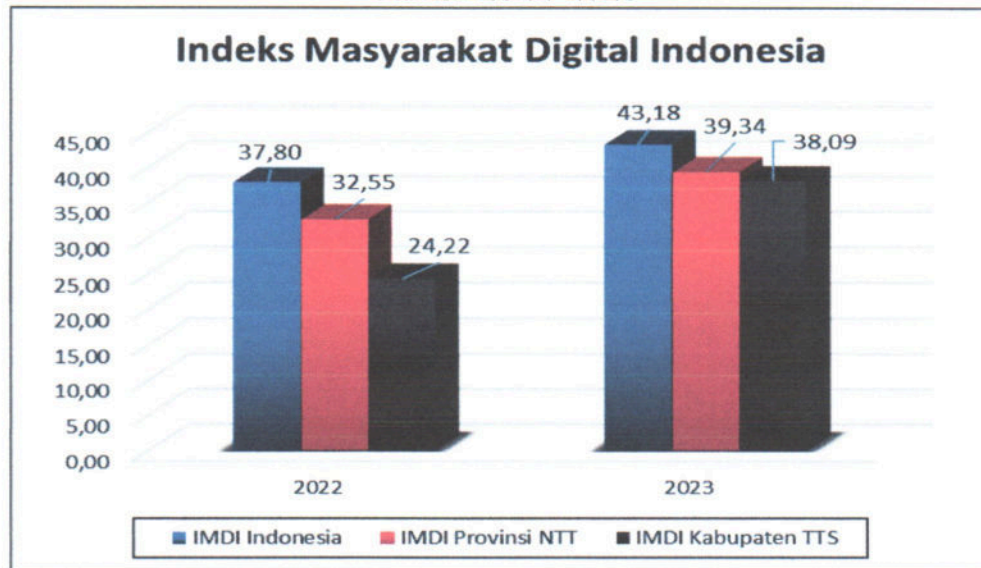
Sumber: Kementerian Kominfo RI Tahun 2022 (diolah)

#### 2.2.3.5 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Nilai IMDI menggambarkan tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Nilai IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan dan Pekerjaan. Data IMDI dimulai dari tahun 2022. Berdasarkan data 2 tahun terakhir, nilai IMDI Kabupaten TTS pada tahun 2022 sebesar 24,22 meningkat 13,87 di tahun 2023 menjadi 38,09. Pilar penyumbang terbesar untuk nilai IMDI Kabupaten TTS adalah pilar Infrastruktur dan Ekosistem dan Keterampilan Digital.



Gambar 2.28  
Nilai IMDI Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2022-2023



Sumber: Kementerian Kominfo RI Tahun Tahun 2024 (diolah)

## 2.2.4 Perlindungan Sosial Yang Adaptif

### 2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Program ini ditujukan untuk melindungi pekerja dari risiko-risiko yang dapat terjadi selama bekerja, seperti kecelakaan, kematian dan kebutuhan perawatan Kesehatan. Untuk Kabupaten TTS dapat dilihat bahwa program ini telah berjalan akan tetapi belum dapat dilakukan secara maksimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.24  
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
Kab. TTS Tahun 2021-2024

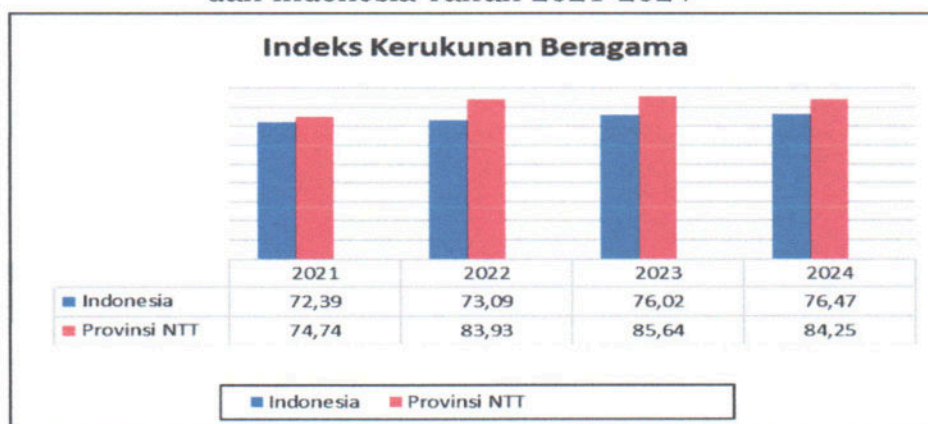
| Tahun | Potensi TK Aktif |         |         | TK Aktif     |       |        | COVERAGE/Kepesertaan |         |          |
|-------|------------------|---------|---------|--------------|-------|--------|----------------------|---------|----------|
|       | PU dan JAKON     | BPU     | Total   | PU dan JAKON | BPU   | Total  | PU dan JAKON         | BPU     | Total    |
| 1     | 2                | 3       | 4       | 5            | 6     | 7      | 8 = 5/2              | 9 = 6/3 | 10 = 7/4 |
| 2021  | 210.403          | 376.843 | 587.246 | 35.727       | 3.601 | 39.328 | 16,98                | 0,96    | 6,70     |
| 2022  | 42.390           | 117.116 | 159.506 | 49.754       | 4.785 | 54.539 | 117,37               | 4,09    | 34,19    |
| 2023  | 43.518           | 92.302  | 135.820 | 27.696       | 7.300 | 34.996 | 63,64                | 7,91    | 25,77    |
| 2024  | 18.670           | 54.689  | 73.359  | 41.136       | 6.069 | 47.205 | 220,33               | 11,10   | 64,35    |

Sumber : Dinas Nakertrans Kabupaten TTS Tahun 2025

## 2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan, melalui peningkatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah. Pengukuran nilai indeks ini sampai pada tingkat provinsi. Merujuk pada data Indeks Kerukunan Umat Beragama di NTT maka dapat diketahui bahwa Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi yang toleransi beragama dinilai cukup baik. Adapun nilai indeks yang ada dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.29  
Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT  
dan Indonesia Tahun 2021-2024



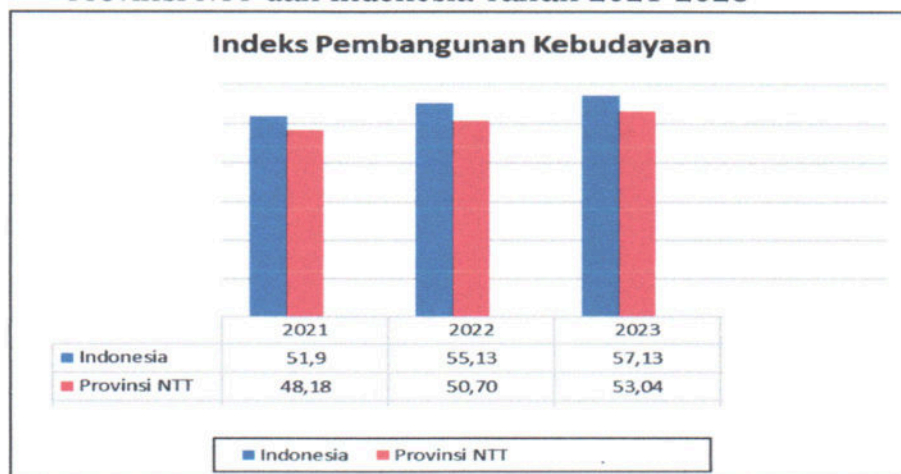
Sumber: Kementerian Agama Tahun 2025

Kebudayaan memiliki peran strategis dalam membentuk identitas dan karakter suatu daerah serta berkontribusi langsung terhadap berbagai aspek pembangunan termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan adanya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPKD) ini maka pemerintah daerah dapat lebih mudah memetakan area-area yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pelestarian kebudayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbasis kebudayaan. IPKD juga memberikan nilai pengukuran yang terstandarisasi untuk melihat bagaimana daerah dapat memanfaatkan potensi kebudayaannya sebagai motor penggerak pembangunan. Pengukuran nilai indeks ini sampai pada tingkat provinsi. Merujuk pada data maka diketahui Provinsi NTT masih dalam tahapan pengembangan potensi



kebudayaan dengan nilai indeks tahun 2023 sebesar 53,04. Untuk lebih jelas perihal nilai indeks yang ada dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:

Gambar 2.30  
Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan  
Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2023



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024

## 2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

### 2.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Sejalan dengan visi Indonesia Emas pada tahun 2045, sebagai perwujudan SDM yang berkualitas emas tentunya tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada anak. Upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak menjadi mutlak untuk dilakukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Nilai IPA menunjukkan tingkat capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Nilai IPA di Provinsi NTT cenderung meningkat dengan nilai tahun 2023 sebesar 52,35. Dengan nilai ini diharapkan tetap berupaya untuk

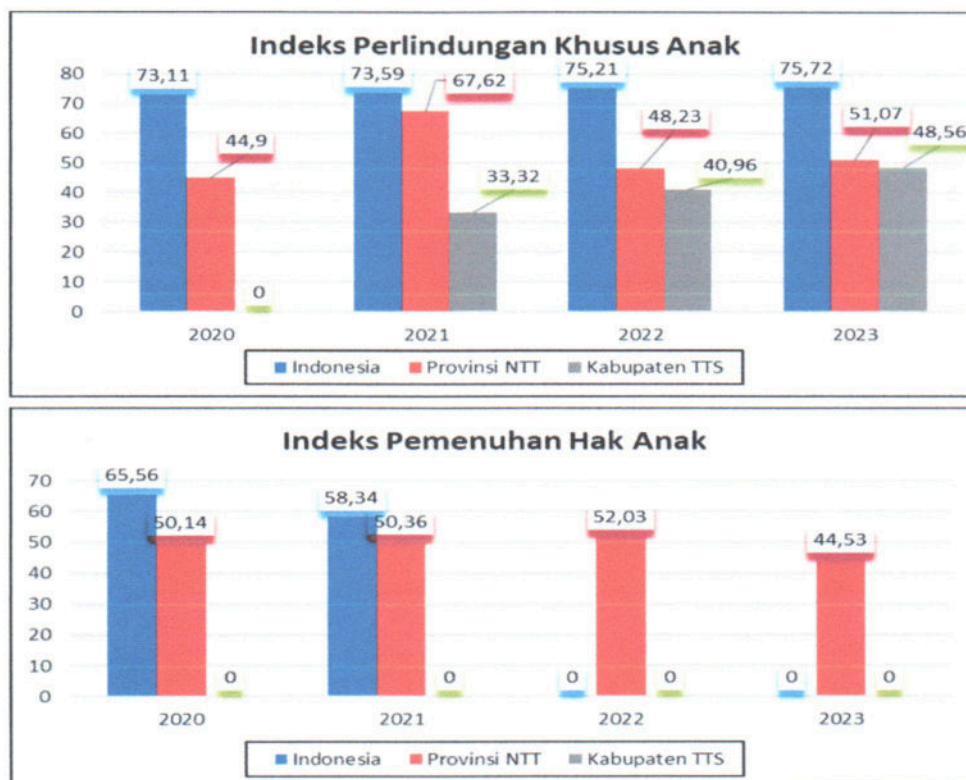
sebesar 52,35. Dengan nilai ini diharapkan tetap berupaya untuk bisa melakukan berbagai upaya dalam perlindungan anak.

Nilai IPHA menunjukkan tingkat realisasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nilai IPHA di Provinsi NTT cenderung tidak stabil nilai tahun 2022 sebesar 52,03 dan tahun 2023 sebesar 44,53. Dengan nilai ini diharapkan Pemerintah Daerah berupaya secara berkelanjutan untuk bisa melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak anak. Untuk Kabupaten TTS belum dilakukan pengukuran indeks ini. Sedangkan nilai IPKA menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak dan anak terlantar. Untuk Kabupaten TTS Tahun 2023 mendapatkan penilaian sebesar 48,56 sehingga perlu ada program-program khusus untuk dapat memperhatikan anak yang berkebutuhan khusus. Data IPA, IPKA dan IPHA disajikan hanya sampai tahun 2023 sesuai data Kementerian PPPA. Untuk lebih jelas perihal nilai indeks yang ada dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.31  
Nilai IPA, IPHA dan IPKA Kabupaten TTS, Provinsi NTT  
dan Indonesia Tahun 2020-2024







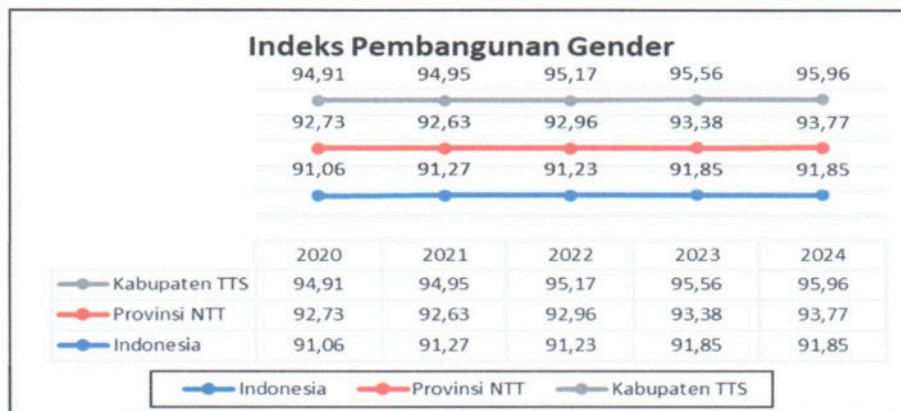
Sumber: Kementerian PPPA RI Tahun 2021- 2023 (diolah)

#### 2.2.6.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender adalah melalui nilai IPG. Nilai IPG diperoleh melalui perbandingan antara IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Capaian IPG Kabupaten TTS mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Nilai IPG Kabupaten TTS tahun 2020 sebesar 94,91 poin dan mengalami kenaikan secara bertahap mencapai 95,96 poin pada tahun 2024. Capaian nilai IPG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir berada di atas capaian IPG Provinsi NTT dan Indonesia. Peningkatan nilai IPG Kabupaten TTS mengindikasikan kondisi pembangunan gender yang semakin baik dan mengindikasikan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Gambar 2.32  
Nilai IPG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2020-2023

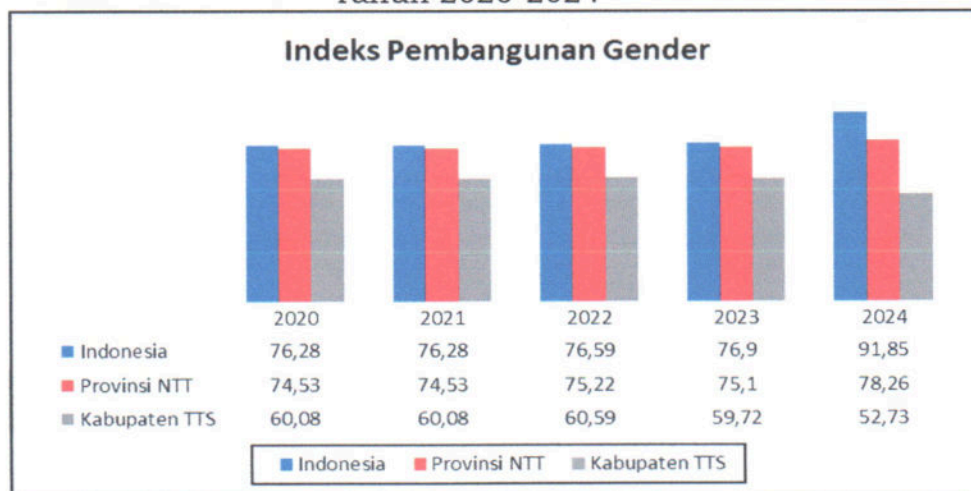


Sumber: <https://ntt.bps.go.id/>, <https://timortengahselatankab.bps.go.id> (diolah)

### 2.2.6.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Selain IPG, indikator lain yang juga terkait dengan gender yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Nilai IDG Kabupaten TTS selama kurun waktu 2020-2024 cenderung menurun. Nilai IDG Kabupaten TTS selama 4 tahun terakhir masih di bawah provinsi dan nasional.

Gambar 2.33  
Nilai IDG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2020-2024



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), <https://ntt.bps.go.id/>, <https://timortengahselatankab.bps.go.id> (diolah)

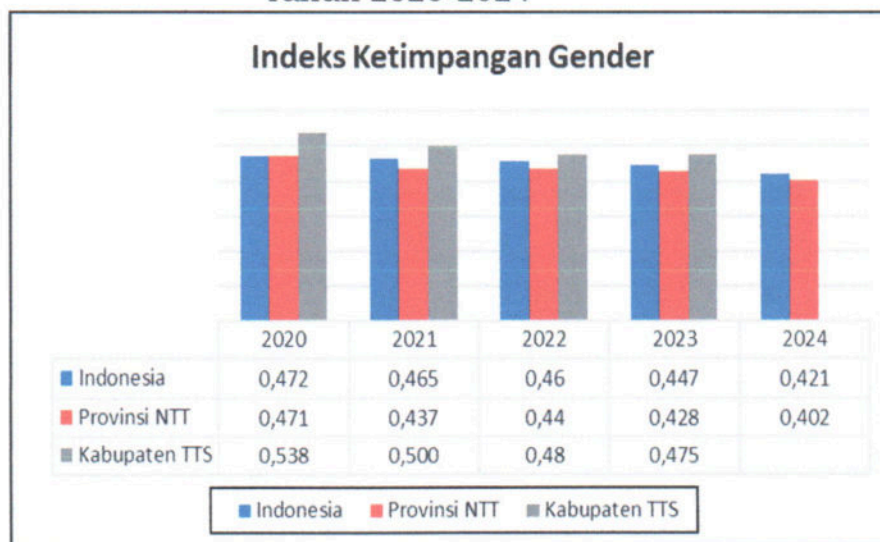


Nilai IDG terbentuk dari 3 komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional dan komponen sumbangan pendapatan perempuan. Data komponen IDG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat penurunan pada 2 komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional sedangkan komponen sumbangan pendapatan perempuan cenderung menurun (diukur menggunakan perbandingan upah buruh laki-laki dan perempuan pada sektor non pertanian).

#### 2.2.6.4 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nilai IKG mencerminkan kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam 3 dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan nilai per tahun. Sesuai kategori kelas nilai IKG oleh BPS maka IKG Kabupaten TTS tahun 2022-2023 berada pada kategori menengah atas (rentang 0,450-0,499), walaupun demikian kecenderungan penurunan nilai IKG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau semakin baik.

Gambar 2.34  
Nilai IKG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2020-2024

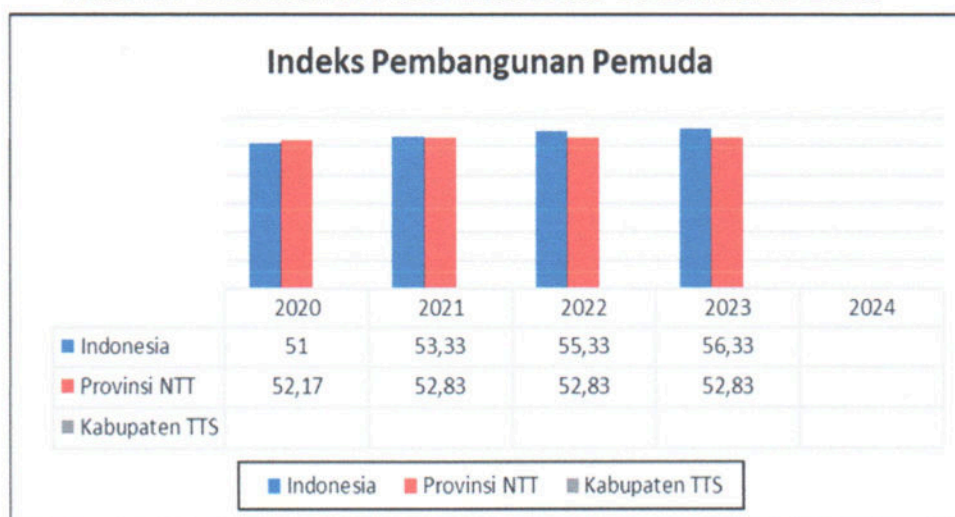


Sumber: <https://ntt.bps.go.id>, <https://timortengahselatankab.bps.go.id> (diolah)

## 2.2.6.5 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. Terdapat 5 aspek penilaian IPP yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi. Untuk pengukuran indeks ini hanya sampai tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2023. Untuk lebih jelas perihal nilai indeks yang ada dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.35  
Nilai IPP Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2023



Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2024

Untuk Kabupaten TTS dibuat perkembangan beberapa indikator pembentuk IPP yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25  
Perkembangan Indikator IPP Kabupaten TTS  
Tahun 2020-2024

| Uraian                                   | Tahun |      |       |       |       |
|------------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|
|                                          | 2020  | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| Organisasi pemuda yang aktif dan terbina | 1     | 1    | 4     | 4     | 4     |
| Wirausaha muda                           | 0     | 74   | 1.915 | 1.945 | 1.993 |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTS Tahun 2025



Berdasarkan data tahun 2020-2024 organisasi pemuda yang aktif dan dibina serta persentase wirausaha muda mengalami stagnansi. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan karena adanya pandemi Covid 19 yang mengharuskan adanya pembatasan aktivitas masyarakat sehingga berpengaruh terhadap penutupan lapangan kerja.

## 2.3 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

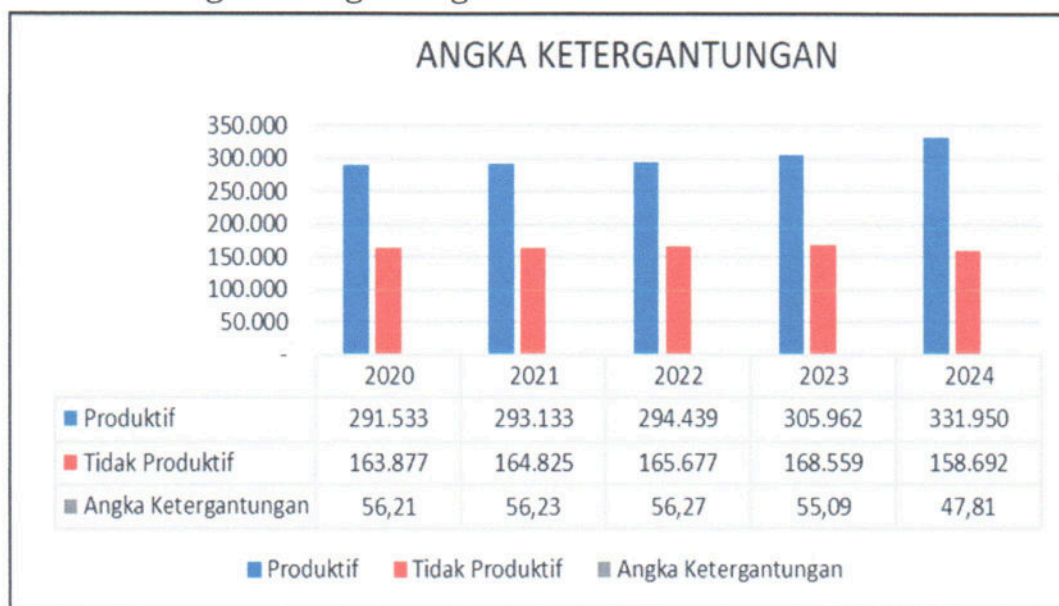
Daya saing sumber daya manusia (SDM) merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja atau pasar global. Hal ini mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh SDM, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di lingkungan kerja. Di Kabupaten TTS dapat digambarkan dengan tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan antara jumlah angkatan kerja (15-64 tahun) dengan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Tingkat ketergantungan digunakan untuk mengukur tekanan ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif. Semakin tinggi tingkat ketergantungan, artinya makin banyak yang harus ditanggung dan dalam jangka panjang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.26  
Tingkat Ketergantungan Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Tahun 2020-2024

| No | Uraian                                     | Tahun   |         |         |         |         |
|----|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                            | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1  | Jumlah penduduk usia < 15 tahun            | 131.124 | 131.124 | 131.168 | 132.891 | 119.426 |
| 2  | Jumlah penduduk usia > 64 tahun            | 33.701  | 33.701  | 34.509  | 35.668  | 39.266  |
| 3  | Jumlah penduduk usia tidak produktif (1+2) | 164.825 | 164.825 | 165.677 | 168.559 | 158.692 |
| 4  | Jumlah penduduk usia 15-64 tahun           | 293.133 | 293.133 | 294.439 | 305.962 | 331.950 |
| 5  | Persentase Ketergantungan (3/4)            | 56,22   | 56,22   | 56,27   | 55,09   | 47.81   |

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025

Gambar 2.36  
Nilai Angka Ketergantungan Kab. TTS Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2025 (diolah)

Persentase ketergantungan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2023 ke tahun 2024 menurun menjadi 47,81%, hal ini menunjukkan ada penurunan sebesar 7,28% beban yang ditanggung oleh penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang berusia belum produktif dan tidak produktif lagi.

#### 2.3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten TTS mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Peningkatan nilai IPM Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir tidak signifikan dan masih berada di bawah provinsi dan nasional untuk periode yang sama. Data pertumbuhan IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.27  
Nilai IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2020 – 2024

| No | Indikator                                   | Tahun |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                             | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia Indonesia        | 71,94 | 73,16 | 73,77 | 74,39 | 75,02 |
| 2  | Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT     | 65,19 | 67,02 | 67,63 | 68,4  | 69,14 |
| 3  | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten TTS    | 62,15 | 63,97 | 64,54 | 65,39 | 66,22 |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten TTU    | 64,93 | 65,09 | 65,65 | 66,56 | 65,83 |
| 5  | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kupang | 66,00 | 66,08 | 66,72 | 67,51 | 66,57 |
| 6  | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belu   | 66,32 | 66,40 | 66,87 | 67,50 | 64,43 |

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Memperhatikan data pada tabel yang ada diketahui bahwa IPM Kabupaten Timor Tengah Selatan masuk dalam kategori sedang pada Tahun 2024 sama dengan tingkatan Provinsi maupun kabupaten yang berada di sekitar Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### 2.3.1.2 Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Daya saing Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam sumber daya manusia dapat digambarkan melalui jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan yaitu tingkat sarjana. Tingkatan pekerja ini dianggap telah memenuhi syarat dalam bersaing secara global. Untuk data ini hanya digambarkan dari tahun 2022 dikarenakan untuk tahun 2020-2021 tidak termuat dalam dokumen yang diterbitkan oleh BPS. Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki pekerja sebanyak 34.372 jiwa yang berpendidikan sarjana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Gambar 2.37  
Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

## 2.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

### 2.3.2.1 Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Data 5 tahun terakhir menunjukkan nilai IID Kabupaten TTS berfluktuatif. Pada tahun 2020, nilai IID Kabupaten TTS masuk pada kategori Kurang Inovatif akan tetapi pada tahun 2024 nilai IID meningkat menjadi 36,69 dan masuk dalam kategori Inovatif. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28  
Indeks Inovasi Daerah (IID)

| Provinsi/Kab     | Tahun  |       |       |       |       |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Provinsi NTT     | 3,83   | 53,38 | 59,76 | 62,53 | 50,1  |
| Kabupaten TTS    | 24,00  | 3,56  | 12,50 | 37,47 | 36,69 |
| Kabupaten TTU    | 0,00   | 37,56 | 43,20 | 25,13 | 40,61 |
| Kabupaten Kupang | 21,00  | 27,08 | 38,76 | 35,08 | 37,8  |
| Kabupaten Belu   | 174,00 | 54,01 | 46,08 | 49,88 | 9,4   |

Sumber: Kemendagri Tahun 2020-2024 (diolah)

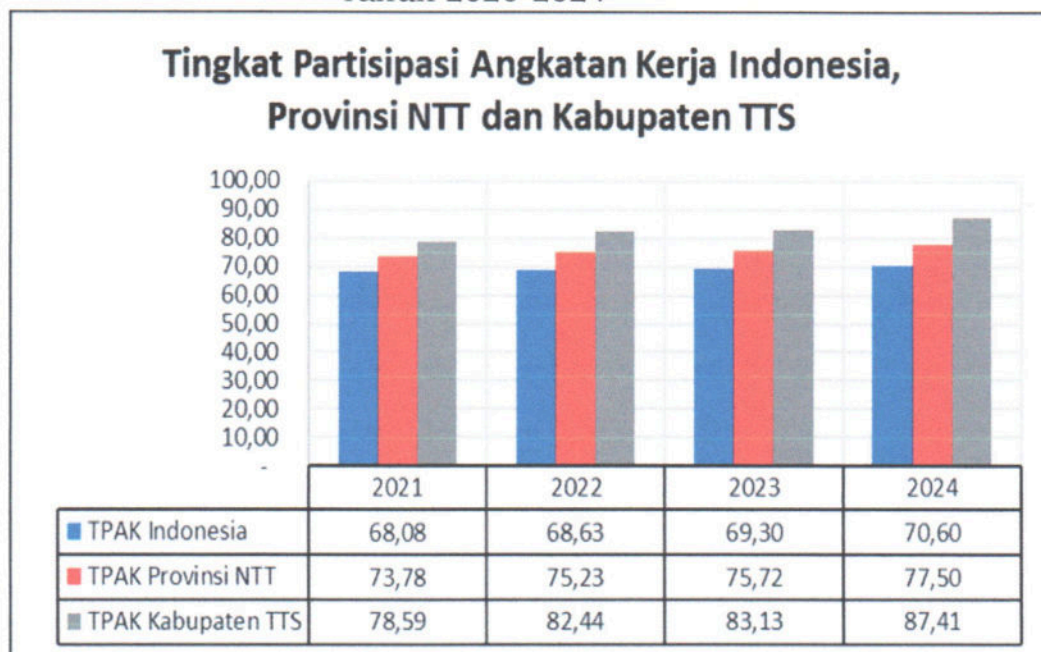
Memperhatikan data yang tersedia pada tabel diatas diketahui bahwa Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat bersaing secara baik perihal inovasi daerah bersama kabupaten disekitarnya.

### 2.3.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menjadi salah satu indikator perkembangan ketenagakerjaan di suatu wilayah. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, perkembangan TPAK Kabupaten TTS mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,40%. Peningkatan TPAK Kabupaten TTS berada di atas persentase TPAK Provinsi NTT dan Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang dapat terlibat secara aktif secara ekonomi di wilayah Kabupaten TTS.



Gambar 2.38  
TPAK Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2020-2024



Sumber: <https://ntt.bps.go.id>, <https://timortengahselatankab.bps.go.id> diolah)

### 2.3.2.3 Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan data, kegiatan penanaman modal di Kabupaten TTS didominasi oleh PMDN baik dalam nilai investasi maupun jumlah investornya. Pada rentang tahun 2019-2022, nilai investasi di Kabupaten TTS cenderung mengalami peningkatan. Penghitungan nilai investasi menggabungkan realisasi nilai investasi UMK dan Non UMK tetapi di tahun 2023 penghitungan nilai investasi hanya menggunakan realisasi nilai investasi Non UMK sehingga pada tahun 2023 nilai investasi di Kabupaten TTS mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk Tahun 2024 dilakukan perhitungan dengan menggabungkan UMK dan Non UMK. Perkembangan nilai investasi dan jumlah investor baik PMDN maupun PMA Kabupaten TTS selama tahun 2020-2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.29  
Nilai Investasi dan Jumlah Investor Kabupaten TTS Tahun 2020-2024

| Uraian                      | Tahun          |                |                 |                  |              |              |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|
|                             | 2019           | 2020           | 2021            | 2022             | 2023         | 2024         |
| Nilai Investasi             | 25,9<br>Miliar | 18,1<br>Miliar | 88,82<br>Miliar | 105,87<br>Miliar | 42<br>Miliar | 64<br>Miliar |
| Jumlah Investor<br>PMDN/PMA | 20             | 21             | 176             | 109              | 141          | 93           |

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten TTS Tahun 2025

Pada Bulan April tahun 2024 Pemerintah Kabupaten TTS telah mengoperasikan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan tujuan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, keamanan pelayanan dan meningkatkan daya saing serta memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat dan investor. Aktivitas MPP Kabupaten TTS melibatkan 20 instansi/lembaga baik pada level Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten TTS dengan jenis layanan yang dilakukan sebanyak 143 jenis layanan terintegrasi.

### 2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

#### 2.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau atau *Green Economy Index (GEI)* adalah strategi untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Terdapat 15 indikator yang akan digunakan untuk mengukur pelaksanaan ekonomi hijau. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan menjadi menjadi tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.







Tabel 2.30  
Indikator Kinerja Utama yang mendukung Tiga Pilar  
Ekonomi Hijau Kabupaten TTS Tahun 2025-2026

| Pilar      | Indikator                    | Target Kabupaten TTS |             |
|------------|------------------------------|----------------------|-------------|
|            |                              | 2025                 | 2026        |
| SOSIAL     | Tingkat Pengangguran Terbuka | 1,35-1,03            | 1,03-0,71   |
|            | Tingkat Kemiskinan           | 24,91-24,64          | 24,64-24,37 |
|            | Angka Harapan Hidup          | 66,92-67,04          | 67,04-67,16 |
|            | Rata-rata Lama Sekolah       | 6,79-6,80            | 6,80-6,81   |
| EKONOMI    | Pertumbuhan Ekonomi          | 4,10-4,50            | 4,50-5,00   |
|            | Skor Pola Pangan Harapan     | 90                   | 90          |
| LINGKUNGAN | Indek Kualitas Lingkungan    | 73,00-74,00          | 73,00-74,00 |
|            | Indeks Risiko Bencana        | 155,45               | 155,35      |

Sumber: RPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2026

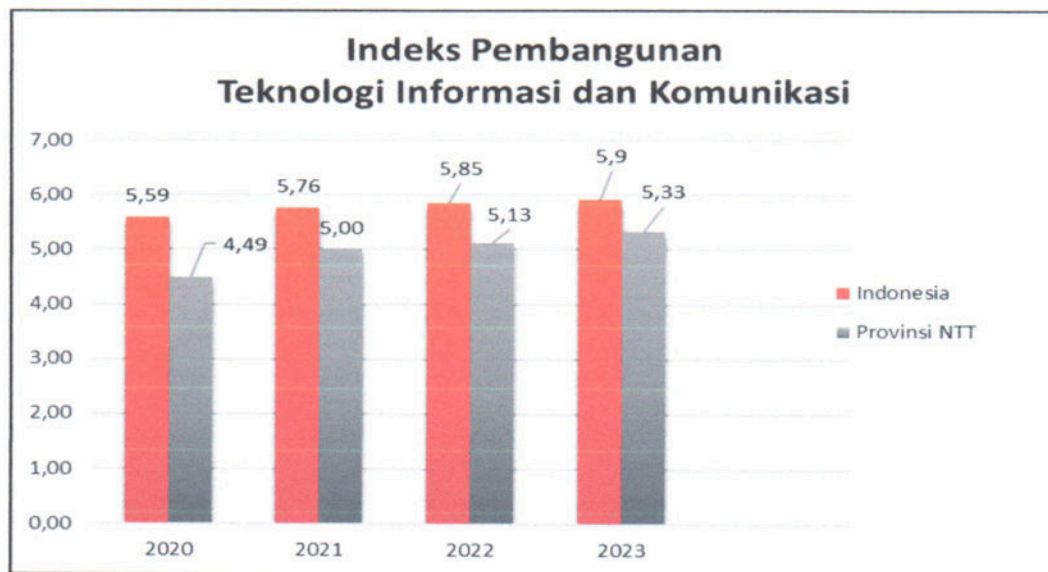
#### 2.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi dan respons dinamika perkembangan global, sehingga perlu disikapi dengan positif untuk dapat memotivasi masyarakat dalam berpartisipasi meningkatkan produktivitas, menumbuhkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Salah satu upaya dalam mendukung transformasi digital yaitu pengukuran Indeks Pembangunan TIK disusun berdasarkan sebelas indikator yang terhimpun dalam tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, serta keahlian TIK sesuai dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU). Data yang digunakan merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS serta kompilasi produk data administrasi dari berbagai instansi terkait. Pengukuran IP-TIK ini hanya sampai pada tingkat provinsi sehingga merujuk pada data yang ada dapat disimpulkan bahwa Provinsi NTT dalam hal ini pada tingkatan kabupaten perlu berupaya lebih maksimal untuk percepatan transformasi digital pada setiap area pembangunan



karena masih dalam kategori sedang (5,01-7,50). Untuk data tahun 2024 belum diterbitkan oleh BPS. Untuk lebih jelasnya perihal Indeks dimaksud dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:

Gambar 2.39  
Transformasi Digital Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Indonesia Tahun 2021-2023

#### 2.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Integrasi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan sangat penting bagi pembangunan ekonomi di suatu daerah agar tetap berkelanjutan. Dengan pengembangan wilayah untuk memperkuat pembangunan perdesaan yang mandiri, maka perlu dibuat pembangunan yang lebih merata dan berdaya saing antara perkotaan dan Perdesaan. Untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi desa dan kota maka dapat digambarkan beberapa Kondisi Infrastruktur seperti:

##### a. Rumah Layak Huni

Data terkait rumah layak huni di Kabupaten TTS menunjukkan kecenderungan peningkatan selama 5 tahun terakhir, sampai dengan tahun 2024 telah tersedia 75.187 unit rumah layak huni di Kabupaten TTS yang dibangun dengan menggunakan anggaran Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.





Tabel 2.31  
Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten TTS Tahun 2019-2024

| Indikator                   | Tahun  |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                             | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Persentase Rumah Layak Huni | 63,51  | N/A    | 63,99  | 64,63  | 64,68  | 64,86  |
| Jumlah Rumah Layak Huni     | 73.625 | 73.849 | 74.184 | 74.919 | 74.983 | 75.187 |

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2025

b. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Indeks Desa Membangun di Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.32  
Indeks Desa Membangun di Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Tahun 2021-2024

| Uraian                 | Tahun      |            |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Desa Mandiri           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Desa Maju              | 0          | 2          | 5          | 6          | 7          |
| Desa Berkembang        | 2          | 37         | 63         | 78         | 86         |
| Desa Tertinggal        | 237        | 198        | 176        | 160        | 156        |
| Desa Sangat Tertinggal | 27         | 29         | 22         | 22         | 17         |
| <b>Jumlah</b>          | <b>266</b> | <b>266</b> | <b>266</b> | <b>266</b> | <b>266</b> |

Sumber: Dinas PMD Kab. Timor Tengah Selatan Tahun 2025

Dari Tabel 2.29 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum ada desa yang terkategori Desa Mandiri tetapi selama 3 tahun terakhir perkembangan Desa Maju dan Desa Berkembang mengalami peningkatan walaupun belum signifikan.

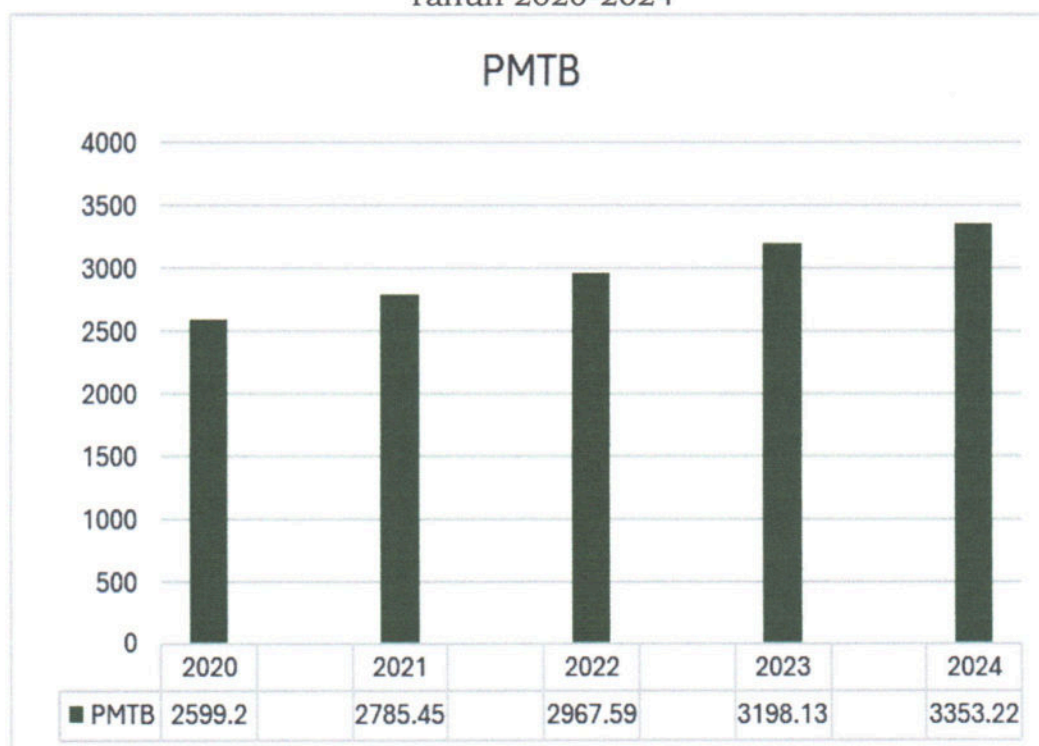


### 2.3.6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global memiliki dampak signifikan terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di daerah. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah indikator ekonomi yang mencerminkan investasi dalam aset tetap yang digunakan untuk produksi barang dan jasa dalam jangka panjang. Peningkatan PMTB menandakan bahwa suatu daerah atau negara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sehat, karena lebih banyak sumber daya dialokasikan untuk pengembangan kapasitas produksi. Sebaliknya, rendahnya PMTB dapat mengindikasikan kurangnya investasi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Nilai PMTB Kabupaten TTS tahun 2020 sebesar 2.599,20, mengalami peningkatan sampai tahun 2024 menjadi 3.353,22. Nilai PMTB Kabupaten TTS dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.40  
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten TTS  
Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025

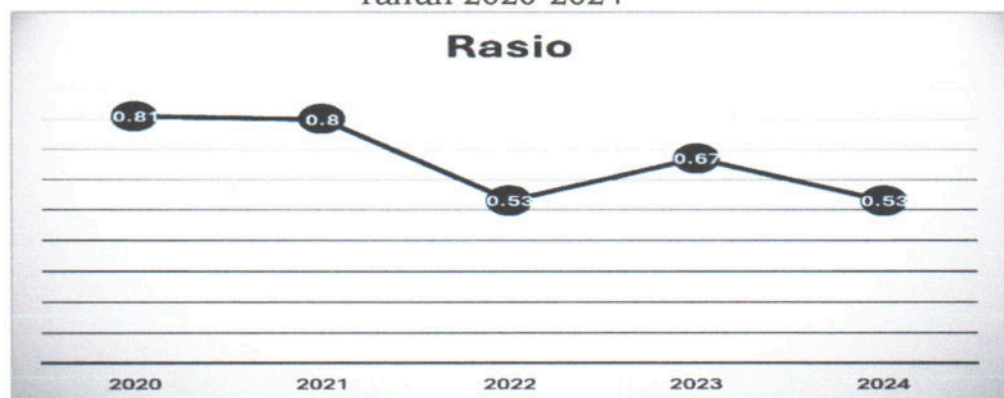


### 2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

#### a. Rasio pajak daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap perekonomian suatu wilayah. Semakin tinggi rasio pajak daerah terhadap PDRB, semakin besar kontribusi pajak dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB ADHB di Kabupaten TTS tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.41  
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB di Kabupaten TTS  
Tahun 2020-2024



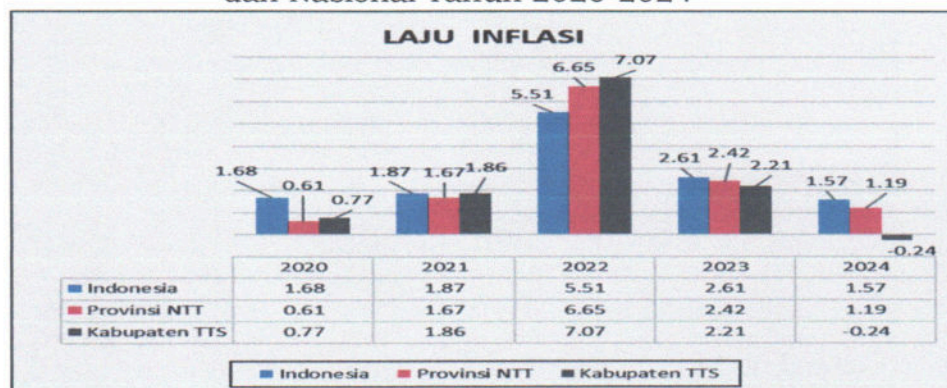
Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB Kabupaten TTS tahun 2020-2024 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif.

#### b. Laju Inflasi

Laju inflasi berperan penting dalam hubungan antara stabilitas ekonomi makro dan rasio pajak daerah terhadap PDRB. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi dan memastikan stabilitas harga barang serta jasa, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat menggerus daya beli dan meningkatkan biaya produksi bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat mengurangi penerimaan pajak daerah akibat menurunnya aktivitas ekonomi. Kabupaten TTS pada Tahun 2024 mengalami deflasi 0,24% yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.42  
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten TTS, Provinsi NTT  
dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

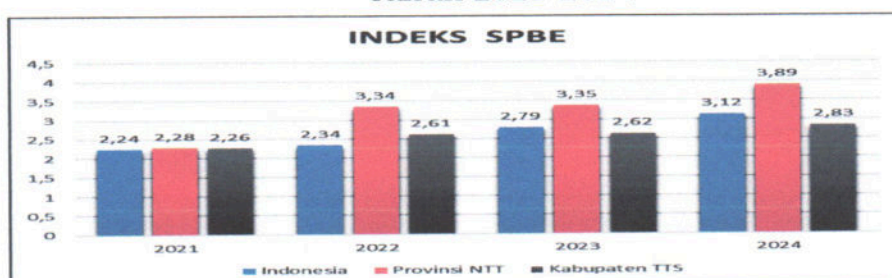
## 2.4 Aspek Pelayanan Umum

### 2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

#### 2.4.1.1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Berdasarkan data selama 3 tahun terakhir, nilai Indeks SPBE Kabupaten TTS mengalami peningkatan setiap tahun, namun masih berada di bawah nilai provinsi dan nasional. Pada tahun 2021 sebesar 2,26 berada pada kategori Cukup (rentang nilai 1,8–2,6), sedangkan tahun 2022, 2023 dan 2024 berada pada kategori Baik (rentang nilai 2,6–3,5).

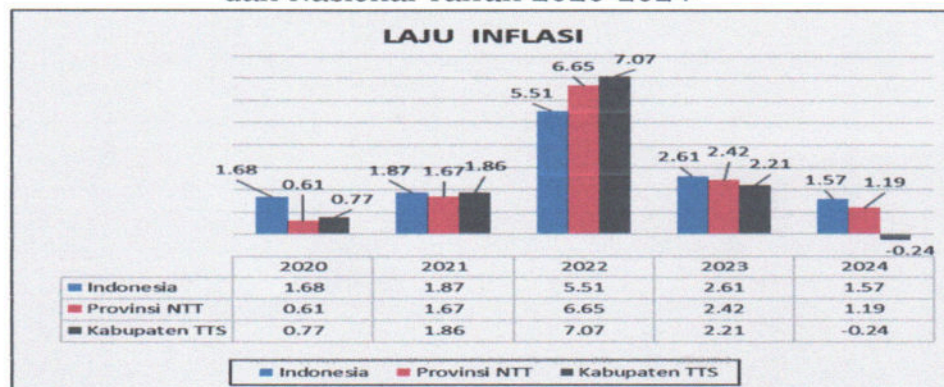
Gambar 2.43  
Nilai SPBE Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2021-2024



Sumber: Kemenpan RB Tahun 2025 (diolah)



Gambar 2.41  
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten TTS, Provinsi NTT  
dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka Tahun 2025 (diolah)

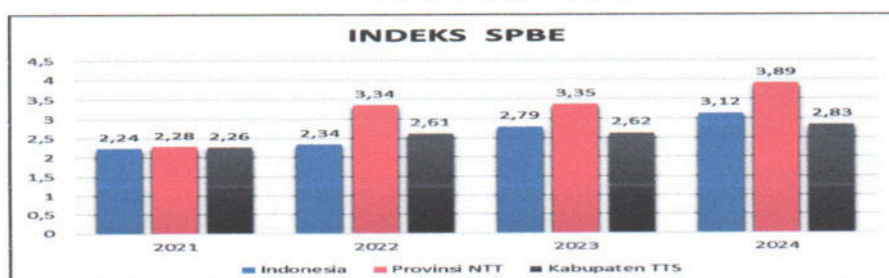
## 2.4 Aspek Pelayanan Umum

### 2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

#### 2.4.1.1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Berdasarkan data selama 3 tahun terakhir, nilai Indeks SPBE Kabupaten TTS mengalami peningkatan setiap tahun, namun masih berada di bawah nilai provinsi dan nasional. Pada tahun 2021 sebesar 2,26 berada pada kategori Cukup (rentang nilai 1,8–2,6), sedangkan tahun 2022, 2023 dan 2024 berada pada kategori Baik (rentang nilai 2,6–3,5).

Gambar 2.42  
Nilai SPBE Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2021-2024



Sumber: Kemenpan RB Tahun 2025 (diolah)



#### **2.4.1.2. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Indeks SAKIP merupakan hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dasar penilaian mangacu pada 4 komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kabupaten TTS selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan nilai SAKIP. Pada tahun 2021-2022 nilai SAKIP Kabupaten TTS berada pada kategori Cukup (rentang nilai >50-60) sedangkan pada tahun 2023 nilai SAKIP meningkat sehingga berada pada kategori Baik (rentang nilai >60-70).

#### **2.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik**

Berdasarkan PermenPAN RB No. 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia. Penilaian ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi. Penyusunan indikator IPP dilakukan berdasarkan enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan enam aspek penilaian kinerja instansi dalam pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan). Kabupaten TTS pada tahun 2021 mendapatkan nilai IPP dengan kategori C- (Cukup dengan catatan).





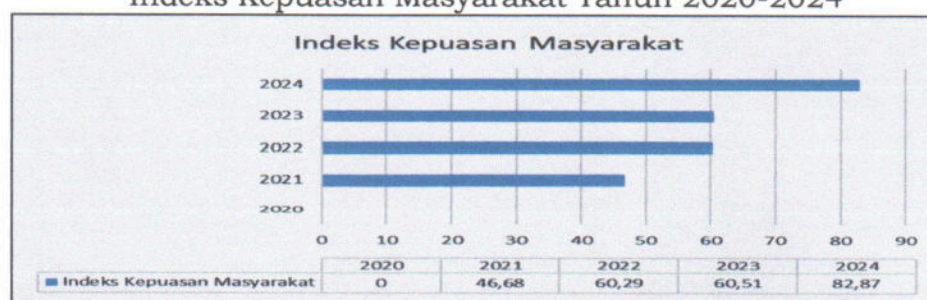
#### 2.4.1.4. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional digunakan untuk menilai tingkat integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Indeks ini bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan memperbaiki praktik antikorupsi, serta mendorong terciptanya budaya integritas di sektor publik. Dengan adanya indeks ini, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, jujur, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Indeks Integritas Nasional Kabupaten TTS pada tahun 2025 yang ditetapkan sebagai baseline dengan capaian sebesar 70.83 dengan target capaian tahun 2045 sebesar 80,83. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik.

#### 2.4.1.5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu Perangkat Daerah. Nilai IKM didapatkan dari hasil survei yang mengukur pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diterima, dibandingkan dengan harapan masyarakat. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan indeks ini disurvei dari Ombudsman dari tahun 2021-2024 dan diketahui tahun 2024 mendapatkan nilai 82,57 dengan kategori Kualitas Tinggi.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.44  
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024



Sumber : Ombudsman Tahun 2025 (diolah)



#### **2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial**

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi substansial adalah tiga pilar penting dalam pembangunan suatu daerah. Hukum berkeadilan memastikan penegakan hukum yang adil dan setara bagi masyarakat. Keamanan nasional yang tangguh melindungi negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Demokrasi substansial menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan mendukung terwujudnya suatu negara dan atau daerah yang aman, adil, dan sejahtera.

##### **2.4.2.1. Persentase Penegakan Perda**

Persentase penegakan Perda di Kabupaten TTS selama periode 2019-2024 belum dapat dilaksanakan secara maksimal setiap tahun. Untuk pelaksanaan ini membutuhkan kerjasama antara Perangkat Daerah teknis dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab pada Perda yang ada. Jumlah Perda dari tahun 2020-2024 sebanyak 30 Perda.

##### **2.4.2.2. Indeks Demokrasi Indonesia**

Indeks Demokrasi (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Tingkat pencapaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Saat ini, pengukuran IDI hanya dilakukan pada tingkat nasional dan provinsi, sehingga dalam pengukurannya Kabupaten TTS menggunakan indikator pembentuknya antara lain adalah proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, dengan data *baseline* tahun 2025 sebesar 67,25% dan target 2045 sebesar 99%.



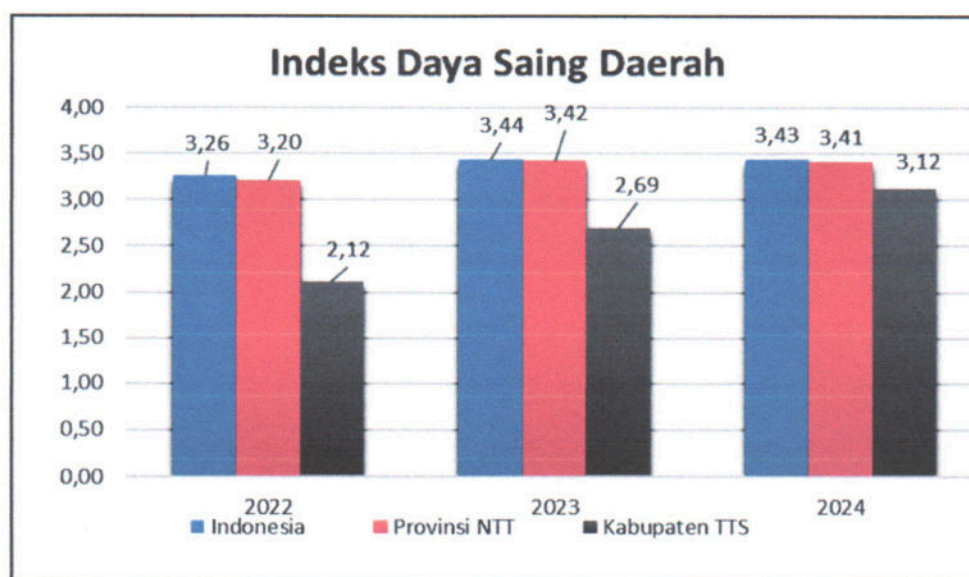


### 2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

#### 2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, nilai IDSD Kabupaten TTS mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, nilai IDSD sebesar 2,12 berada pada kategori Sedang (rentang nilai 1,26–2,5), sedangkan pada tahun 2023 nilai IDSD sebesar 2,69 serta tahun 2024 dengan nilai 3,12 berada pada kategori Tinggi (rentang nilai 2,51–3,75). Nilai IDSD Kabupaten TTS masih berada di bawah nilai IDSD Provinsi NTT dan Indonesia.

Gambar 2.45  
Nilai IDSD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia  
Tahun 2022-2024



Sumber: BRIN Tahun 2025 (diolah)

#### 2.4.4. Kinerja Urusan Setiap Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kunci Kabupaten TTS tahun 2020-2024 meliputi 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Capaian IKK dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.33  
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten TTS  
Tahun 2020-2024

| Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                    | Satuan | Kondisi<br>Awal<br>RPJMD-P<br>2020 | Capaian            |                    |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                                                                                                             |        |                                    | 2021               | 2022               | 2023               | 2024           |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT                                                                              |        |                                    |                    |                    |                    |                |
| Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan                                                                          |        |                                    |                    |                    |                    |                |
| Ekonomi                                                                                                     |        |                                    |                    |                    |                    |                |
| Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian |        |                                    |                    |                    |                    |                |
| Pertumbuhan PDRB                                                                                            | %      | -0,06                              | 2,41               | 3,11               | 3,21               | 3,5            |
| Laju Inflasi                                                                                                | %      | 0,61 (Kota Kupang)                 | 1,86 (Kota Kupang) | 7,07 (Kota Kupang) | 2,21 (Kota Kupang) | 0,24 (Deflasi) |
| Persentase Penduduk Miskin                                                                                  | %      | 27,49                              | 26,64              | 25,45              | 25,18              | 24,68          |
| Indeks Pembangunan Manusia                                                                                  | %      | 62,15                              | 63,97              | 64,54              | 65,39              | 66,22          |
| Indeks Kepuasan Masyarakat :                                                                                |        |                                    |                    |                    |                    |                |
| Pelayanan RSUD                                                                                              | %      | N/A                                | 80,79              | 82,96              | 85,70              | 86,90          |
| Persentase Layanan Adminduk/Capilduk                                                                        | %      | 100                                | 100                | 100                | 100                | 100            |
| Pelayanan Kepegawaian/ BKPP                                                                                 | %      | 81                                 | 100                | 100                | 100                | 100            |
| Persentase layanan perijinan /DPMP2TSP                                                                      | %      | 81                                 | 100                | 100                | 100                | 100            |
| Pelayanan perpajakan/ Bapenda                                                                               | %      | 81                                 | 100                | 100                | 100                | 100            |
| Fokus Kesejahteraan Sosial                                                                                  |        |                                    |                    |                    |                    |                |
| Kesehatan                                                                                                   |        |                                    |                    |                    |                    |                |
| Prevalensi Anak Stunting                                                                                    | %      | 40,6                               | 32,1               | 28,3               | 22,3               | 56,8           |
| ASPEK PELAYANAN UMUM                                                                                        |        |                                    |                    |                    |                    |                |
| Pelayanan Urusan Umum                                                                                       |        |                                    |                    |                    |                    |                |
| Terkait Pelayanan Dasar                                                                                     |        |                                    |                    |                    |                    |                |
| Pendidikan                                                                                                  |        |                                    |                    |                    |                    |                |
| Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                                                             |        |                                    |                    |                    |                    |                |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) :                                                                             |        |                                    |                    |                    |                    |                |
| SD/Mi                                                                                                       | %      | 98,27                              | 114,01             | 117,05             | 115,88             | 109,68         |
| SMP/MTs                                                                                                     | %      | 95,23                              | 85,86              | 94,46              | 89,72              | 87,25          |
| Angka Partisipasi Murni (APM) :                                                                             |        |                                    |                    |                    |                    |                |
| SD/Mi / Paket A                                                                                             | %      | 96,13                              | 96,13              | 113,39             | 98,54              | 95,6           |
| SMP/MTs/Paket B                                                                                             | %      | 66,50                              | 67,01              | 70,17              | 60,67              | 64,99          |





| Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                  | Satuan                   | Kondisi<br>Awal<br>RPJMD-P<br>2020 | Capaian     |             |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                                                                                                                           |                          |                                    | 2021        | 2022        | 2023        | 2024    |
| Rasio ketersediaan<br>sekolah/penduduk<br>usia sekolah<br>Pendidikan SD/Mi                                                | Rasio                    | 0,103                              | 0.097916667 | 0.100694444 | 0.101388889 | 0,997   |
| Rasio ketersediaan<br>sekolah/penduduk<br>usia sekolah<br>Pendidikan<br>SMP/MTs                                           | Rasio                    | 01:42                              | 01:54       | 01:59       | 0.084722222 | 0,89    |
| Rasio<br>Guru/Murid<br>pendidikan SD/Mi                                                                                   | Rasio                    | 01:09                              | 01:08       | 01:08       | 01:09       | 01:12   |
| Rasio<br>Guru/Murid<br>pendidikan<br>SMP/MTs                                                                              | Rasio                    | 01:45                              | 01:06       | 01:08       | 01:10       | 01:02   |
| Angka Pendidikan<br>yang ditamatkan                                                                                       | %                        | 100                                | 77,67       | 80,87       | 81,68       | 100     |
| Penduduk yang<br>berusia >15<br>Tahun melek<br>huruf (tidak buta<br>aksara)                                               | %                        | 88,77                              | 87,76       | 95,55       | 89,78       | 92,35   |
| Guru yang<br>memenuhi<br>kualifikasi S1/D-<br>IV                                                                          | %                        | 65,15                              | 70,89       | 67,49       | 63,34       | 73,3    |
| <b>Kesehatan</b>                                                                                                          |                          |                                    |             |             |             |         |
| Kasus Kematian<br>Neonatal dan Bayi                                                                                       | Kasus                    | 109                                | 101         | 100         | 82          | 73      |
| Angka Kematian<br>Balita                                                                                                  | 1:1000<br>KH             | 20                                 | 8,00        | 7           | 7           | 4       |
| Angka Kematian<br>Ibu                                                                                                     | Ibu/Per<br>100.000<br>KH | 14                                 | 17          | 15          | 11          | 20      |
| Tingkat Kepuasan<br>Layanan<br>Kesehatan Rumah<br>Sakit Umum<br>Daerah                                                    | %                        | N/A                                | 80,79       | 82,96       | 85,70       | 86,90   |
| Rasio Dokter per<br>Satuan Penduduk                                                                                       | Rasio                    | 01:11.1                            | 01:10.0     | 01:10.0     | 01:11.0     | 01:18.0 |
| Rasio Tenaga<br>kesehatan per<br>Satuan Penduduk                                                                          | Rasio                    | 01:08.3                            | 01:08.0     | 01:08.0     | 01:08.0     | 01:08.0 |
| Cakupan<br>Desa/Kelurahan<br>Universal Child<br>Imunization (UCI)                                                         | %                        | 81,30                              | 67,60       | 64,7        | 91          | 38,8    |
| Pelayanan<br>kesehatan orang<br>dengan resiko<br>terinfeksi virus<br>yang melemahkan<br>daya tahan tubuh<br>manusia (HIV) | %                        | 95                                 | 63,50       | 65,5        | 73,7        | 70,1    |





| Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah  | Satuan         | Kondisi<br>Awal<br>RPJMD-P<br>2020 | Capaian |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|                                                                           |                |                                    | 2021    | 2022  | 2023  | 2024  |
| Cakupan pelayanan penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standart   | %              | 80                                 | 58,90   | 64,89 | 72,4  | 82,05 |
| Bayi mendapat ASI Eksklusif                                               | %              | 79,10                              | 78,3    | 82    | 83,5  | 76,3  |
| Proporsi Ibu Hamil KEK mendapatkan PMT                                    | %              | 100                                | 100     | 100   | 93,36 | 65    |
| Usia Harapan Hidup                                                        | Umur/<br>Tahun | 66,42                              | 70,64   | 70,84 | 71,02 | 71,32 |
| <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                  |                |                                    |         |       |       |       |
| Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam)               | %              | 46,17                              | 48,30   | 50,35 | 51,08 | 52,91 |
| Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik                           | %              | 47,69                              | 49,73   | 50,47 | 50,07 | 52,63 |
| Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun (Target 8 Dokumen) | %              | 50                                 | 62,5    | 75    | 75    | 75    |
| Persentase Pemanfaatan Ruang                                              | %              | 100                                | 100     | 100   | 100   | 100   |
| <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>                            |                |                                    |         |       |       |       |
| Persentase penduduk berakses air minum                                    | %              | 53                                 | 59,23   | 59,59 | 60,93 | 61,90 |
| Rumah Tangga Pengguna Listrik                                             | %              | 56,93                              | 70,62   | 79,20 | 82,99 | 87,67 |
| Cakupan ketersediaan rumah layak huni                                     | %              | 63,70                              | 63,99   | 64,63 | 64,68 | 64,86 |
| Rasio Rumah Layak Huni                                                    | Rasio          | 0,162                              | 0,164   | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi layak                                | %              | 60,04                              | 60,40   | 61,07 | 61,82 | 63,08 |
| <b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>           |                |                                    |         |       |       |       |
| Persentase Penegakan Peraturan Daerah                                     | %              | 100                                | 100     | 100   | 100   | 100   |
| Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran                                       | %              | 4,92                               | 4,92    | 4,92  | 4,92  | 4,92  |







| Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                           | Satuan                 | Kondisi<br>Awal<br>RPJMD-P<br>2020 | Capaian |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                    |                        |                                    | 2021    | 2022  | 2023  | 2024  |
| Sosial                                                                                                                             |                        |                                    |         |       |       |       |
| Persentase PMKS<br>Yang tertangani                                                                                                 | %                      | 64                                 | 68      | 76    | 100   | 94    |
| Jumlah<br>penyandang cacat<br>fisik dan mental,<br>serta lanjut usia<br>tidak potensia<br>yang telah<br>menerima<br>jaminan sosial | %                      | 12                                 | 15      | 27    | 29    | 36    |
| Persentase<br>Korban Bencana<br>yang menerima<br>Bantuan Sosial<br>selama Masa<br>Tanggap Darurat                                  | %                      | 100                                | 100     | 100   | 100   | 100   |
| Fokus Pelayanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar                                                                                 |                        |                                    |         |       |       |       |
| Tenaga Kerja                                                                                                                       |                        |                                    |         |       |       |       |
| Persentase<br>Angkatan Kerja                                                                                                       | %                      | 98,30                              | 78,59   | 82,44 | 83,13 | 87,41 |
| Tingkat<br>Pengangguran<br>Terbuka                                                                                                 | %                      | 2,63                               | 2,57    | 1,99  | 2,64  | 2,63  |
| Angka Partisipasi<br>Angkatan Kerja<br>Perempuan                                                                                   | %                      | 94                                 | 96      | 98,31 | 95,97 | 97,77 |
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                       |                        |                                    |         |       |       |       |
| Persentase KDRT<br>yang ditangani                                                                                                  | %                      | 100                                | 100     | 100   | 100   | 100   |
| Indeks<br>Pembangunan<br>Gender (IPG)                                                                                              | Point                  | 95,36                              | 94,95   | 95,17 | 95,56 | 95,96 |
| Indeks<br>Pemberdayaan<br>Gender (IDG)                                                                                             | Point                  | 59,53                              | 60,08   | 60,59 | 59,72 | 52,73 |
| Jumlah<br>Desa/Kelurahan<br>Persiapan Menuju<br>Kategori Layak<br>Anak                                                             | Desa/<br>kelura<br>han | 7                                  | 9       | 6     | 7     | 5     |
| Ketahanan Pangan                                                                                                                   |                        |                                    |         |       |       |       |
| Pola Pangan<br>Harapan                                                                                                             | Skor                   | 94,3                               | 81      | 75,2  | 80,5  | 75,9  |
| Lingkungan Hidup                                                                                                                   |                        |                                    |         |       |       |       |
| Jumlah Sampah<br>yang Diolah                                                                                                       | Ton                    | 30                                 | 60      | 54    | 42    | 54    |
| Dokumen<br>Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup                                                                                         | Dok.                   | 1                                  | 1       | 1     | 1     | 1     |



| Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                             | Satuan         | Kondisi<br>Awal<br>RPJMD-P<br>2020 | Capaian |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                      |                |                                    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil                                                          |                |                                    |         |         |         |         |
| Persentase<br>Penerbitan KTP                                                                         | %              | 83,89                              | 93,01   | 91,94   | 97,58   | 97,58   |
| Persentase<br>Penduduk ber<br>Kartu Keluarga                                                         | %              | 69,91                              | 75      | 99,41   | 99,95   | 99,95   |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                     |                |                                    |         |         |         |         |
| Jumlah BUMDES<br>aktif                                                                               | Bumde<br>s     | 96                                 | 45      | 43      | 112     | 51      |
| Persentase Desa<br>Mandiri                                                                           | %              | 1,50                               | 2       | -       | -       | -       |
| Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                         |                |                                    |         |         |         |         |
| Laju<br>Pertumbuhan<br>Penduduk (LPP)                                                                | %              | -2,69                              | 0,42    | 0,03    | 0,41    | 2,75    |
| Perhubungan                                                                                          |                |                                    |         |         |         |         |
| Rasio Ijin Trayek                                                                                    | Rasio          | 0,00028                            | 0,00028 | 0,00028 | 0,00028 | 0,00028 |
| Persentase Uji KIR<br>Angkutan Umum<br>(Target 4.870<br>Unit)                                        | %              | 68,56                              | 86,53   | 79,90   | 68,91   | 67,33   |
| Persentase<br>Kepemilikan KIR                                                                        | %              | 31,44                              | 15,32   | 22,07   | 15,85   | 16,41   |
| Persentase sarana<br>prasarana dan<br>fasilitas LLAJ<br>dalam kondisi<br>baik (Target 1.379<br>Unit) | %              | 89,12                              | 90,57   | 90,57   | 90,57   | 90,57   |
| Komunikasi dan Informatika                                                                           |                |                                    |         |         |         |         |
| Persentase Luas<br>Layanan<br>Telekomunikasi<br>(3. 955, 36 Ha)                                      | %              | 27,51                              | 34,51   | 34,76   | 35,27   | 52      |
| Capaian Nilai<br>Indeks SPBE                                                                         | Indeks         | 1,27                               | 2,26    | 2,61    | 2,62    | 2,83    |
| Persentase<br>Aplikasi<br>Website/Aplikasi<br>Layanan Publik<br>Yang Berfungsi<br>Baik (25 Website)  | %              | 76                                 | 76      | 88      | 92      | 96      |
| Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                                                                    |                |                                    |         |         |         |         |
| Persentase<br>Koperasi Aktif                                                                         | %              | 32                                 | 32      | 32      | 32      | 32      |
| Penanaman Modal                                                                                      |                |                                    |         |         |         |         |
| Jumlah Nilai<br>Investasi Berskala<br>Nasional<br>(PMDN/PMA)                                         | Rp<br>(miliar) | 18,1                               | 88,82   | 109,87  | 77,58   | 64,06   |
| Jumlah Investor<br>Berskala Nasional<br>(PMDN/PMA)                                                   | Investo<br>r   | 21                                 | 176     | 109     | 141     | 105     |







| Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                        | Satuan | Kondisi<br>Awal<br>RPJMD-P<br>2020 | Capaian |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------|------|-------|-------|
|                                                                                                                 |        |                                    | 2021    | 2022 | 2023  | 2024  |
| Kepemudaan dan Olahraga                                                                                         |        |                                    |         |      |       |       |
| Jumlah Atlet Berprestasi                                                                                        | Orang  | 56                                 | 56      | 91   | 91    | 91    |
| Cakupan Pembinaan Olahraga                                                                                      | %      | 62                                 | 62      | 62   | 62    | 62    |
| Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif                                                                     | %      | 4                                  | 0       | 3    | 3     | 3     |
| Persentase Wirausaha Muda                                                                                       | %      | 2                                  | 0       | 2    | 2     | 2     |
| Persandian                                                                                                      |        |                                    |         |      |       |       |
| Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (4 Perangkat Daerah) | %      | 50                                 | 50      | 50   | 50    | 100   |
| Indeks Kematangan Keamanan Informasi                                                                            | Level  | 0                                  | 3       | 3    | 3     | 3     |
| Kebudayaan                                                                                                      |        |                                    |         |      |       |       |
| Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya                                                                        | Kali   | 1                                  | 0       | 0    | 1     | 1     |
| Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan                                                  | Situs  | 7                                  | 5       | 5    | 7     | 5     |
| Perpustakaan                                                                                                    |        |                                    |         |      |       |       |
| Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun                                                                        | Orang  | 2.374                              | 2.374   | 2.32 | 3.666 | 3     |
| Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah                                                               | Judul  | 30                                 | 2       | 2    | 26.75 | 26.75 |
| Kearsipan                                                                                                       |        |                                    |         |      |       |       |
| Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku                                                    | %      | 35,30                              | 25      | 25   | 50    | 50    |





| Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah  | Satuan   | Kondisi<br>Awal<br>RPJMD-P<br>2020 | Capaian           |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                           |          |                                    | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri                                  |          |                                    |                   |                   |                   |                   |
| Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Hak pilih Dalam Pemilu | %        | 75                                 | 75                | 75                | 75                | 75                |
| Fokus Pelayanan Urusan Pilihan                                            |          |                                    |                   |                   |                   |                   |
| Pariwisata                                                                |          |                                    |                   |                   |                   |                   |
| Jumlah Kunjungan Wisata:                                                  |          |                                    |                   |                   |                   |                   |
| Domestik                                                                  | Orang    | 39.8                               | 22.501            | 21.247            | 24.774            | 18.761            |
| Mancanegara                                                               | Orang    | 35                                 | 0                 | 3                 | 140               | 75                |
| Rata-rata lama Tinggal Wisatawan                                          | Hari     | 2                                  | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| Pertanian                                                                 |          |                                    |                   |                   |                   |                   |
| Nilai Tukar Petani                                                        | %        | 95,93                              | 95,22             | 95,41             | 96,83             | 99,60             |
| Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB                                 | %        | 44,11                              | 44,63             | 45,64             | 45,93             | 46,64             |
| Perdagangan                                                               |          |                                    |                   |                   |                   |                   |
| Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB                               | %        | 5,97                               | 6,13              | 6,43              | 6,73              | 7,09              |
| Perindustrian                                                             |          |                                    |                   |                   |                   |                   |
| Ketransmigrasian                                                          |          |                                    |                   |                   |                   |                   |
| Peningkatan kualitas dan pendapatan warga translok                        | Orang    | 350                                | 60                | 60                | 60                | 60                |
| Perikanan                                                                 |          |                                    |                   |                   |                   |                   |
| Produksi Perikanan Budidaya                                               | Ton      | 401,4                              | 556               | 560               | 562               | 570,20            |
| Produksi Perikanan Tangkap                                                | Ton      | 395,40                             | 392,70            | 420,1             | 648,20            | 708,40            |
| Penunjang Urusan Pemerintahan                                             |          |                                    |                   |                   |                   |                   |
| Perencanaan                                                               |          |                                    |                   |                   |                   |                   |
| Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD                        | %        | 95                                 | 100               | 100               | 100               | 100               |
| Keuangan                                                                  |          |                                    |                   |                   |                   |                   |
| Penetapan APBD tepat waktu                                                | Ya/Tidak | Ya                                 | Ya                | Ya                | Ya                | Ya                |
| Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan                                       | Opini    | WTP                                | WTP               | WTP               | WTP               | WTP               |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                              | Rp.      | 64.192.990.192,85                  | 65.657.453.733,66 | 46.784.070.870,36 | 63.315.176.817,02 | 54.339.058.986,18 |







| Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/ Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Satuan   | Kondisi<br>Awal<br>RPJMD-P<br>2020 | Capaian |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|                                                                          |          |                                    | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   |
| Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan                               |          |                                    |         |        |        |        |
| Penelitian dan Pengembangan                                              |          |                                    |         |        |        |        |
| Pengawasan                                                               |          |                                    |         |        |        |        |
| Tindak Lanjut<br>Hasil Temuan                                            | %        | 55,35                              | 62      | 65     | 76,53  | 75     |
| Setwan                                                                   |          |                                    |         |        |        |        |
| Dokumen PERDA<br>inisiatif                                               | Dok      | 1                                  | 1       | 2      | 1      | 0      |
| Setda                                                                    |          |                                    |         |        |        |        |
| Nilai hasil evaluasi<br>SAKIP                                            | Predikat | CC                                 | C       | C      | B      | B      |
| Nilai capaian<br>kinerja LPPD                                            | Skor     | 26,184                             | 25,272  | 25,272 | 25,272 | 25,272 |
| Persentase Paket<br>yang di lelang<br>secara ONLINE                      | %        | 100                                | 100     | 100    | 100    | 100    |

Berdasarkan data tabel di atas terkait capaian IKK Kabupaten TTS tahun 2020-2024, maka dapat diuraikan capaian setiap urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

#### 1. Capaian IKK Urusan Pendidikan

Partisipasi warga negara dalam setiap jenjang pendidikan maupun dalam penyetaraan menjadi salah satu unsur penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, untuk menjembatani masyarakat yang tertinggal dalam sistem pendidikan formal maka dilakukan melalui penyetaraan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kedua dalam meningkatkan taraf hidupnya. Beberapa faktor lain yang turut mendukung dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pada setiap jenjang pendidikan adalah ketersediaan sarana prasarana sekolah yang memadai, ketersediaan guru maupun kualitas guru. Capaian kinerja pada urusan pendidikan di Kabupaten TTS dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu:





### 1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK),

Angka Partisipasi Kasar adalah ukuran yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam suatu jenjang pendidikan, tanpa memperhitungkan usia ideal untuk jenjang tersebut. APK dihitung dengan membandingkan jumlah siswa (berapapun usianya) yang terdaftar pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk yang seharusnya berada pada usia tersebut.

Berdasarkan data capaian, maka APK SD/MI Kabupaten TTS berfluktuasi dan berada di atas 100% dan hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang tersebut atau banyak anak di luar usia sekolah yang bersekolah. Sementara untuk jenjang SMP/MTs menunjukkan capaian antara 85,86-95,23%. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah rendah atau terdapat anak usia sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs atau diluar usia sekolah tersebut yang tidak bersekolah.

1.2. Angka Partisipasi Murni (APM), digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Nilai idealnya adalah 100%, namun berdasarkan data capaian untuk SD/MI menunjukkan berfluktuasi antara 98,13-113,39. Pada tahun 2020-2021 dan 2023 tidak mencapai 100% yang berarti bahwa masih terdapat 1,5-3,9% anak usia SD/MI yang tidak bersekolah. Sementara untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga berada di bawah 100% (berfluktuasi antara 60,67-70,17%). Menunjukkan bahwa terdapat 29,2-39,3% anak usia sekolah SMP/MTs yang tidak bersekolah.





## 2. Capaian IKK Urusan Kesehatan

Pemerintah dan pemerintah daerah berupaya untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, memastikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mencegah dan mengendalikan penyakit melalui kebijakan yang efektif. Capaian kinerja urusan kesehatan Kabupaten TTS diantaranya dapat dilihat melalui 15 indikator, diantaranya kasus kematian neonatal dan bayi yang terus menurun sejak tahun 2020 sebanyak 109 kasus menjadi 73 kasus di 2024. Hal ini perlu terus dipertahankan agar terus menurun. Angka kematian balita juga menunjukkan tren yang sama yaitu 20 kasus di 2020 dan terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 4. Indikator lainnya Usia Harapan Hidup yang juga terus meningkat dari tahun 2020 yaitu 66,42 menjadi 71,32 di tahun 2024.

## 3. Capaian IKK Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Dalam bidang pekerjaan umum, pemerintah daerah bertanggungjawab atas pembangunan serta pemeliharaan jalan kabupaten, sistem drainase, jaringan irigasi, penyediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi lingkungan. Sementara dalam penataan ruang, kewenangan daerah meliputi penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna memastikan pemanfaatan lahan yang tertib, berkelanjutan dan sesuai dengan peruntukannya.

Capaian IKK urusan PUPR yang meliputi jalan kabupaten, jaringan irigasi, akses air minum dan sanitasi. Kinerja ke-4 indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, namun belum optimal. Indikator jalan kabupaten dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2024 mencapai 52,91% (664,629 km dari panjang jalan kabupaten sepanjang 1.256.15 km). Indikator irigasi kabupaten dalam kondisi baik selalu meningkat juga, namun belum optimal. Data tahun 2024 mencapai 52,63% (3.164.12 Ha dari Luas irigasi kabupaten sesuai Permen PUPR Nomor 14/2015 seluas 6.012 Ha). Indikator



persentase penduduk berakses air minum layak juga selalu meningkat setiap tahun, namun belum optimal. Capaian sampai tahun 2024 sebesar 61,90% (303.707 jiwa dari jumlah penduduk 2024 sebanyak 490.642 jiwa). Cakupan akses ini perlu ditingkatkan karena berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 bahwa akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%. Indikator persentase rumah tinggal bersanitasi layak pada tahun 2024 mencapai 63,08%. Capaian indikator ini juga perlu ditingkatkan mengingat sanitasi dan juga air minum merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum. Target nasional khusus untuk sanitasi layak di tahun 2024 adalah 90%.

4. Capaian IKK Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP)

Urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkaitan dengan penyediaan hunian yang layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk membangun maupun meningkatkan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya dilakukan melalui program seperti bantuan rumah subsidi, rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pemerintah daerah berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan hunian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Cakupan ketersediaan rumah layak huni terus meningkat dan tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 64,86% (75.190 Kepala keluarga dari jumlah KK 2024 sebesar 137.481 KK).

5. Capaian IKK Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi kehidupan masyarakat. Fungsi utamanya mencakup penegakan peraturan daerah, pengelolaan keamanan lingkungan, serta upaya mitigasi







terhadap potensi gangguan sosial yang dapat mengancam stabilitas wilayah. Melalui peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan perangkat keamanan lainnya, pemerintah daerah memastikan bahwa regulasi daerah dipatuhi, termasuk dalam hal ketertiban umum, penataan kawasan, dan pengendalian konflik sosial. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui sistem respons cepat terhadap keadaan darurat seperti bencana, tindak kriminal, atau gangguan sosial lainnya. Beberapa indikator yang dipakai adalah persentase penegakan perda dengan capaian setiap tahunnya adalah 100%; persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat juga selalu 100 % setiap tahunnya.

#### 6. Capaian Kinerja IKK Urusan Sosial

Kebijakan sosial yang mencakup perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran dan kesejahteraan anak juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehubungan dengan maka program-program seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi kelompok marginal menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, organisasi sosial, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan sosial dapat berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti merupakan kewenangan Kabupaten. Indikator pada urusan ini meliputi persentase PMKS yang tertangani, capaiannya cenderung meningkat sejak 2020 sebesar 64% hingga 2023 mencapai 100%, namun di tahun 2024 menurun menjadi 94%. Indikator lainnya adalah jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah





menerima jaminan sosial menunjukkan capaian yang terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 12% menjadi 36% di tahun 2024. Capaian ini meningkat namun peningkatannya belum optimal sehingga perlu ditingkatkan.

7. Capaian Kinerja IKK Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, fasilitasi penempatan dan kesempatan kerja, serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga diharapkan juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator pada urusan ini meliputi persentase angkatan kerja sejak tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan. Capaiannya berfluktuasi 78,59–98,30%. Persentase angkatan kerja tertinggi adalah di tahun 2020 yaitu sebesar 98,30%. Capaian ini menunjukkan bahwa terdapat 1,7% penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau sementara tidak bekerja. Sementara data tahun 2024 menunjukkan 87,41%. Indikator berikutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami penurunan. Secara kumulatif rata-rata per tahun 0,03. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir peningkatan TPT dimulai sejak tahun 2022 karena adanya dampak dari Pandemi Covid-19.

8. Capaian IKK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berperan penting dalam meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perlindungan hak perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan adalah melalui pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak dan perempuan, penyediaan layanan dan fasilitas pendukung bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Indikator pada urusan ini meliputi: Persentase KDRT yang ditangani selalu







diupayakan tuntas (100%) terhadap semua pengaduan yang disampaikan. Indikator berikutnya adalah indeks pembangunan gender (IPG). IPG Kabupaten TTS terus meningkat sejak tahun 2021-2024 dengan capaian 2024 adalah sebesar 95,96%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Indeks lainnya adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Variabel-variabel yang digunakan dalam pengukuran IDG adalah peran perempuan di parlemen, kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga dan peran perempuan sebagai tenaga profesionalisme. Data 2020-2022 menunjukkan kenaikan, namun sejak 2022-2024 mengalami penurunan. Faktor penurunannya terdapat pada 2 komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional sedangkan komponen sumbangan pendapatan perempuan cenderung menurun (diukur menggunakan perbandingan upah buruh laki-laki dan perempuan pada sektor non pertanian).

#### 9. Capaian IKK Urusan Ketahanan Pangan

Bidang urusan pangan dalam pemerintahan kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat. Indikator kinerja kunci pada urusan ketahanan pangan adalah skor pola pangan harapan (PPH). Skor ini digunakan untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat, dengan skor ideal adalah 100. PPH yang ideal mengarah pada konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Capaian indikator ini berfluktuasi sejak tahun 2020-2024 berkisar antara 75,2-94,3 skor (di tahun 2021). Skor PPH tahun 2024 sebesar 75,9 skor.





#### 10. Capaian IKK Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dan catatan sipil berperan penting dalam pencatatan identitas penduduk dan pencatatan sipil. Terdapat 2 indikator yaitu persentase penerbitan KTP dan persentase penduduk ber Kartu Keluarga, dimana ke-2 indikator ini sejak tahun 2021-2024 mengalami peningkatan.

#### 11. Capaian IKK Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Melalui upaya pemberdayaan ini diharapkan masyarakat desa dapat lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat menjadi desa yang kuat dan berdaya agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan, menciptakan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja urusan ini adalah jumlah BUMDES aktif yang capaiannya berfluktuasi. Capaian 2024 sebanyak 51 bumdes.

#### 12. Capaian IKK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan ini memiliki peran strategis dalam mengendalikan penduduk dan melaksanakan program keluarga berencana (KB) agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengendalikan angka kelahiran, serta memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memadai. Indikator pada urusan ini meliputi Laju Pertumbuhan Penduduk yang capaiannya berfluktuasi dan data tahun 2024 menunjukkan 2,75%.

#### 13. Capaian IKK Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan memiliki peran penting dalam memastikan sistem transportasi yang aman, nyaman, tertib dan berkelanjutan bagi warganya. Melalui perencanaan dan pengelolaan yang baik,







urusan perhubungan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Indikator kinerja pada urusan ini meliputi Rasio Izin Trayek yang capaiannya menunjukkan angka yang flat sejak tahun 2020-2024. Angka rasio ini dipengaruhi oleh jumlah izin trayek terhadap jumlah penduduk. Indikator berikutnya Persentase uji KIR Angkutan umum. Nilai capaian indikator ini juga berfluktuasi, dimana capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 86,53% (sebanyak 4.214 kendaraan). Capaian ini cenderung menurun hingga tahun 2024 sebesar 67,33% (3.278 kendaraan). Capaian tertinggi di tahun 2021 dan 2022 karena pada periode tersebut, laboratorium pengujian yang terakreditasi hanya terdapat di Kabupaten TTS.

#### 14. Capaian IKK Urusan Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Urusan komunikasi dan informatika di tingkat kabupaten memiliki peran penting untuk memastikan keterbukaan informasi, pengelolaan teknologi, serta pemanfaatan komunikasi digital dalam meningkatkan pelayanan publik. Untuk itu maka Kominfo memiliki tugas untuk menyediakan akses informasi yang transparan dan mudah dijangkau masyarakat melalui pengelolaan website resmi, media sosial, serta layanan keterbukaan informasi publik. Harapannya adalah masyarakat dapat memperoleh berita dan kebijakan daerah secara cepat dan akurat. Selain itu, Kominfo juga berperan dalam meningkatkan literasi digital guna mencegah penyebaran hoaks dan misinformasi yang dapat merugikan masyarakat. Capaian indikator kinerja pada urusan ini meliputi persentase luas layanan telekomunikasi dengan capaian yang terus meningkat dari tahun 2020-2024. Data 2024 menunjukkan capaian 52%. Indikator lain adalah capaian nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Capaian indeks ini selalu meningkat setiap tahun sejak tahun 2020-2024. Capaian 2024 adalah 2,83 indeks dengan predikat baik.



## 15. Capaian IKK Urusan Penanaman Modal

Urusan ini berhubungan dengan kemudahan perizinan, menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong masuknya investasi, selain penguatan regulasi dan kebijakan yang ramah investasi hingga mengawasi pelaksanaan kegiatan penanaman modal agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Indikator pada urusan ini meliputi jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), yang capaiannya cenderung berfluktuasi sejak tahun 2020-2024, dengan angka terendah di tahun 2020 sebesar Rp.18,1 miliar dan tertinggi di tahun 2022 sebesar Rp.109,87 miliar. Capaian ini cenderung menurun hingga tahun 2024 sebesar Rp.64,06%. Indikator lainnya adalah jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Capaiannya juga berfluktuasi sejak 2020-2024. Tertinggi adalah pada tahun 2021 sebanyak 176 investor dan terendah adalah di tahun 2020 sebanyak 21 investor. Jumlah investor pada tahun 2024 sebanyak 105 investor, menurun dari tahun 2023 sebanyak 141 investor. Fluktuasi ini menggambarkan adanya dinamika investasi di daerah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, potensi dan kebijakan.

## 16. Capaian IKK Kepemudaan dan Olahraga

Urusan ini meliputi pengembangan pemuda dan olahraga melalui perumusan kebijakan, pemberdayaan pemuda, pembinaan atlet, penyediaan sarana olahraga, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain itu juga memberikan dorongan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam olahraga dan kegiatan kepemudaan guna menciptakan generasi berkualitas dan meningkatkan prestasi daerah. Capaian kinerja urusan pemuda dan olahraga pada 2020-2024 menunjukkan tren yang beragam, mencerminkan tantangan serta peluang dalam pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga daerah. Jumlah atlet berprestasi meningkat sejak tahun 2022 menjadi 91 orang, Sementara cakupan pembinaan olahraga juga menunjukkan capaian yang signifikan tahun 2020-2024 berada pada angka 62%, Angka yang ada ini menunjukkan perlunya







peningkatan program pembinaan atlet, dukungan sarana dan prasarana olahraga, serta kompetisi yang lebih berkelanjutan guna menjaga prestasi daerah baik di tingkat Provinsi maupun nasional. Persentase wirausaha muda tidak mengalami perubahan yang signifikan dan cenderung flat sejak tahun 2020-2024 yaitu 2%, walaupun sempat meningkat cukup drastis di tahun 2023 menjadi 20% hingga menurun kembali di tahun 2024 menjadi 2%. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala dalam akses permodalan, terbatasnya pelatihan kewirausahaan, tidak berkembangnya usaha pasca pelatihan serta perlu adanya pengawasan dan pendampingan bagi pemuda pasca pelatihan maupun pendampingan bagi pemuda yang ingin membangun usaha sendiri.

#### 17. Capaian IKK Urusan Persandian

Urusan ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan informasi dan perlindungan data di lingkungan pemerintahan daerah termasuk mencegah kebocoran data serta melindungi komunikasi pemerintahan dari ancaman siber. Capaian indikator kinerja kunci pada urusan ini meliputi persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (dengan target 4 Perangkat Daerah) dan capaiannya sudah mencapai 100% di tahun 2024. Jumlah Perangkat Daerah akan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Sementara indikator lainnya yaitu indeks kematangan keamanan informasi menunjukkan angka yang flat, walaupun pada tahun 2020 berada di level 0 dan mencapai level 3 sejak tahun 2021.

#### 18. Capaian IKK Kebudayaan

Urusan ini memiliki tanggung jawab dalam melestarikan, mengembangkan dan memajukan kebudayaan daerah sebagai bagian dari identitas dan jati diri bangsa melalui upaya menjaga warisan budaya hingga mendorong inovasi budaya agar tetap relevan di era moderen. Capaian indikator kinerja pada urusan ini meliputi antara lain jumlah benda, situs dan Kawasan Cagar





Budaya yang dilestarikan juga menunjukkan angka capaian yang relatif tidak meningkat secara signifikan. Dimana jumlah cagar budaya yang dilestarikan berjumlah 7 situs sejak tahun 2020.

#### 19. Capaian IKK Perpustakaan

Urusan ini merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan literasi di tingkat daerah, mendukung pendidikan, meningkatkan akses informasi, serta membangun budaya literasi yang kuat di masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perpustakaan berfungsi secara optimal sebagai pusat ilmu pengetahuan yang inklusif dan berdaya guna. Capaian kinerja pada urusan ini diukur melalui dua indikator yaitu jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Indikator pertama menunjukkan minat masyarakat dalam membaca baik melalui akses terhadap buku fisik maupun sumber digital. Capaian indikator ini berfluktuasi selama periode 2020-2023, dimana jumlah pengunjung berkisar 2.320-3.666 orang (pada tahun 2023). Indikator lainnya adalah jumlah koleksi buku yang juga cenderung menurun. Hal ini menjadi tantangan pada urusan ini agar ke depannya dapat berinovasi untuk menciptakan/membuat kegemaran membaca menjadi kebutuhan masyarakat.

#### 20. Capaian IKK Urusan Kearsipan

Kearsipan berfungsi sebagai sistem pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen negara secara tertata dan aman. Pengelolaan kearsipan yang baik dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, menjamin kepastian hukum serta memastikan keberlanjutan informasi bagi generasi mendatang. Fungsi arsip adalah sebagai bukti autentik dari berbagai keputusan dan kebijakan pemerintahan, menjaga memori kolektif bangsa serta mendukung akuntabilitas. Capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat melalui indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Persentase data tahun 2020 menunjukkan 35,30% dan meningkat menjadi 50% di tahun 2023. Arsip yang dikelola







dengan baik akan memastikan transparansi pemerintahan, mendukung akuntabilitas kebijakan, serta menjadi alat bukti yang sah dalam berbagai proses hukum dan administrasi.

#### 21. Capaian IKK Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, menjalin kerja sama bersama forum kerukunan umat beragama, memfasilitasi partai politik serta pendidikan politik bagi masyarakat. Kinerja urusan ini dapat dinilai dari indikator persentase partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu. Capaiannya relatif stabil pada tahun 2020-2024 yaitu 75%.

#### 22. Capaian IKK Pariwisata

Potensi pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan bagi pemerintah daerah bila memiliki potensinya. Pengelolaan pariwisata secara tepat akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hasil kinerja urusan pariwisata di tingkat kabupaten/kota dicerminkan tiga indikator utama, yaitu jumlah kunjungan wisatawan meliputi wisatawan domestik dan mancanegara, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan rata-rata lama tinggal wisatawan. Capaian indikator jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat sejak tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya minat masyarakat dalam berwisata di dalam negeri. Hal ini didukung oleh promosi wisata daerah, peningkatan infrastruktur, serta berbagai event dan program wisata yang menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.





### 23. Capaian IKK Urusan Pertanian

Sektor pertanian sangat memiliki peranan yang penting untuk ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan perekonomian daerah. Agar dapat berfungsi optimal, maka pengelolaannya dilakukan melalui pengembangan teknologi, penyediaan sarana produksi, pendampingan petani maupun penerapan pertanian berkelanjutan. Penilaian kinerja urusan ini dapat diukur antara lain melalui Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB. Data tahun 2020 menunjukkan 44,11% dan selanjutnya meningkat menjadi 46,64%.

### 24. Capaian IKK Urusan Perdagangan

Urusan ini memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, stabilisasi harga, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan itu maka perlu dilakukan upaya untuk memastikan kelancaran distribusi barang, pengembangan pasar, serta perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Upaya ini dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian harga, pengembangan infrastruktur perdagangan seperti pasar rakyat dan pusat distribusi, pemberdayaan pedagang, serta pengawasan standar mutu barang dan jasa. Kinerja urusan ini dapat dilihat dari indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Capaian indikator ini menunjukkan tren positif sejak tahun 2020-2024. Data tahun 2020 menunjukkan 5,97% dan terus meningkat sampai dengan tahun 2024 sebesar 7,09%.

### 25. Capaian IKK Urusan Perindustrian

Urusan ini juga turut berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri lokal. Kinerja urusan ini dinilai melalui indikator utama kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri. Penguatan regulasi, dukungan infrastruktur, dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong industri yang berkelanjutan dan kompetitif.







## 26. Capaian IKK Urusan Perikanan

Sektor ini juga turut mendukung perekonomian daerah serta ketahanan pangan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, serta menjaga ekosistem perairan. Kinerja urusan ini dapat diukur dari beberapa indikator yaitu produksi perikanan budidaya yang terus meningkat sejak tahun 2020-2024. Angka tahun 2020 adalah 401,4 ton yang terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai 570,20 ton. Produksi perikanan tangkap juga menunjukkan peningkatan. Data 2020 395.40 ton menjadi 708,40 pada tahun 2024.

### 2.5 Aspek Kerjasama Daerah

Kerja Sama Daerah (KAD) merupakan sarana memantapkan hubungan dan keterikatan antar daerah dalam menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal daerah. Pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan lokal, namun juga memerlukan kolaborasi yang lebih luas untuk menciptakan solusi yang lebih efektif terhadap berbagai permasalahan. Kerjasama antar daerah dapat mempercepat pencapaian target pembangunan yang sudah ditetapkan, terutama dalam menghadapi tantangan bersama.

Kerja sama antara daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara efektif dan efisien dimana efektifitas tersebut memperhatikan potensi daerah dan kemampuan yang dimiliki daerah. Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan, pemerintah bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)/NGO (*Non-Governmental Organization*) sebanyak 27 LSM dan atau perbankan untuk dapat membantu dan mendorong pembangunan. Untuk kerjasama dengan perbankan dilakukan melalui dana CSR sedangkan untuk LSM/NGO dilakukan kerjasama pada bidang-bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat.





## 2.6 Gambaran Keuangan Daerah

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

### 2.6.1. Kinerja Keuangan Tahun 2019-2024

Analisis kinerja keuangan tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis proyeksi keuangan ke depan. Analisis kinerja keuangan dilaksanakan terhadap kinerja pelaksanaan APBD untuk mengetahui struktur, komponen dan tingkat biaya dari setiap kegiatan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah munculnya kemungkinan *under-financing* atau *over-financing* yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit-unit kerja pemerintah daerah.

Keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan







Daerah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD diatur dalam Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan APBD yang tercermin dalam komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024, digambarkan berdasarkan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, sebagai berikut:





Tabel 2.34  
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024

| No       | Uraian                               | Realisasi                   |                             |                             |                             |                             |                             |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|          |                                      | 2019                        | 2020                        | 2021                        | 2022                        | 2023                        | 2024                        |
| (1)      | (2)                                  | (3)                         | (4)                         | (5)                         | (6)                         | (7)                         | (8)                         |
| <b>1</b> | <b>PENDAPATAN</b>                    |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| A.       | Pendapatan Asli Daerah               | 77.594.080.656,42           | 64.192.990.192,85           | 65.657.453.733,66           | 46.784.070.870,36           | 63.315.176.817,02           | 54.339.058.986,18           |
| B.       | Pendapatan Transfer                  | 1.349.485.048.605,00        | 1.295.194.696.329,81        | 1.232.323.902.250,00        | 1.350.046.938.758,00        | 1.379.270.117.075           | 1.342.136.980.808           |
| C.       | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 78.138.467.387,00           | 76.974.276.344,00           | 72.571.733.018,00           | 4.220.283.397,00            | 89.912.001.496,00           | 88.355.657.609,00           |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>             | <b>1.505.217.596.648,42</b> | <b>1.436.361.962.866,66</b> | <b>1.370.553.089.001,66</b> | <b>1.401.051.293.025,36</b> | <b>1.532.497.295.388,02</b> | <b>1.484.831.697.403,18</b> |
| <b>2</b> | <b>BELANJA</b>                       |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| A.       | Belanja Operasi                      | 882.029.238.504,00          | 838.793.324.573,00          | 867.931.639.118,00          | 871.775.753.741,00          | 852.353.723.990,00          | <b>1.072.549.594.413,00</b> |
| B.       | Belanja Modal                        | 248.312.505.585,00          | 218.800.559.811,00          | 153.521.108.021,00          | 181.688.374.183,00          | 198.575.433.612             | 166.227.066.280             |
| C.       | Belanja Tak Terduga                  | 87.689.550,00               | 19.714.932.720,00           | 5.003.308.610,00            | 153.461.080,00              | 330.730.000,00              | 1.067.754.958,00            |
| D.       | Belanja Transfer                     | 366.617.206.490,00          | 370.675.624.366,00          | 376.167.181.286,00          | 360.615.374.503,00          | 331.525.378.400,00          | 325.616.669.367,00          |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                | <b>1.497.046.640.129,00</b> | <b>1.447.984.441.470,00</b> | <b>1.402.623.237.035,00</b> | <b>1.414.232.963.507,00</b> | <b>1.382.785.266.002,00</b> | <b>1.565.461.085.018,00</b> |
|          | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>               | <b>8.170.956.519,42</b>     | <b>-11.622.478.603,34</b>   | <b>-32.058.682.833,34</b>   | <b>-13.181.670.481,64</b>   | <b>149.712.029.386,02</b>   | <b>-80.629.387.614,82</b>   |







| No  | Uraian                                    | Realisasi         |                   |                   |                   |                    |                    |
|-----|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                           | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023               | 2024               |
| (1) | (2)                                       | (3)               | (4)               | (5)               | (6)               | (7)                | (8)                |
| 3   | PEMBIAYAAN                                |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
|     | A. Penerimaan<br>Pembiayaan               | 77.792.084.055,05 | 85.560.313.583,47 | 73.517.364.538,04 | 29.521.216.504,70 | 16.339.728.011,06  | 160.304.212.397,08 |
|     | B. Pengeluaran<br>Pembiayaan              | 0,00              | 0,00              | 12.000.000.000,00 | 0,00              | 6.000.000.000      | 0,00               |
|     | PEMBIAYAAN NETTO                          | 77.792.084.055,05 | 85.560.313.583,47 | 61.517.364.538,04 | 29.521.216.504,70 | 10.339.728.011,06  | 160.304.212.397,08 |
|     | SISA LEBIH PEMBIAYAAN<br>ANGGARAN (SILPA) | 85.963.040.574,47 | 73.937.834.980,13 | 29.447.216.504,70 | 16.339.546.023,06 | 160.051.757.397,08 | 79.674.824.782,26  |

Sumber : Badan PKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019- 2024



Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Terlihat bahwa Pendapatan Daerah berfluktuasi, dimana tahun 2019 sebesar Rp.1.505.217.596.648,42 dan mengalami penurunan di tahun 2020 Rp.1.436.361.962.867 atau sebanyak -4,57%. Pada tahun 2021 kembali menurun menjadi Rp.1.370.553.089.002 atau sebanyak -4,58%. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sebagai sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah melalui realokasi dan *refocusing* anggaran APBN dan APBD tahun 2020-2022 sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.1.401.051.293.025,36 atau naik sebanyak 2,23% dan terus naik di tahun 2023 sebanyak 9,38% namun menurun sebesar Rp.1.532.497.295.388,02 atau sebanyak -3,11% di Tahun 2024. Sumber-sumber pendapatan berdasarkan realisasi tahun dasar 2024 adalah:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.54.298.253.518,00 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- Pendapatan transfer sebesar Rp.1.342.136.980.808,00 yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah;
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp.88.355.657.609,00 yang bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pendapatan tersebut dapat dikategorikan sebagai rentang kendali penuh pemerintah kabupaten (PAD) melalui evaluasi capaian pendapatan tahun sebelumnya sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menilai potensi, kendala dan peluang peningkatan pendapatan. Sumber





pendapatan dalam rentang kendali pemerintah kabupaten berarti pemerintah kabupaten memiliki kewenangan penuh dalam proses penentuan pendapatan daerah.

Penentuan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dilakukan berdasarkan kerangka desentralisasi fiskal dalam sistem keuangan negara melalui beberapa jenis dana antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Insentif Fiskal hingga Dana Desa. Proses penentuan tersebut melalui langkah-langkah perhitungan potensi fiskal dan kebutuhan fiskal daerah, penyusunan rincian transfer dalam RAPBN maupun negosiasi dan klarifikasi teknis sehingga proyeksi dana transfer ditetapkan berdasarkan rata-rata pertumbuhan realiasi pendapatan.

Terhadap penetapan nilai proyeksi untuk komponen PAD, jika menggunakan data target PAD sepanjang tahun 2019-2024 maka angka tersebut di luar kemampuan daerah untuk memenuhinya. Proyeksi yang ditampilkan didasarkan asumsi bahwa kondisi perekonomian normal pada level regional maupun nasional. Asumsi tidak terealisasi apabila terjadi keadaan luar biasa.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah dari tahun 2019 sampai 2024 berfluktuasi, dimana pada tahun 2019 sebesar Rp.1.497.046.640.129 menjadi Rp.1.447.984.441.470 atau menurun sebanyak -3,28% di tahun 2020. Selanjutnya di tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp.1.402.623.237.035 atau sebesar -3,13%. Penurunan Belanja Daerah terjadi karena adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19. Total realisasi belanja daerah pada tahun 2024 adalah Rp.1.565.461.085.018,00 dengan sumber-sumber belanja daerah berdasarkan realisasi tahun dasar 2024 adalah:

- Belanja operasi, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial sebesar Rp.1.072.549.594.413,00;
- Belanja modal, yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya sebesar Rp.166.227.066.280,00;
- Belanja tidak terduga sebesar Rp.1.067.754.958,00;
- Belanja transfer, yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp.325.616.669.367,00.

c. **Pembiayaan Daerah**

Komponen pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Data tahun 2024 menunjukkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.160.051.757.397,00 dimana komponen sumber penerimaan berasal dari:

- Sisa dari realisasi belanja yang dialokasikan untuk semua perangkat daerah dari seluruh sumber dana;
- Dana lain yang baru direalisasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada akhir tahun, sehingga tidak dapat langsung direalisasikan penggunaannya.

**2.6.2. Neraca Daerah**

Neraca daerah menggambarkan besarnya jumlah kekayaan daerah yang dimiliki dan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawab daerah dari kegiatan dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan. Neraca daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selama kurun waktu 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 2.35  
Neraca Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019-2024

| Uraian                       | Tahun                |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
| ASET                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| A. Aset Lancar               | 152.328.931.462,59   | 135.828.373.575,98   | 105.610.626.907,80   | 60.099.705.173,82    | 225.726.691.331,85   | 152.694.908.046,94   |
| B. Investasi Jangka Panjang  | 83.177.726.970,83    | 91.798.380.472,00    | 103.798.380.472,00   | 103.798.380.472,00   | 109.260.504.040      | 109.242.075.131      |
| C. Aset Tetap                | 1.733.584.841.125,79 | 1.781.055.730.752,37 | 1.824.282.338.399,69 | 1.875.007.097.874,69 | 1.884.683.019.652,52 | 1.955.955.249.257,44 |
| D. Aset Lainnya              | 16.064.336.404,25    | 18.681.886.562,25    | 21.667.208.362,25    | 23.136.092.645,25    | 39.606.184.818,35    | 39.487.791.913,35    |
| JUMLAH ASET                  | 1.985.155.835.963,46 | 2.027.364.371.362,60 | 2.055.358.554.141,74 | 2.062.041.276.165,76 | 2.259.276.399.842,72 | 2.257.380.024.348,73 |
| KEWAJIBAN                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| A. Kewajiban Jangka Pendek   | 12.680.761.831,46    | 10.854.140.313,46    | 13.810.713.062,46    | 10.403.711.129,49    | 35.573.834.412,89    | 19.574.538.273,17    |
| B. Kewajiban Jangka Panjang  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| JUMLAH KEWAJIBAN             | 12.680.761.831,46    | 10.854.140.313,46    | 13.810.713.062,46    | 10.403.711.129,49    | 35.573.834.412,89    | 19.574.538.273,17    |
| EKUITAS                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Ekuitas                      | 1.972.475.074.132,00 | 2.016.510.231.049,14 | 2.041.547.841.079,28 | 2.051.637.565.036,30 | 2.223.702.565.429,83 | 2.237.805.486.075,56 |
| JUMLAH EKUITAS               | 1.972.475.074.132,00 | 2.016.510.231.049,14 | 2.041.547.841.079,28 | 2.051.637.565.036,30 | 2.223.702.565.429,83 | 2.237.805.486.075,56 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 1.985.155.835.963,46 | 2.027.364.371.362,60 | 2.055.358.554.141,74 | 2.062.041.276.165,79 | 2.259.276.399.842,72 | 2.257.380.024.348,73 |

Sumber: Badan PKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan 2024 (diolah)





### **2.6.3. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030**

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026-2030 adalah nilai APBD yang memungkinkan untuk terwujudnya pembiayaan bagi seluruh program strategis sesuai target RPJMD dalam menjawab Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, seperti pada tabel berikut.







Tabel 2.36

## Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026-2030

| No | Uraian                                  | Baseline             | Proyeksi             |                      |                      |                      |                      |
|----|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |                                         | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
| 1  | PENDAPATAN                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|    | A. Pendapatan Asli Daerah               | 100.000.000.000,00   | 101.020.000.000,00   | 102.050.404.000,00   | 103.091.318.120,80   | 104.142.849.565,63   | 105.205.106.631,20   |
|    | B. Pendapatan Transfer                  | 1.573.715.397.809    | 1.589.667.294.866,00 | 1.605.982.921.274,29 | 1.622.363.947.071,29 | 1.638.912.059.331,42 | 1.655.628.962.336,60 |
|    | C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 17.000.000.000,00    | 17.173.400.000,00    | 17.348.568.680,00    | 17.525.524.080,54    | 17.704.284.426,16    | 17.884.868.127,30    |
|    | JUMLAH PENDAPATAN                       | 1.690.715.397.809,00 | 1.707.860.694.866,00 | 1.725.381.893.954,29 | 1.742.980.789.272,63 | 1.760.759.193.323,21 | 1.778.718.937.095,10 |
| 2  | BELANJA                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|    | A. Belanja Operasi                      | 1.240.748.820.630,00 | 1.253.304.458.600,00 | 1.266.189.184.078,15 | 1.279.104.313.755,75 | 1.292.151.177.756,06 | 1.305.331.119.769,17 |
|    | B. Belanja Modal                        | 110.641.826.181      | 111.770.372.808,00   | 112.910.430.610,69   | 114.062.117.002,92   | 115.225.550.596,35   | 116.400.851.212,43   |
|    | C. Belanja Tak Terduga                  | 2.125.000.000,00     | 2.146.675.000,00     | 2.168.571.085,00     | 2.190.690.510,07     | 2.213.035.553,27     | 2.235.608.515,91     |
|    | D. Belanja Transfer                     | 337.199.750.998,00   | 340.639.188.458,00   | 344.113.708.180,45   | 347.623.668.003,89   | 351.169.429.417,53   | 354.751.357.597,59   |
| 3  | JUMLAH BELANJA                          | 1.690.715.397.809,00 | 1.707.860.694.866,00 | 1.725.381.893.954,29 | 1.742.980.789.272,63 | 1.760.759.193.323,21 | 1.778.718.937.095,10 |
|    | SURPLUS/DEFISIT                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|    | PEMBIAYAAN                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|    | A. Penerimaan Pembiayaan                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|    | B. Pengeluaran Pembiayaan               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|    | PEMBIAYAAN NETTO                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|    | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

Sumber: Badan PKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan 2024 (diolah)



Tgl cetak: 20 Agustus 2025



Pada Tabel 2.37 terlihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2019-2024 yang diproyeksikan meningkat setiap tahun dengan pertumbuhan 1,02%. Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2026 sebesar Rp.1.690.715.397.809,00 dan terus meningkat sampai tahun 2030 menjadi sebesar Rp.1.778.718.937.095,10.

## **2.7 Permasalahan dan Isu Strategis**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gambaran dari kesenjangan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai dengan yang direncanakan. Kondisi ini terlihat dari hasil evaluasi dan kajian terhadap capaian kinerja pembangunan daerah. Isu strategis adalah suatu kondisi, perkembangan, atau kecenderungan yang dianggap sangat penting dan perlu menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2029 permasalahan dan isu strategis dikaji dengan benar untuk menghindari, mengurangi atau menyelesaikan potensi permasalahan daerah serta mengoptimalkan peluang yang ada di daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **2.7.1. Permasalahan**

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengacu pada hasil analisis kondisi pembangunan daerah dan laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029. digambarkan berdasarkan masing-masing aspek sebagai berikut:

#### **1. Permasalahan Pada Aspek Geografi dan Demografi**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Timor Tengah Selatan dari aspek geografi dan demografi, yaitu:

Wilayah yang luas, topografi berbukit, persebaran potensi sumber daya alam yang tidak merata dan persebaran penduduk yang tidak terkonsentrasi mengakibatkan tingginya nilai investasi untuk pembangunan infrastruktur.





- a. Prasarana dan sarana infrastruktur belum memadai bahkan masih terdapat beberapa yang belum dapat diakses masyarakat.
  - b. Aktifitas penduduk di daerah rawan bencana dalam memanfaatkan potensi yang ada guna meningkatkan produktifitas dan menambah pendapatan berpotensi merusak lingkungan.
  - c. Sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah melaksanakan praktek budaya bertani yang konvensional pada lahan yang tidak tersedia air pada musim kemarau serta kepemilikan tanah yang terbatas menyebabkan tingginya angka tenaga kerja yang mencari pekerjaan di luar daerah.
  - d. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali pada daerah-daerah pertumbuhan baru dan pusat perekonomian.
  - e. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah karena kurangnya ketaatan dalam mengurus dokumen kependudukan.
2. Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Timor Tengah Selatan pada peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat, yaitu:
- a. Produktifitas rendah, yang berakibat rendahnya pendapatan.
  - b. Kurangnya inovasi dan penerapan IPTEK dalam melaksanakan usaha.
  - c. Kurang mampu mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki.
  - d. Kurangnya keterampilan dan kecakapan kerja.
  - e. Kurangnya penguasaan aset lahan pribadi.
  - f. Rendahnya tingkat pendidikan.
  - g. Akses yang masih terbatas ke sumber-sumber ekonomi.
3. Permasalahan Pada Aspek Daya Saing Daerah
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Timor Tengah Selatan pada aspek daya saing daerah, yaitu:





- a. Masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan padahal sektor-sektor ini masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.
  - b. Belum optimalnya pengembangan sektor industri terutama industri pengolahan dan ekonomi kreatif dalam mendukung daya saing daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  - c. Tidak berkembangnya sektor akomodasi dan makan minum akibat belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata daerah.
  - d. PDRB perkapita Kabupaten Timor Tengah Selatan masih berada di bawah PDRB Provinsi NTT dan Nasional.
  - e. Belum optimalnya peningkatan dan pemerataan infrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan.
  - f. Masih rendahnya angka literasi dan numerasi siswa SD dan SMP di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  - g. Masih rendahnya indeks literasi digital di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  - h. Belum optimalnya kontribusi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  - i. Tingginya angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kondisi angka ketergantungan sebesar 47,81 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung antara 47-48 penduduk usia tidak produktif.
4. Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada aspek pelayanan umum di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu:
- a. Belum optimalnya pelayanan publik, dimana pada tahun 2021 nilai indeks pelayanan publik Kabupaten TTS dengan kategori C (cukup)







- b. Belum optimalnya inovasi daerah Kabupaten TTS, dimana pada tahun 2023, nilai IID sebesar 37,47 dan masuk dalam kategori Inovatif namun inovasi-inovasi yang sudah dibuat belum dimanfaatkan secara optimal.
- c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kabupaten TTS mengalami peningkatan namun masih berada di bawah nilai provinsi dan nasional, dimana pada tahun 2021 sebesar 2,26 berada pada kategori Cukup (rentang nilai 1,8 – 2,6), sedangkan tahun 2022 dan 2023 dengan nilai 2,61 dan 2,62 berada pada kategori Baik (rentang nilai 2,6 – 3,5).
- d. Belum optimalnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- e. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- f. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- g. Kurangnya infrastruktur digital yang merata, literasi digital aparatur, serta sistem informasi antar-perangkat daerah.
- h. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur, pengembangan birokrasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pelayanan publik.
- i. Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah daerah dan penegak hukum untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah.

#### **2.7.2. Isu Strategis**

Isu strategis daerah Kabupaten TTS diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, provinsi dan kabupaten) dan potensi yang dimiliki Kabupaten TTS yang relevan dan menjadi tantangan bagi daerah lima tahun ke depan. Berikut merupakan uraian dari isu-isu yang terjadi pada tingkat global, nasional provinsi maupun daerah.



### 2.7.2.1. Isu Strategis Global

Isu-isu strategis global mencakup berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh komunitas internasional atau secara global yang turut berpengaruh terhadap pembangunan baik nasional maupun daerah. Beberapa isu strategis global, antara lain:

#### a) Perdagangan dan Perekonomian Global

Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, Eropa dan negara-negara sedang berkembang. Tambahan pula dengan adanya gejolak harga minyak dunia di satu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun di sisi lain juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter seperti meningkatnya suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*), yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar (*capital out flow*) tiba-tiba dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat. Kebijakan perpajakan AS (*tax policy*) yang baru juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, di mana Pemerintah AS berencana memotong pajak AS yang dapat mendorong perpindahan arus modal ke AS dan pelemahan mata uang global terhadap dolar AS. Selain kebijakan Pemerintah AS, kebijakan ekonomi Cina yang sedang melakukan restrukturisasi perekonomian dalam upaya menyeimbangkan.





Komposisi pertumbuhan ekonominya dinilai juga dapat berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah. Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41% penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50% transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Kecenderungan ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahan, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerja sama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerja sama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships* (TPP), *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), *East Asia Summit* (EAS), serta *Expand ASEAN Maritime Forum* (EAMF).

#### **b) Konflik Geopolitik**

Meskipun ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif di tahun 2023, perlu tetap diwaspadai terjadinya masalah geopolitik global yang berkepanjangan, seperti invasi Rusia ke Ukraina, konflik di jalur Gaza dan konflik geopolitik lainnya. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut Cina Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan.





Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Konflik yang terjadi kemungkinan mengundang kehadiran negara-negara besar lainnya untuk terlibat yang ditakutkan akan menjadi masalah global yang berkepanjangan, sehingga tentu akan memberikan dampak yang signifikan bagi kondisi sosial-ekonomi dunia dikarenakan kontribusi negara-negara tersebut yang sangat besar terhadap dunia.

**c) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030 atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Goals dan 169 Target SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu:

**1. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:**

- a. Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun
- b. Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- c. Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- d. Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- e. Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.







## **2. Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi:**

- a. Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
- b. Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- c. Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
- d. Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
- e. Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

## **3. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:**

- a. Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- b. Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman tangguh, dan berkelanjutan;
- c. Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- d. Tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya



- e. Tujuan 14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
- f. Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

#### **4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, meliputi:**

- a. Tujuan 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

Untuk memastikan pelaksanaan SGD's berjalan dengan baik maka peran negara dan semua pemangku kepentingan pembangunan sangat penting dalam pencapaian tujuan SDG's.

#### **d) Isu Perubahan Iklim (*Climate Change*)**

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Dunia kini menghadapi berbagai dampak nyata, seperti kenaikan suhu ekstrem, cuaca yang tidak teratur, kekeringan masal, krisis air, kelangkaan pangan, munculnya berbagai penyakit, hingga naiknya permukaan air laut. Semua ini erat kaitannya dengan pemanasan global yang semakin parah. Perubahan ini dapat mengakibatkan; 1) kerusakan infrastruktur dimana badai tropis yang intens atau banjir bisa merusak jembatan, jalan raya dan bangunan penting lainnya; 2) ancaman terhadap kesehatan yakni gelombang panas yang lebih sering dan ekstrem







dapat meningkatkan risiko kesehatan seperti penyakit panas dan dehidrasi; 3) ketidakstabilan pangan yakni kekeringan yang parah atau banjir dapat mengganggu produksi pangan dan mengakibatkan kenaikan harga pangan; 4) kehilangan keanekaragaman hayati yakni perubahan iklim yang drastis dapat mengancam spesies-spesies tertentu dan mengganggu ekosistem yang rapuh dan; 5) meningkatnya pengungsi iklim yakni masyarakat yang terdampak dapat terpaksa pindah atau mengungsi akibat bencana alam yang lebih sering dan parah.

Pemanasan global terjadi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dan dinitrogen oksida (N<sub>2</sub>O). Aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, serta industri yang tidak ramah lingkungan, menjadi penyebab utama meningkatnya emisi gas-gas tersebut. Gas rumah kaca berfungsi seperti selimut yang menyelimuti bumi dan menjebak panas matahari, menyebabkan suhu bumi terus meningkat.

Dampak perubahan iklim sudah dapat kita rasakan di berbagai belahan dunia. Salah satu contoh nyata adalah naiknya suhu rata-rata global. Menurut data dari lembaga iklim internasional, suhu bumi telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celsius sejak era pra-industri. Peningkatan ini mungkin terdengar kecil, tetapi dampaknya sangat signifikan. Misalnya, pemanasan global menyebabkan mencairnya es di kutub yang berkontribusi pada naiknya permukaan air laut. Hal ini mengancam daerah pesisir dan pulau kecil, bahkan bisa menyebabkan tenggelamnya wilayah tersebut jika tidak segera ditangani.

Selain itu perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Curah hujan menjadi tidak menentu, di beberapa daerah terjadi hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir besar, sedangkan di daerah lain terjadi kekeringan berkepanjangan yang memicu



krisis air. Kondisi ini berdampak buruk pada sektor pertanian karena tanaman sulit tumbuh dengan baik, menyebabkan kelangkaan pangan di banyak negara.

Munculnya berbagai penyakit juga menjadi salah satu konsekuensi dari perubahan iklim. Suhu yang lebih hangat menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangan berbagai virus dan bakteri. Penyakit seperti malaria, demam berdarah dan infeksi saluran pernapasan menjadi lebih mudah menyebar, terutama di wilayah tropis dan subtropis.

**e) Masalah Keamanan *Cyber Security***

Di era revolusi industri 4.0 segala aspek kehidupan tidak terlepas dari sentuhan teknologi, mendorong transformasi digital pada aktivitas dan proses bisnis di berbagai sektor. Hal ini melahirkan beragam inovasi teknologi seperti *Artificial Intelligence* dan *Internet of Things (IoT)*. Melalui perkembangan teknologi informasi, saat ini setiap perangkat dengan mudah terkoneksi dalam jaringan komputer seperti internet.

Peningkatan jumlah pengguna internet di dunia tidak terlepas dari peningkatan jumlah ancaman ataupun serangan siber (*cyber attack*). Serangan siber (*cyber attack*) terus menciptakan ancaman potensial bagi sistem sampai *end-user*. Salah satu solusi untuk meminimalisir hal tersebut yaitu dengan memberi perhatian terhadap pengelolaan sistem keamanan siber (*cybersecurity*). *Cybersecurity* merupakan perlindungan yang sangat dibutuhkan baik untuk perorangan, perusahaan, ataupun pemerintahan untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut.







Beberapa risiko utama yang terkait dengan kegagalan *cybersecurity* meliputi; 1) serangan siber dimana serangan *malware*, *ransomware*, *phishing* dan *hacking* yang dapat mengakibatkan pencurian data sensitif, pencurian identitas atau gangguan pada infrastruktur kritis; 2) kerentanan perangkat IoT dimana peningkatan penggunaan dan ketergantungan pada perangkat *Internet of Things* (IoT) meningkatkan risiko terhadap serangan siber karena keamanan yang lemah pada perangkat tersebut; 3) kehilangan kepercayaan publik dimana kejadian kebocoran data atau pelanggaran keamanan yang sering dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap perusahaan atau institusi yang terlibat; 4) dampak ekonomi yakni biaya besar untuk memulihkan data, memperbaiki sistem yang terpengaruh dan mengganti kerugian akibat serangan siber dapat berdampak pada kesehatan finansial perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan, dan; 5) ancaman terhadap keamanan nasional dimana serangan siber yang terkoordinasi dan kompleks dapat menimbulkan ancaman terhadap infrastruktur kritis suatu negara seperti sistem energi, transportasi dan komunikasi.

#### **2.7.2.2. Isu Strategis Nasional**

Isu strategis nasional dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan berbagai masalah, tantangan dan peluang yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Isu-isu ini mendapatkan perhatian dan penanganan serius oleh pemerintah pusat sehingga memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi NTT untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

- a) Isu Strategis Transformasi Sosial Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada masalah dan tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan



kapasitas dan pemerataan kapasitas dan *responsiveness system* kesehatan di seluruh wilayah yang ditandai dengan; 1) AKI masih tinggi (189/100.000); 2) *Stunting* masih tinggi (21,6%); 3) Prevalensi obesitas 21,8%; 4) Kasus baru TB meningkat ke-2 dunia; 5) Kasus kusta peringkat ke-3 dunia; 6) 51,14% puskesmas tidak tersedia 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar; 7) 24,7% RSUD kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang, 8) 36,5% Rumah Sakit terakreditasi Paripurna dan 9) 56,4% FKTP terakreditasi.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada kondisi untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain; 1) Layanan pendidikan belum merata; 2) Kualitas pendidikan masih rendah; 3) Kuantitas, kualitas dan distribusi guru masih terbatas; 4) Kualitas pendidikan angkatan kerja masih rendah; 5) Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah, dan; 6) Daya saing perguruan tinggi di tingkat global masih rendah.

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain; 1) Akurasi program bantuan sosial masih rendah; 2) Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim; 3) Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan; 4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah; 5) Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan dan; 6) Program Jaminan Sosial belum optimal.







b) Isu Strategis Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta Penguatan Riset Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pembangunan ekonomi pada periode pertama dari 20 tahun pembangunan jangka panjang diarahkan untuk penyelesaian isu:

- Peningkatan produktivitas, sektor-sektor ekonomi melalui industrialisasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dengan pemanfaatan IPTEK, pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan UMKM dan koperasi, produktivitas BUMN dan penguatan ekonomi serta keuangan Syariah.
- Pengembangan IPTEK dan inovasi
- Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
- Transformasi digital
- Integrasi ekonomi domestik dan global
- Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

c) Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Tepat Fungsi dan Kolaboratif, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif, Digitalisasi Pelayanan Publik, Peningkatan Integritas Partai Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil

Transformasi tata kelola akan menjamin terlaksananya transformasi sosial dan transformasi ekonomi sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif. Transformasi tata kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif.

d) Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat Supremasi Hukum dan Stabilitas serta Membangun Kekuatan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan dan Ketangguhan Diplomasi.





Supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi diarahkan untuk; 1) terwujudnya supremasi hukum nasional yang berkeadilan, kepastian hukum, bermanfaat dan berlandaskan HAM; 2) terwujudnya keselamatan bangsa, kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia yang aman, damai dan mandiri serta aktif menjaga perdamaian dunia dan berpengaruh di dunia Internasional; 3) terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik; 4) kesetaraan sosial, ekonomi dan politik, serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak; 5) terwujudnya kesinambungan fiskal dan stabilitas harga melalui transformasi tata kelola dan kelembagaan keuangan negara disertai optimalisasi bauran kebijakan; 6) penguatan sinergi dan fokus diplomasi dan; 7) pemantapan kelembagaan dan infrastruktur pendukung diplomasi.

- e) Isu Stategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Sebagai Landasan dan Modal Dasar Pembangunan

Ketahanan sosial budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga kesinambungan alam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan. Ketahanan sosial, budaya dan ekologi bertumpu pada: 1) penguatan agama sebagai landasan spiritual, etika, moral sebagai modal dasar pembangunan; 2) pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menetapkan peran dan posisi Indonesia dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia; 3) peningkatan ketangguhan







individu keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan; 4) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 5) memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*) dan; 6) pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK, pembangunan berketahanan iklim dan penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi berbasis pulau.

f) Isu Strategis Transformasi Sistem Pangan

Sektor pangan adalah pilar penting dalam perekonomian Indonesia dimana sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan ketahanan pangan. Tetapi sektor ini dalam beberapa tahun terakhir ini dihadapkan pada beberapa tantangan seperti adanya konflik geopolitik dan dampak dari perubahan iklim global. Tantangan-tantangan ini sangat mempengaruhi stabilitas pasokan pangan, kualitas, keamanan, hingga akses masyarakat terhadap pangan.

Industri pangan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ke depan, terdapat tantangan besar yang perlu dihadapi oleh setiap insan pangan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem pangan di Indonesia. Tantangan besar tersebut adalah bagaimana Indonesia dapat melaksanakan transformasi sistem pangan.

Transformasi sistem pangan bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan resiliensinya; yaitu kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi, mengatasi, mencegah, meminimalkan atau menghilangkan tekanan pada sistem. Dengan demikian, diharapkan untuk terus mampu berfungsi memberikan ketahanan pangan dan gizi bagi semua.





Menjamin kemampuan produksi pangan dalam berbagai skenario situasi, sehingga dapat memastikan ketahanan pangan dan gizi, dengan tetap memberikan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang optimal. Transformasi ini memerlukan investasi dan inovasi untuk memastikan bahwa sistem pangan secara keseluruhan menjadi lebih berkelanjutan dan adil, serta menjamin akses bagi setiap individu untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

g) Isu Strategis Transformasi Energi Baru Terbarukan

Dalam mitigasi perubahan iklim, Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* dan berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% hingga 43,2% dengan bantuan internasional pada 2030. Salah satu upaya mengurangi emisi GRK yakni melalui transisi energi dimana sistem energi yang ada sekarang ditransformasi untuk mengakomodasi penetrasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tinggi, sehingga secara berangsur-angsur akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Pada 2023, Indonesia berhasil untuk mencapai porsi energi terbarukan sebesar 14%. Namun demikian, potensi pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik masih sangat besar. Dari potensi tenaga listrik sebesar 3.686 GW, pemanfaatan EBT baru mencapai 12.557 MW dimana bioenergi berkontribusi sebesar 3.086 MW.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan energi terbarukan. Hingga Semester I (Januari-Juni) tahun 2024, penambahan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Energi Baru dan Terbarukan (EBT) telah mencapai 217,73 Mega Watt (MW) atau sekitar 66,6% dari target tahunan sebesar 326,91 MW. Peningkatan kapasitas ini didominasi oleh PLT hidro dan PLT surya. PLT hidro berhasil mencapai 66,4% dari target, sementara PLT surya bahkan melampaui target dengan capaian 147,02%. Kendati PLT panas







bumi belum mencapai target, namun sektor energi terbarukan lainnya seperti bioenergi juga menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu 43,2% dari target.

Dalam upaya pengembangan energi bersih, Indonesia menghadapi tantangan berupa realisasi bauran EBT yang belum mencapai target. Hingga semester I-2024, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan realisasi bauran EBT baru mencapai 13,93%, masih jauh dari target 23% yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional pada 2025.

### **2.7.2.3. Isu Strategis Regional**

#### **A. Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Berdasarkan permasalahan serta isu global dan nasional, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis daerah yang dipetakan pada beberapa transformasi sebagai berikut:

- a) Isu Strategis Transformasi Sosial: Peningkatan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif (Belum Optimalnya Mutu dan Akses Pendidikan dan Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial).

Tercapainya transformasi sosial bertumpu pada upaya pemenuhan pelayanan dasar serta pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya yang berkaitan dengan kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata serta perlindungan sosial yang adaptif. Karena itu, transformasi sosial di NTT adalah upaya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di daerah dan menciptakan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Kesehatan untuk semua dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan akses dan kualitas layanan kesehatan





melalui: 1) optimalisasi penanganan stunting dan penyakit endemik (malaria); 2) pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas kesehatan; 3) optimalisasi peningkatan umur harapan hidup; 4) optimalisasi penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita, dan; 5) optimalisasi penurunan angka *wasting* yaitu gizi buruk, gizi kurang dan *underweight*.

Pendidikan yang berkualitas dan merata dihadapkan pada upaya untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia NTT yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang melalui peningkatan mutu pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah untuk penduduk usia sekolah termasuk disabilitas, peningkatan angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah, mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan vokasional, peningkatan cakupan SMA dan SMK yang terakreditasi, peningkatan digitalisasi sektor pendidikan dan peningkatan SPM sektor pendidikan.

Perlindungan sosial yang adaptif dihadapkan pada upaya untuk memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif adaptif. Upaya tersebut dilaksanakan melalui: 1) penurunan angka kemiskinan; 2) optimalisasi pembangunan *Gender, Equality, Disabilitas, dan Sosial Inklusi* (GEDSI); 3) peningkatan perlindungan sosial bagi PMKS; 4) optimalisasi cakupan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; 5) optimalisasi akurasi data untuk ketepatan intervensi; 6) optimalisasi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; 7) fasilitas umum yang ramah GEDSI, dan; 8) mengurangi jumlah masyarakat yang masuk kategori rumah tidak layak huni.







- b) Isu Strategis Transformasi Ekonomi: Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi (1) Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah, (2) Belum Terbangunnya Ketahanan Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan; dan (3) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Terciptanya transformasi ekonomi bertumpu pada upaya penciptaan kemampuan dan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor primer, sektor industri, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, serta BUMD. Upaya tersebut ditunjang dengan penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pada berbagai sektor.

Peningkatan produksi dan produktifitas pada sektor primer dihadapkan pada upaya untuk: 1) perbaikan pola pertanian, peternakan, dan perikanan yang bersifat subsisten kepada pola pertanian yang berorientasi komersil; 2) optimalisasi adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan; 3) optimalisasi penguatan sentra produksi di kawasan pedesaan, serta sentra-sentra pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan; 4) perbaikan insentif pada sistem pasar sektor primer; 5) optimalisasi ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasana termasuk ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi; 6) optimalisasi penanganan hama penyakit pada sektor pertanian dan peternakan dan optimalisasi ketahanan sektor primer terhadap dampak perubahan iklim.

Peningkatan produksi dan produksi pada sektor primer memberikan dukungan terhadap pengembangan industri pengolahan (hilirisasi). Selain itu, ketersediaan dan kontinuitas produksi dan produktifitas sektor primer juga diperlukan agar dapat menjamin keberlanjutan penyediaan bahan baku bagi pengembangan industri di NTT. Provinsi NTT memiliki





komoditas berbasis *Core Competence* komoditas unggulan wilayah antara lain; padi, mete, kopi, kakao, jagung, babi, sapi, rumput laut, perikanan tangkap dan garam. Komoditas-komoditas ini perlu diperkuat guna mendukung industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

- c) Isu Strategis Transformasi Tata Kelola: Peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta dan keberlanjutan pembangunan (Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan).

Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga bisa menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini ditempuh melalui; peningkatan kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta dan keberlanjutan pembangunan.

Penguatan terhadap derajat kemandirian fiskal dihadapkan pada upaya: 1) optimalisasi pengelolaan potensi PAD; 2) mengembangkan investasi pengelolaan keuangan daerah dan; 3) penguatan pengelolaan aset daerah. Penguatan terhadap pelayanan publik ditempuh melalui upaya: 1) peningkatan akses pelayanan publik berbasis digital yang merata bagi masyarakat; 2) peningkatan pelayanan yang berbasis kepuasan pelanggan dan; 3) optimalisasi inovasi pelayanan publik. Peningkatan manajemen talenta ditempuh melalui optimalisasi pengembangan SDM birokrasi berbasis manajemen talenta. Keberlanjutan pembangunan ditempuh melalui: 1) pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi dan; 2) peningkatan perencanaan dan penganggaran dalam







memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### B. Isu Strategis KLHS Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025-2029

Sintesa isu yang berasal dari dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan kondisi lingkungan hidup serta isu hasil kegiatan konsultasi publik diperoleh 7 Isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Ketimpangan sosial;
2. Akses layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, inklusif dan merata;
3. Transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
4. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Akses air dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan;
6. Ketahanan iklim, bencana dan pangan;
7. Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang belum Optimal.

#### C. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pada berbagai aspek, telaah terhadap isu global, nasional dan regional, isu strategis jangka menengah Kabupaten Timor Tengah Selatan maka dapat dirumuskan kesimpulan isu strategis Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2029 seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.37.





Tabel 2.37  
Rumusan Kesimpulan Isu Strategis Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029

| Potensi Daerah                                                                                                                    | Isu KLHS                                                                                                                                                   | Isu Lingkungan Dinamis                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Isu Strategis Daerah                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | Global (SDG's)                                                                                                                                                                                                      | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a. Sumber daya alam: tanah subur, hutan, kekayaan laut (ikan, terumbu karang), dan sumber daya tambang (minyak bumi, gas, logam); | a. Ketimpangan sosial;<br>b. Akses layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, inklusif dan merata;<br>c. Transformasi ekonomi inklusif & berkelanjutan; | a. Perdagangan dan Perekonomian Global;<br>b. Konflik Geopolitik;<br>c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's;<br>d. Isu Perubahan Iklim ( <i>Climate Change</i> );<br>e. Masalah Keamanan <i>Cyber Security</i> . | a. Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;<br>b. Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;<br>c. Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, | <b>Isu Strategis Transformasi Sosial:</b><br>a. Belum Optimalnya Mutu dan Akses Pendidikan;<br>b. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial<br><b>Isu Strategis Transformasi Ekonomi:</b><br>a. Belum Maksimalnya Transformasi Ekonomi Daerah;<br>b. Belum terbangunnya ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan;<br>c. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. | a. Belum optimalnya penanganan masalah ketimpangan sosial dalam masyarakat;<br>b. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing daerah;<br>c. Belum optimalnya upaya peningkatan ketahanan iklim |
| b. Sumber Daya Manusia;                                                                                                           | d. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| c. Budaya;                                                                                                                        | e. Akses air dan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan;                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| d. Potensi Ekonomi;                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| e. Potensi Sosial;                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |







| Potensi Daerah         | Isu KLHS                                                                                                             | Isu Lingkungan Dinamis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | Isu Strategis Daerah                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                      | Global (SDG's)         | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Regional                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| f. Potensi Lingkungan. | f. Ketahanan iklim, bencana, dan pangan;<br><br>g. Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang belum Optimal. |                        | <p>peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil;</p> <p>Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia:<br/>Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi;</p> <p>d. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi</p> | <p><b>Isu Strategis Transformasi Tata Kelola:</b><br/>Belum optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.</p> | <p>untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bencana, dan meningkatkan ketahanan pangan;</p> <p>d. Belum optimalnya supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum;</p> <p>e. Belum optimalnya pembangunan yang</p> |



| Potensi Daerah | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis |                                                                                                                                                                           |          | Isu Strategis Daerah                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          | Global (SDG's)         | Nasional                                                                                                                                                                  | Regional |                                                                                                                                                                                                    |
|                |          |                        | Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan;<br>e. Transformasi Sistem Pangan;<br>f. Transformasi Energi Baru Terbarukan. |          | berperspektif/berwawasan sosial budaya dan berketahanan ekologi;<br>f. Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan; |







| Potensi Daerah | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis |          |          | Isu Strategis Daerah                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|----------|------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          | Global (SDG's)         | Nasional | Regional |                                                                                                                                                                                                                        |
|                |          |                        |          |          | g. Belum optimalnya akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan merata;<br>h. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;<br>i. Masih rendahnya kemampuan fiskal daerah. |





**RPJMD**  
2023 - 2029



*B  
A  
B*

*III*





### BAB III

## VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bagian ini disajikan visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah. Visi dan misi yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 merupakan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2030.

### 3.1. Visi

Visi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 adalah **“TERWUJUDNYA TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”**.

Visi di atas mengandung makna sebagai berikut:

1. **Timor Tengah Selatan**, meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan 32 (tiga puluh dua) kecamatan, 12 (dua belas) kelurahan dan 266 (dua ratus enam puluh enam) desa, 20 (dua puluh) desa persiapan serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan didirikan pada tahun 1958 hingga sekarang.
2. **Maju**, bahwa upaya pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap maupun sekaligus harus mampu membawa Kabupaten Timor Tengah Selatan keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan.
3. **Mandiri**, bahwa segala potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam harus mampu dikelola dan dikembangkan secara efisien dan efektif untuk kemajuan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. **Sejahtera**, bahwa seluruh rangkaian proses pembangunan yang dilaksanakan dan hasil yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan dasar, mental dan spiritual masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan.



5. **Berkelanjutan**, bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten sampai terwujudnya tujuan pembangunan dengan mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan.

### 3.2. Misi

Misi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

1. **MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN (VISI TTS MAJU, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN)**

Misi ini dimaksudkan untuk membangun, memperbaiki dan merekonstruksi infrastruktur secara berkelanjutan yang dilaksanakan bertahap maupun sekaligus dengan menggunakan segala potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalan.

2. **MEMACU PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI AKSELERASI YANG INKLUSIF (VISI TTS MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA)**

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten, berkarakter dan berdaya saing dalam segala aspek dengan tetap memperhatikan prinsip inklusi.

3. **MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH SECARA OPTIMAL (VISI TTS MANDIRI DAN BERKELANJUTAN)**

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkuat pengelolaan sektor-sektor unggulan daerah (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata dan koperasi). Pengembangan sektor-sektor unggulan ini diharapkan menjadi daya ungkit ekonomi bagi sektor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan PDRB dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.





#### **4. MENINGKATKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA BERKELANJUTAN (VISI TTS MANDIRI)**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memaksimalkan strategi pemerintah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah.

#### **5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (VISI TTS MAJU)**

Misi ini dimaksudkan untuk mendorong tercapainya reformasi birokrasi melalui pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang mencakup berbagai aspek, termasuk organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur, partisipasi masyarakat serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.

#### **6. MENDORONG PERCEPATAN TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN STUNTING (VISI TTS SEJAHTERA)**

Misi ini dimaksudkan bahwa seluruh rangkaian proses pembangunan yang dilaksanakan dan hasil yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan keluarga yang memiliki anak *stunting*.

### **3.3. Keselarasan Visi Dan Misi**

1. Keselarasan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 dengan RPJD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan visi dan misi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Timor Tengah Selatan NEKAFMESE Menuju Indonesia Emas 2045, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.1.

Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 dengan  
Visi dan Misi RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

| VISI RPJMD 2025-2029                                                                                     | SELARAS DENGAN | VISI RPJPD 2025-2045                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Timor Tengah Selatan yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan                         |                | Timor Tengah Selatan "Nekafmese" Menuju Indonesia Emas 2045              |
| MISI RPJMD 2025-2029                                                                                     |                | MISI RPJPD 2025-2045                                                     |
| 1. Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Infrastruktur Ramah Lingkungan                     |                | 1. Mewujudkan Transformasi Sosial                                        |
| 2. Memacu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Akselerasi Yang Inklusif                      |                | 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi                                       |
| 3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal            |                | 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola                                   |
| 4. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara Berkelanjutan  |                | 4. Mewujudkan Supremasi Hukum, Stabilitas Dan Kepemimpinan               |
| 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik                                                         |                | 5. Mewujudkan Sosial Budaya Dan Ekologi                                  |
| 6. Mendorong Percepatan Transformasi Sosial Melalui Pengentasan Kemiskinan Dan Penurunan <i>Stunting</i> |                | 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan        |
|                                                                                                          |                | 7. Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan |
|                                                                                                          |                | 8. Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan                                   |

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)

- Keselarasan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029

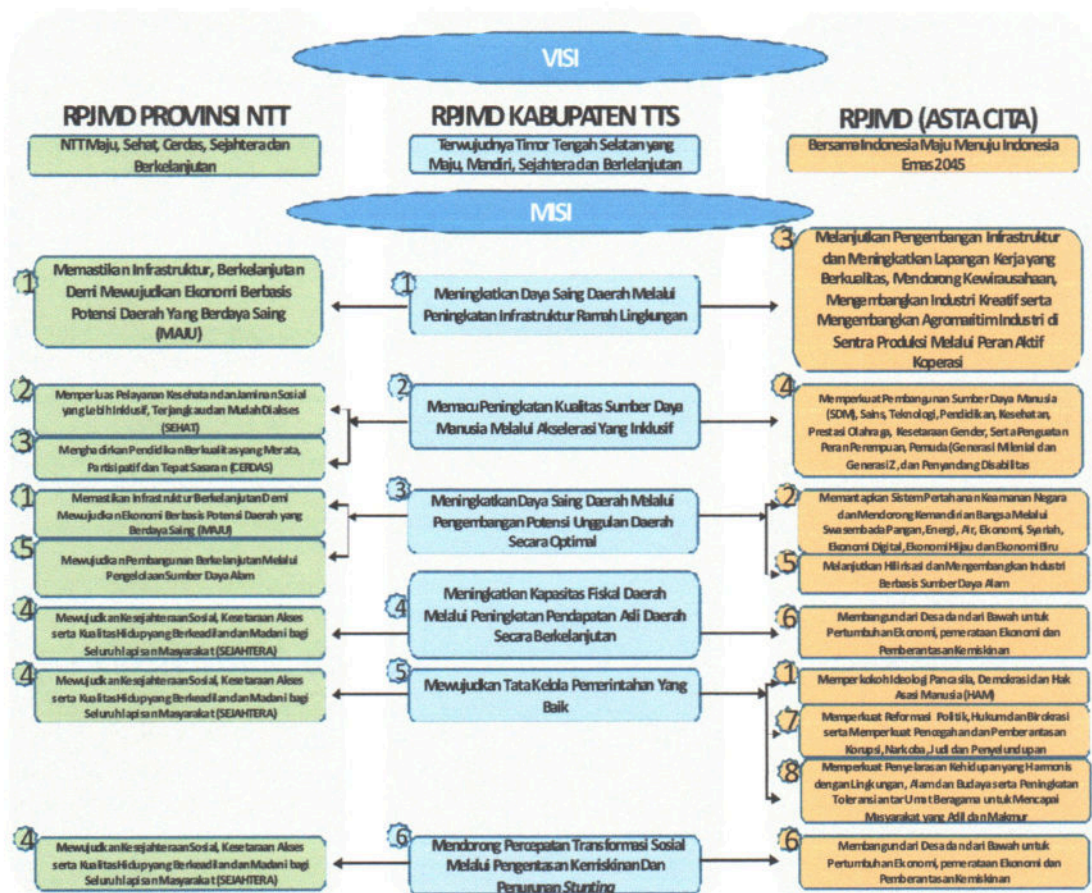
Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN disajikan pada gambar berikut:





Gambar 3.2.

Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN (Asta Cita)



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)

### 3. Keselarasan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029 dengan SDG's Tahun 2015-2030

Penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan diselaraskan dengan SDG's untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berkontribusi pada pencapaian target-target global yang telah ditetapkan dalam SDG's, khususnya dalam konteks sosial, ekonomi, hukum dan lingkungan. Keselarasan RPJMD Kabupaten TTS dengan SDG's dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.

Keselarasan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2029  
dengan SDG's Tahun 2015-2030

| RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029                                                                                  | SDG's Tahun 2015-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Misi 1:</b><br/>Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan infrastruktur ramah lingkungan</p>          | <p><b>Tujuan 6:</b><br/>Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua</p> <p><b>Tujuan 9:</b><br/>Industri, inovasi, dan infrastruktur: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.</p> <p><b>Tujuan 11:</b><br/>Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.</p> <p><b>Tujuan 13:</b><br/>Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.</p> <p><b>Tujuan 17:</b><br/>Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan</p> |
| <p><b>Misi 2:</b><br/>Memacu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Akselerasi Yang Inklusif</p>           | <p><b>Tujuan 3:</b><br/>Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.</p> <p><b>Tujuan 4:</b><br/>Pendidikan Berkualitas: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.</p> <p><b>Tujuan 5:</b><br/>Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum Perempuan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Misi 3:</b><br/>Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal</p> | <p><b>Tujuan 7:</b><br/>Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029                                                                                             | SDG's Tahun 2015-2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | <p><b>Tujuan 8:</b><br/>Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:<br/>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.</p> <p><b>Tujuan 12:</b><br/>Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab:<br/>Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.</p> <p><b>Tujuan 14:</b><br/>Ekosistem Laut: Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.</p> <p><b>Tujuan 15:</b><br/>Ekosistem Daratan: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.</p> |
| <p><b>Misi 4:</b><br/>Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan</p>  | <p><b>Tujuan 8:</b><br/>Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:<br/>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Misi 5:</b><br/>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</p>                                                         | <p><b>Tujuan 16:</b><br/>Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh: Memperkuat Masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Misi 6:</b><br/>Mendorong percepatan transformasi sosial melalui pengentasan kemiskinan dan penurunan <i>stunting</i></p> | <p><b>Tujuan 1:</b><br/>Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| RPJMD Kabupaten TTS Tahun 2025-2029 | SDG's Tahun 2015-2030                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p><b>Tujuan 2:</b><br/>Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan</p> <p><b>Tujuan 10:</b><br/>Berkurangnya Kesenjangan: Mengurangi kesenjangan intra- dan antar Negara</p> |

Sumber: BAPPEDA Kabupaten TTS Tahun 2025 (diolah)

### 3.4. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari misi RPJMD adalah sebagai berikut:

- Misi Satu** Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Infrastruktur Ramah Lingkungan
- Tujuan** 1. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang menjangkau seluruh masyarakat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- Sasaran** 1. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi dan informasi  
2. Peningkatan cakupan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi yang layak dan aman  
3. Peningkatan sistem pengelolaan sampah  
4. Peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat  
5. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim
- Misi Dua** Memacu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Akselerasi yang Inklusif
- Tujuan** 1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat
- Sasaran** 1. Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah  
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat





|                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan            | 2. Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas serta peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan                                                                      |
| Sasaran           | 1. Peningkatan pemenuhan hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas<br>2. Peningkatan akses pemuda dalam pembangunan bidang kecakapan hidup/wirausaha, olahraga dan seni         |
| <b>Misi Tiga</b>  | Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal                                                                                                                            |
| Tujuan            | 1. Terwujudnya pengembangan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat                                                                                                                                             |
| Sasaran           | 1. Peningkatan pendapatan masyarakat<br>2. Peningkatan pengembangan potensi unggulan daerah                                                                                                                           |
| <b>Misi Empat</b> | Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara Berkelanjutan                                                                                                                  |
| Tujuan            | 1. Terwujudnya kemandirian fiskal daerah                                                                                                                                                                              |
| Sasaran           | 1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber PAD                                                                                                                                                         |
| <b>Misi Lima</b>  | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik                                                                                                                                                                         |
| Tujuan            | 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, jujur, adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan                                                                                   |
| Sasaran           | 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik<br>2. Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi<br>3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan<br>4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah |
| <b>Misi Enam</b>  | Mendorong Percepatan Transformasi Sosial Melalui Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan <i>Stunting</i>                                                                                                                 |
| Tujuan            | 1. Terwujudnya pengentasan kemiskinan                                                                                                                                                                                 |
| Sasaran           | 1. Penurunan angka kemiskinan                                                                                                                                                                                         |
| Tujuan            | 2. Terwujudnya pengentasan <i>stunting</i>                                                                                                                                                                            |
| Sasaran           | 1. Penurunan prevalensi <i>stunting</i>                                                                                                                                                                               |





Tabel 3.2.

Tujuan dan sasaran Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030

| Misi                                                                                         | Tujuan                                                                                                                                                | Sasaran | Indikator                                                                                     | Satuan              | Kondisi Awal<br>(2023/2024) | Target                                                                                                                                                                                    |                                                                     |               |               |               |              |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-----|
|                                                                                              |                                                                                                                                                       |         |                                                                                               |                     |                             | 2025                                                                                                                                                                                      | 2026                                                                | 2027          | 2028          | 2029          | 2030         |       |     |
| 1                                                                                            | 2                                                                                                                                                     | 3       | 4                                                                                             | 5                   | 6                           | 7                                                                                                                                                                                         | 8                                                                   | 9             | 10            | 11            | 12           |       |     |
| Misi 1:<br>Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Infrastruktur Ramah Lingkungan | T1<br>Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang menjangkau seluruh masyarakat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan |         | T1                                                                                            | %                   | 53,56                       | 54,82 - 55,45                                                                                                                                                                             | 55,45- 56,08                                                        | 56,08 - 56,71 | 56,71 - 57,34 | 57,34 - 57,97 | 57,97 - 58,6 |       |     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                       | S1.1    | Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi dan informasi |                     |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |               |               |               |              |       |     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                       |         | S1.1                                                                                          | %                   |                             | 41,53                                                                                                                                                                                     | 41,53                                                               | 43,13         | 44,72         | 46,31         | 47,90        | 49,50 |     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                       |         |                                                                                               |                     |                             |                                                                                                                                                                                           | Persentase jalan non status kewenangan kabupaten dalam kondisi baik |               |               |               |              |       |     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                       |         |                                                                                               |                     |                             |                                                                                                                                                                                           | Persentase jaringan internet yang dapat diakses                     |               |               |               |              |       |     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                       |         | S2.1                                                                                          | %                   |                             | 64,86                                                                                                                                                                                     | 64,90                                                               | 64,94         | 64,99         | 65,03         | 65,07        | 65,12 |     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                       |         |                                                                                               |                     |                             |                                                                                                                                                                                           | Persentase rumah layak huni                                         |               |               |               |              |       |     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                       |         |                                                                                               |                     |                             |                                                                                                                                                                                           | Persentase rumah korban bencana yang dibangun                       |               |               |               |              |       |     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                       |         |                                                                                               |                     |                             | %                                                                                                                                                                                         | 87,67                                                               | 92,35         | 97,03         | 100           | 100          | 100   | 100 |
|                                                                                              |                                                                                                                                                       |         |                                                                                               | Rasio elektrifikasi |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |               |               |               |              |       |     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                       |         |                                                                                               | %                   | 59,04                       | 60,26                                                                                                                                                                                     | 61,07                                                               | 61,89         | 62,7          | 63,52         | 64,33        |       |     |
|                                                                                              |                                                                                                                                                       |         |                                                                                               |                     |                             | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten |                                                                     |               |               |               |              |       |     |







| Misi                                                                                     | Tujuan | Sasaran | Indikator                                                                                                 | Satuan                     | Kondisi Awal<br>(2023/2024) | Target |                                                                                |       |                                                        |                       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                          |        |         |                                                                                                           |                            |                             | 2025   | 2026                                                                           | 2027  | 2028                                                   | 2029                  | 2030  |       |       |       |       |
| 1                                                                                        | 2      | 3       | 4                                                                                                         | 5                          | 6                           | 7      | 8                                                                              | 9     | 10                                                     | 11                    | 12    |       |       |       |       |
|                                                                                          |        |         | Peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman) | %                          | 53,19                       | 53,55  | 53,92                                                                          | 54,28 | 54,64                                                  | 55,01                 | 55,37 |       |       |       |       |
|                                                                                          |        |         |                                                                                                           |                            |                             | S3.1   | Peningkatan sistem pengelolaan sampah                                          | S3.1  | Persentase sampah yang tertangani                      | 100                   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|                                                                                          |        |         |                                                                                                           |                            |                             | S4.1   | Peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat           | S4.1  | Persentase daerah irigasi pertanian dalam kondisi baik | 19,36                 | 20,69 | 22,02 | 23,35 | 24,68 | 26,01 |
|                                                                                          |        |         |                                                                                                           |                            |                             | S5.1   | Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim | S5.1  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                       | 71,79                 | 79,19 | 79,36 | 79,53 | 79,7  | 79,87 |
|                                                                                          |        |         |                                                                                                           |                            |                             |        |                                                                                |       | Indeks Resiko Bencana (IRB)                            | 166,2 (Risiko Tinggi) | 160   | 157   | 154   | 150   | 147   |
| Misi 2: Memacu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Akselerasi yang Inklusif | T1     |         | Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah                                                | Tahun                      | 7,21                        | 100    | 100                                                                            | 100   | 100                                                    | 100                   | 100   |       |       |       |       |
|                                                                                          |        |         |                                                                                                           |                            |                             |        |                                                                                |       |                                                        |                       |       |       |       |       |       |
|                                                                                          |        |         |                                                                                                           |                            |                             |        |                                                                                |       |                                                        |                       |       |       |       |       |       |
|                                                                                          |        |         | T1                                                                                                        | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks                      | 66,22  | 67,72                                                                          | 68,47 | 69,22                                                  | 69,97                 | 70,72 |       |       |       |       |
|                                                                                          |        |         | S1.1                                                                                                      | Rata-rata lama sekolah     | Tahun                       | 7,33   | 7,45                                                                           | 7,57  | 7,69                                                   | 7,81                  | 7,93  |       |       |       |       |
|                                                                                          |        |         | S2.1                                                                                                      | Harapan lama sekolah       | Tahun                       | 12,63  | 12,64                                                                          | 12,65 | 12,66                                                  | 12,67                 | 12,68 |       |       |       |       |
|                                                                                          |        |         | S2.1                                                                                                      | Usia Harapan Hidup         | Tahun                       | 71,37  | 71,52                                                                          | 71,67 | 71,82                                                  | 71,97                 | 72,12 |       |       |       |       |



| Misi                                                                                                                       | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal<br>(2023/2024) | Target     |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                            |        |         |           |        |                             | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
| 1                                                                                                                          | 2      | 3       | 4         | 5      | 6                           | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |
|                                                                                                                            |        |         |           |        |                             | 48,23      | 50,23      | 52,23      | 54,23      | 56,23      | 58,23      |
|                                                                                                                            |        |         |           |        |                             | 96,22      | 96,48      | 96,74      | 97         | 97,26      | 97,52      |
|                                                                                                                            |        |         |           |        |                             | 53,73      | 54,73      | 55,73      | 56,73      | 57,73      | 59,73      |
|                                                                                                                            |        |         |           |        |                             | 30         | 30         | 30         | 40         | 40         | 40         |
|                                                                                                                            |        |         |           |        |                             | 13,67      | 15,67      | 17,67      | 19,67      | 21,67      | 23,67      |
|                                                                                                                            |        |         |           |        |                             | 3,9        | 4,3        | 4,7        | 5,1        | 5,5        | 5,9        |
|                                                                                                                            |        |         |           |        |                             | 22.243.525 | 23.204.050 | 24.164.575 | 25.125.100 | 26.085.625 | 27.046.150 |
| Misi 3:<br>Meningkatkan<br>Daya Saing<br>Daerah Melalui<br>Pengembangan<br>Potensi<br>Unggulan<br>Daerah Secara<br>Optimal | T1     | T2      | T1        | T2     | T1                          | 2,63       | 2,62       | 2,62       | 2,62       | 2,62       | 2,62       |
|                                                                                                                            |        |         |           |        |                             | 0,01-2     | 0,01-2     | 0,01-2     | 0,01-2     | 0,01-2     | 0,01-2     |
|                                                                                                                            |        |         |           |        |                             | 68,23      | 69,44      | 70,65      | 71,86      | 73,07      | 74,28      |
|                                                                                                                            |        |         |           |        |                             | 78,9       | 80         | 82,5       | 84,5       | 87,5       | 90         |







| Misi                                                                                                            | Tujuan                                                                                                                                      | Sasaran   | Indikator                                         | Satuan        | Kondisi Awal<br>(2023/2024)   | Target                           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                             |           |                                                   |               |                               | 2025                             | 2026                             | 2027                             | 2028                             | 2029                             | 2030                             |
| Misi 4:<br>Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara Berkelanjutan | 2<br>T1<br>Terwujudnya kemandirian fiskal daerah                                                                                            | 3<br>S1.1 | T1<br>Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)        | 5<br>Kategori | 6<br>0,836 (Sangat Rendah)    | 7<br><0,905 (Sangat Rendah)      | 8<br>1,14-1,378 (Rendah)         | 9<br>1,14-1,378 (Rendah)         | 10<br>1,14-1,378 (Rendah)        | 11<br>1,14-1,378 (Rendah)        | 12<br>1,14-1,378 (Rendah)        |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                             |           | S1.1<br>Persentase PAD terhadap pendapatan daerah | %             | 3,32                          | 4                                | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9                                |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                             |           | T1<br>Indeks Reformasi Birokrasi                  | Kategori      | C                             | C                                | C                                | C                                | CC                               | CC                               | B                                |
| Misi 5:<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik                                                        | 2<br>T1<br>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, jujur, adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan | 3<br>S1.1 | S1.1<br>Indeks SPBE                               | Indeks        | 2,83                          | 3,02                             | 3,21                             | 3,4                              | 3,59                             | 3,78                             | 3,97                             |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                             |           | Indeks Inovasi Daerah                             | Kategori      | 36,69 (Inovatif)              | 47,69 (Inovatif)                 | 58,69 (Inovatif)                 | 69,69 (Sangat Inovatif)          | 80,69 (Sangat Inovatif)          | 91,69 (Sangat Inovatif)          | 91,69 (Sangat Inovatif)          |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                             |           | Indeks Kepuasan Masyarakat                        | Kategori      | 82,87 (Kategori B Zona Hijau) | 78-87,99 (Kategori B Zona Hijau) | 78-87,99 (Kategori B Zona Hijau) | 78-87,99 (Kategori B Zona Hijau) | 78-87,99 (Kategori B Zona Hijau) | 78-87,99 (Kategori B Zona Hijau) | 78-87,99 (Kategori B Zona Hijau) |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                             |           | S2.1<br>Indeks Reformasi Birokrasi                | Kategori      | C                             | C                                | C                                | C                                | CC                               | CC                               | B                                |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                             |           | S3.1<br>Nilai capaian SAKIP                       | Kategori      | B                             | B                                | B                                | B                                | BB                               | BB                               | BB                               |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                             |           | Opini BPK atas laporan keuangan                   | Kategori      | WTP                           | WTP                              | WTP                              | WTP                              | WTP                              | WTP                              | WTP                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                             |           | Capaian penilaian SPM                             | Skor          | 92,86                         | 100                              | 100                              | 100                              | 100                              | 100                              | 100                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                             |           | S4.1<br>Nilai capaian kinerja LPPD                | Kategori      | 2,573 (Rendah)                | Rendah (Skor 2,26 - 2,75)        | Sedang (Skor 2,76 - 3,25)        | Sedang (Skor 2,76 - 3,25)        | Sedang (Skor 2,76 - 3,25)        | Sedang (Skor 2,76 - 3,25)        | Sedang (Skor 2,76 - 3,25)        |





| Misi                                                                                                                           | Tujuan | Sasaran                                    | Indikator | Satuan                                                   | Kondisi Awal<br>(2023/2024) | Target       |           |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                |        |                                            |           |                                                          |                             | 2025         | 2026      | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
| Misi 6:<br>Mendorong<br>Percepatan<br>Transformasi<br>Sosial Melalui<br>Pergentasan<br>Kemiskinan dan<br>Penurunan<br>Stunting | T1     | Terwujudnya<br>pengentasan<br>kemiskinan   | T1        | Persentase<br>penduduk miskin                            | 5                           | 7            | 8         | 9            | 10           | 11           | 12           |
|                                                                                                                                |        |                                            | S1.1      | Angka<br>kemiskinan                                      | %                           | 23,98        | 23,28     | 22,58        | 21,88        | 21,18        | 20,48        |
|                                                                                                                                | T2     | Terwujudnya<br>pengentasan <i>stunting</i> | S1.1      | Penurunan<br>angka<br>kemiskinan                         | %                           | 23,98        | 23,28     | 22,58        | 21,88        | 21,18        | 20,48        |
|                                                                                                                                |        |                                            |           | Indeks Gini                                              | Rasio                       | 0,2 -<br>0,3 | 0,2 - 0,3 | 0,2 -<br>0,3 | 0,2 -<br>0,3 | 0,2 -<br>0,3 | 0,2 -<br>0,3 |
|                                                                                                                                | T2     | Terwujudnya<br>pengentasan <i>stunting</i> |           | Prevalensi<br><i>stunting</i>                            | %                           | 54,3         | 51,8      | 49,3         | 46,8         | 44,3         | 41,8         |
|                                                                                                                                |        |                                            | S2.1      | Persentase balita<br><i>wasting</i> (gizi<br>buruk)      | %                           | 13           | 12,7      | 12,4         | 12,1         | 11,8         | 11,5         |
|                                                                                                                                |        |                                            |           | Persentase balita<br><i>underweight</i> (gizi<br>kurang) | %                           | 31,3         | 30,7      | 30           | 29,3         | 28,6         | 27,9         |

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)





### **3.5. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025-2030. Strategi dan arah kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi misi tersebut. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2030, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

#### **3.5.1 Strategi Pembangunan Daerah**

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan instrumen kebijakan yang diperlukan sebagai rujukan dalam perumusan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan bagi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Timor Tengah Selatan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Timor Tengah Selatan yang relevan, relatif dominan dan strategis agar program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai kondisi objektif.

Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan, sebagai penjabaran tujuan dan sasaran dari misi dalam rangka mewujudkan visi kabupaten disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| No                                                                                               | Tujuan                                                                                                                                          | Sasaran                                                                                         | Strategi                                                                                                                                                   | Arah kebijakan                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                | 2                                                                                                                                               | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                      |
| <b>Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Infrastruktur Ramah Lingkungan</b> |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |
| 1                                                                                                | Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang menjangkau seluruh masyarakat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | 1 Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi dan informasi | 1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur jalan kabupaten yang berstatus maupun non status disertai fasilitas perlengkapan jalan | 1 Pembangunan dan pengembangan 19 ruas jalan strategis kabupaten serta ruas jalan kabupaten lainnya                    |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                            | 2 Pembangunan dan pengembangan ruas jalan non status kewenangan kabupaten                                              |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                            | 3 Pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan                                                             |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 2 Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan mitra                                                                                                | 1 Peningkatan cakupan layanan informasi                                                                                |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 2 Peningkatan cakupan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi yang layak dan aman    | 1 Meningkatkan kemitraan dalam pemenuhan akses dan kualitas layanan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi bagi masyarakat sampai pelosok      | 1 Penyediaan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria tertentu |





| No | Tujuan | Sasaran                                                                          | Strategi                                                                                                                                                            | Arah kebijakan                                                                                                                         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2      | 3                                                                                | 4                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                      |
|    |        | 3 Peningkatan sistem pengelolaan sampah                                          | 1 Meningkatkan kemitraan dalam pengelolaan sampah melalui penyediaan sarana dan pengolahan sampah                                                                   | 1 Pengurangan sampah mulai dari sumber (rumah tangga) melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir |
|    |        | 4 Peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat           | 1 Meningkatkan kemitraan dalam peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi pada daerah-daerah irigasi potensial sebagai lumbung pangan daerah                     | 1 Pemenuhan ketersediaan bangunan jaringan irigasi yang baik dan berfungsi                                                             |
|    |        |                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 2 Meningkatkan produksi pertanian                                                                                                      |
|    |        | 5 Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim | 1 Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup melalui rehabilitasi wilayah atau kawasan yang telah berubah fungsi serta mempertahankan wilayah yang masih terpelihara | 1 Optimalisasi regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang (kawasan lindung dan budidaya)     |
|    |        |                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 2 Peningkatan mitigasi, pasca dan tanggap bencana                                                                                      |
|    |        |                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 3 Peningkatan konservasi air dan lahan                                                                                                 |
|    |        |                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 4 Peningkatan pengawasan dan pembinaan aktifitas pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan                                |
|    |        |                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
|    |        |                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
|    |        |                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |



| No                                                                                       | Tujuan                                                                                                            | Sasaran | Strategi                                                   | Arah kebijakan |                                                                                      |   |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                        | 2                                                                                                                 | 3       | 4                                                          | 5              |                                                                                      |   |                                                                                                                                                                             |
| Misi 2: Memacu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Akselerasi yang Inklusif |                                                                                                                   |         |                                                            |                |                                                                                      |   |                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                        | Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat. | 1       | Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah | 1              | Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau                  | 1 | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan                                                                                                                                  |
|                                                                                          |                                                                                                                   |         |                                                            |                |                                                                                      | 2 | Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan                                                                                                                      |
|                                                                                          |                                                                                                                   |         |                                                            |                |                                                                                      | 3 | Penanganan anak tidak sekolah dan yang putus sekolah                                                                                                                        |
|                                                                                          |                                                                                                                   |         |                                                            |                |                                                                                      | 4 | Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran                                                                                                                       |
|                                                                                          |                                                                                                                   | 2       | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat                   | 1              | Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif, muda dan terjangkau | 1 | Peningkatan peran dan dukungan pemerintah desa dalam promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan                                                             |
|                                                                                          |                                                                                                                   |         |                                                            |                |                                                                                      | 2 | Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pola hidup sehat                                                                                                             |
|                                                                                          |                                                                                                                   |         |                                                            |                |                                                                                      | 3 | Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan |



| No                                                                                                 | Tujuan                                                                                                                                         | Sasaran |                                                                                                       | Strategi |                                                                                                          | Arah kebijakan |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                              | 3       |                                                                                                       | 4        |                                                                                                          | 5              |                                                                                                                   |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                                                                       |          |                                                                                                          | 4              | Inovasi dan pemanfaatan pengembangan kesehatan digital dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan    |
| 2                                                                                                  | Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas serta peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan. | 1       | Peningkatan pemenuhan hak perempuan, perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas | 1        | Meningkatkan pembangunan inklusif dan responsif terhadap perempuan dan anak serta penyandang disabilitas | 1              | Penguatan regulasi dan penegakan hukum                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                                                                       |          |                                                                                                          | 2              | Perluasan akses layanan dasar yang inklusif                                                                       |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                                                                       |          |                                                                                                          | 3              | Pemberdayaan ekonomi dan sosial                                                                                   |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                                                                       |          |                                                                                                          | 4              | Pengembangan Sekoper (Sekolah Perempuan)                                                                          |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                | 2       | Peningkatan akses pemuda dalam pembangunan bidang kecakapan hidup/wira usaha, olahraga dan seni.      | 1        | Pengembangan generasi muda yang berdaya saing                                                            | 1              | Peningkatan akses dan fasilitas olah raga                                                                         |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                                                                       |          |                                                                                                          | 2              | Pengembangan sistem pembinaan dan kompetisi olahraga                                                              |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |                                                                                                       |          |                                                                                                          | 3              | Peningkatan partisipasi kepemudaan dan wirausaha muda                                                             |
| Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal |                                                                                                                                                |         |                                                                                                       |          |                                                                                                          |                |                                                                                                                   |
| 1                                                                                                  | Terwujudnya pengembangan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat                                                                         | 1       | Peningkatan pendapatan masyarakat                                                                     | 1        | Meningkatkan ekonomi masyarakat yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis potensi daerah                 | 1              | Pengembangan sektor unggulan daerah dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif |

| No                                                                                                           | Tujuan                                                                                                                            | Sasaran |                                                            | Strategi |                                                                                                                           | Arah kebijakan |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                            | 2                                                                                                                                 | 3       |                                                            | 4        |                                                                                                                           | 5              |                                                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                                                   |         |                                                            |          |                                                                                                                           | 2              | Pemberdayaan dan pengembangan UMKM, Bumdes dan koperasi melalui pelatihan manajemen usaha dan akses pembiayaan |
|                                                                                                              |                                                                                                                                   |         |                                                            |          |                                                                                                                           | 3              | Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi                                    |
| Misi 4: Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara Berkelanjutan |                                                                                                                                   |         |                                                            |          |                                                                                                                           |                |                                                                                                                |
| 1                                                                                                            | Terwujudnya kemandirian fiskal daerah                                                                                             | 1       | Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber PAD | 1        | Mendorong kreatifitas dan langkah inovatif melalui <i>reward</i> dan <i>punishment</i> untuk semua kumponen pengelola PAD | 1              | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD                                                             |
|                                                                                                              |                                                                                                                                   |         |                                                            |          |                                                                                                                           | 2              | Optimalisasi anggaran bagi OPD pengelola PAD yang potensial dan strategis                                      |
| Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik                                                        |                                                                                                                                   |         |                                                            |          |                                                                                                                           |                |                                                                                                                |
| 1                                                                                                            | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, jujur, adil, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan | 1       | Peningkatan kualitas pelayanan publik                      | 1        | Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik                                                              | 1              | Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital berdasarkan SOP dan ketentuan yang telah ditetapkan             |
|                                                                                                              |                                                                                                                                   | 2       | Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi       | 1        | Menata area atau wilayah birokrasi yang menghambat pelayanan publik                                                       | 1              | Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah                                                          |



| No                                                                                                     | Tujuan                             | Sasaran |                                                         | Strategi |                                                                                                | Arah kebijakan |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                  | 3       |                                                         | 4        |                                                                                                | 5              |                                                                                      |
|                                                                                                        |                                    | 3       | Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan          | 1        | Meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien dan bertanggung jawab               | 1              | Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja                    |
|                                                                                                        |                                    |         |                                                         |          |                                                                                                | 2              | Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dan penguatan peran pengawasan internal |
|                                                                                                        |                                    |         |                                                         |          |                                                                                                | 3              | Optimalisasi penganggaran pada urusan wajib pelayanan dasar                          |
|                                                                                                        |                                    | 4       | Peningkatan kualitas penyelenggara an urusan pemerintah | 1        | Meningkatkan kualitas penilaian capaian kinerja dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah | 1              | Peningkatan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah         |
| Misi 6: Mendorong Percepatan Transformasi Sosial Melalui Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting |                                    |         |                                                         |          |                                                                                                |                |                                                                                      |
| 1                                                                                                      | Terwujudnya pengentasan kemiskinan | 1       | Penurunan angka kemiskinan                              | 1        | Penanganan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan                                         | 1              | Pemenuhan akses dan kualitas layanan dasar bagi masyarakat miskin                    |
|                                                                                                        |                                    |         |                                                         |          |                                                                                                | 2              | Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin                                   |
|                                                                                                        |                                    |         |                                                         |          |                                                                                                | 3              | Pemutakhiran data kemiskinan sampai pada level By Name By Address (BNBA)             |

| No | Tujuan                                  | Sasaran                                | Strategi                                                                             | Arah kebijakan                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                       | 3                                      | 4                                                                                    | 5                                                                                                                                                                             |
| 2  | Terwujudnya pengentasan <i>stunting</i> | 1 Penurunan prevalensi <i>stunting</i> | 1 Meningkatkan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> | 1 Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui pengembangan inovasi daerah<br>2 Optimalisasi intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan <i>stunting</i> |

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)

### 3.5.2 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten TTS 2026-2030

Pembangunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025-2029 disajikan dalam tahapan-tapahan spesifik, yang menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan perencanaan pembangunan secara bertahap. Tahapan ini disajikan dalam tabel 3.4:

Tabel 3.4.

Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026-2030

| TAHAP I (2026)                                                                                                                                                     | TAHAP II (2027)                                                                                                      | TAHAP III (2028)                                                                                                                         | TAHAP IV (2029)                                                                                       | TAHAP V (2030)                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                | (2)                                                                                                                  | (3)                                                                                                                                      | (4)                                                                                                   | (5)                                                                             |
| PEMENUHAN INFRASTRUKTUR DAN SDM BERKUALITAS UNTUK OPTIMALISASI POTENSI UNGGULAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF SERTA PENINGKATAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH | AKSELERASI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN SDM UNGGUL UNTUK MENDORONG DAYA SAING POTENSI DAERAH DAN KEMANDIRIAN FISKAL | PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH BERBASIS POTENSI UNGGULAN MELALUI INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG, SDM YANG UNGGUL DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN | PENGUATAN HASIL PEMBANGUNAN MELALUI INFRASTRUKTUR DAN SDM BERKUALITAS SERTA TATA KELOLA YANG INOVATIF | PERWUJUDAN TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN |

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)



### 3.5.3 Prioritas Daerah

Kerangka perumusan program prioritas RPJMD secara umum diturunkan dari penelaahan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diperoleh *outcome*, indikator yang bermuara pada pemilihan program-program prioritas daerah yang akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun dokumen turunan selanjutnya. Secara umum, kerangka perumusan program prioritas pembangunan Kabupaten TTS dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.  
Pemetaan Misi dengan Prioritas Daerah

| MISI                            | 1       | 2                                                                                                     | 3     | 4    | 5 | 6         |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|-----------|
| PRIORITAS DAERAH (PD)           | 1,2,3,7 | 2,3,4                                                                                                 | 1,5,7 | 1,5, | 6 | 1,2,3,5,7 |
| Dengan rincian sebagai berikutL |         |                                                                                                       |       |      |   |           |
| <b>MISI</b>                     | 1       | Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan infrastruktur ramah lingkungan                     |       |      |   |           |
|                                 | 2       | Memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akselerasi yang inklusif                      |       |      |   |           |
|                                 | 3       | Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan potensi unggulan daerah secara optimal            |       |      |   |           |
|                                 | 4       | Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan  |       |      |   |           |
|                                 | 5       | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik                                                         |       |      |   |           |
|                                 | 6       | Mendorong percepatan transformasi sosial melalui pengentasan kemiskinan dan penurunan <i>stunting</i> |       |      |   |           |
| <b>PRIORITAS DAERAH (PD)</b>    | 1       | Penyediaan infrastruktur dasar sebagai penunjang aktifitas publik pada berbagai sektor                |       |      |   |           |
|                                 | 2       | Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan akses dan layanan pendidikan dasar.        |       |      |   |           |
|                                 | 3       | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pendekatan promotif.                                 |       |      |   |           |

| MISI                  | 1       | 2                                                          | 3     | 4    | 5 | 6         |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------|------|---|-----------|
| PRIORITAS DAERAH (PD) | 1,2,3,7 | 2,3,4                                                      | 1,5,7 | 1,5, | 6 | 1,2,3,5,7 |
|                       | 4       | Peningkatan kemampuan fiskal daerah                        |       |      |   |           |
|                       | 5       | Pengembangan potensi daerah yang unggul secara komparatif. |       |      |   |           |
|                       | 6       | Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan           |       |      |   |           |
|                       | 7       | Pengentasan masalah kemiskinan dan <i>stunting</i>         |       |      |   |           |

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)

### 3.5.4 Lokus Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan wilayah umumnya berfokus pada pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk membuka isolasi daerah, meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2024 memiliki jumlah penduduk 490.642 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,75%. Pada tahun 2030 proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan akan menjadi sebanyak 521.280 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat akan membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan kebutuhan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam pembangunan wilayah, adanya penyediaan infrastruktur (konektivitas, energi dan sarana prasarana dasar) menjadi faktor pendorong yang penting dan memerlukan adanya fokus dan kekuatan fiskal daerah. Akan tetapi pembangunan dalam dan antar wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih kurang merata terutama terkait dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur masih terpusat pada kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Timor Tengah





Selatan, pusat-pusat pemerintahan di kecamatan serta kantong-kantong kemiskinan ekstrem maupun *stunting*.

Pengembangan wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan hirarki perkotaan terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) SoE, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Niki-Niki, Panite, Kapan dan OeEkam, Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) Oebobo, Siso, Pusu, Oinlasi, Kualin, Kolbano, Kuanfatu, Napi, Polen, Boking, Nunkolo dan Ayotupas serta Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL) Oepliki, Nunbena, Nunuhkniti, Noebana, Fatumnasi, Tobu, Salbait, Binaus, Tetaf, Kot'olin, Lotas, Toianas, Oenino, Nunfutu dan Santian, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna mempercepat pertumbuhan wilayah. Dalam pengembangan wilayah berdasarkan hirarki tersebut masih diperlukan adanya dukungan peningkatan infrastruktur dasar perkotaan dan perdesaan, peningkatan konektivitas penghubung antar kawasan pada kawasan yang masih tertinggal, terisolir, daerah perbatasan serta peningkatan ekonomi melalui sektor unggulan.

Dalam hal penyediaan aksesibilitas (konektivitas desa kota dan aksesibilitas jalan) melalui upaya pembangunan ruas jalan guna meningkatkan aksesibilitas di beberapa kecamatan dan desa strategis. Upaya ini belum mampu meningkatkan distribusi dan pola pergerakan sehingga masih diperlukan dukungan pembangunan maupun peningkatan akses jalur penghubung antar PKW, PKLp, PPK dan PPL khususnya untuk mendukung jalur distribusi hulu hilir yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan disusun dengan mengacu pada RTRW. Tujuan penataan ruang dalam pengembangan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah mewujudkan kabupaten yang berdaya saing berbasis pada pengembangan pertanian,



peternakan, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berkelanjutan menuju masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.

Pemantapan dan perwujudan konstelasi pusat kegiatan kabupaten yang berhierarki, PKW SoE, PKLp Niki-Niki, Panite, Kapan dan OeEkam, PPK Oebobo, Siso, Pusu, Oinlasi, Kualin, Kolbano, Kuanfatu, Napi, Polen, Boking, Nunkolo dan Ayotupas serta PPL yakni Oepliki, Nunbena, Nunuhkniti, Noebana, Fatumnasi, Tobu, Salbait, Binaus, Tetaf, Kot'olin, Lotas, Toianas, Oenino, Nunfutu dan Santian, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna mempercepat pertumbuhan wilayah, yang meliputi:

- Pengembangan perkotaan SoE sebagai PKW dengan fungsi pemerintahan sekaligus menjadi pusat pengembangan;
- Pemantapan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki dengan membentuk PKW, PKLp, PPK dan PPL;
- Mempersiapkan dan mengembangkan Perkotaan SoE, Batu Putih, Niki-Niki sebagai perkotaan yang menunjang perkembangan kawasan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata;
- Mempersiapkan dan mengembangkan Kecamatan Kolbano sebagai kawasan pengembangan pelabuhan laut; dan
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis.

Tabel 3.6.  
Lokus Pengembangan

| Lokus        | Pengembangan                                                                                                                                    | Program Strategis                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PKW Kota SoE | Pembangunan jalan, pengembangan pendidikan, kesehatan, olah raga, pusat perdagangan dan jasa, pengembangan industri, pengembangan holtikultura. | Peningkatan sarana pendidikan                                                      |
|              |                                                                                                                                                 | Peningkatan kualitas rumah sakit                                                   |
|              |                                                                                                                                                 | Peningkatan sarana prasarana olah raga                                             |
|              |                                                                                                                                                 | Pembangunan BLK                                                                    |
|              |                                                                                                                                                 | Pembangunan ruang terbuka non hijau (pasar lama)                                   |
|              |                                                                                                                                                 | Peningkatan produktifitas pertanian                                                |
|              |                                                                                                                                                 | Pembangunan drainase                                                               |
|              |                                                                                                                                                 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)            |
|              |                                                                                                                                                 | Pembangunan dan rehabilitasi jalan serta pembangunan infrastruktur pelengkap jalan |
|              |                                                                                                                                                 |                                                                                    |





| Lokus          | Pengembangan                                                                                                                                                          | Program Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                       | Penanganan dan pencegahan kawasan kumuh perkotaan<br>Pengembangan pariwisata<br>Pembangunan sarana telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PKLp Kapan     | Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (padi, jagung, perkebunan, hortikultura), pengembangan pariwisata, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup | Peningkatan produktifitas pertanian<br>Pengembangan pariwisata<br>Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup<br>Pembangunan dan rehabilitasi jalan serta pembangunan infrastruktur pelengkap jalan<br>Peningkatan sarana pendidikan<br>Peningkatan sarana kesehatan<br>Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)<br>Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar<br>Pembangunan sarana telekomunikasi |
| PKLp Panite    | Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (jagung, padi), pengembangan pariwisata, pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya                   | Peningkatan produktifitas pertanian<br>Pengembangan pariwisata<br>Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya<br>Pembangunan dan rehabilitasi jalan serta pembangunan infrastruktur pelengkap jalan<br>Peningkatan sarana pendidikan<br>Peningkatan sarana kesehatan<br>Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar<br>Pembangunan sarana telekomunikasi                                                                    |
| PKLp Niki-Niki | Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (jagung, padi hortikultura), pengembangan pariwisata, perikanan tangkap dan perikanan budidaya                   | Peningkatan produktifitas pertanian<br>Pengembangan pariwisata<br>Pembangunan dan rehabilitasi jalan serta pembangunan infrastruktur pelengkap jalan<br>Peningkatan sarana pendidikan<br>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)<br>Peningkatan produktifitas pertanian<br>Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar<br>Pembangunan sarana telekomunikasi                                           |
| PKLp OeEkam    | Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (jagung, padi, hortikultura), pengembangan pariwisata,                                                           | Pengembangan pariwisata<br>Pembangunan dan rehabilitasi jalan serta pembangunan infrastruktur pelengkap jalan<br>Peningkatan sarana pendidikan<br>Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)<br>Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar<br>Pembangunan sarana telekomunikasi                                                                                                                         |

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)



### 3.5.5 Arah Kebijakan

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2029 akan lebih optimal dengan didukung oleh arah kebijakan yang akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan tahunan ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan setiap tahun untuk penentuan tema dan prioritas daerah setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.3 (Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan) diatas.

### 3.5.6 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilakukan selama tahun 2026-2030 dirumuskan dengan menggunakan *cascading* kinerja. Penjabaran program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut.





Tabel 3.7.

Program Prioritas RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026-2030

| Visi/<br>misi                                                                             | Tujuan                                                                                                                                          | Sasaran                                                                                         | Outcome                                                  | Indikator                                                                                                                                                                                 | Satuan | Program Prioritas                                                | Perangkat<br>Daerah |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                                                                                               | 3                                                                                               | 4                                                        | 5                                                                                                                                                                                         | 6      | 7                                                                | 8                   |
| VISI"TERWUJUDNYA TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN".   |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                           |        |                                                                  |                     |
| MISI 1: MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                           |        |                                                                  |                     |
| 1                                                                                         | Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang menjangkau seluruh masyarakat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | 1 Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan kenyamanan transportasi dan informasi | Kemantapan jalan sesuai dengan standar keselamatan jalan | Indeks Pembangunan Infrastruktur                                                                                                                                                          | %      |                                                                  |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                          | Tingkat kemantapan jalan kabupaten                                                                                                                                                        | %      | Program Penyelenggaraan Jalan                                    | PUPR                |
|                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                          | Persentase jalan non status kewenangan kabupaten dalam kondisi baik                                                                                                                       | %      | Program Penyelenggaraan Jalan                                    |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                           | %      | Program informasi dan komunikasi publik                          |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                          | Persentase rumah layak huni                                                                                                                                                               | %      | Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman       | PRKP                |
| 2                                                                                         | Peningkatan cakupan rumah layak huni, listrik, air bersih dan sanitasi layak                                                                    | Meningkatkan Kualitas Permukiman Masyarakat                                                     | Meningkatkan Kualitas Permukiman Masyarakat              | Persentase rumah korban bencana yang dibangun                                                                                                                                             | %      | Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman       |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                          | Rasio Elektrifikasi                                                                                                                                                                       | %      | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)    | PLN                 |
|                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                          | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten | %      | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | PRPK                |





| Visi/<br>misi                                                                                    | Tujuan                                                                                                            | Sasaran | Outcome                                                                        | Indikator                                                                                                            | Satuan | Program Prioritas                                                                                                                                        | Perangkat<br>Daerah |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                | 2                                                                                                                 | 3       | 4                                                                              | 5                                                                                                                    | 6      | 7                                                                                                                                                        | 8                   |
|                                                                                                  |                                                                                                                   |         | Meningkatkan Kualitas Permukiman Masyarakat                                    | Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman) | %      | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                                                                   | PRPK                |
|                                                                                                  |                                                                                                                   | 3       | pengurangan pencemaran lingkungan                                              | Persentase sampah yang tertangani                                                                                    | %      | Program Pengelolaan Sampahan; Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampahan Regional                                                              | DLH, PRKP           |
|                                                                                                  |                                                                                                                   | 4       | Peningkatan kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat           | Presentase daerah irigasi pertanian dalam kondisi baik                                                               | %      | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                                                                | PU dan TPH          |
|                                                                                                  |                                                                                                                   | 5       | Peningkatan pelestarian lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                     | Indeks | Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                      | DLH                 |
|                                                                                                  |                                                                                                                   |         | Menurunkan Risiko Bencana                                                      | Indeks Resiko Bencana (IRB)                                                                                          | Indeks | Program Penanggulangan Bencana                                                                                                                           | BPBD                |
|                                                                                                  |                                                                                                                   |         |                                                                                | Persentase ketaatan terhadap dokumen tata ruang                                                                      | %      | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                                                                   | PUPR                |
| <b>MISI. 2. MEMACU PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI AKSELERASI YANG INKLUSIF</b> |                                                                                                                   |         |                                                                                |                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                          |                     |
| 1                                                                                                | Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat. | 1       | Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah                     | Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas Bagi Semua                                                                 | Indeks | Program Pengelolaan Pendidikan<br>Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan<br>Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | P dan K             |







| Visi/<br>misi | Tujuan | Sasaran | Outcome                                                                                                                                        | Indikator                                                             | Satuan | Program Prioritas                                                                                                                                                                                                                                  | Perangkat Daerah |
|---------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1             | 2      | 3       | 4                                                                                                                                              | 5                                                                     | 6      | 7                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                |
|               |        |         | Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas Bagi Semua                                                                                           | Harapan lama sekolah                                                  | Tahun  | Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan                                                                                                   | P dan K          |
|               |        | 2       | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat                                                                                                      | Umur Harapan Hidup                                                    | Tahun  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sedian Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinkes           |
|               | 2      | 1       | Peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas serta peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan. | Meningkatkan kesetaraan gender                                        | Indeks | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                                                                     | P3A              |
|               |        |         | Meningkatkan Kesetaraan Gender                                                                                                                 | Indeks Pemberdayaan Gender                                            | Indeks | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                                                                     | P3A              |
|               |        |         | Pemenuhan Hak Anak                                                                                                                             | Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sampai tuntas | %      | Program Perlindungan Khusus Anak                                                                                                                                                                                                                   | P3A              |
|               |        |         | Meningkatnya penyandang disabilitas yang di fasilitas/ diberdayakan                                                                            | Persentase penyandang disabilitas yang difasilitasi                   | %      | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                                                                                                        | Dinsos           |



| Visi/<br>misi                                                                                                        | Tujuan                                                                                                                                        | Sasaran | Outcome                                              | Indikator                                       | Satuan          | Program Prioritas                                                                                                                                                                                        | Perangkat<br>Daerah |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                    | 2                                                                                                                                             | 3       | 4                                                    | 5                                               | 6               | 7                                                                                                                                                                                                        | 8                   |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 2       | Meningkatkan Daya Saing<br>Kepemudaan                | Persentase pemuda<br>yang berprestasi           | %               | Program Pengeembangan<br>Kapasitas Daya Saing<br>Kepemudaan                                                                                                                                              | Dispora             |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         | Meningkatkan<br>Pembudayaan dan Prestasi<br>Olahraga | Peningkatan Prestasi<br>Olahraga                | %               | Program Pengembangan<br>Daya Saing<br>Keolahragaan                                                                                                                                                       | Dispora             |
| <b>MISI. 3. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH SECARA OPTIMAL</b>           |                                                                                                                                               |         |                                                      |                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 1                                                                                                                    | Terwujudnya<br>pengembangan potensi<br>daerah untuk<br>kesejahteraan masyarakat                                                               | 1       | Meningkatnya<br>pertumbuhan ekonomi                  | Pertumbuhan ekonomi<br><br>PDRB perkapita       | %<br><br>Rupiah | Program Penyediaan dan<br>Pengembangan sarana<br>pertanian; Program<br>penyediaan dan<br>pengembangan prasarana<br>pertanian; Program<br>pengelolaan perikanan<br>Tangkap; Program<br>Perikanan Budidaya | Dinas TPHP          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         | Meningkatnya<br>pertumbuhan ekonomi                  | Tingkat Pengangguran<br>Terbuka (TPT)           | %               | Program Pelatihan Kerja<br>dan Produktifitas Tenaga<br>Kerja                                                                                                                                             | Nakertrans          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         | Meningkatnya<br>pertumbuhan ekonomi                  | Inflasi                                         | Nilai           | Program Stabilisasi<br>Harga Barang<br>Kebutuhan Pokok dan<br>Barang Penting                                                                                                                             | dinas UMKM          |
| <b>MISI. 4. MENINGKATKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA BERKELANJUTAN</b> |                                                                                                                                               |         |                                                      |                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 1                                                                                                                    | Terwujudnya kemandirian<br>fiskal daerah                                                                                                      |         |                                                      | Indeks Kapasitas<br>Fiskal Daerah (IKFD)        | Kategori        |                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 1       | Meningkatnya kemandirian<br>daerah                   | Persentase PAD<br>terhadap pendapatan<br>daerah | %               | Program Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                                                                                                                                                 | Bappenda            |
| <b>MISI. 5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>                                                        |                                                                                                                                               |         |                                                      |                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 1                                                                                                                    | Terwujudnya tata kelola<br>pemerintahan yang efektif,<br>efisien, profesional, jujur,<br>adil, transparan dan dapat<br>dipertanggung-jawabkan |         |                                                      | Indeks Reformasi<br>Birokrasi                   | Kategori        |                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 1       | meningkatkan kualitas tata<br>kelola hukum di daerah | Indeks SPBE                                     | Poin            | Program<br>Informatika                                                                                                                                                                                   | Kominfo             |







| Visi/<br>misi                                                                                       | Tujuan                             | Sasaran                    | Outcome                                         | Indikator                                                                                                      | Satuan   | Program Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Perangkat<br>Daerah                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2                                  | 3                          | 4                                               | 5                                                                                                              | 6        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                                                      |
|                                                                                                     |                                    |                            |                                                 | Indeks Inovasi Daerah                                                                                          | Kategori | Program Riset dan Inovasi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Balitbang                                                              |
|                                                                                                     |                                    |                            |                                                 | Indeks Masyarakat                                                                                              | Kategori | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PMPTSP                                                                 |
|                                                                                                     |                                    |                            |                                                 | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Abses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) | %        | Program Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kominfo                                                                |
|                                                                                                     |                                    | 2                          |                                                 | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                     | Predikat | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                     | Setda                                                                  |
|                                                                                                     |                                    | 3                          | Meningkatnya kinerja pemerintah                 | Nilai capaian SAKIP                                                                                            | %        | Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi                                                                                                                                                                                                                                                            | Inspektorat                                                            |
|                                                                                                     |                                    | 4                          | Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat | Opini BPK atas laporan keuangan Capaian penilaian SPM                                                          | Kategori | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                     | Setda                                                                  |
|                                                                                                     |                                    |                            |                                                 | Nilai Capaian Kinerja LPPD                                                                                     | Dokumen  | Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BPKAD                                                                  |
|                                                                                                     |                                    |                            |                                                 |                                                                                                                | Kategori | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                     | Setda                                                                  |
|                                                                                                     |                                    |                            |                                                 |                                                                                                                | Kategori | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                     | Setda                                                                  |
| <b>MISI 6. MENDORONG PERCEPATAN TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN STUNTING</b> |                                    |                            |                                                 |                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
| 1                                                                                                   | Terwujudnya pengentasan kemiskinan |                            |                                                 | Persentase penduduk miskin                                                                                     | %        | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; | Dinas TPHP, Perikanan, Peternakan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, UMKM |
|                                                                                                     | 1                                  | Penurunan angka kemiskinan | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat           | Angka Kemiskinan                                                                                               | %        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|                                                                                                     |                                    |                            | Meningkatnya pendapatan masyarakat              | Indeks Gini                                                                                                    | Rasio    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |

Tgl cetak: 20 Agustus 2025

BAB III. - 183 -





| Visi/<br>misi | Tujuan                           | Sasaran                       | Outcome                  | Indikator                                                                                                                          | Satuan      | Program Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perangkat Daerah                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                | 3                             | 4                        | 5                                                                                                                                  | 6           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                      |
|               |                                  |                               |                          |                                                                                                                                    |             | Program Pemberdayaan Usaha Menengah; Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM); Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedauletan dan Kemandirian Pangan; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Penanganan Kerawanan Pangan; Program Pengelolaan Pendidikan; Program kesehatan upaya pemenuhan upaya kesehatan perorangan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. |                                                                                                                                        |
| 2             | Terwujudnya pengentasan stunting | Penurunan prevalensi stunting | Meningkatkan status Gizi | Prevalensi stunting<br>Persentase balita gizi buruk ( <i>wasting</i> )<br><br>Prevalensi balita gizi kurang ( <i>underweight</i> ) | %<br>%<br>% | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); Program Pengawasan Keamanan Pangan; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Pengelolaan Pendidikan; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.                                                                                                    | P2KB, P dan K, DKP, Kesehatan, TPHP, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, PRKP, Kominfo, Dukcapil, P3A, Sosial, PMD dan Bappeda. |

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)





# R P J M D

2023 - 2029



B  
A  
B

IV

14





## BAB IV

### PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

#### 4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025–2029 didukung dengan program perangkat daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kebijakan dan mencapai sasaran yang tertuang dalam RPJMD. Program pembangunan daerah disusun guna menggambarkan keterkaitan antar program perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: 1) Penjabaran visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih; 2) Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah; 3) Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM); 4) Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup; dan 5) Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026-2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.







Tabel 4.1

## Program Perangkat Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2026-2030

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan    | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                      | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 | PD Penanggung Jawab |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------------------|
|                                                                 |                                                                                                          |               |        | 2026   |                 | 2027   |                 | 2028   |                 | 2029   |                 | 2030   |                 |                     |
|                                                                 |                                                                                                          |               |        | Target | Pagu (juta Rp)  | Target | Pagu (juta Rp)  | Target | Pagu (juta Rp)  | Target | Pagu (juta Rp)  | Target | Pagu (juta Rp)  |                     |
| 1                                                               | 2                                                                                                        | 3             | 4      | 5      | 6               | 7      | 8               | 9      | 10              | 11     | 12              | 13     | 14              | 15                  |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                          |               |        |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |                                                                                                          |               |        |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  |                                                                                                          |               |        |        | 138.313.148.250 |        | 139.723.942.362 |        | 141.149.126.574 |        | 142.588.847.665 |        | 144.043.253.911 | Dinas P & K         |
| Outcome                                                         |                                                                                                          |               |        |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                     |
| Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah                      | Persentase anak usia 4-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan:                                    |               |        |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                     |
|                                                                 | - PAUD                                                                                                   | 84,54         | %      | 100    | 13.920.400.000  | 100    | 14.062.388.080  | 100    | 14.205.824.438  | 100    | 14.350.723.848  | 100    | 14.497.101.231  |                     |
|                                                                 | - SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B                                                                     | 96,25         | %      | 100    | 123.601.248.250 | 100    | 124.861.980.982 | 100    | 126.135.573.188 | 100    | 127.422.156.035 | 100    | 128.721.862.026 |                     |
|                                                                 | Persentase anak usia 4-15 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) | 83,14         | %      | 86,14  | 791.500.000     | 88,14  | 799.573.300     | 90,14  | 807.728.948     | 92,14  | 815.967.783     | 100    | 824.290.654     |                     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                  |                                                                                                          |               |        |        | 100.000.000     |        | 101.020.000     |        | 102.232.240     |        | 103.275.009     |        | 104.328.414     | Dinas P & K         |
| Outcome                                                         |                                                                                                          |               |        |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                     |
| Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan                      | Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal                                   | 4,08          | %      | 100    |                 | 100    |                 | 100    |                 | 100    |                 | 100    |                 |                     |
|                                                                 | - SD/MI/Paket A                                                                                          | 3,68          | %      | 100    | 50.000.000      | 100    | 50.510.000      | 100    | 51.116.120      | 100    | 51.637.504      | 100    | 52.164.207      |                     |
|                                                                 | - SMP/MTs/Paket B                                                                                        | 5,29          | %      | 100    | 50.000.000      | 100    | 50.510.000      | 100    | 51.116.120      | 100    | 51.637.504      | 100    | 52.164.207      |                     |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                | Baseline 2024 | Satuan            | Tahun  |                 |        |                 |        |                 |        |                    |        |                    | PD Penanggung Jawab |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|
|                                                                             |                                                                    |               |                   | 2026   |                 | 2027   |                 | 2028   |                 | 2029   |                    | 2030   |                    |                     |
|                                                                             |                                                                    |               |                   | Target | Pagu (juta Rp)  | Target | Pagu (juta Rp)  | Target | Pagu (juta Rp)  | Target | Pagu (juta Rp)     | Target | Pagu (juta Rp)     |                     |
| 1                                                                           | 2                                                                  | 3             | 4                 | 5      | 6               | 7      | 8               | 9      | 10              | 11     | 12                 | 13     | 14                 | 15                  |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    |                                                                    |               |                   |        | 200.000.000     |        | 202.040.000     |        | 204.100.808     |        | 206.182.636        |        | 210.306.289        | Dinas P & K         |
| Outcome                                                                     |                                                                    |               |                   |        |                 |        |                 |        |                 |        |                    |        |                    |                     |
| Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan             | Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik                  | 16,35         | %                 | 19,35  | 200.000.000     | 20,85  | 202.040.000     | 22,35  | 204.100.808     | 23,85  | 206.182.636        | 25,35  | 210.306.289        |                     |
| PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                   |                                                                    |               |                   |        | 200.000.000     |        | 202.040.000     |        | 204.100.808     |        | 206.182.636        |        | 210.306.289        | Dinas P & K         |
| Outcome                                                                     |                                                                    |               |                   |        |                 |        |                 |        |                 |        |                    |        |                    |                     |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan                   | Jumlah usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui | 28            | Satuan Pendidikan | 38     | 200.000.000     | 48     | 202.040.000     | 58     | 204.100.808     | 68     | 206.182.636        | 78     | 210.306.289        |                     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                      |                                                                    |               |                   |        | 100.000.000     |        | 101.020.000     |        | 102.050.404     |        | 103.091.318        |        | 105.153.144        | Dinas P & K         |
| Outcome                                                                     |                                                                    |               |                   |        |                 |        |                 |        |                 |        |                    |        |                    |                     |
| Tersebitkannya bahasa dan sastra daerah                                     | Persentase pengembangan bahasa dan sastra                          | 100           | %                 | 100    | 100.000.000     | 100    | 101.020.000     | 100    | 102.050.404     | 100    | 103.091.318        | 100    | 105.153.144        |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                        |                                                                    |               |                   |        |                 |        |                 |        |                 |        |                    |        |                    |                     |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                    |               |                   |        | 142.450.000.000 |        | 143.902.990.000 |        | 145.370.800.498 |        | 146.853.582.663,08 |        | 148.351.489.206,24 | Dinkes & RSUD       |
| Outcome                                                                     |                                                                    |               |                   |        |                 |        |                 |        |                 |        |                    |        |                    |                     |
| Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat                   | Jumlah Kematian Ibu                                                | 20            | Orang             | 18     | 350.000.000,00  | 15     | 353.570.000     | 12     | 357.176.414     | 10     | 360.819.613        | 8      | 364.499.973        | Dinkes              |
|                                                                             | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)         | 56,80         | %                 | 51,8   | 1.000.000.000   | 49,3   | 1.010.200.000   | 46,8   | 1.020.504.040   | 44,3   | 1.030.913.181      | 41,8   | 1.041.428.496      | Dinkes              |
|                                                                             | Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun                            | N/A           | %                 | 1,4    | 100.000.000     | 1,4    | 101.020.000     | 1,4    | 102.050.404     | 1,4    | 103.091.318        | 1,4    | 104.142.850        | Dinkes              |







| Bidang Usuran Pemerintahan<br>dan Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)                                                           | Baseline<br>2024 | Satuan | Tahun  |                |      |                |                |                |        |                |      |                |                |  | PD<br>Penanggung<br>Jawab |        |                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|------|----------------|----------------|--|---------------------------|--------|----------------|
|                                                                    |                                                                                                  |                  |        | 2026   |                |      | 2027           |                |                | 2028   |                |      | 2029           |                |  |                           | 2030   |                |
|                                                                    |                                                                                                  |                  |        | Target | Pagu (juta Rp) |      | Target         | Pagu (juta Rp) |                | Target | Pagu (juta Rp) |      | Target         | Pagu (juta Rp) |  |                           | Target | Pagu (juta Rp) |
| 1                                                                  | 2                                                                                                | 3                | 4      | 5      | 6              | 7    | 8              | 9              | 10             | 11     | 12             | 13   | 14             | 15             |  |                           |        |                |
|                                                                    | Persentase Desa/Kelurahan<br>sanitasi total berbasis<br>Masyarakat                               | 87,05            | %      | 91     | 250.000.000    | 93   | 252.550.000    | 95             | 255.126.010    | 97     | 257.728.295    | 99   | 260.357.124    | Dinkes         |  |                           |        |                |
|                                                                    | Prevalensi Obesitas > 18 tahun                                                                   | N/A              | %      | 23,4   | 100.000.000    | 23,4 | 101.020.000    | 23,4           | 102.050.404    | 23,4   | 103.091.318    | 23,4 | 104.142.850    | Dinkes         |  |                           |        |                |
|                                                                    | Persentase fasilitas pelayanan<br>kesehatan sesuai standar                                       | 30               | %      | 30     | 30.000.000.000 | 30   | 30.306.000.000 | 50             | 30.615.121.200 | 50     | 30.927.395.436 | 70   | 31.242.854.870 | Dinkes         |  |                           |        |                |
|                                                                    | Tingkat kepuasan pasien<br>terhadap layanan kesehatan                                            | N/A              | %      | 80     | 500.000.000    | 80   | 505.100.000    | 80             | 510.252.020    | 80     | 515.456.591    | 80   | 520.714.248    | Dinkes         |  |                           |        |                |
|                                                                    | Persentase tempat<br>pengelolaan pangan<br>memenuhi syarat                                       | 82,3             | %      | 88     | 50.000.000     | 90   | 50.510.000     | 92             | 51.025.202     | 94     | 51.545.659     | 100  | 52.071.425     | Dinkes         |  |                           |        |                |
|                                                                    | Persentase fasilitas kesehatan<br>yang terintegrasi dalam sistem<br>informasi kesehatan nasional | 100              | %      | 100    | 200.000.000    | 100  | 202.040.000    | 100            | 204.100.808    | 100    | 206.182.636    | 100  | 208.285.699    | Dinkes         |  |                           |        |                |
|                                                                    | Persentase fasilitas pelayanan<br>kesehatan terakreditasi<br>paripurna                           | 30               | %      | 30     | 100.000.000    | 50   | 101.020.000    | 50             | 102.050.404    | 50     | 103.091.318    | 70   | 104.142.850    | Dinkes         |  |                           |        |                |
|                                                                    | Persentase fasilitas pelayanan<br>kesehatan dengan pembekalan<br>kesehatan sesuai standar        | 81,08            | %      | 85     | 50.400.000.000 | 87   | 50.914.080.000 | 89             | 51.433.403.616 | 89     | 51.958.024.333 | 92   | 52.487.996.181 | Dinkes         |  |                           |        |                |
|                                                                    | Persentase merokok penduduk<br>10-21 tahun                                                       | N/A              | %      | 11,4   | 50.000.000     | 10,4 | 50.510.000     | 9,4            | 51.025.202     | 8,4    | 51.545.659     | 7,4  | 52.071.425     | Dinkes         |  |                           |        |                |
|                                                                    | Pelayanan Kesehatan Ibu hamil                                                                    | 62,2             | %      | 73     | 300.000.000    | 75   | 303.060.000    | 89             | 306.151.212    | 90     | 309.273.954    | 100  | 312.428.549    | Dinkes         |  |                           |        |                |
|                                                                    | Pelayanan Kesehatan Ibu<br>bersalin                                                              | 69,4             | %      | 70     | 150.000.000    | 78   | 151.530.000    | 85             | 153.075.606    | 90     | 154.636.977    | 100  | 156.214.274    | Dinkes         |  |                           |        |                |
|                                                                    | Pelayanan kesehatan bayi<br>baru lahir                                                           | 70,8             | %      | 73     | 150.000.000    | 78   | 151.530.000    | 85             | 153.075.606    | 90     | 154.636.977    | 100  | 156.214.274    | Dinkes         |  |                           |        |                |





| Bidang Ususan Pemerintahan<br>dan Program Prioritas<br>Pembangunan | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)                                                                                                                     | Baseline<br>2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD<br>Penanggung<br>jawab |      |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------------|------|--|
|                                                                    |                                                                                                                                                            |                  |        | 2026   |                |        | 2027           |        |                | 2028   |                |        | 2029           |        |                |                           | 2030 |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                            |                  |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                           |      |  |
| 1                                                                  | 2                                                                                                                                                          | 3                | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15     |                |                           |      |  |
|                                                                    | Pelayanan kesehatan balita                                                                                                                                 | 76,7             | %      | 82     | 150.000.000    | 86     | 151.530.000    | 95     | 153.075.606    | 97     | 154.636.977    | 100    | 155.214.274    | Dinkes |                |                           |      |  |
|                                                                    | Pelayanan kesehatan pada<br>usia pendidikan dasar                                                                                                          | 100              | %      | 100    | 250.000.000    | 100    | 252.550.000    | 100    | 255.126.010    | 100    | 257.728.295    | 100    | 260.357.124    | Dinkes |                |                           |      |  |
|                                                                    | Pelayanan kesehatan pada<br>usia produktif                                                                                                                 | 89,7             | %      | 91,7   | 300.000.000    | 92,3   | 303.060.000    | 94,3   | 306.151.212    | 95,8   | 309.273.954    | 98     | 312.428.549    | Dinkes |                |                           |      |  |
|                                                                    | Pelayanan kesehatan pada<br>usia lanjut                                                                                                                    | 63,3             | %      | 70     | 150.000.000    | 75     | 151.530.000    | 80     | 153.075.606    | 85     | 154.636.977    | 90     | 156.214.274    | Dinkes |                |                           |      |  |
|                                                                    | Pengobatan standar penderita<br>Malaria                                                                                                                    | 100              | %      | 100    | 300.000.000    | 100    | 303.060.000    | 100    | 306.151.212    | 100    | 309.273.954    | 100    | 312.428.549    | Dinkes |                |                           |      |  |
|                                                                    | Pelayanan kesehatan<br>penderita hipertensi                                                                                                                | 76,6             | %      | 85     | 400.000.000    | 90     | 404.080.000    | 95     | 408.201.616    | 100    | 412.365.272    | 100    | 416.571.398    | Dinkes |                |                           |      |  |
|                                                                    | Pelayanan kesehatan<br>penderita diabetes mellitus                                                                                                         | 61,6             | %      | 70     | 150.000.000    | 75     | 151.530.000    | 80     | 153.075.606    | 100    | 154.636.977    | 100    | 156.214.274    | Dinkes |                |                           |      |  |
|                                                                    | Pelayanan kesehatan orang<br>dengan gangguan jiwa berat                                                                                                    | 141,3            | %      | 100    | 100.000.000    | 100    | 101.020.000    | 100    | 102.050.404    | 100    | 103.091.318    | 100    | 104.142.850    | Dinkes |                |                           |      |  |
|                                                                    | Pelayanan kesehatan orang<br>terduga tuberkulosis                                                                                                          | 88,89            | %      | 90     | 525.000.000    | 95     | 530.355.000    | 95     | 535.764.621    | 100    | 541.229.420    | 100    | 546.749.960    | Dinkes |                |                           |      |  |
|                                                                    | Pelayanan kesehatan orang<br>dengan risiko terinfeksi virus<br>yang melemahkan daya tahan<br>tubuh manusia ( <i>Human<br/>Immunodeficiency Virus</i> /HIV) | 70,1             | %      | 85     | 525.000.000    | 90     | 530.355.000    | 95     | 535.764.621    | 100    | 541.229.420    | 100    | 546.749.960    | Dinkes |                |                           |      |  |
|                                                                    | Cakupan Kepesertaan JKN                                                                                                                                    | 99,69            | %      | 100    | 45.000.000.000 | 100    | 45.459.000.000 | 100    | 45.922.681.800 | 100    | 46.391.093.154 | 100    | 46.864.282.305 | Dinkes |                |                           |      |  |
|                                                                    | Persentase ketersediaan obat<br>pada RS                                                                                                                    | 100              |        | 67,62  | 4.400.000.000  | 72,62  | 4.444.880.000  | 77,62  | 4.490.217.776  | 82,62  | 4.536.017.997  | 87,62  | 4.582.285.381  | RSUD   |                |                           |      |  |
|                                                                    | Persentase ketersediaan alat<br>kesehatan sesuai standar tipe RS                                                                                           | 62,62            | %      | 100    | 950.000.000    | 100    | 959.690.000    | 100    | 969.478.838    | 100    | 979.367.522    | 100    | 989.357.071    | RSUD   |                |                           |      |  |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                          | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                 | PD Penanggung jawab |      |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|---------------------|------|--|
|                                                              |                                                                                              |               |        | 2026   |                |        | 2027           |        |                | 2028   |                  |        | 2029             |        |                 |                     | 2030 |  |
|                                                              |                                                                                              |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)  |                     |      |  |
| 1                                                            | 2                                                                                            | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12               | 13     | 14               | 15     | RSUD            |                     |      |  |
|                                                              | Persentase ketersediaan makanan dan minuman pasien                                           | 100           |        | 88,8   | 1.000.000.000  | 88,9   | 1.010.200.000  | 90     | 1.020.504.040  | 90,5   | 1.030.913.181    |        | 1.041.428.496    |        | RSUD            |                     |      |  |
|                                                              | Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah                                   | 88,5          | %      | 100    | 250.000.000    | 100    | 252.550.000    | 100    | 255.126.010    | 100    | 257.728.295      | 91     | 260.357.124      |        | RSUD            |                     |      |  |
|                                                              | Cakupan penanganan kedaruratan kesehatan                                                     | 100           | %      | 97,1   | 500.000.000    | 97,25  | 505.100.000    | 100    | 510.252.020    | 97,35  | 515.456.591      | 100    | 520.714.248      |        | RSUD            |                     |      |  |
|                                                              | Persentase pasien yang sembuh setelah mendapat perawatan                                     | 97,5          | %      | 100    | 3.500.000.000  | 100    | 3.535.700.000  | 100    | 3.571.764.140  | 100    | 3.608.196.134    | 97,4   | 3.644.999.735    |        | RSUD            |                     |      |  |
|                                                              | Persentase rujukan dari PUSKESMAS ke RS yang menggunakan Sistem Informasi Rujukan (SISRUITE) | 100           | %      | 100    | 300.000.000    | 100    | 303.060.000    | 100    | 306.151.212    | 100    | 309.273.954      | 100    | 312.428.549      |        | RSUD            |                     |      |  |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  |                                                                                              |               |        |        | 6.011.434.919  |        | 6.033.874.919  |        | 6.056.543.807  |        | 6.079.443.917,66 |        | 6.102.577.609,44 |        | Dinkes dan RSUD |                     |      |  |
| Outcome                                                      |                                                                                              |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                 |                     |      |  |
| Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan            | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi                                    | 5,43          |        | 5,6    | 1.100.000.000  | 5,7    | 1.111.220.000  | 5,8    | 1.122.554.444  | 5,9    | 1.134.004.499    | 6,0    | 1.145.571.345    |        | Dinkes          |                     |      |  |
|                                                              | Persentase puskesmas dengan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar                     | 100           |        | 100    | 1.100.000.000  | 100    | 1.111.220.000  | 100    | 1.122.554.444  | 100    | 1.134.004.499    | 100    | 1.145.571.345    |        | Dinkes          |                     |      |  |
|                                                              | Persentase rumah sakit pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar                     | 2             | Rasio  | 3,4    | 3.811.434.919  | 4,1    | 3.850.311.555  | 4,8    | 3.889.584.733  | 5,5    | 3.929.258.497    | 6,2    | 3.969.336.733    |        | RSUD            |                     |      |  |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                              | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                              | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung Jawab |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                           |                                                                                                                  |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                           |                                                                                                                  |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                                         | 2                                                                                                                | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                               |                                                                                                                  |               |        |        | 900.000.000    |        | 909.180.000    |        | 918.453.636    |        | 927.821.863    |        | 937.285.646    | Dinkes              |
| Outcome                                                                                   |                                                                                                                  |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman: |                                                                                                                  |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
|                                                                                           | Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan                                                                   | 43            | %      | 60     | 300.000.000    | 70     | 303.060.000    | 80     | 306.151.212    | 90     | 309.273.954    | 100    | 312.428.549    | Dinkes              |
|                                                                                           | Persentase apotik dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan                                      | 2,8           | %      | 4      | 100.000.000    | 5      | 101.020.000    | 6      | 102.050.404    | 7      | 103.091.318    | 8      | 104.142.850    | Dinkes              |
|                                                                                           | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang diindaklanjuti |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
|                                                                                           | Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar                                              | 60            | %      | 64     | 100.000.000    | 66     | 101.020.000    | 68     | 102.050.404    | 70     | 103.091.318    | 72     | 104.142.850    | Dinkes              |
|                                                                                           | Persentase pangan industri rumah tangga yang aman dan bermutu                                                    | 60            | %      | 64     | 200.000.000    | 66     | 202.040.000    | 68     | 204.100.808    | 70     | 206.182.636    | 72     | 208.285.699    | Dinkes              |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                 | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung jawab |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                         |                                                                     |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                         |                                                                     |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                                                       | 2                                                                   | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                        |                                                                     |               |        |        | 750.000.000    |        | 757.650.000    |        | 765.378.030    |        | 773.184.886    |        | 781.071.372    | Dinkes              |
| Outcome                                                                                                 |                                                                     |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan                                          | Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan:           |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
|                                                                                                         | Persentase pelayanan POSYANDU aktif                                 | 86            | %      | 88     | 250.000.000    | 89     | 252.550.000    | 90     | 255.126.010    | 91     | 257.728.295    | 92     | 260.357.124    |                     |
|                                                                                                         | Persentase pelayanan aksi bergizi                                   | 2             | %      | 3      | 250.000.000    | 3      | 252.550.000    | 3      | 255.126.010    | 3      | 257.728.295    | 3      | 260.357.124    |                     |
|                                                                                                         | Jumlah POSYANDU yang melaksanakan siklus hidup                      | 10            | %      | 25     | 250.000.000    | 40     | 252.550.000    | 50     | 255.126.010    | 60     | 257.728.295    | 80     | 260.357.124    |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                            |                                                                     |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                               |                                                                     |               |        |        | 6.000.000.000  |        | 6.061.200.000  |        | 6.123.024.240  |        | 6.185.479.087  |        | 6.248.570.973  | Dinas PUPR          |
| Outcome                                                                                                 |                                                                     |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik                        | 19,36         | %      | 20,69  | 2.750.000.000  | 22,02  | 2.778.050.000  | 23,35  | 2.806.386.110  | 24,68  | 2.835.011.248  | 26,01  | 2.863.928.363  |                     |
|                                                                                                         | Persentase embung dalam kondisi baik                                | 26,67         | %      | 33,33  | 2.250.000.000  | 40,00  | 2.272.950.000  | 46,67  | 2.296.134.090  | 53,33  | 2.319.554.465  | 60     | 2.343.214.115  |                     |
|                                                                                                         | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir | 100           | %      | 100    | 1000.000.000   | 100    | 1.010.200.000  | 100    | 1.020.504.040  | 100    | 1.030.913.181  | 100    | 1.041.428.495  |                     |





| Bidang Usuran Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan         | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                                                                                       | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PD Penanggung Jawab |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                           |               |        | 2026   |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                           |               |        | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   |                     |
| 1                                                                    | 2                                                                                                                                                                                         | 3             | 4      | 5      | 6                | 7      | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                  |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM     |                                                                                                                                                                                           |               |        |        | 19.064.664.520   |        | 19.259.124.098   |        | 19.455.567.163   |        | 19.654.013.948   |        | 19.854.484.891   | Dinas PRKP          |
| Outcome                                                              |                                                                                                                                                                                           |               |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum   | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten | 59,04         | %      | 61,07  | 19.064.664.520   | 61,89  | 19.259.124.098   | 62,70  | 19.455.567.163   | 63,52  | 19.654.013.948   | 64,33  | 19.854.484.891   |                     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL     |                                                                                                                                                                                           |               |        |        | 1.408.815.319    |        | 1.436.991.625    |        | 1.465.731.457    |        | 1.495.046.087    |        | 1.524.947.009    | Dinas PRKP          |
| Outcome                                                              |                                                                                                                                                                                           |               |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya layanan persampahan                                     | Persentase sampah yang tertangani                                                                                                                                                         | 100           | %      | 100    | 1.408.815.319    | 100    | 1.436.991.625    | 100    | 1.465.731.457    | 100    | 1.495.046.087    | 100    | 1.524.947.009    |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH               |                                                                                                                                                                                           |               |        |        | 9.135.245.616,00 |        | 9.228.425.121,28 |        | 9.322.555.057,52 |        | 9.417.645.119,11 |        | 9.513.705.099,32 | Dinas PRKP          |
| Outcome                                                              |                                                                                                                                                                                           |               |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sistem air limbah | Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)                                                                      | 53,19         | %      | 53,92  | 9.385.245.616    | 54,28  | 9.480.975.121    | 54,61  | 9.577.681.067    | 55,01  | 9.675.373.414    | 55,37  | 9.774.062.223    |                     |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                 | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung Jawab |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                              |                                                                     |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                              |                                                                     |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                            | 2                                                                   | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE         |                                                                     |               |        |        | 1.390.000.000  |        | 1.404.178.000  |        | 1.418.500.615  |        | 1.432.969.321  |        | 1.447.585.608  | Dinas PRKP          |
| Outcome                                                      |                                                                     |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan              | Persentase drainase dalam kondisi baik                              | 30            | %      | 40     | 1.390.000.000  | 60     | 1.404.178.000  | 80     | 1.418.500.615  | 90     | 1.432.969.321  | 100    | 1.447.585.608  |                     |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                             |                                                                     |               |        |        | 1.067.951.886  |        | 1.078.844.995  |        | 1.089.849.214  |        | 1.100.965.676  |        | 1.112.195.526  | Dinas PRKP          |
| Outcome                                                      |                                                                     |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung                        | Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik                       | 38,71         | %      | 40,09  | 1.067.951.886  | 41,47  | 1.078.844.995  | 42,86  | 1.089.849.214  | 44,24  | 1.100.965.676  | 45,62  | 1.112.195.526  |                     |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                |                                                                     |               |        |        | 11.045.483.696 |        | 11.158.147.629 |        | 11.271.960.735 |        | 11.386.934.735 |        | 11.503.081.469 | Dinas PUPR          |
| Outcome                                                      |                                                                     |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman   | Tingkat kenyamanan jalan kabupaten                                  | 41,53         | %      | 43,13  | 10.045.483.696 | 44,72  | 10.147.947.629 | 46,31  | 10.251.456.695 | 47,90  | 10.356.021.553 | 49,50  | 10.461.652.973 |                     |
|                                                              | Persentase jalan non status kewenangan kabupaten dalam kondisi baik | 9,76          | %      | 11,96  | 1.000.000.000  | 13,42  | 1.010.200.000  | 15,13  | 1.020.504.040  | 17,08  | 1.030.913.181  | 19,28  | 1.041.428.495  |                     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                         |                                                                     |               |        |        | 25.000.000     |        | 25.255.000     |        | 25.512.601     |        | 25.773.829     |        | 26.035.712     | Dinas PUPR          |
| Outcome                                                      |                                                                     |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi                    | Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli                 | N/A           | %      | 20     | 12.500.000     | 40     | 12.627.500     | 60     | 12.756.300     | 80     | 12.886.414     | 100    | 13.017.856     |                     |
|                                                              | Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil             | 43,68         | %      | 46,32  | 12.500.000     | 48,95  | 12.627.500     | 51,58  | 12.756.300     | 54,21  | 12.886.414     | 56,84  | 13.017.856     |                     |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                           | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung Jawab |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                                                                  | 2                                                                                                                             | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                             |                                                                                                                               |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Outcome                                                                                                            |                                                                                                                               |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Dinas PUPR          |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang                                                                   | Persentase dokumen perencanaan tata ruang yang disusun                                                                        | 17,14         | %      | 22,86  | 500.000.000    | 25,71  | 505.100.000    | 28,57  | 510.252.020    | 31,43  | 515.456.590    | 34,29  | 520.714.247    |                     |
|                                                                                                                    | Persentase ketataan terhadap dokumen tata ruang                                                                               | 100           | %      | 100    | 250.000.000    | 100    | 252.550.000    | 100    | 255.126.010    | 100    | 257.728.295    | 100    | 260.357.123    |                     |
| URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                            |                                                                                                                               |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                     |                                                                                                                               |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Outcome                                                                                                            |                                                                                                                               |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Dinas PRKP          |
| Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni                                                       | 100           | %      | 100    | 3.500.000.000  | 100    | 3.535.700.000  | 100    | 3.571.764.140  | 100    | 3.608.196.134  | 100    | 3.644.999.734  |                     |
|                                                                                                                    | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni | 100           | %      | 100    | 250.000.000    | 100    | 252.550.000    | 100    | 255.126.010    | 100    | 257.728.295    | 100    | 260.357.123    |                     |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                         |                                                                                                                               |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Outcome                                                                                                            |                                                                                                                               |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Dinas PRKP          |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman                                                                           | Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani                                                                         | 22,42         | %      | 45,19  | 3.278.778.559  | 60     | 3.312.222.100  | 65     | 3.346.006.76   | 70     | 3.380.136.034  | 75     | 3.414.613.422  |                     |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                              | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                              | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |          |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PD Penanggung Jawab |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|----------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|
|                                                                                           |                                                                                  |               |        | 2026   |                | 2027     |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                     |
|                                                                                           |                                                                                  |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target   | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   |                     |
| 1                                                                                         | 2                                                                                | 3             | 4      | 5      | 6              | 7        | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                  |
| PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                            |                                                                                  |               |        |        | 2.250.000.000  |          | 2.272.950.000    |        | 2.296.134.090    |        | 2.319.554.657    |        | 2.343.214.115    | Dinas PRKP          |
| Outcome                                                                                   |                                                                                  |               |        |        |                |          |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya penyediaan rumah layak huni                                                  | Persentase rumah layak huni                                                      | 64,86         | %      | 64,94  | 2.250.000.000  | 64,99psu | 2.272.950.000    | 65,03  | 2.296.134.090    | 65,07  | 2.319.554.657    | 65,12  | 2.343.214.115    |                     |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                             |                                                                                  |               |        |        | 2.745.143.160  |          | 2.773.143.620    |        | 2.801.429.685    |        | 2.830.004.267    |        | 2.858.870.311    | Dinas PRKP          |
| Outcome                                                                                   |                                                                                  |               |        |        |                |          |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman                                                    | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 100           | %      | 100    | 2.745.143.160  | 100      | 2.773.143.620    | 100    | 2.801.429.685    | 100    | 2.830.004.267    | 100    | 2.858.870.311    |                     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                           |                                                                                  |               |        |        | 1.000.000.00   |          | 1.000.000.000    |        | 1.000.000.000    |        | 0                |        | 0                | Dinas PRKP          |
| Outcome                                                                                   |                                                                                  |               |        |        |                |          |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya Sarana Prasarana Sistem Pengangkutan Air Limbah                              | Jumlah Sarana Prasarana Sistem Pengangkutan Air Limbah                           | n/a           | Unit   | 1      |                | 1        |                  | 1      |                  |        |                  |        |                  |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                  |               |        |        |                |          |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| PROGRAM PENINGKATAN KETERANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      |                                                                                  |               |        |        | 3.485.626.172  |          | 3.521.179.558,95 |        | 3.557.095.590,46 |        | 3.593.377.965,48 |        | 3.630.030.420,73 | SaPol PP            |
| Outcome                                                                                   |                                                                                  |               |        |        |                |          |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada                              | Persentase PERDA dan PERKADA yang dilagakkan                                     | 80            | %      | 80     | 200.000.000    | 80       | 202.040.000      | 80     | 204.100.808      | 100    | 206.182.636,24   | 100    | 208.285.699,13   |                     |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                              | Indikator Kinerja Program (Outcome)                               | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |       |                  |                |                  |        |                  |       |                  |                |       | PD Penanggung Jawab |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|-------|------------------|----------------|------------------|--------|------------------|-------|------------------|----------------|-------|---------------------|--------|----------------|
|                                                                                           |                                                                   |               |        | 2026   |                |       | 2027             |                |                  | 2028   |                  |       | 2029             |                |       |                     | 2030   |                |
|                                                                                           |                                                                   |               |        | Target | Pagu (juta Rp) |       | Target           | Pagu (juta Rp) |                  | Target | Pagu (juta Rp)   |       | Target           | Pagu (juta Rp) |       |                     | Target | Pagu (juta Rp) |
| 1                                                                                         | 2                                                                 | 3             | 4      | 5      | 6              | 7     | 8                | 9              | 10               | 11     | 12               | 13    | 14               | 15             |       |                     |        |                |
| Meningkatnya penanganan gangguan ketentrman dan keterliban umum                           | Persentase penyelenggaraan Tribumtansmas                          | 72,41         | %      | 80     | 250.000.000    | 80    | 252.550.000      | 80             | 255.126.010      | 80     | 257.728.295,30   | 100   | 260.357.123,91   |                |       |                     |        |                |
| Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat                                             | Persentase cakupan perlindungan masyarakat                        | 1,416         | %      | 1,416  | 2.791.997.972  | 1,416 | 2.820.476.351,31 | 1,416          | 2.849.245.210,10 | 1,416  | 2.878.307.511,24 | 1,416 | 2.907.666.247,86 |                |       |                     |        |                |
| Meningkatnya kapasitas SDM PPNS                                                           | Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya                   | 12,5          | %      | 44,55  | 243.628.200    | 84,15 | 246.113.207.64   | 100            | 248.623.562,36   | 100    | 251.159.522.69   | 100   | 253.721.349,83   |                |       |                     |        |                |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                            |                                                                   |               |        |        | 880.205.937    |       | 889.184.037      |                | 898.253.714      |        | 907.415.902      |       | 916.671.544      |                | BPBD  |                     |        |                |
| Outcome                                                                                   |                                                                   |               |        |        |                |       |                  |                |                  |        |                  |       |                  |                |       |                     |        |                |
| Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana                                   | Cakupan ketersediaan dokumen JITUPASNA                            | NA            | %      | 100    | 150.000.000    | 100   | 151.530.000      | 100            | 153.075.606      | 100    | 154.636.977      | 100   | 156.214.274      |                |       |                     |        |                |
| Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana               | Indeks Resiko Bencana                                             | 166,2         | Indeks | 160    | 400.000.000    | 157   | 404.080.000      | 154            | 408.201.616      | 150    | 412.365.272      | 147   | 416.517.398      |                |       |                     |        |                |
|                                                                                           | Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana | 100           | %      | 100    | 100.000.000    | 100   | 101.020.000      | 100            | 102.050.404      | 100    | 103.091.318      | 100   | 104.142.849      |                |       |                     |        |                |
| Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat                                 | Persentase penanganan tanggap darurat bencana                     | 100           | %      | 100    | 230.205.937    | 100   | 232.554.037      | 100            | 234.926.088      | 100    | 237.322.334      | 100   | 239.743.022      |                |       |                     |        |                |
| PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |                                                                   |               |        |        | 70.650.000     |       | 71.370.630       |                | 72.098.610,43    |        | 72.834.016,25    |       | 73.576.923,22    |                | POLPP |                     |        |                |
| Outcome                                                                                   |                                                                   |               |        |        |                |       |                  |                |                  |        |                  |       |                  |                |       |                     |        |                |
| Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran                                                 | Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran          | 9,84          | %      | 9,84   | 30.000.000,00  | 9,84  | 30.306.000,00    | 9,84           | 30.615.121,20    | 9,84   | 30.927.395,44    | 9,84  | 31.242.854,87    |                |       |                     |        |                |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan    | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                                                                                                                  | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                  |        |                  | PD Penanggung Jawab |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                  | 2030   |                  |                     |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   |                     |
| 1                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                  |
| Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                                                                                                                           | 100           | %      | 100    | 40.650.000,00  | 100    | 41.064.630,00  | 100    | 41.483.489,23  | 100    | 41.906.620,82    | 100    | 42.334.068,35    |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                               |                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                  |        |                  |                     |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                     |                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        | 4.850.000.000  |        | 4.899.470.000  |        | 4.949.444.594  |        | 4.999.928.929    |        | 5.050.928.203,93 | Dinas Sosial        |
| Outcome                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya pemberdayaan sosial                                | Persentase pekerja sosial/tenaga kerja kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial                                                                                     | 100           | %      | 100    | 100.000.000    | 100    | 101.020.000    | 100    | 102.050.404    | 100    | 103.091.318,12   | 100    | 104.142.849,57   |                     |
|                                                                 | Persentase pekerja sosial /tenaga kerja kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA | 100           | %      | 100    | 100.000.000    | 100    | 101.020.000    | 100    | 102.050.404    | 100    | 103.091.318,12   | 100    | 104.142.849,57   |                     |
|                                                                 | Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau Relawan Sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan paskah bencana sesuai standar                               | 100           | %      | 100    | 4.200.000.000  | 100    | 4.242.840.000  | 100    | 4.286.116.968  | 100    | 4.329.835.361,07 | 100    | 4.373.999.681,76 |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                          | Baseline 2024 | Satuan | Tahun         |                |               |                |               |                |                  |                |                  |                | PD Penanggung Jawab |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|
|                                                              |                                                                                                                              |               |        | 2026          |                | 2027          |                | 2028          |                | 2029             |                | 2030             |                |                     |
|                                                              |                                                                                                                              |               |        | Target        | Pagu (Juta Rp) | Target        | Pagu (Juta Rp) | Target        | Pagu (Juta Rp) | Target           | Pagu (Juta Rp) | Target           | Pagu (Juta Rp) |                     |
| 1                                                            | 2                                                                                                                            | 3             | 4      | 5             | 6              | 7             | 8              | 9             | 10             | 11               | 12             | 13               | 14             | 15                  |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                  | Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial                                      | 100           | %      | 100           | 200.000.000    | 100           | 202.040.000    | 100           | 204.100.808    | 100              | 206.182.636,24 | 100              | 208.285.699,13 |                     |
|                                                              | Persentase lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial                          | 100           | %      | 100           | 250.000.000    | 100           | 252.550.000    | 100           | 255.126.010    | 100              | 257.728.295,30 | 100              | 260.357.123,91 |                     |
|                                                              |                                                                                                                              |               |        | 1.650.000.000 |                | 1.666.830.000 |                | 1.683.831.666 |                | 1.701.006.748,99 |                | 1.718.357.017,83 | Dinas Sosial   |                     |
|                                                              |                                                                                                                              |               |        |               |                |               |                |               |                |                  |                |                  |                |                     |
| Outcome                                                      |                                                                                                                              |               |        |               |                |               |                |               |                |                  |                |                  |                |                     |
|                                                              | Persentase penyandang disabilitas terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                | 6,90          | %      | 10            | 390.000.000    | 15            | 393.978.000    | 35            | 397.996.575,60 | 40               | 402.056.140,67 | 50               | 406.157.113,31 |                     |
|                                                              | Presentase anak terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                  | 28            | %      | 35            | 200.000.000    | 50            | 202.040.000    | 65            | 204.100.808    | 85               | 206.182.636,24 | 100              | 208.285.699,13 |                     |
|                                                              | Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                     | 39            | %      | 45            | 500.000.000    | 50            | 505.100.000    | 50            | 510.252.020    | 55               | 515.456.590,6  | 60               | 520.714.247,83 |                     |
|                                                              | Persentase pemenuh pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 21,26         | %      | 25            | 500.000.000    | 30            | 505.100.000    | 35            | 510.252.020    | 40               | 515.456.590,6  | 50               | 520.714.247,83 |                     |
|                                                              | Indeks Kesejahteraan sosial                                                                                                  | 58,02         | %      | 58,04         | 25.000.000     | 58,06         | 25.255.000     | 59            | 25.512.601     | 60               | 25.772.829,53  | 61               | 26.035.712,39  |                     |
|                                                              | Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia                                                                                      | 49,02         | %      | 50            | 25.000.000     | 52            | 25.255.000     | 55            | 25.512.601     | 57               | 25.772.829,53  | 61               | 26.035.712,39  |                     |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                        | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  | PD Penanggung Jawab |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|
|                                                              |                                                                                            |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                     |
|                                                              |                                                                                            |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   |                     |
| 1                                                            | 2                                                                                          | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                  |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                      |                                                                                            |               |        |        | 1.745.000.000  |        | 1.762.799.000  |        | 1.780.779.549,80 |        | 1.798.943.501,21 |        | 1.817.292.724,92 | Dinas Sosial        |
| Outcome                                                      |                                                                                            |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial                 | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                              | 100           | %      | 100    | 495.000.000    | 100    | 500.049.000    | 100    | 505.149.499,80   | 100    | 510.302.024,70   | 100    | 515.507.105,35   |                     |
|                                                              | Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandiannya                                    | 0,03          | %      | 0,06   | 350.000.000    | 0,14   | 353.570.000    | 0,29   | 357.176.414      | 0,58   | 360.819.613,42   | 1,16   | 364.499.973,48   |                     |
|                                                              | Persentase daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan pendataan data fakir miskin            | 100           | %      | 100    | 600.000.000    | 100    | 606.120.000    | 100    | 612.302.424      | 100    | 618.547.908,72   | 100    | 624.857.097,39   |                     |
|                                                              | Peningkatan indeks kebutuhan dasar                                                         | 23,28         | %      | 28,25  | 100.000.000    | 42,56  | 101.020.000    | 51,60  | 102.050.404      | 55,77  | 103.091.318,12   | 57,52  | 104.142.849,57   |                     |
|                                                              | Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi                                                     | 40,41         | %      | 46,24  | 100.000.000    | 47,40  | 101.020.000    | 49,88  | 102.050.404      | 51,92  | 103.091.318,12   | 52,39  | 104.142.849,57   |                     |
|                                                              | Persentase keluarga miskin dan rentan perlindungan sosial yang tergraduasi dari Kemiskinan | 0,03          | %      | 0,06   | 100.000.000    | 0,14   | 101.020.000    | 0,29   | 102.050.404      | 0,58   | 103.091.318,12   | 1,16   | 104.142.849,57   |                     |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                   |                                                                                            |               |        |        | 410.000.000    |        | 414.182.000    |        | 418.406.656,40   |        | 426.774.789,53   |        | 431.127.892,38   | Dinas Sosial        |
| Outcome                                                      |                                                                                            |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana              | Persentase penanganan masalah strategis langgap cepat darurat korban bencana               | 100           | %      | 100    | 50.000.000     | 100    | 50.510.000     | 100    | 51.025.202       | 100    | 51.545.659,06    | 100    | 52.071.424,78    |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan          | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                                   | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung Jawab |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                       |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                       |                                                                                                                                       |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                     | 2                                                                                                                                     | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
|                                                                       | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap                                 | 100           | %      | 100    | 50.000.000     | 100    | 50.510.000     | 100    | 51.025.202     | 100    | 51.545.659,06  | 100    | 52.071.424,78  |                     |
|                                                                       | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                                                    | 100           | %      | 100    | 200.000.000    | 100    | 202.040.000    | 100    | 204.100.808    | 100    | 206.182.636,24 | 100    | 208.285.699,13 |                     |
|                                                                       | Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 100           | %      | 100    | 110.000.000    | 100    | 111.122.000    | 100    | 112.255.444,40 | 100    | 113.400.449,93 | 100    | 114.557.134,52 |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                               |                                                                                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                      |                                                                                                                                       |               | %      |        | 75.000.000     |        | 75.765.000     |        | 76.537.803     |        | 77.318.488,59  |        | 78.107.137,17  | Dinas Nakertrans    |
| Outcome                                                               |                                                                                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Terkelompoknya informasi tenaga kerja                                 | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja                                                                          | 100           | %      | 100    | 75.000.000     | 100    | 75.765.000     | 100    | 76.537.803     | 100    | 77.318.488,59  | 100    | 78.107.137,17  |                     |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                |                                                                                                                                       |               |        |        | 859.395.000    |        | 868.160.829    |        | 877.016.069,46 |        | 885.961.633,36 |        | 894.998.442,02 | Dinas Naker trans   |
| Outcome                                                               |                                                                                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya produktifitas tenaga kerja                               | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkatkan produktifitasnya                                                        | 75            | %      | 76     | 859.395.000    | 77     | 868.160.829    | 78     | 877.016.069,46 | 79     | 885.961.633,36 | 80     | 894.998.442,02 |                     |





| Bidang Ususan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                               | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung jawab |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                   |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                 |                                                                                                   |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                                               | 2                                                                                                 | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                 |                                                                                                   |               |        |        | 188.500.000    |        | 188.402.300    |        | 190.324.003,46 |        | 192.265.308,30 |        | 194.226.414,44 | Dinas Naker trans   |
| Outcome                                                                                         |                                                                                                   |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya penempatan tenaga kerja                                                            | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri                                             | 34,73         | %      | 38,54  | 186.500.000    | 42,36  | 188.402.300    | 46,18  | 190.324.003,46 | 50,00  | 192.265.308,30 | 53,81  | 194.226.414,44 |                     |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                     |                                                                                                   |               |        |        | 294.875.000,00 |        | 297.882.725,00 |        | 300.921.128,80 |        | 303.990.524,31 |        | 307.091.227,66 | Dinas Naker trans   |
| Outcome                                                                                         |                                                                                                   |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya pekerja TTS yang terlindungi                                                       | Jumlah pekerja pada perusahaan yang mendapatkan Perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial    | 35,72         | Org    | 35,727 | 57.193.000     | 35,727 | 57.776.368,6   | 35,727 | 58.365.687,56  | 35,727 | 58.961.017,57  | 35,727 | 59.562.419,95  |                     |
|                                                                                                 | Persentase Jaminan Ketenagakerjaan                                                                | 28,94         | %      | 32     | 237.682.000,00 | 34     | 240.106.366,40 | 36     | 242.555.441,24 | 38     | 245.029.506,74 | 40     | 247.528.807,70 |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                         |                                                                                                   |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PENGARUSAJUTANAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                      |                                                                                                   |               |        |        | 134.000.000    |        | 135.366.800    |        | 136.747.541    |        | 138.142.366    |        | 139.551.418    | Dinas P3A           |
| Outcome                                                                                         |                                                                                                   |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam pembangunan | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)<br>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | 3,8           | %      | 4,2    | 67.000.000     | 4,4    | 67.683.400     | 4,6    | 68.373.771     | 4,8    | 69.071.183     | 5,0    | 69.775.709     |                     |
|                                                                                                 |                                                                                                   | 95,0          | %      | 95,20  | 67.000.000     | 95,30  | 67.683.400     | 95,40  | 68.373.771     | 95,50  | 69.071.183     | 95,60  | 69.775.709     |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung Jawab |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                    |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                                      |                                                                                                    |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                                                                    | 2                                                                                                  | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                       |                                                                                                    |               |        |        | 603.000.000    |        | 609.150.600    |        | 615.363.936    |        | 621.640.648    |        | 627.981.383    | Dinas P3A           |
| Outcome                                                                                                              |                                                                                                    |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Menurunnya kekerasan terhadap perempuan                                                                              | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif               | 51            | %      | 53     | 603.000.000    | 54     | 609.150.600    | 55     | 615.363.936    | 56     | 621.640.648    | 57     | 627.981.383    |                     |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                |                                                                                                    |               |        |        | 134.000.000    |        | 135.366.800    |        | 136.747.541    |        | 138.142.366    |        | 139.551.418    | Dinas P3A           |
| Outcome                                                                                                              |                                                                                                    |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesehatan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak | Persentase ketersediaan Sekolah Perempuan (SEKOPER) pada setiap kecamatan                          | 40,63         | %      | 53,13  | 134.000.000    | 62,5   | 135.366.800    | 71,88  | 136.747.541    | 81,25  | 138.142.366    | 90,63  | 139.551.418    |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                      |                                                                                                    |               |        |        | 201.000.000    |        | 203.050.200    |        | 205.121.312    |        | 207.213.549    |        | 209.327.128    | Dinas P3A           |
| Outcome                                                                                                              |                                                                                                    |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak                                                                        | Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan | 15            | %      | 21     | 201.000.000    | 27     | 203.050.200    | 33     | 205.121.312    | 39     | 207.213.549    | 40     | 209.327.128    |                     |

Tgl cetak: 20 Agustus 2025





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                  | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung jawab |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                      |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                                                            |                                                                                      |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                                                                                          | 2                                                                                    | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK                                                                                                                 |                                                                                      |               |        |        | 201.000.000    |        | 203.050.200    |        | 205.121.312    |        | 207.213.549    |        | 209.327.128    | Dinas P3A           |
| Outcome                                                                                                                                    |                                                                                      |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Terjaminnya pemenuhan Hak semua anak secara komprehensif                                                                                   | Indeks Pemenuhan Hak Anak                                                            | 48            | Angka  | 49     | 201.000.000    | 49,50  | 203.050.200    | 50     | 205.121.312    | 50,50  | 207.213.549    | 60     | 209.327.128    |                     |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                           |                                                                                      |               |        |        | 214.500.000    |        | 217.074.000    |        | 219.678.888    |        | 222.315.035    |        | 224.982.815    | Dinas P3A           |
| Outcome                                                                                                                                    |                                                                                      |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | 45            | %      | 47     | 147.500.000    | 48     | 149.004.500    | 49     | 150.524.346    | 50     | 152.059.694    | 51     | 153.610.703    |                     |
|                                                                                                                                            | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)                                               | 48            | Angka  | 49     | 67.000.000     | 49,50  | 67.683.400     | 50     | 68.373.771     | 50,50  | 69.071.183     | 60     | 69.775.709     |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                          |                                                                                      |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN                                                            |                                                                                      |               |        |        | 440.000.000    |        | 444.488.000    |        | 449.021.778    |        | 453.601.800    |        | 458.228.538    | DKP                 |
| Outcome                                                                                                                                    |                                                                                      |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan                                                       | Persentase jumlah cadangan pangan                                                    | 4,54          | %      | 7,74   | 440.000.000    | 9,34   | 444.488.000    | 10,94  | 449.021.778    | 12,54  | 453.601.800    | 14,14  | 458.228.538    |                     |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan      | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                        | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |       |               |                |               |        |                |      |               |                |  | PD Penanggung Jawab |        |                |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|-------|---------------|----------------|---------------|--------|----------------|------|---------------|----------------|--|---------------------|--------|----------------|--|
|                                                                   |                                                                            |               |        | 2026   |                |       | 2027          |                |               | 2028   |                |      | 2029          |                |  |                     | 2030   |                |  |
|                                                                   |                                                                            |               |        | Target | Pagu (juta Rp) |       | Target        | Pagu (juta Rp) |               | Target | Pagu (juta Rp) |      | Target        | Pagu (juta Rp) |  |                     | Target | Pagu (juta Rp) |  |
| 1                                                                 | 2                                                                          | 3             | 4      | 5      | 6              | 7     | 8             | 9              | 10            | 11     | 12             | 13   | 14            | 15             |  |                     |        |                |  |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |                                                                            |               |        |        | 1.440.000.000  |       | 1.454.688.000 |                | 1.469.525.818 |        | 1.484.514.981  |      | 1.499.657.034 | DKP            |  |                     |        |                |  |
| Outcome                                                           |                                                                            |               |        |        |                |       |               |                |               |        |                |      |               |                |  |                     |        |                |  |
| Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat        | Pola Pangan Harapan                                                        | 75,9          | Skor   | 80     | 1.440.000.000  | 82,5  | 1.454.688.000 | 84,5           | 1.469.525.818 | 87,5   | 1.484.514.981  | 90   | 1.499.657.034 |                |  |                     |        |                |  |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                               |                                                                            |               |        |        | 440.000.000    |       | 444.488.000   |                | 449.021.778   |        | 453.601.800    |      | 458.228.538   | DKP            |  |                     |        |                |  |
| Outcome                                                           |                                                                            |               |        |        |                |       |               |                |               |        |                |      |               |                |  |                     |        |                |  |
| Meningkatnya penanganan kerawanan pangan                          | Persentase daerah rentan rawan pangan                                      | 16,9          | %      | 13,66  | 440.000.000    | 11,51 | 444.488.000   | 8,99           | 449.021.778   | 5,39   | 453.601.800    | 2,87 | 458.228.538   |                |  |                     |        |                |  |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                |                                                                            |               |        |        | 200.000.000    |       | 202.040.000   |                | 204.100.808   |        | 206.182.636    |      | 208.285.699   | DKP            |  |                     |        |                |  |
| Outcome                                                           |                                                                            |               |        |        |                |       |               |                |               |        |                |      |               |                |  |                     |        |                |  |
| Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan                  | Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan | 75            | %      | 75,50  | 200.000.000    | 75,80 | 202.040.000   | 76             | 204.100.808   | 76,50  | 206.182.636    | 80   | 208.285.699   |                |  |                     |        |                |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                             |                                                                            |               |        |        |                |       |               |                |               |        |                |      |               |                |  |                     |        |                |  |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                       |                                                                            |               |        |        | 100.000.000    |       | 101.020.000   |                | 102.050.404   |        | 103.091.318    |      | 104.142.849   | Dinas PRKP     |  |                     |        |                |  |
| Outcome                                                           |                                                                            |               |        |        |                |       |               |                |               |        |                |      |               |                |  |                     |        |                |  |
| Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan                  | Persentase penyelesaian kasus tanah negara                                 | 100           | %      | 100    | 100.000.000    | 100   | 101.020.000   | 100            | 102.050.404   | 100    | 103.091.318    | 100  | 104.142.849   |                |  |                     |        |                |  |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                         | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |                |             |                |                |        |                |                |             |                |        | PD Penanggung Jawab |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------|---------------------|----------------|--|
|                                                                                 |                                                                             |               |        | 2026   |                |                | 2027        |                |                | 2028   |                |                | 2029        |                |        |                     | 2030           |  |
|                                                                                 |                                                                             |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Pagu (juta Rp) | Target      | Pagu (juta Rp) | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Pagu (juta Rp) | Target      | Pagu (juta Rp) | Target |                     | Pagu (juta Rp) |  |
| 1                                                                               | 2                                                                           | 3             | 4      | 5      | 6              | 7              | 8           | 9              | 10             | 11     | 12             | 13             | 14          | 15             |        |                     |                |  |
| PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN        |                                                                             |               |        |        | 100.000.000    |                | 101.020.000 |                | 102.050.404    |        | 103.091.318    |                |             | Dinas PRKP     |        |                     |                |  |
| Outcome                                                                         |                                                                             |               |        |        |                |                |             |                |                |        |                |                |             |                |        |                     |                |  |
| Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan   | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | 100           | %      | 100    | 100.000.000    | 100            | 101.020.000 | 100            | 102.050.404    | 100    | 103.091.318    | 100            | 104.142.849 |                |        |                     |                |  |
| PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                      |                                                                             |               |        |        | 100.000.000    |                | 101.020.000 |                | 102.050.404    |        | 103.091.318    |                | 104.142.849 | Dinas PRKP     |        |                     |                |  |
| Outcome                                                                         |                                                                             |               |        |        |                |                |             |                |                |        |                |                |             |                |        |                     |                |  |
| Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah | Persentase luas lahan pemerintah yang bersertifikat                         | 41,63         | %      | 43,00  | 100.000.000    | 45,00          | 101.020.000 | 47,00          | 102.050.404    | 49,00  | 103.091.318    | 51,00          | 104.142.849 |                |        |                     |                |  |
| URUSAN PEMERINTAHAN                                                             |                                                                             |               |        |        |                |                |             |                |                |        |                |                |             |                |        |                     |                |  |
| BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                         |                                                                             |               |        |        |                |                |             |                |                |        |                |                |             |                |        |                     |                |  |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                            |                                                                             |               |        |        | 403.000.000    | 100            | 407.110.600 | 100            | 411.263.128    | 100    | 415.458.012    | 100            | 419.695.684 | DLH            |        |                     |                |  |
| Outcome                                                                         |                                                                             |               |        |        |                |                |             |                |                |        |                |                |             |                |        |                     |                |  |
| Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk mitigasi dampak KRP            | Persentase rekomendasi KLH yang ditindaklanjuti                             | 100           | %      | 100    | 403.000.000    | 100            | 407.110.600 | 100            | 411.263.128    | 100    | 415.458.012    | 100            | 419.695.684 |                |        |                     |                |  |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP            |                                                                             |               |        |        | 245.000.000    |                | 249.900.000 |                | 254.898.000    |        | 259.995.960    |                | 265.195.879 | DLH            |        |                     |                |  |
| Outcome                                                                         |                                                                             |               |        |        |                |                |             |                |                |        |                |                |             |                |        |                     |                |  |
| Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                       | Indeks Kualitas Air (IKA)                                                   | 60,53         | Indeks | 73,27  | 122.500.000    | 73,47          | 123.749.500 | 73,67          | 125.011.745    | 73,87  | 126.286.865    | 74,07          | 127.574.991 |                |        |                     |                |  |
|                                                                                 | Indeks Kualitas Udara (IKU)                                                 | 92,57         | Indeks | 90,42  | 122.500.000    | 90,62          | 123.749.500 | 90,82          | 125.011.745    | 91,02  | 126.286.865    | 91,22          | 127.574.991 |                |        |                     |                |  |

Tgl cetak: 20 Agustus 2025

BAB IV. - 206 -







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                              | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung jawab |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                  |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                  |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      |                                                                                                  |               |        |        | 276.000.000    |        | 278.815.200    |        | 281.659.115    |        | 284.532.038    |        | 287.434.285    | DLH                 |
| Outcome                                                                                                                 |                                                                                                  |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati                                                                 | Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola                                                     | 7             | %      | 7      | 51.000.000     | 7      | 51.520.200     | 7      | 52.045.706     | 7      | 52.576.572     | 7      | 53.112.853     |                     |
|                                                                                                                         | Persentase TPU dalam kondisi baik                                                                | 100           | %      | 100    | 225.000.000    | 100    | 227.295.000    | 100    | 229.613.409    | 100    | 231.955.466    | 100    | 234.321.412    | Dinas PUPR          |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                                                  |               |        |        | 10.000.000     |        | 10.102.000     |        | 10.205.040     |        | 10.309.132     |        | 10.414.285     | DLH                 |
| Outcome                                                                                                                 |                                                                                                  |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan                         | Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH | 25            | %      | 25     | 10.000.000     | 25     | 10.102.000     | 25     | 10.205.040     | 25     | 10.309.132     | 25     | 10.414.285     |                     |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |                                                                                                  |               |        |        | 50.000.000     |        | 50.510.000     |        | 51.025.202     |        | 51.545.659     |        | 52.071.425     | DLH                 |
| Outcome                                                                                                                 |                                                                                                  |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kapasitas SDM di bidang lingkungan hidup                                                                   | Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya                             | 6,5           | %      | 6,5    | 50.000.000     | 6,5    | 50.510.000     | 6,5    | 51.025.202     | 6,5    | 51.545.659     | 6,5    | 52.071.425     |                     |

Tgl cetak: 20 Agustus 2025







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                   | Baseline 2024 | Satuan | Tahun         |                |           |                |                |                |           |                |           |                |                |  | PD Penanggung Jawab |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------------|--|---------------------|--------|----------------|
|                                                                                               |                                                                                       |               |        | 2026          |                |           | 2027           |                |                | 2028      |                |           | 2029           |                |  |                     | 2030   |                |
|                                                                                               |                                                                                       |               |        | Target        | Pagu (juta Rp) |           | Target         | Pagu (juta Rp) |                | Target    | Pagu (juta Rp) |           | Target         | Pagu (juta Rp) |  |                     | Target | Pagu (juta Rp) |
| 1                                                                                             | 2                                                                                     | 3             | 4      | 5             | 6              | 7         | 8              | 9              | 10             | 11        | 12             | 13        | 14             | 15             |  |                     |        |                |
| PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                         |                                                                                       |               |        |               | 30.000.000     |           | 30.300.000     |                | 30.615.121     |           | 30.927.395     |           | 31.242.855     | DLH            |  |                     |        |                |
| Outcome                                                                                       |                                                                                       |               |        |               |                |           |                |                |                |           |                |           |                |                |  |                     |        |                |
| Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 25            | %      | 25            | 30.000.000     | 25        | 30.300.000     | 25             | 30.615.121     | 25        | 30.927.395     | 25        | 31.242.855     |                |  |                     |        |                |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                 |                                                                                       |               |        |               | 10.000.000     |           | 10.102.000     |                | 10.205.040     |           | 10.309.132     |           | 10.414.285     |                |  |                     |        |                |
| Outcome                                                                                       |                                                                                       |               |        |               |                |           |                |                |                |           |                |           |                |                |  |                     |        |                |
| Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tingkat pidana lingkungan hidup                      | Persentase penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup                | 100           | %      | 100           | 10.000.000     | 100       | 10.102.000     | 100            | 10.205.040     | 100       | 10.309.132     | 100       | 10.414.285     |                |  |                     |        |                |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                               |                                                                                       |               |        |               | 130.000.000    |           | 131.326.000    |                | 132.665.525    |           | 134.018.714    |           | 135.385.704    | DLH            |  |                     |        |                |
| Outcome                                                                                       |                                                                                       |               |        |               |                |           |                |                |                |           |                |           |                |                |  |                     |        |                |
| Meningkatnya tata kelola persampahan                                                          | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah                                | 12,58<br>6,05 | Ton    | 46.043,2<br>7 | 130.000.000    | 57.476,66 | 131.326.000    | 67.357,26      | 132.665.525    | 75.143,28 | 134.018.714    | 76.106,88 | 135.385.704    |                |  |                     |        |                |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                     |                                                                                       |               |        |               |                |           |                |                |                |           |                |           |                |                |  |                     |        |                |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                  |                                                                                       |               |        |               | 641.969.009    |           | 648.517.092,89 |                | 655.131.967,24 |           | 661.814.313,31 |           | 668.564.819,30 | Dinas Dukcapil |  |                     |        |                |
| Outcome                                                                                       |                                                                                       |               |        |               |                |           |                |                |                |           |                |           |                |                |  |                     |        |                |
| Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk                                            | Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital                                 | 3,76          | %      | 4,76          | 449.378.306,3  | 5,76      | 453.961.965,02 | 6,76           | 458.592.377,07 | 7,76      | 463.270.019,31 | 8,76      | 467.995.373,51 |                |  |                     |        |                |
|                                                                                               | Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)                                     | 22,18         | %      | 42,18         | 192.590.702,7  | 52,18     | 194.555.127,87 | 62,18          | 196.539.590,17 | 72,18     | 198.544.293,99 | 82,66     | 200.569.445,79 |                |  |                     |        |                |







| Bidang Usuan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                               | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung Jawab |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                             |                                                                   |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                             |                                                                   |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                           | 2                                                                 | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                    |                                                                   |               |        |        | 10.000.000     |        | 10.102.000     |        | 10.205.040,40  |        | 10.309.131,81  |        | 10.414.284,96  | Dinas Dukcapil      |
| Outcome                                                     |                                                                   |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil              | Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan    | 100           | %      | 100    | 2.500.000      | 100    | 2.525.500      | 100    | 2.551.260,1    | 100    | 2.577.282,95   | 100    | 2.603.571,24   |                     |
|                                                             | Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan   | 100           | %      | 100    | 2.500.000      | 100    | 2.525.500      | 100    | 2.551.260,1    | 100    | 2.577.282,95   | 100    | 2.603.571,24   |                     |
|                                                             | Persentase aktaa perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan | 100           | %      | 100    | 2.500.000      | 100    | 2.525.500      | 100    | 2.551.260,1    | 100    | 2.577.282,95   | 100    | 2.603.571,24   |                     |
|                                                             | Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan  | 100           | %      | 100    | 2.500.000      | 100    | 2.525.500      | 100    | 2.551.260,1    | 100    | 2.577.282,95   | 100    | 2.603.571,24   |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN     |                                                                   |               |        |        | 30.000.000     |        | 30.306.000     |        | 30.615.121,20  |        | 30.927.395,44  |        | 31.242.854,87  | Dinas Dukcapil      |
| Outcome                                                     |                                                                   |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan             | Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan               | 3,13          | %      | 15     | 30.000.000     | 20     | 30.306.000     | 25     | 30.615.121,20  | 30     | 30.927.395,44  | 35     | 31.242.854,87  |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                     |                                                                   |               |        |        | 25.000.000     |        | 25.255.000     |        | 25.512.601     |        | 25.772.829,53  |        | 26.035.712,39  | Dinas Dukcapil      |
| Outcome                                                     |                                                                   |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas profil kependudukan                   | Cakupan pengelolaan profil kependudukan                           | 100           | %      | 100    | 25.000.000     | 100    | 25.255.000     | 100    | 25.512.601     | 100    | 25.772.829,53  | 100    | 26.035.712,39  |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                   | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  | PD Penanggung Jawab |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|
|                                                                                                          |                                                                       |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                     |
|                                                                                                          |                                                                       |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   |                     |
| 1                                                                                                        | 2                                                                     | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                              |                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                    |                                                                       |               |        |        | 210.000.000    |        | 212.142.000    |        | 214.305.848,40   |        | 216.491.768,05   |        | 218.699.984,09   | Dinas PMD           |
| Outcome                                                                                                  |                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya kualitas penataan desa                                                                      | Persentase fasilitasi penataan desa                                   | 100           | %      | 100    | 210.000.000    | 100    | 212.142.000    | 100    | 214.305.848,40   | 100    | 216.491.768,05   | 100    | 218.699.984,09   |                     |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                      |                                                                       |               |        |        | 30.000.000     |        | 30.306.000     |        | 30.615.121,20    |        | 30.927.395,44    |        | 31.242.854,87    | Dinas PMD           |
| Outcome                                                                                                  |                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya efektivitas kerja sama desa                                                                 | Persentase fasilitasi kerjasama desa                                  | N/A           | %      | 2      | 30.000.000     | 4      | 30.306.000     | 6      | 30.615.121,20    | 8      | 30.927.395,44    | 10     | 31.242.854,87    |                     |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                   |                                                                       |               |        |        | 1.240.000.000  |        | 1.252.648.000  |        | 1.265.425.009,60 |        | 1.278.332.344,70 |        | 1.291.371.334,61 | Dinas PMD           |
| Outcome                                                                                                  |                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                         | Persentase Aparat Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya | N/A           | %      | 20     | 130.000.000    | 40     | 131.326.000    | 60     | 132.665.525,20   | 80     | 134.018.713,56   | 100    | 135.385.704,44   |                     |
|                                                                                                          | Persentase fasilitasi tata kelola desa                                | 100           | %      | 100    | 1.110.000.000  | 100    | 1.121.322.000  | 100    | 1.132.759.484,40 | 100    | 1.144.313.631,14 | 100    | 135.385.704,44   |                     |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                      |                                                                       |               |        |        | 940.000.000    |        | 949.588.000    |        | 959.273.797,60   |        | 969.058.390,34   |        | 978.942.785,92   | Dinas PMD           |
| Outcome                                                                                                  |                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan | Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)  | 3,75          | %      | 7,52   | 500.000000     | 11,27  | 505.100.000    | 15,03  | 510.252.020      | 18,70  | 515.456.590,60   | 22,55  | 520.714.247,83   |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                    | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung Jawab |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                              |                                                                                        |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                              |                                                                                        |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                                            | 2                                                                                      | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
|                                                                                              | Persentase fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | 3,75          | %      | 7,52   | 440.000.000    | 11,27  | 444.488.000    | 15,03  | 449.021.777,60 | 18,70  | 453.601.799,73 | 22,55  | 458.228.538,09 |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                      |                                                                                        |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                |                                                                                        |               |        |        | 579.600.000    |        | 585.511.920    |        | 591.484.142    |        | 597.517.280    |        | 603.611.956    | Dinas PPKB          |
| Outcome                                                                                      |                                                                                        |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk                                                    | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate)                                           | 2,88          | %      | 2,78   | 279.600.000    | 2,73   | 282.451.920    | 2,68   | 285.332.930    | 2,63   | 288.243.325    | 2,58   | 291.183.403    |                     |
|                                                                                              | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)       | 23,8          | %      | 22,9   | 300.000.000    | 22,6   | 303.060.000    | 22,3   | 306.151.212    | 22     | 309.273.954    | 21,3   | 312.428.549    |                     |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                    |                                                                                        |               |        |        | 5.746.013.000  |        | 5.804.622.333  |        | 5.863.829.480  |        | 5.923.640.541  |        | 5.984.061.675  | Dinas PPKB          |
| Outcome                                                                                      |                                                                                        |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB) | Angka prevalensi kontrasepsi modern / Modern Contraceptive (mCPR)                      | 41,9          | %      | 42,7   | 2.991.713.000  | 43,2   | 3.022.228.473  | 43,7   | 3.053.055.203  | 44,2   | 3.084.196.366  | 44     | 3.115.655.169  |                     |
|                                                                                              | Persentase kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)                           | 20,5          | %      | 18,9   | 2.754.300.000  | 18,1   | 2.782.393.860  | 17,5   | 2.810.774.277  | 16,8   | 2.839.444.175  | 16,3   | 2.868.406.506  |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                     | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |       |               |                |               |        |                |       |               |                |  | PD Penanggung Jawab |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|-------|---------------|----------------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|----------------|--|---------------------|--------|----------------|
|                                                                                               |                                                                         |               |        | 2026   |                |       | 2027          |                |               | 2028   |                |       | 2029          |                |  |                     | 2030   |                |
|                                                                                               |                                                                         |               |        | Target | Pagu (juta Rp) |       | Target        | Pagu (juta Rp) |               | Target | Pagu (juta Rp) |       | Target        | Pagu (juta Rp) |  |                     | Target | Pagu (juta Rp) |
| 1                                                                                             | 2                                                                       | 3             | 4      | 5      | 6              | 7     | 8             | 9              | 10            | 11     | 12             | 13    | 14            | 15             |  |                     |        |                |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                  |                                                                         |               |        |        | 1.207.000.000  |       | 1.219.311.400 |                | 1.231.748.376 |        | 1.244.312.210  |       | 1.257.004.194 | Dinas PPKB     |  |                     |        |                |
| Outcome                                                                                       |                                                                         |               |        |        |                |       |               |                |               |        |                |       |               |                |  |                     |        |                |
| Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS) | Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga | 23,24         | %      | 23,38  | 1.207.000.000  | 23,45 | 1.219.311.400 | 23,52          | 1.231.748.376 | 23,59  | 1.244.312.210  | 23,66 | 1.257.004.194 |                |  |                     |        |                |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                        |                                                                         |               |        |        |                |       |               |                |               |        |                |       |               |                |  |                     |        |                |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                  |                                                                         |               |        |        | 1.286.700.000  |       | 1.299.824.340 |                | 1.313.082.548 |        | 1.326.475.990  |       | 1.340.006.045 | DISHUB         |  |                     |        |                |
| Outcome                                                                                       |                                                                         |               |        |        |                |       |               |                |               |        |                |       |               |                |  |                     |        |                |
| Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat                                              | Persentase uji kir angkutan Umum (target 3.939 unit)                    | 83,24         | %      | 100    | 375.000.000    | 100   | 378.825.000   | 100            | 382.689.015   | 100    | 386.592.442    | 100   | 390.535.685   |                |  |                     |        |                |
|                                                                                               | Jumlah LPU yang terpasang pada ruas jalan kabupaten                     | 76            | unit   | 5      | 150.000.000    | 5     | 151.530.000   | 5              | 153.075.606   | 5      | 154.636.977    | 5     | 156.214.274   |                |  |                     |        |                |
|                                                                                               | Konektivitas darat                                                      | 93,33         | %      | 95     | 148.379.283    | 95,83 | 149.892.751   | 96,67          | 151.421.657   | 98,33  | 152.966.158    | 100   | 154.526.413   |                |  |                     |        |                |
|                                                                                               | Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang dalam kondisi ideal   | 7,23          | %      | 8,43   | 363.320.717    | 9,64  | 367.026.588   | 10,84          | 370.770.259   | 12,05  | 374.552.116    | 13,25 | 378.372.547   |                |  |                     |        |                |
|                                                                                               | Pembangunan dan pemeliharaan terminal tipe C                            | 1             | Unit   | 1      | 250.000.000    | 2     | 252.550.000   | 2              | 255.126.010   | 2      | 257.728.295    | 2     | 260.357.123   |                |  |                     |        |                |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan            | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                   | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                  |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung jawab |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                         |                                                                                                       |               |        | 2026   |                  | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                         |                                                                                                       |               |        | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                       | 2                                                                                                     | 3             | 4      | 5      | 6                | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                   |                                                                                                       |               |        |        |                  |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                     |                                                                                                       |               |        |        | 61.809.300       |        | 62.439.755     |        | 63.076.640     |        | 63.720.022     |        | 64.371.241     | Dinas Kominfo       |
| Outcome                                                                 |                                                                                                       |               |        |        |                  |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM                                                             | 8             | %      | 20     | 30.000.000       | 32     | 30.306.000     | 44     | 30.615.121     | 56     | 30.927.395     | 68     | 31.242.854     |                     |
|                                                                         | Persentase pelayanan informasi publik                                                                 | 25            | %      | 50     | 10.000.000       | 75.00  | 10.102.000     | 80.0   | 10.205.040     | 85.00  | 10.304.131     | 100.00 | 10.414.284     |                     |
|                                                                         | Persentase diseminasi informasi publik                                                                | 30,58         | %      | 31,65  | 6.809.300        | 32.73  | 6.878.754      | 33.81  | 6.948.918      | 34.89  | 7.019.797      | 35.97  | 7.091.399      |                     |
|                                                                         | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah | N/A           | %      | 100    | 15.000.000       | 100    | 15.153.000     | 100    | 15.307.560     | 100    | 15.463.697     | 100    | 15.621.427     |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                |                                                                                                       |               |        |        | 1.362.952.415.00 |        | 1.376.854.529  |        | 1.390.898.445  |        | 1.405.085.609  |        | 1.419.417.483  | Dinas Kominfo       |
| Outcome                                                                 |                                                                                                       |               |        |        |                  |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika                  | Cakupan layanan internet pemerintah                                                                   | 67            | %      | 73     | 1.262.952.415    | 80     | 1.275.834.529  | 87     | 1.288.848.041  | 93     | 1.301.994.291  | 100    | 1.315.274.633  |                     |
|                                                                         | Persentase jaringan internet yang dapat diakses                                                       | 52            | %      | 54.48  | 75.000.000       | 55.75  | 75.765.000     | 57.01  | 76.537.488     | 58.28  | 77.318.488     | 59.54  | 78.107.137     |                     |
|                                                                         | Indeks SPBE                                                                                           | 2.83          | indeks | 3,21   | 25.000.000       | 3,4    | 25.255.000     | 3,59   | 25.512.601     | 3,78   | 25.772.829     | 3,97   | 26.035.712     |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan            | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                 | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung Jawab |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                         |                                                                     |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                         |                                                                     |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                       | 2                                                                   | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH          |                                                                     |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                            |                                                                     |               |        |        | 65.000.000     |        | 65.663.000     |        | 66.332.763     |        | 67.009.357     |        | 67.692.852     | Dinas PPK UMKM      |
|                                                                         | Outcome                                                             |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian                                 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan     | 4             | %      | 12     | 65.000.000     | 16     | 65.663.000     | 20     | 66.332.763     | 24     | 67.009.357     | 28     | 67.692.852     |                     |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                          |                                                                     |               |        |        | 130.000.000    |        | 131.326.000    |        | 132.665.525    |        | 134.018.714    |        | 135.385.704    | Dinas PPK UMKM      |
|                                                                         | Outcome                                                             |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya produktivitas koperasi                                     | Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas                   | 52,9          | %      | 60     | 130.000.000    | 65     | 131.326.000    | 70     | 132.665.525    | 75     | 134.018.714    | 80     | 135.385.704    |                     |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                     |               |        |        | 25.000.000     |        | 25.255.000     |        | 25.512.601     |        | 25.772.830     |        | 26.035.712     | Dinas PPK UMKM      |
|                                                                         | Outcome                                                             |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri                    | Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal | 13,17         | %      | 20     | 20.000.000     | 25     | 20.204.000     | 30     | 20.410.081     | 35     | 20.618.264     | 40     | 20.828.570     |                     |
|                                                                         | Pertumbuhan wirausaha                                               | 0,35          | %      | 0,75   | 5.000.000      | 0,95   | 5.051.000      | 1,15   | 5.102.520      | 1,35   | 5.154.566      | 1,55   | 5.207.142      |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                              |                                                                     |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                       |                                                                     |               |        |        | 83.259.595     |        | 84.108.843     |        | 84.966.753     |        | 85.833.414     |        | 86.708.915     | Dinas PMP TSP       |
|                                                                         | Outcome                                                             |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko                         | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan       | 65            | %      | 70     | 70.000.000     | 72     | 70.714.000     | 75     | 71.435.283     | 78     | 72.163.923     | 81     | 72.899.995     |                     |
|                                                                         | Indeks kepuasan masyarakat                                          | 88,25         | %      | 89,25  | 13.259.595     | 91,25  | 13.394.843     | 92,1   | 13.531.470     | 93,5   | 13.669.491     | 94,55  | 13.808.920     |                     |







| Bidang Ususan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                              | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung Jawab |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                              |                                                                                                  |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                              |                                                                                                  |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                            | 2                                                                                                | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL             |                                                                                                  |               |        |        | 100.000.000    |        | 101.020.000    |        | 102.050.040    |        | 103.091.318    |        | 104.142.850    | Dinas PMP TSP       |
| Outcome                                                      |                                                                                                  |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal                     | Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha | N/A           | %      | 100    | 60.000.000     | 100    | 60.612.000     | 100    | 61.230.242     | 100    | 61.854.791     | 100    | 62.485.710     |                     |
|                                                              | Persentase nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMMA)                                         | 51,2          | %      | 52     | 20.000.000     | 53     | 20.204.000     | 54     | 20.410.081     | 55     | 20.618.264     | 56     | 20.828.570     |                     |
|                                                              | Persentase jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMMA)                                         | 33,98         | %      | 35,1   | 20.000.000     | 35,9   | 20.204.000     | 36,7   | 20.410.081     | 37,5   | 20.618.264     | 38,7   | 20.828.570     |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAHA             |                                                                                                  |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN         |                                                                                                  |               |        |        | 500.000.000    |        | 505.100.000    |        | 510.252.020    |        | 515.456.591    |        | 520.714.248    | DISPORA             |
| Outcome                                                      |                                                                                                  |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya daya saing kepemudaan                           | Rasio Wirausaha Pemuda                                                                           | 2             | %      | 2      | 500.000.000    | 2      | 505.100.000    | 2      | 510.252.020    | 2      | 515.456.591    | 2      | 520.714.248    |                     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN       |                                                                                                  |               |        |        | 1.300.000.000  |        | 1.313.260.000  |        | 1.326.655.252  |        | 1.340.187.136  |        | 1.353.857.044  | DISPORA             |
| Outcome                                                      |                                                                                                  |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga               | Persentase atlet yang masuk Pelatnas                                                             | 11,67         | orang  | 15,67  | 1.300.000.000  | 17,67  | 1.313.260.000  | 19,67  | 1.326.655.252  | 21,67  | 1.340.187.136  | 23,67  | 1.353.857.044  |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                    | Baseline 2024 | Satuan | Tahun     |                |         |                |        |                |          |                |          |                | PD Penanggung Jawab |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------------------|
|                                                                                                    |                                                                                        |               |        | 2026      |                | 2027    |                | 2028   |                | 2029     |                | 2030     |                |                     |
|                                                                                                    |                                                                                        |               |        | Target    | Pagu (juta Rp) | Target  | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target   | Pagu (juta Rp) | Target   | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                      | 3             | 4      | 5         | 6              | 7       | 8              | 9      | 10             | 11       | 12             | 13       | 14             | 15                  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                               |                                                                                        |               |        |           |                |         |                |        |                |          |                |          |                |                     |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                         |                                                                                        |               |        |           | 32.890.650,00  |         | 33.226.134,63  |        | 33.565.041,20  |          | 33.907.404,62  |          | 34.253.260,15  | Dinas KOMINFO       |
| Outcome                                                                                            |                                                                                        |               |        |           |                |         |                |        |                |          |                |          |                |                     |
| Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarasasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional | Indeks Pembangunan Statistik Sektoral                                                  | 2,06 (cukup)  | Indeks | 2,06 -2,6 | 15.000.000,00  | 2,6-2,8 | 15.153.000     | 2,81-3 | 15.307.561     | 3,01-3,2 | 15.463.698     | 3,21-3,4 | 15.621.427     |                     |
|                                                                                                    | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat di akses oleh pengguna data | 38            | %      | 50        | 17.890.650,00  | 63      | 18.073.135     | 75     | 18.257.481     | 88       | 18.443.707     | 100      | 18.631.833     |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                              |                                                                                        |               |        |           |                |         |                |        |                |          |                |          |                |                     |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                      |                                                                                        |               |        |           | 30.116.850,00  |         | 30.116.850,00  |        | 30.424.042     |          | 30.734.367     |          | 31.047.858     | Dinas KOMINFO       |
| Outcome                                                                                            |                                                                                        |               |        |           |                |         |                |        |                |          |                |          |                |                     |
| Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah                                 | Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah                                | N/A           | Indeks | 1         | 30.116.850,00  | 1,2     | 30.116.850,00  | 1,4    | 30.424.042     | 1,6      | 30.734.367     | 1,8      | 31.047.858     |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                              |                                                                                        |               |        |           |                |         |                |        |                |          |                |          |                |                     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                    |                                                                                        |               |        |           | 1.125.000.000  |         | 1.136.475.000  |        | 1.148.067.045  |          | 1.159.777.329  |          | 1.171.607.058  | Dinas P & K         |
| Outcome                                                                                            |                                                                                        |               |        |           |                |         |                |        |                |          |                |          |                |                     |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan                                  | Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan                        | 11,76         | %      | 35,29     | 1.125.000.000  | 52,94   | 1.136.475.000  | 70,59  | 1.148.067.045  | 88,24    | 1.159.777.329  | 100      | 1.171.607.058  |                     |







| Bidang Usuan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung jawab |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                             |                                                                                    |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                             |                                                                                    |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                           | 2                                                                                  | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                   |                                                                                    |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Outcome                                                                     |                                                                                    |               |        |        | 200.000.000    |        | 202.040.000    |        | 204.100.808    |        | 206.182.636    |        | 208.285.699    | Dinas P & K         |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan                 | 100           | %      | 100    | 200.000.000    | 100    | 202.040.000    | 100    | 204.100.808    | 100    | 206.182.636    | 100    | 208.285.699    |                     |
| PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                   |                                                                                    |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Outcome                                                                     |                                                                                    |               |        |        | 200.000.000    |        | 202.040.000    |        | 204.100.808    |        | 206.182.636    |        | 208.285.699    | Dinas P & K         |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah                    | Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal                     | 6,67          | %      | 33,3   | 200.000.000    | 53,3   | 202.040.000    | 73,3   | 204.100.808    | 93,3   | 206.182.636    | 100    | 208.285.699    |                     |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                            |                                                                                    |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Outcome                                                                     |                                                                                    |               |        |        | 800.000.000    |        | 808.160.000    |        | 816.403.232    |        | 824.730.545    |        | 833.142.797    | Dinas P & K         |
| Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan                               | Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang diletapkan/ dilestarikan | 10,71         | %      | 35,71  | 800.000.000    | 53,57  | 808.160.000    | 71,43  | 816.403.232    | 89,29  | 824.730.545    | 100    | 833.142.797    |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                             |                                                                                    |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Outcome                                                                     |                                                                                    |               |        |        | 2.000.000.000  |        | 2.020.400.000  |        | 2.041.008.080  |        | 2.061.826.362  |        | 2.082.856.991  | Dinas P & K         |
| Meningkatnya tata kelola museum                                             | Persentase kunjungan wisatawan ke museum                                           | 0             | %      | 40     | 2.000.000.000  | 45     | 2.020.400.000  | 50     | 2.041.008.080  | 55     | 2.061.826.362  | 60     | 2.082.856.991  |                     |





| Bidang Urusan Pemenuhan dan Program Prioritas Pembangunan              | Indikator Kinerja Program (Outcome)                       | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                |               |  | PD Penanggung jawab |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|--|---------------------|
|                                                                        |                                                           |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |               |  |                     |
|                                                                        |                                                           |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |               |  |                     |
| 1                                                                      | 2                                                         | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15            |  |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                |                                                           |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |               |  |                     |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                         |                                                           |               |        |        | 350.000.000    |        | 353.570.000    |        | 357.176.414    |        | 360.819.613,42 |        | 364.499.973,48 | Dinas Arsipus |  |                     |
| Outcome                                                                |                                                           |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |               |  |                     |
| Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                | 0,96          | %      | 1,38   | 350.000.000    | 1,59   | 353.570.000    | 1,8    | 357.176.414    | 2,21   | 360.819.613,42 | 2,22   | 364.499.973,48 |               |  |                     |
| PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                   |                                                           |               |        |        | 100.000.000    |        | 101.020.000    |        | 102.050.404    |        | 103.091.318    |        | 104.142.850    | Dinas Arsipus |  |                     |
| Outcome                                                                |                                                           |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |               |  |                     |
| Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno              | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki | N/A           | %      | 33,33  | 100.000.000    | 66,66  | 101.020.000    | 100    | 102.050.404    | 100    | 103.091.318    | 100    | 104.142.850    |               |  |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                   |                                                           |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |               |  |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                              |                                                           |               |        |        | 60.000.000     |        | 60.612.000     |        | 61.230.242,40  |        | 61.854.790,87  |        | 62.485.709,74  | Dinas Arsipus |  |                     |
| Outcome                                                                |                                                           |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |               |  |                     |
| Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis                      | Tingkat ketersediaan arsip                                | 16,66         | %      | 17,64  | 60.000.000     | 20,64  | 60.612.000     | 23,64  | 61.230.242,40  | 26,64  | 61.854.790,87  | 30,64  | 62.485.709,74  |               |  |                     |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                            |                                                           |               |        |        | 130.000.000    |        | 131.326.000    |        | 132.665.525,20 |        | 134.018.713,56 |        | 135.385.704,44 | Dinas Arsipus |  |                     |
| Outcome                                                                |                                                           |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |               |  |                     |
| Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK           | Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip    | 16,66         | %      | 17,64  | 130.000.000    | 20,64  | 131.326.000    | 23,64  | 132.665.525,2  | 26,64  | 134.018.713,56 | 30,64  | 135.385.704,44 |               |  |                     |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                   | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Baseline 2024 | Satuan        | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung Jawab |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                |                                     |               |               | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                |                                     |               |               | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                              | 2                                   | 3             | 4             | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                                             |                                     |               |               |        | 20.000.000     |        | 20.204.000     |        | 20.410.081     |        | 20.618.264     |        | 20.828.570     | Dinas Arsipus       |
| Outcome                                                                        |                                     |               |               |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup |                                     | N/A           | %             | 5      | 20.000.000     | 7,5    | 20.204.000     | 10     | 20.410.081     | 12,5   | 20.618.264     | 15     | 20.828.570     |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                    |                                     |               |               |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                              |                                     |               |               |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                          |                                     |               |               |        | 574.811.000    |        | 580.674.072    |        | 592.287.554    |        | 598.328.887    |        | 604.431.841    | Dinas Perikanan     |
| Outcome                                                                        |                                     |               |               |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya produksi perikanan tangkap                                        |                                     | 520,4         | Ton           | 530    | 574.811.000    | 540    | 580.674.072    | 550    | 592.287.554    | 560    | 598.328.887    | 570    | 604.431.841    |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                         |                                     |               |               |        | 1.167.970.948  |        | 1.179.884.252  |        | 1.191.919.071  |        | 1.204.076.646  |        | 1.216.358.227  | Dinas Perikanan     |
| Outcome                                                                        |                                     |               |               |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya produksi perikanan budidaya                                       |                                     | 568           | Ton           | 571,2  | 1.167.970.948  | 572,2  | 1.179.884.252  | 573,2  | 1.191.919.071  | 574,2  | 1.204.076.646  | 575,2  | 1.216.358.227  |                     |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                               |                                     |               |               |        | 100.000.000    |        | 101.020.000    |        | 102.050.404    |        | 103.091.318    |        | 104.142.850    | Dinas Perikanan     |
| Outcome                                                                        |                                     |               |               |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat                                     |                                     | 15.82         | Kg/kap/ Tahun | 18     | 100.000.000    | 19     | 101.020.000    | 20     | 102.050.404    | 21     | 103.091.318    | 22     | 104.142.850    |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan    | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                         | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung jawab      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------------------|
|                                                                 |                                                                             |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                          |
|                                                                 |                                                                             |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                          |
| 1                                                               | 2                                                                           | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                       |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                           |                                                                             |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                          |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA             |                                                                             |               |        |        | 200.000.000    |        | 202.040.000    |        | 204.100.808    |        | 206.182.636    |        | 208.285.699    | Dinas Pariwisata         |
| Outcome                                                         |                                                                             |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                          |
| Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata                    | Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan                                  | -0,25         | %      | 0,5    | 200.000.000    | 0,75   | 202.040.000    | 1      | 204.100.808    | 1,25   | 206.182.636    | 1,50   | 208.285.699    |                          |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                    |                                                                             |               |        |        | 150.000.000    |        | 151.530.000    |        | 153.075.606    |        | 154.636.977    |        | 156.214.274    | Dinas Pariwisata         |
| Outcome                                                         |                                                                             |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                          |
| Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata                     | Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata                           | 100           | %      | 100    | 150.000.000    | 100    | 151.530.000    | 100    | 153.075.606    | 100    | 154.636.977    | 100    | 156.214.274    |                          |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |                                                                             |               |        |        | 150.000.000    |        | 151.530.000    |        | 153.075.606    |        | 154.636.977    |        | 156.214.274    | Dinas Pariwisata         |
| Outcome                                                         |                                                                             |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                          |
| Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif       | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi | 100           | %      | 100    | 150.000.000    | 100    | 151.530.000    | 100    | 153.075.606    | 100    | 154.636.977    | 100    | 156.214.274    |                          |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                            |                                                                             |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                          |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN            |                                                                             |               |        |        | 3.850.000.000  |        | 3.889.270.000  |        | 3.928.940.554  |        | 3.969.015.748  |        | 4.009.499.708  | Dinas TPHP dan Dinas PKH |
| Outcome                                                         |                                                                             |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                          |
| Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian           | Peningkatan produksi tanaman pangan:<br>* Produksi padi                     | 24.352        | Ton    | 26.847 | 600.000.000    |        | 606.120.000    |        | 612.302.424    |        | 618.547.909    |        | 624.857.097    | Dinas TPHP               |
|                                                                 |                                                                             |               |        |        |                |        |                | 29.598 |                | 31.077 |                | 32.630 |                | Dinas TPHP               |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                               | Baseline 2024 | Satuan   | Tahun    |                |               |                |               |                |          |                |               |                | PD Penanggung jawab |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------------|------------|
|                                                              |                                                                                   |               |          | 2026     |                | 2027          |                | 2028          |                | 2029     |                | 2030          |                |                     |            |
|                                                              |                                                                                   |               |          | Target   | Pagu (juta Rp) | Target        | Pagu (juta Rp) | Target        | Pagu (juta Rp) | Target   | Pagu (juta Rp) | Target        | Pagu (juta Rp) |                     |            |
| 1                                                            | 2                                                                                 | 3             | 4        | 5        | 6              | 7             | 8              | 9             | 10             | 11       | 12             | 13            | 14             | 15                  | Dinas TPHP |
|                                                              | * Produksi jagung                                                                 | 282.752       | Ton      | 311.733  |                | 327.319       |                | 343.684       |                | 368.868  |                | 386.911       |                |                     |            |
|                                                              | Peningkatan produksi hortikultura:                                                |               |          |          | 606.120.000    |               |                |               | 612.302.424    |          | 618.547.909    |               | 624.857.097    |                     | Dinas TPHP |
|                                                              | * Produksi jeruk                                                                  | 269.236       | Ton      | 280.113  |                | 285.715       |                | 291.430       |                | 297.258  |                | 303.203       |                |                     | Dinas TPHP |
|                                                              | * Produksi sayuran                                                                | 12.439        | Kw       | 12.942   |                | 13.200        |                | 13.464        |                | 13.734   |                | 14.008        |                |                     | Dinas TPHP |
|                                                              | Peningkatan produksi komoditas pertanian:                                         |               |          |          |                |               |                |               |                |          |                |               |                |                     | Dinas PKH  |
|                                                              | * Inseminasi Buatan ternak sapi                                                   | 0,15          | %        | 0,21     | 2.650.000.000  | 0,24          | 2.677.030.000  | 0,27          | 2.704.335.706  | 0,30     | 2.731.919.930  | 0,33          | 2.759.785.513  |                     | Dinas PKH  |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN      |                                                                                   |               |          |          | 5.040.000.000  |               | 5.091.408.000  |               | 5.143.340.362  |          | 5.195.802.433  |               | 5.248.799.618  |                     | Dinas TPHP |
| Outcome                                                      |                                                                                   |               |          |          |                |               |                |               |                |          |                |               |                |                     |            |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian     | Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan LP2B                                 | 32,42<br>9,3  | Ha       | 32.429,3 | 1.350.000.000  | 32.429,3<br>3 | 1.363.770.000  | 32.429,3<br>3 | 1.377.680.454  | 32.429,3 | 1.391.732.795  | 32.429,3<br>3 | 1.405.928.469  |                     | Dinas TPHP |
|                                                              | Cakupan kelompok tani penerima prasarana pertanian (alsintan dan prasarana fisik) | 50            | Kelompok | 60       | 1.350.000.000  | 65            | 1.363.770.000  | 70            | 1.377.680.454  | 75       | 1.391.732.795  | 80            | 1.405.928.469  |                     | Dinas TPHP |
|                                                              | Persentase puskesmas dan RPH dalam kondisi baik                                   | 60            | %        | 65       | 2.340.000.000  | 70            | 2.363.868.000  | 75            | 2.387.979.454  | 80       | 2.412.336.844  | 85            | 2.436.942.680  |                     | Dinas PKH  |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                 |                                                                                   |               |          |          | 2.000.000.000  |               | 2.020.400.000  |               | 2.041.008.080  |          | 2.061.826.362  |               | 2.082.856.991  |                     | Dinas TPHP |
| Outcome                                                      |                                                                                   |               |          |          |                |               |                |               |                |          |                |               |                |                     |            |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian       | Persentase penyuluhan pertanian yang ditingkatkan                                 | 0             | %        | 7,14     | 1.000.000.000  | 10,71         | 1.010.200.000  | 14,29         | 1.020.504.040  | 17,85    | 1.030.913.181  | 21,42         | 1.041.428.496  |                     |            |

Tgl cetak: 20 Agustus 2025

BAB IV. - 221 -







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                               | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung jawab |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                      |                                                                                   |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                      |                                                                                   |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                 | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
|                                                                                                      | Peningkatan kelas kelompok tani:                                                  |               |        |        | 1.000.000.000  |        | 1.010.200.000  |        | 1.020.504.040  |        | 1.030.913.181  |        | 1.041.428.496  |                     |
|                                                                                                      | • Tingkat lanjut                                                                  | 449           | KT     | 459    |                | 464    |                | 469    |                | 474    |                | 479    |                |                     |
|                                                                                                      | • Tingkat madya                                                                   | 57            | KT     | 57     |                | 58     |                | 59     |                | 60     |                | 61     |                |                     |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                              |                                                                                   |               |        |        | 1.150.000.000  |        | 1.161.730.000  |        | 1.173.579.646  |        | 1.185.550.158  |        | 1.197.642.770  | Dinas PKH           |
| Outcome                                                                                              |                                                                                   |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner                         | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)                      | 70            | %      | 75     | 1.125.000.000  | 80     | 1.136.475.000  | 85     | 1.148.067.045  | 90     | 1.159.777.329  | 95     | 1.171.607.058  |                     |
|                                                                                                      | Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV | 2             | %      | 2      | 25.000.000     | 2      | 25.255.000     | 2      | 25.512.601     | 2      | 25.772.830     | 2      | 26.035.712     |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                               |                                                                                   |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                    |                                                                                   |               |        |        | 250.000.000    |        | 252.550.000    |        | 255.126.010    |        | 257.728.295    |        | 260.357.124    | Dinas PPK UMKM      |
| Outcome                                                                                              |                                                                                   |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya                       | 34,25         | %      | 39,73  | 250.000.000    | 42,47  | 252.550.000    | 45,21  | 255.126.010    | 47,95  | 257.728.295    | 50,68  | 260.357.124    |                     |





| Bidang Usuan Pemerintahan<br>dan Program Prioritas<br>Pembangunan                                          | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)                                                                          | Baseline<br>2024 | Satuan | Tahun  |                |             |                |             |                |             |                |             |                | PD<br>Penanggung<br>jawab |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                 |                  |        | 2026   |                | 2027        |                | 2028        |                | 2029        |                | 2030        |                |                           |                      |
|                                                                                                            |                                                                                                                 |                  |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target      | Pagu (juta Rp) | Target      | Pagu (juta Rp) | Target      | Pagu (juta Rp) | Target      | Pagu (juta Rp) |                           |                      |
|                                                                                                            |                                                                                                                 |                  |        |        |                |             |                |             |                |             |                |             |                |                           |                      |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                               | 3                | 4      |        | 5              | 6           | 7              | 8           | 9              | 10          | 11             | 12          | 13             | 14                        | 15                   |
| PROGRAM STABILISASI<br>HARGA BARANG KEBUTUHAN<br>POKOK DAN BARANG<br>PENTING                               |                                                                                                                 |                  |        |        | 280.750.000    |             |                | 283.613.650 |                | 286.506.509 |                | 289.428.876 |                | 292.381.050               | Dinas<br>PPK<br>UMKM |
| Outcome                                                                                                    |                                                                                                                 |                  |        |        |                |             |                |             |                |             |                |             |                |                           |                      |
| Meningkatnya kelancaran<br>distribusi dan stabilitas<br>harga barang kebutuhan pokok<br>dan barang penting | Persentase stabilisasi harga<br>barang kebutuhan pokok dan<br>barang penting                                    | 75               | %      |        | 75             | 280.750.000 | 75             | 283.613.650 | 75             | 286.506.509 | 75             | 289.428.876 | 75             | 292.381.050               |                      |
| PROGRAM STANDARDISASI<br>DAN PERLINDUNGAN<br>KONSUMEN                                                      |                                                                                                                 |                  |        |        |                | 171.000.000 |                |             |                | 174.506.191 |                | 176.286.154 |                | 178.084.273               | Dinas<br>PPK<br>UMKM |
| Outcome                                                                                                    |                                                                                                                 |                  |        |        |                |             |                |             |                |             |                |             |                |                           |                      |
| Meningkatnya tertib niaga dan<br>mutu produk                                                               | Persentase penanganan<br>pengaduan konsumen                                                                     | 100              | %      |        | 100            | 85.500.000  | 100            | 86.372.100  | 100            | 87.253.095  | 100            | 88.143.077  | 100            | 89.042.136                |                      |
|                                                                                                            | Persentase alat-alat ukur,<br>takar, timbang dan<br>perlengkapannya (UTTP)<br>bertanda tera sah yang<br>berlaku | 51,5             | %      |        | 60             | 85.500.000  | 65             | 86.372.100  | 70             | 87.253.095  | 75             | 88.143.077  | 80             | 89.042.136                |                      |
| PROGRAM PENGGUNAAN<br>DAN PEMASARAN PRODUK<br>DALAM NEGERI                                                 |                                                                                                                 |                  |        |        |                | 50.000.000  |                |             |                | 51.025.202  |                | 51.545.659  |                | 52.071.425                | Dinas<br>PPK<br>UMKM |
| Outcome                                                                                                    |                                                                                                                 |                  |        |        |                |             |                |             |                |             |                |             |                |                           |                      |
| Meningkatnya penggunaan dan<br>pemasaran produk dalam negeri                                               | Persentase promosi produk<br>lokal yang difasilitasi/<br>dilaksanakan                                           | 10               | %      |        | 15             | 50.000.000  | 15             | 50.510.000  | 20             | 51.025.202  | 20             | 51.545.659  | 25             | 52.071.425                |                      |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                      | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung Jawab |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                              |                                                                          |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                              |                                                                          |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                            | 2                                                                        | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                     |                                                                          |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                 |                                                                          |               |        |        | 738.000.000    |        | 745.527.600    |        | 753.131.982    |        | 760.813.928    |        | 768.574.230    | Dinas PPK UMKM      |
|                                                              |                                                                          |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Outcome                                                      |                                                                          |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya Realisasi pembangunan industri                  | Cakupan pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota | 13,9          | %      | 20     | 738.000.000    | 25     | 745.527.600    | 30     | 753.131.982    | 35     | 760.813.928    | 40     | 768.574.230    |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL       |                                                                          |               |        |        | 35.000.000     |        | 35.357.000     |        | 35.717.641     |        | 36.081.961     |        | 36.449.997     | Dinas PPK UMKM      |
| Outcome                                                      |                                                                          |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi industri                  | Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini        | 745           | Unit   | 785    | 35.000.000     | 805    | 35.357.000     | 830    | 35.717.641     | 850    | 36.081.961     | 870    | 36.449.997     |                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                      |                                                                          |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                     |                                                                          |               |        |        | 60.100.000     |        | 60.713.020     |        | 61.332.293     |        | 61.957.882     |        | 62.589.853     | Dinas Naker Trans   |
| Outcome                                                      |                                                                          |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi       | Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang                     | 25            | %      | 35     | 60.100.000     | 40     | 60.713.020     | 45     | 61.332.293     | 50     | 61.957.882     | 55     | 62.589.853     |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)                               | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                  |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung jawab |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                      |                                                                   |               |        | 2026   |                  | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                      |                                                                   |               |        | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                                    | 2                                                                 | 3             | 4      | 5      | 6                | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                            |                                                                   |               |        |        | 75.000.000       |        | 75.76.000      |        | 76.53.803      |        | 77.318.489     |        | 78.107.137     | Dinas Naker trans   |
| Outcome                                                                              |                                                                   |               |        |        |                  |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigrasi dalam pengembangan transmigrasi | Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan              | 25            | %      | 35     | 75.000.000       | 40     | 75.765.000     | 45     | 76.537.803     | 50     | 77.318.489     | 55     | 78.107.137     |                     |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                  |                                                                   |               |        |        |                  |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| SEKRETARIAT DAERAH                                                                   |                                                                   |               |        |        |                  |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                        |                                                                   |               |        |        | 6.589.126.360,08 |        | 6.656.335.449  |        | 6.724.230.071  |        | 6.792.817.217  |        | 6.862.103.953  | SETDA               |
| Outcome                                                                              |                                                                   |               |        |        |                  |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat                                 | Persentase Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat | 100           | %      | 100    | 3.766.787.004,72 | 100    | 3.805.208.232  | 100    | 3.844.021.356  | 100    | 3.883.230.374  | 100    | 3.922.839.324  |                     |
| Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah                                | Indeks kematangan organisasi                                      | 100           | %      | 100    | 604.787.004,72   | 100    | 610.955.832    | 100    | 617.187.582    | 100    | 623.482.895    | 100    | 629.842.421    |                     |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah                      | Persentase Efektivitas kerjasama daerah                           | 100           | %      | 100    | 100.000.000      | 100    | 101.020.000    | 100    | 102.050.404    | 100    | 103.091.318    | 100    | 104.142.849    |                     |
|                                                                                      | Kinerja penyelenggaraan pemerintahan                              | 100           | %      | 100    | 605.584.838,84   | 100    | 611.761.804    | 100    | 618.001.775    | 100    | 624.305.393    | 100    | 630.673.308    |                     |
| Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan                                   | Persentase produk hukum yang dihasilkan                           | 100           | %      | 100    | 403.191.336,48   | 100    | 407.303.888    | 100    | 411.458.388    | 100    | 415.655.263    | 100    | 419.894.947    |                     |
| Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa                              | Tingkat kematangan UKPBJ                                          | 35,56         | %      | 100    | 705.584.838,84   | 100    | 712.781.804    | 100    | 720.052.179    | 100    | 727.396.711    | 100    | 734.816.157    |                     |
| Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan                             | Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan                    | 100           | %      | 100    | 403.191.336,48   | 100    | 407.303.888    | 100    | 411.458.388    | 100    | 415.655.263    | 100    | 419.894.947    |                     |



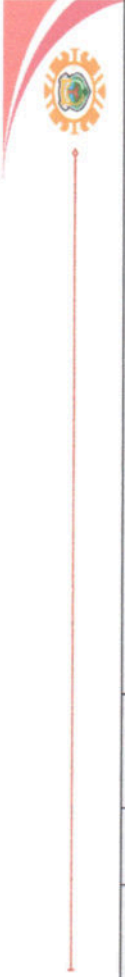




| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan              | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                   | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  | PD Penanggung Jawab |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|
|                                                                           |                                                                                       |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                     |
|                                                                           |                                                                                       |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   |                     |
| 1                                                                         | 2                                                                                     | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                  |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                      |                                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Outcome                                                                   |                                                                                       |               |        |        | 503.989.170,60 |        | 509.129.860    |        | 514.322.985      |        | 519.569.079      |        | 524.868.684      |                     |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan  | Persentase Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | 53,30         | %      | 100    | 503.989.170,60 | 100    | 509.129.860    | 100    | 514.322.985      | 100    | 519.569.079      | 100    | 524.868.684      |                     |
| SEKRETARIAT DPRD                                                          |                                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                        |                                                                                       |               |        |        | 8.033.255.000  |        | 8.115.194.201  |        | 8.197.969.181,85 |        | 8.281.588.467,51 |        | 8.366.060.669,87 | Sekretaria DPRD     |
| Outcome                                                                   |                                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan | Kelepatan penetapan Perda APBD tahun N                                                | 100           | %      | 100    | 800.000.000    | 100    | 808.160.000    | 100    | 816.403.232      | 100    | 824.730.544,97   | 100    | 833.142.796,53   |                     |
|                                                                           | Persentase penetapan Ranperda tahun N                                                 | 100           | %      | 100    | 800.000.000    | 100    | 808.160.000    | 100    | 816.403.232      | 100    | 824.730.544,97   | 100    | 833.142.796,53   |                     |
| Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan                         | Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan                                    | 100           | %      | 100    | 6.433.255.000  | 100    | 6.498.874.201  | 100    | 6.565.162.717,85 | 100    | 6.632.127.377,57 | 100    | 6.699.775.076,82 |                     |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                       |                                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| PERENCANAAN                                                               |                                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH         |                                                                                       |               |        |        | 392.905.000    |        | 396.912.631    |        | 400.961.139,84   |        | 405.050.943,46   |        | 409.182.463,09   | BAPPEDA             |
| Outcome                                                                   |                                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah                      | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD                                              | 100           | %      | 100    | 200.000.000    | 100    | 202.040.000    | 100    | 204.100.808      | 100    | 206.182.636,24   | 100    | 208.285.699,13   |                     |
|                                                                           | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD                                        | 100           | %      | 100    | 192.905.000    | 100    | 194.872.631    | 100    | 196.860.331,84   | 100    | 198.868.307,22   | 100    | 200.896.763,95   |                     |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                              | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                          | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  | PD Penanggung Jawab |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|
|                                                                                           |                                                                                              |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                     |
|                                                                                           |                                                                                              |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   |                     |
| 1                                                                                         | 2                                                                                            | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                  |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                        |                                                                                              |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Outcome                                                                                   |                                                                                              |               |        |        | 1.022.500.000  |        | 1.032.929.500  |        | 1.043.465.380,90 |        | 1.054.108.727,79 |        | 1.064.860.636,81 | BAPPEDA             |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100           | %      | 100    | 511.250.000    | 100    | 516.464.750    | 100    | 521.732.690,45   | 100    | 527.054.363,89   | 100    | 532.430.318,40   |                     |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan        | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan        | 100           | %      | 100    | 255.625.000    | 100    | 258.232.375    | 100    | 260.866.345,23   | 100    | 263.527.181,95   | 100    | 266.215.159,20   |                     |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA                 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA                 | 100           | %      | 100    | 255.625.000    | 100    | 258.232.375    | 100    | 260.866.345,23   | 100    | 263.527.181,95   | 100    | 266.215.159,20   |                     |
| URUSAN KEUANGAN                                                                           |                                                                                              |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                       |                                                                                              |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Outcome                                                                                   |                                                                                              |               |        |        | 6.120.537.932  |        | 6.182.967.419  |        | 6.246.033.687    |        | 6.309.743.230    |        | 6.374.102.611    | BPKAD               |
| Meningkatnya tata kelola anggaran                                                         | Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang di alokasikan melalui TKD             | 21,71         | %      | 21,71  | 306.026.897    | 21,71  | 309.148.371    | 21,71  | 312.301.684      | 21,71  | 315.487.162      | 21,71  | 318.705.131      |                     |
|                                                                                           | Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik                                    | 22,2          | %      | 26,86  | 306.026.897    | 29,55  | 309.148.371    | 32,50  | 312.301.684      | 35,75  | 315.487.162      | 39,15  | 318.705.131      |                     |
| Meningkatnya tata kelola perbendaharaan                                                   | Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar                           | 88,17         | %      | 89,93  | 1.836.161.380  | 90,82  | 1.854.890.226  | 91,70  | 1.873.810.106    | 92,58  | 1.892.922.969    | 93,46  | 1.912.230.783    |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan<br>dan Program Prioritas<br>Pembangunan      | Indikator Kinerja Program<br>(Outcome)                                | Baseline<br>2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD<br>Penanggung<br>jawab |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------------|
|                                                                         |                                                                       |                  |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                           |
|                                                                         |                                                                       |                  |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                           |
| 1                                                                       | 2                                                                     | 3                | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                        |
|                                                                         | Persentase penurunan<br>SILPA                                         | 49,99            | %      | 48,01  | 1.836.161.380  | 47,05  | 1.854.890.226  | 46,11  | 1.873.810.106  | 45,19  | 1.892.922969   | 44,27  | 1.912.230.783  |                           |
| Meningkatnya tata kelola<br>akuntansi dan pelaporan                     | Persentase laporan<br>keuangan tepat waktu                            | 98               | %      | 98     | 1.836.161.380  | 98     | 1.854.890.226  | 98     | 1.873.810.106  | 98     | 1.892.922969   | 100    | 1.912.230.783  |                           |
| PROGRAM PENGELOLAAN<br>BARANG MILIK DAERAH                              |                                                                       |                  |        |        | 1.971.500.000  |        | 1.991.609.300  |        | 2.011.923.715  |        | 2.032.445.337  |        | 2.053.176.279  | BPKAD                     |
| Outcome                                                                 |                                                                       |                  |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                           |
| Meningkatnya tata kelola aset<br>daerah                                 | Persentase penambahan<br>nilai aset tetap                             | 14,1             | %      | 14,1   | 1.971.500.000  | 14,1   | 1.991.609.300  | 14,1   | 2.011.923.715  | 14,1   | 2.032.445.337  | 14,1   | 2.053.176.279  |                           |
| PROGRAM PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN DAERAH                                |                                                                       |                  |        |        | 2.761.097.943  |        | 2.789.261.142  |        | 2.817.711.606  |        | 2.846.452.264  |        | 2.875.486.077  | BAPEN<br>DA               |
| Outcome                                                                 |                                                                       |                  |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                           |
| Meningkatnya upaya<br>ekstensifikasi dan intensifikasi<br>pendapatan    | Persentase PAD terhadap<br>pendapatan daerah                          | 100              | %      | 100    | 1.104.439.177  | 100    | 1.115.704.475  | 100    | 1.127.084.642  | 100    | 1.138.580.906  | 100    | 1.150.194.431  |                           |
| Meningkatnya kualitas<br>pengawasan dan Pelaporan                       | Cakupan pembinaan dan<br>pengawasan<br>pengelolaan pendapatan         | 100              | %      | 100    | 828.329.383    | 100    | 836.778.343    | 100    | 845.313.482    | 100    | 853.935.679    | 100    | 862.545.823    |                           |
| Meningkatnya penerapan<br>sistem informasi keuangan<br>berbasis digital | Persentase penerapan sistem<br>informasi keuangan berbasis<br>digital | 100              | %      | 100    | 828.329.383    | 100    | 836.778.343    | 100    | 845.313.482    | 100    | 853.935.679    | 100    | 862.545.823    |                           |
| PROGRAM KEPEGAWAIAN<br>DAERAH                                           |                                                                       |                  |        |        | 2.492.958.890  |        | 2.518.387.071  |        | 2.544.074.619  |        | 2.570.024.180  |        | 2.596.238.427  | BKP<br>SDMD               |
| Outcome                                                                 |                                                                       |                  |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                           |
| Meningkatnya kualitas layanan<br>administrasi kepegawaian               | Persentase perencanaan<br>kebutuhan yang sesuai dengan<br>formasi     | 286,7<br>1       | %      | 100    | 564.319.630    | 100    | 570.075.690    | 100    | 575.890.462    | 100    | 581.764.545    | 100    | 587.698.543    |                           |



| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                      | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung jawab |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                               |                                                                                          |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                               |                                                                                          |               |        | Target | Pagu (Juta Rp) | Target | Pagu (Juta Rp) | Target | Pagu (Juta Rp) | Target | Pagu (Juta Rp) | Target | Pagu (Juta Rp) |                     |
| 1                                                                                             | 2                                                                                        | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN                                                      | Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya                                           | 200           | %      | 100    | 400.000.000    | 100    | 404.080.000    | 100    | 408.201.616    | 100    | 412.365.272    | 100    | 416.571.398    |                     |
| Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN                                               | Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya                            | 94,17         | %      | 100    | 914.319.630    | 100    | 923.645.690    | 100    | 933.086.876    | 100    | 942.584.158    | 100    | 952.198.517    |                     |
| Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN                                                   | Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik                                              | 99,19         | %      | 100    | 614.319.630    | 100    | 620.585.690    | 100    | 626.915.664    | 100    | 633.310.204    | 100    | 639.769.968    |                     |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                      |                                                                                          |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA                                                       |                                                                                          |               |        |        | 319.319.631    |        | 322.576.691    |        | 325.866.973    |        | 329.190.817    |        | 332.548.563    | BKP SDMD            |
| Outcome                                                                                       |                                                                                          |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional          | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional | 0             | %      | 6,31   | 100.000.000    | 8,17   | 101.020.000    | 9,59   | 102.050.404    | 10,71  | 103.091.318    | 11,61  | 104.142.850    |                     |
| Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi              | Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan                          | 100           | %      | 100    | 100.000.000    | 100    | 101.020.000    | 100    | 102.050.404    | 100    | 103.091.318    | 100    | 104.142.850    |                     |
| Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi | Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi                                      | 1,92          | %      | 3,15   | 50.000.000     | 4,09   | 50.510.000     | 4,80   | 51.025.202     | 5,35   | 51.545.659     | 5,80   | 52.071.425     |                     |
| Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis                                           | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis                           | 0             | %      | 2,53   | 69.319.631     | 2,76   | 70.026.691     | 3,08   | 70.740.963     | 3,37   | 71.462.521     | 3,49   | 72.191.439     |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                                   | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung jawab |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                     | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                             |                                                                                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                              |                                                                                                                                       |               |        |        | 723.000.000    |        | 547.780.950    |        | 553.388.316    |        | 559.012.673    |        | 564.714.602    | BALITBA NG          |
| Outcome                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan                                                                 | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan                    | 100           | %      | 100    | 180.750.000    | 100    | 182.593.650    | 100    | 184.456.105    | 100    | 186.337.558    | 100    | 188.238.201    |                     |
| Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan                          | Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang memanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah             | 100           | %      | 100    | 180.750.000    | 100    | 182.593.650    | 100    | 184.456.105    | 100    | 186.337.558    | 100    | 188.238.201    |                     |
| Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah                       | Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang memanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah          | 100           | %      | 100    | 180.750.000    | 100    | 182.593.650    | 100    | 184.456.105    | 100    | 186.337.558    | 100    | 188.238.201    |                     |
| Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah | Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah | 100           | %      | 100    | 180.750.000    | 100    | 182.593.650    | 100    | 184.456.105    | 100    | 186.337.558    | 100    | 188.238.201    |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                             | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung Jawab |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                 |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                                   |                                                                                                 |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                                                                 | 2                                                                                               | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                                  |                                                                                                 |               |        |        | -              |        | 182.593.650    |        | 184.456.105    |        | 186.337.558    |        | 188.238.201    | BALITBA NG          |
| outcome                                                                                                           |                                                                                                 |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan                                                         | Presentase produk inovasi yang dimanfaatkan                                                     | 100           | %      | 100    | -              | 100    | 45.648.413     | 100    | 46.114.026     | 100    | 46.584.389     | 100    | 47.059.550     |                     |
| Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan    | Presentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah                     | 100           | %      | 100    | -              | 100    | 45.648.413     | 100    | 46.114.026     | 100    | 46.584.389     | 100    | 47.059.550     |                     |
| Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | Presentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah                         | 100           | %      | 100    |                | 100    | 45.648.413     | 100    | 46.114.026     | 100    | 46.584.389     | 100    | 47.059.550     |                     |
| Meningkatnya fasilitasi pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah              | Presentase fasilitasi pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah | 100           | %      | 100    |                | 100    | 45.648.413     | 100    | 46.114.026     | 100    | 46.584.389     | 100    | 47.059.550     |                     |
| UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                              |                                                                                                 |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                |                                                                                                 |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM                                                                                                           |                                                                                                 |               |        |        | 2.100.500.000  |        | 2.121.925.100  |        | 2.143.568.736  |        | 2.165.433.137  |        | 2.187.520.555  | Inspektora t        |
| PENYELENGGARAAN                                                                                                   |                                                                                                 |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PENGAWASAN                                                                                                        |                                                                                                 |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Outcome                                                                                                           |                                                                                                 |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan  | Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1                                                | 75            | %      | 100    | 2.100.500.000  | 100    | 2.121.925.100  | 100    | 2.143.568.736  | 100    | 2.165.433.137  | 100    | 2.187.520.555  |                     |







| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan   | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung jawab |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                |                                     |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                |                                     |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                              | 2                                   | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBUJUKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI        |                                     |               |        |        | 285.518.300    |        | 288.430.587    |        | 291.372.579    |        | 294.344.579    |        | 297.346.894    | Inspektora t        |
| Outcome                                                        |                                     |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi               |                                     | 1             | Skor   | 1      | 135.518.300    | 1      | 136.900.586,66 | 1      | 138.296.972,64 | 2      | 139.707.601,76 | 2      | 141.132.619,30 |                     |
|                                                                |                                     | 2             | Skor   | 2      | 150.000.000    | 3      | 151.530.000    | 3      | 153.075.606    | 3      | 154.636.977,18 | 3      | 156.214.274,35 |                     |
| UNSUR KEWILAYAHAN                                              |                                     |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| KECAMATAN                                                      |                                     |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK      |                                     |               |        |        | 495.559.535    |        | 500.614.242    |        | 505.720.507    |        | 510.878.856    |        | 516.089.821    | Kecamatan           |
| Outcome                                                        |                                     |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                                     | 100           | %      | 100    | 495.559.535    | 100    | 495.559.535    | 100    | 505.720.507    | 100    | 510.878.856    | 100    | 516.089.821    |                     |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN             |                                     |               |        |        | 2.400.000.000  |        | 2.424.480.000  |        | 2.449.209.696  |        | 2.474.191.635  |        | 2.474.191.635  | Kelurahan           |
| Outcome                                                        |                                     |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        |                                     | 80            | %      | 80     | 2.400.000.000  | 80     | 2.424.480.000  | 80     | 2.449.209.696  | 80     | 2.474.191.635  | 80     | 2.474.191.635  |                     |



| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)                          | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  | PD Penanggung Jawab |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                        |                                                              |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                     |
|                                                                                                                                        |                                                              |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   | Target | Pagu (juta Rp)   |                     |
| 1                                                                                                                                      | 2                                                            | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 15                  |
|                                                                                                                                        | perindustrian, perdagangan, UMKM, BUMDES Dan Koperasi        |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                |                                                              |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                            |                                                              |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           |                                                              |               |        |        | 375.000.000    |        | 378.825.000    |        | 382.689.015      |        | 386.592.442,95   |        | 390.535.685,87   | Badan Kesbang Pol   |
| Outcome                                                                                                                                |                                                              |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideology Pancasila dan karakter kebangsaan                                                      | Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | 100           | %      | 100    | 375.000.000    | 100    | 378.825.000    | 100    | 382.689.015      | 100    | 386.592.442,95   | 100    | 390.535.685,87   |                     |
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                              |               |        |        | 1.540.000.000  |        | 1.555.708.000  |        | 1.571.576.221,60 |        | 1.587.606.299,06 |        | 1.603.799.883,31 | Badan Kesbang Pol   |
| Outcome                                                                                                                                |                                                              |               |        |        |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  |                     |
| Meningkatnya etika dan budaya politik                                                                                                  | Persentase pendidikan politik pada kader partai politik      | 100           | %      | 100    | 1.540.000.000  | 100    | 1.555.708.000  | 100    | 1.571.576.221,60 | 100    | 1.587.606.299,06 | 100    | 1.603.799.883,31 |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                                                                                                         | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PD Penanggung Jawab |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |               |        | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |               |        | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) | Target | Pagu (juta Rp) |                     |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4      | 5      | 6              | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12             | 13     | 14             | 15                  |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |                                                                                                                                                                                                             |               |        |        | 625.000.000    |        | 631.375.000    |        | 637.815.025    |        | 644.320.738,26 |        | 650.892.809,79 | Badan Kesbang Pol   |
| Outcome                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan                                                   | Persentase konflik sosial yang diselesaikan                                                                                                                                                                 | 100           | %      | 100    | 625.000.000    | 100    | 631.375.000    | 100    | 637.815.025    | 100    | 644.320.738,26 | 100    | 650.892.809,79 |                     |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                              |                                                                                                                                                                                                             |               |        |        | 50.000.000     |        | 50.510.000     |        | 51.025.202     |        | 51.545.659,06  |        | 52.071.424,78  | Badan Kesbang Pol   |
| Outcome                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan                                                          | Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif                                                                                                                                                             | 20            | %      | 50     | 50.000.000     | 60     | 50.510.000     | 70     | 51.025.202     | 80     | 51.545.659,06  | 100    | 52.071.424,78  |                     |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA                                   |                                                                                                                                                                                                             |               |        |        | 20.000.000     |        | 20.204.000     |        | 20.410.080,80  |        | 20.618.263,62  |        | 20.828.569,91  | Badan Kesbang Pol   |
| Outcome                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                     |
| Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat                                              | Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan | 33,3          | %      | 100    | 20.000.000     | 100    | 20.204.000     | 100    | 20.410.080,80  | 100    | 20.618.263,62  | 100    | 20.828.569,91  |                     |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan   | Indikator Kinerja Program (Outcome)                              | Baseline 2024 | Satuan | Tahun  |                      |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      | PD Penanggung jawab |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|---------------------|
|                                                                |                                                                  |               |        | 2026   |                      | 2027   |                      | 2028   |                      | 2029   |                      | 2030   |                      |                     |
|                                                                |                                                                  |               |        | Target | Pagu (juta Rp)       | Target | Pagu (juta Rp)       | Target | Pagu (juta Rp)       | Target | Pagu (juta Rp)       | Target | Pagu (juta Rp)       |                     |
| 1                                                              | 2                                                                | 3             | 4      | 5      | 6                    | 7      | 8                    | 9      | 10                   | 11     | 12                   | 13     | 14                   | 15                  |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    |                                                                  |               |        |        | 1.260.469.566.303,32 |        | 1.273.326.355.879,61 |        | 1.286.314.284.709,59 |        | 1.299.434.690.413,62 |        | 1.312.688.924.255,84 | Semua PD            |
| Outcome                                                        |                                                                  |               |        |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      |                     |
| Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik | 26,23         | %      | 34,43  | 700.000.000          | 42,62  | 707.140.000          | 50,82  | 714.352.828          | 59,02  | 721.639.226,84       | 67,21  | 728.999.946,96       | Dinas PUPR          |
|                                                                | Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan  | 100           | %      | 100    | 1.259.769.566.303,32 | 100    | 1.272.619.215.879,61 | 100    | 1.285.599.937.881,59 | 100    | 1.298.713.051.186,78 | 100    | 1.311.959.924.308,88 | Semua PD            |
| JUMLAH                                                         |                                                                  |               |        |        | 1.707.860.694.866    |        | 1.725.381.893.954,29 |        | 1.742.980.789.272,63 |        | 1.760.759.193.323,21 |        | 1.778.718.937.095,10 |                     |

Sumber: Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)





## 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2026-2030. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### 4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dalam penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah yang merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program, secara rinci IKU Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030

| No | Indikator                                                           | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target |       |       |       |       |       | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|    |                                                                     |        |                     | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| 1  | 2                                                                   | 3      | 4                   | 5      | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11  |
| 1. | Tingkat kemantapan jalan kabupaten                                  | %      | 41,53               | 41,53  | 43,13 | 44,72 | 46,31 | 47,90 | 49,50 |     |
| 2. | Persentase jalan non status kewenangan kabupaten dalam kondisi baik | %      | 9,76                | 10,74  | 11,96 | 13,42 | 15,13 | 17,08 | 19,28 |     |
| 3. | Persentase jaringan internet yang dapat diakses                     | %      | 52                  | 53,22  | 54,48 | 55,75 | 57,01 | 58,28 | 59,54 |     |
| 4. | Persentase rumah layak huni                                         | %      | 64,86               | 64,90  | 64,94 | 64,99 | 65,03 | 65,07 | 65,12 |     |
| 5. | Persentase rumah korban bencana yang dibangun                       | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
| 6. | Rasio elektrifikasi                                                 | %      | 87,67               | 92,35  | 97,03 | 100   | 100   | 100   | 100   |     |



| No  | Indikator                                                                                                                                                                                 | Satuan   | Baseline Tahun 2024 | Target |       |       |       |       |       | Ket |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                           |          |                     | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                         | 3        | 4                   | 5      | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11  |
| 7.  | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten | %        | 59,04               | 60,26  | 61,07 | 61,89 | 62,70 | 63,52 | 64,33 |     |
| 8.  | Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)                                                                      | %        | 53,19               | 53,55  | 53,92 | 54,28 | 54,64 | 55,01 | 55,37 |     |
| 9.  | Persentase sampah yang tertangani                                                                                                                                                         | %        | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
| 10. | Persentase daerah irigasi pertanian dalam kondisi baik                                                                                                                                    | %        | 19,36               | 19,36  | 20,69 | 22,02 | 23,35 | 24,68 | 26,01 |     |
| 11. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                          | Indeks   | 71,79               | 79,01  | 79,19 | 79,36 | 79,53 | 79,7  | 79,87 |     |
| 12. | Indeks Resiko Bencana (IRB)                                                                                                                                                               | Kategori | 166,2               | 165    | 160   | 157   | 154   | 150   | 147   |     |
| 13. | Persentase ketaatan terhadap dokumen tata ruang                                                                                                                                           | %        | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
| 14. | Rata-rata lama sekolah                                                                                                                                                                    | Tahun    | 7,21                | 7,33   | 7,45  | 7,57  | 7,69  | 7,81  | 7,93  |     |
| 15. | Harapan lama sekolah                                                                                                                                                                      | Tahun    | 12,62               | 12,63  | 12,64 | 12,65 | 12,66 | 12,67 | 12,68 |     |
| 16. | Usia harapan hidup                                                                                                                                                                        | Tahun    | 71,22               | 71,37  | 71,52 | 71,67 | 71,82 | 71,97 | 72,12 |     |
| 17. | Indeks Pembangunan Gender                                                                                                                                                                 | Poin     | 95,96               | 96,22  | 96,48 | 96,74 | 97    | 97,26 | 97,52 |     |
| 18. | Indeks Pemberdayaan Gender                                                                                                                                                                | Poin     | 52,73               | 53,73  | 54,73 | 55,73 | 56,73 | 57,73 | 59,73 |     |
| 19. | Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sampai tuntas                                                                                                                     | %        | 20                  | 30     | 30    | 30    | 40    | 40    | 40    |     |
| 20. | Persentase pemuda yang berprestasi                                                                                                                                                        | %        | 11,67               | 13,67  | 15,67 | 17,67 | 19,67 | 21,67 | 23,67 |     |







| No  | Indikator                                          | Satuan   | Baseline Tahun 2024             | Target                           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | Ket |
|-----|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|
|     |                                                    |          |                                 | 2025                             | 2026                             | 2027                             | 2028                             | 2029                             | 2030                             |     |
| 1   | 2                                                  | 3        | 4                               | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9                                | 10                               | 11  |
| 21. | PDRB perkapita                                     | Rupiah   | 21.283.000                      | 22.243.525                       | 23.204.050                       | 24.164.575                       | 25.125.100                       | 26.085.625                       | 27.046.150                       |     |
| 22. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                 | %        | 2,633                           | 2,631                            | 2,629                            | 2,626                            | 2,624                            | 2,622                            | 2,620                            |     |
| 23. | Inflasi                                            | Nilai    | 0,24 (deflasi)                  | 0,01 - 2                         | 0,01 - 2                         | 0,01 - 2                         | 0,01 - 2                         | 0,01 - 2                         | 0,01 - 2                         |     |
| 24. | Indeks Ketahanan Pangan                            | Indeks   | 67,02                           | 68,23                            | 69,44                            | 70,65                            | 71,86                            | 73,03                            | 74,28                            |     |
| 25. | Pola Pangan Harapan                                | Skor     | 75,9                            | 78,9                             | 80                               | 82,5                             | 84,5                             | 87,5                             | 90                               |     |
| 26. | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah          | %        | 3,32                            | 4                                | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9                                |     |
| 27. | Indeks SPBE                                        | Indeks   | 2,83                            | 3,02                             | 3,21                             | 3,4                              | 3,59                             | 3,78                             | 3,97                             |     |
| 28. | Indeks Inovasi Daerah                              | Kategori | 36,69 (Inovatif)                | 47,69 (Inovatif)                 | 58,69 (Inovatif)                 | 69,69 (Sangat Inovatif)          | 80,69 (Sangat Inovatif)          | 91,69 (Sangat Inovatif)          | 91,69 (Sangat Inovatif)          |     |
| 29. | Indeks Kepuasan Masyarakat                         | Kategori | 82,87 (Kategori B Zona Hijau)   | 78-87,99 (Kategori B Zona Hijau) | 78-87,99 (Kategori B Zona Hijau) | 78-87,99 (Kategori B Zona Hijau) | 78-87,99 (Kategori B Zona Hijau) | 78-87,99 (Kategori B Zona Hijau) | 78-87,99 (Kategori B Zona Hijau) |     |
| 30. | Indeks Reformasi Birokrasi                         | Kategori | C                               | C                                | C                                | C                                | CC                               | CC                               | B                                |     |
| 31. | Nilai capaian SAKIP                                | Kategori | B                               | B                                | B                                | B                                | BB                               | BB                               | BB                               |     |
| 32. | Opini BPK atas laporan keuangan                    | Kategori | WTP                             | WTP                              | WTP                              | WTP                              | WTP                              | WTP                              | WTP                              |     |
| 33. | Capaian penilaian SPM                              | Skor     | 92,86                           | 100                              | 100                              | 100                              | 100                              | 100                              | 100                              |     |
| 34. | Nilai capaian kinerja LPPD                         | Kategori | 2,573 Rendah (Skor 2,26 - 2,75) | Rendah (Skor 2,26 - 2,75)        | Sedang (Skor 2,76 - 3,25)        | Sedang (Skor 2,76 - 3,25)        | Sedang (Skor 2,76 - 3,25)        | Sedang (Skor 2,76 - 3,25)        | Sedang (Skor 2,76 - 3,25)        |     |
| 35. | Angka kemiskinan                                   | %        | 24,68                           | 23,98                            | 23,28                            | 22,58                            | 21,86                            | 21,18                            | 20,48                            |     |
| 36. | Indeks Gini                                        | Rasio    | 0,28                            | 0,2 - 0,3                        | 0,2 - 0,3                        | 0,2 - 0,3                        | 0,2 - 0,3                        | 0,2 - 0,3                        | 0,2 - 0,3                        |     |
| 37. | Persentase balita <i>wasting</i> (gizi buruk)      | %        | 15,9                            | 13                               | 12,7                             | 12,4                             | 12,1                             | 11,8                             | 11,5                             |     |
| 38. | Persentase balita <i>underweight</i> (gizi kurang) | %        | 34                              | 31,3                             | 30,7                             | 30                               | 29,3                             | 28,6                             | 27,9                             |     |

Sumber: Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)





Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut, maka ditetapkan Indikator Makro Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.3.

Indikator Makro Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030

| No | Bidang Urusan/<br>Indikator Kinerja<br>Pembangunan<br>Daerah | Satuan | Capaian<br>2024 | Target<br>2025 | Target<br>2026 | Target<br>2027 | Target<br>2028 | Target<br>2029 | Target<br>2030 |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Indeks<br>Pembangunan<br>Manusia                             | Indeks | 66,22           | 66,97          | 67,72          | 68,47          | 69,22          | 69,97          | 70,72          |
| 2. | Angka Kemiskinan                                             | %      | 24,68           | 23,98          | 23,28          | 22,58          | 21,88          | 21,18          | 20,48          |
| 3. | Tingkat<br>Pengangguran<br>Terbuka                           | %      | 2,633           | 2,631          | 2,629          | 2,626          | 2,624          | 2,622          | 2,620          |
| 4. | Pertumbuhan<br>Ekonomi                                       | %      | 3,5             | 3,9            | 4,3            | 4,7            | 5,1            | 5,5            | 5,9            |
| 5. | PDRB per Kapita                                              | Rupiah | 21.283.000      | 22.243.525     | 23.204.050     | 24.164.575     | 25.125.100     | 26.085.625     | 27.046.150     |
| 6. | Indeks Gini                                                  | Rasio  | 0,28            | 0,2-0,3        | 0,2-0,3        | 0,2-0,3        | 0,2-0,3        | 0,2-0,3        | 0,2-0,3        |

Sumber: Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)

#### 4.2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran terukur untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan fokus pada kemajuan daerah di berbagai aspek. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.







Tabel 4.4.

## Indikator Kinerja Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025-2030

| No                                       | Indikator                                                                                                                                                                                 | Satuan              | Baseline Tahun    | Target              |                     |                   |                   |                   |                   | Ket |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
|                                          |                                                                                                                                                                                           |                     | 2024              | 2025                | 2026                | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |     |
| 1                                        | 2                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4                 | 5                   | 6                   | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11  |
| <b>I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>    |                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |     |
| 1                                        | Indeks Ketahanan Pangan                                                                                                                                                                   | Angka               | 67,02             | 68,23               | 69,44               | 70,65             | 71,86             | 73,07             | 74,28             |     |
| 2                                        | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan                                                                                                                                                 | %                   | 12,61             | 11,22               | 9,83                | 8,44              | 7,05              | 5,66              | 4,27              |     |
| 3                                        | Rasio elektrifikasi                                                                                                                                                                       | %                   | 87,67             | 92,35               | 97,03               | 100               | 100               | 100               | 100               |     |
| 4                                        | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten | %                   | 59,04             | 60,26               | 61,07               | 61,89             | 62,70             | 63,52             | 64,33             |     |
| 5                                        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah                                                                                                                                                   | Angka               | 71,79             | 79,01               | 79,19               | 79,36             | 79,53             | 79,7              | 79,87             |     |
| 6                                        | Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)                                                                      | %                   | 53,19             | 53,55               | 53,92               | 54,28             | 54,64             | 55,01             | 55,37             |     |
| 7                                        | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah                                                                                                                                    | Ton                 | 12.586,05         | 36.500,35           | 46.043,27           | 57.476,66         | 67.357,26         | 75.143,28         | 76.106,88         |     |
| 8                                        | Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah                                                                                                                             | %                   | 100               | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               | 100               |     |
| 9                                        | Indeks Resiko Bencana                                                                                                                                                                     | Angka               | 166,2             | 165                 | 160                 | 157               | 154               | 150               | 147               |     |
| 10                                       | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                                                                                                                 | %                   | 2,75              | 2,55                | 2,35                | 2,15              | 1,95              | 1,75              | 1,55              |     |
| 11                                       | Kepadatan Penduduk                                                                                                                                                                        | Org/Km <sup>2</sup> | 120               | 120                 | 120                 | 120               | 120               | 120               | 120               |     |
| <b>II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b> |                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |     |
| 1                                        | Pertumbuhan ekonomi                                                                                                                                                                       | %                   | 3,5               | 3,9                 | 4,3                 | 4,7               | 5,1               | 5,5               | 5,9               |     |
| 2                                        | Tingkat kemiskinan                                                                                                                                                                        | %                   | 24,68             | 23,98               | 23,28               | 22,58             | 21,88             | 21,18             | 20,48             |     |
| 3                                        | PDRB per Kapita                                                                                                                                                                           | Rp. Juta            | 21,283            | 22,243              | 23,204              | 24,164            | 25,125            | 26,085            | 27,046            |     |
| 4                                        | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                                                                                                              | %                   | 2,63              | 2,63                | 2,62                | 2,62              | 2,62              | 2,62              | 2,62              |     |
| 5                                        | Indeks Gini                                                                                                                                                                               | Angka               | 0,28              | 0,2-0,3             | 0,2-0,3             | 0,2-0,3           | 0,2-0,3           | 0,2-0,3           | 0,2-0,3           |     |
| 6                                        | Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                | Angka               | 66,22             | 66,97               | 67,72               | 68,47             | 69,22             | 69,97             | 70,72             |     |
| 7                                        | Usia harapan hidup                                                                                                                                                                        | Tahun               | 71,22             | 71,37               | 71,52               | 71,67             | 71,82             | 71,97             | 72,12             |     |
| 8                                        | Prevalensi stunting                                                                                                                                                                       | %                   | 56,80             | 54,3                | 51,8                | 49,3              | 46,8              | 44,3              | 41,8              |     |
| 9                                        | Rata-rata lama sekolah                                                                                                                                                                    | Tahun               | 7,21              | 7,33                | 7,45                | 7,57              | 7,69              | 7,81              | 7,93              |     |
| 10                                       | Harapan lama sekolah                                                                                                                                                                      | Tahun               | 12,62             | 12,63               | 12,64               | 12,65             | 12,66             | 12,67             | 12,68             |     |
| 11                                       | Angka Literasi:                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |     |
|                                          | SD                                                                                                                                                                                        | %                   | 40,02             | 45,02               | 50,02               | 55,02             | 60,02             | 65,02             | 70,02             |     |
|                                          | SMP                                                                                                                                                                                       | %                   | 30,42             | 35,42               | 40,42               | 45,42             | 50,42             | 55,42             | 60,42             |     |
| 12                                       | Angka Numerasi:                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |     |
|                                          | SD                                                                                                                                                                                        | %                   | 41,53             | 46,53               | 51,53               | 56,53             | 61,53             | 66,53             | 71,53             |     |
|                                          | SMP                                                                                                                                                                                       | %                   | 35,35             | 40,35               | 45,35               | 50,35             | 55,35             | 60,35             | 65,35             |     |
| 13                                       | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                                                                                                                    | Angka               | 20,80<br>(Kurang) | 40 - 59<br>(Sedang) | 40 - 59<br>(Sedang) | 60 - 79<br>(Baik) | 60 - 79<br>(Baik) | 60 - 79<br>(Baik) | 60 - 79<br>(Baik) |     |
| 14                                       | Indeks Masyarakat Digital Kab. TTS                                                                                                                                                        | Angka               | 42,52             | 43,52               | 45,52               | 46,52             | 47,52             | 48,52             | 49,52             |     |
| 15                                       | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                                                                                           | %                   | 28,94             | 30                  | 32                  | 34                | 36                | 38                | 40                |     |
| 16                                       | Indeks Kerukunan Umat Beragama                                                                                                                                                            | Angka               | 100               | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               | 100               |     |
| 17                                       | Indeks Perlindungan Anak                                                                                                                                                                  | Angka               | 45                | 47                  | 49                  | 51                | 53                | 55                | 57                |     |
| 18                                       | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga                                                                                                                                                      | Angka               | 53,12             | 54,39               | 55,66               | 56,93             | 58,2              | 59,47             | 60,74             |     |
| 19                                       | Indeks Pembangunan Gender                                                                                                                                                                 | Angka               | 95,96             | 96,22               | 96,48               | 96,74             | 97                | 97,26             | 97,52             |     |







| No                                 | Indikator                                                   | Satuan   | Baseline Tahun | Target        |              |               |               |               |              | Ket |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|
|                                    |                                                             |          | 2024           | 2025          | 2026         | 2027          | 2028          | 2029          | 2030         |     |
| 1                                  | 2                                                           | 3        | 4              | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             | 10           | 11  |
| <b>III ASPEK DAYA SAING DAERAH</b> |                                                             |          |                |               |              |               |               |               |              |     |
| 1                                  | Angka Ketergantungan                                        | %        | 47,81          | 45,71         | 43,61        | 41,51         | 39,41         | 37,31         | 35,21        |     |
| 2                                  | Rasio PDRB Industri Pengolahan                              | %        | 0,66           | 0,67          | 0,68         | 0,69          | 0,70          | 0,71          | 0,72         |     |
| 3                                  | Rasio PDRB Akomodasi makan dan Minum                        | %        | 0,08           | 0,08          | 0,09         | 0,1           | 0,11          | 0,12          | 0,13         |     |
| 4                                  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                          | %        | 87,41          | 89,17         | 90,94        | 92,70         | 94,47         | 96,23         | 97,99        |     |
| 5                                  | Indeks Inovasi Daerah                                       | Angka    | 36,69          | 47,69         | 58,69        | 69,69         | 80,69         | 91,69         | 91,69        |     |
| 6                                  | Indeks Infrastruktur /Indeks kepuasan Layanan Infrastruktur | %        | 53,56          | 54,82 - 55,45 | 55,45- 56,08 | 56,08 - 56,71 | 56,71 - 57,34 | 57,34 - 57,97 | 57,97 - 58,6 |     |
| 7                                  | Rumah tangga dengan akses hunian layak                      | %        | 64,86          | 64,90         | 64,94        | 64,99         | 65,03         | 65,07         | 65,12        |     |
| 8                                  | Persentase Desa Maju                                        | %        | 2,63           | 3,01          | 3,38         | 3,75          | 4,14          | 4,51          | 4,89         |     |
| 9                                  | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah                   | %        | 3,32           | 4             | 5            | 6             | 7             | 8             | 9            |     |
| 10                                 | Tingkat Inflasi                                             | %        | 0,24 (deflasi) | 0,01-2        | 0,01-2       | 0,01-2        | 0,01-2        | 0,01-2        | 0,01-2       |     |
| <b>IV ASPEK PELAYANAN UMUM</b>     |                                                             |          |                |               |              |               |               |               |              |     |
| 1                                  | Indeks Reformasi Hukum                                      | Angka    | 78             | 80            | 82           | 84            | 86            | 88            | 90           |     |
| 2                                  | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik              | Angka    | 2,83           | 3,02          | 3,21         | 3,4           | 3,59          | 3,78          | 3,97         |     |
| 3                                  | Indeks Reformasi Birokrasi                                  | Kategori | C              | C             | C            | C             | CC            | CC            | B            |     |
| 4                                  | Persentase Penegakan Perda                                  | %        | 75             | 100           | 100          | 100           | 100           | 100           | 100          |     |
| 5                                  | Persentase Capaian aksi HAM                                 | %        | 80             | 82            | 84           | 86            | 88            | 89            | 90           |     |
| 6                                  | Indeks Ketenteraman dan Ketertiban                          | Angka    | 33,30          | 35,30         | 37,30        | 39,30         | 41,30         | 43,30         | 45,30        |     |
| 7                                  | Indeks Daya Saing Daerah                                    | Angka    | 3,12           | 3,62          | 4,12         | 4,62          | 5,12          | 5,62          | 7,12         |     |
| 8                                  | Opini BPK terhadap laporan keuangan                         | Predikat | WTP            | WTP           | WTP          | WTP           | WTP           | WTP           | WTP          |     |

Sumber: Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)

#### 4.2.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5.

Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2030

| No                                                         | Indikator                                                                               | Satuan | Baseline Tahun | Target |      |      |      |      |      | Ket |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|------|------|------|------|------|-----|
|                                                            |                                                                                         |        | 2024           | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |     |
| 1                                                          | 2                                                                                       | 3      | 4              | 5      | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11  |
| <b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>                             |                                                                                         |        |                |        |      |      |      |      |      |     |
| <b>A Urusan pemerintah Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</b> |                                                                                         |        |                |        |      |      |      |      |      |     |
| <b>I URUSAN PENDIDIKAN</b>                                 |                                                                                         |        |                |        |      |      |      |      |      |     |
|                                                            | Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD              | %      | 88,47          | 98,47  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
|                                                            | Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar | %      | 95,59          | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |     |







| No                         | Indikator                                                                                                                                           | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target |       |       |       |       |       | Ket |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                            |                                                                                                                                                     |        |                     | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
|                            | Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama                                                 | %      | 64,99               | 69,98  | 74,97 | 79,96 | 84,95 | 89,94 | 94,93 |     |
|                            | Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | %      | 82,80               | 83,8   | 84,8  | 85,8  | 86,8  | 87,8  | 88,8  |     |
| <b>II URUSAN KESEHATAN</b> |                                                                                                                                                     |        |                     |        |       |       |       |       |       |     |
|                            | Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk                                                                                             | %      | 5,36                | 5,41   | 5,48  | 5,54  | 5,6   | 5,66  | 5,74  |     |
|                            | Persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi                                                                            | %      | 33                  | 33     | 33    | 33    | 33    | 33    | 33    |     |
|                            | Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil                                                                                         | %      | 62,2                | 66,7   | 73    | 75    | 89    | 90    | 100   |     |
|                            | Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan                                                                                               | %      | 69,4                | 66,7   | 70    | 78    | 85    | 90    | 100   |     |
|                            | Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir                                                                             | %      | 70,8                | 71,7   | 73    | 78    | 85    | 90    | 100   |     |
|                            | Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar                                                                                                   | %      | 76,7                | 78     | 82    | 86    | 95    | 97    | 100   |     |
|                            | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                           | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
|                            | Persentase penduduk usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                                                                  | %      | 89,7                | 90,3   | 91,7  | 92,3  | 94,3  | 95,8  | 98    |     |
|                            | Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                                                             | %      | 63,3                | 68     | 70    | 75    | 80    | 83    | 90    |     |
|                            | Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                    | %      | 76,6                | 80     | 75    | 90    | 95    | 100   | 100   |     |
|                            | Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                            | %      | 61,6                | 65     | 70    | 75    | 80    | 100   | 100   |     |
|                            | Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                                                                         | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
|                            | Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TB sesuai standar                                                                                   | %      | 88,89               | 90     | 90    | 95    | 95    | 100   | 100   |     |





| No                                                                        | Indikator                                                                                                                                                                                 | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target |       |       |       |       |       | Ket |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                                                                           |                                                                                                                                                                                           |        |                     | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
|                                                                           | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar                                                                                          | %      | 70,1                | 80     | 85    | 90    | 95    | 100   | 100   |     |
| <b>III URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>                                          |                                                                                                                                                                                           |        |                     |        |       |       |       |       |       |     |
|                                                                           | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindung oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten                                                              | %      | 31                  | 39     | 47    | 57    | 77    | 100   | 100   |     |
|                                                                           | Rasio luas kawasan permukiman rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindung oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan kabupaten                                              | %      | 10                  | 15     | 20    | 25    | 30    | 35    | 35    |     |
|                                                                           | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi                                                                                                        | %      | 66,11               | 66,45  | 66,83 | 70,42 | 71,09 | 71,42 | 71,80 |     |
|                                                                           | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten | %      | 59,04               | 60,26  | 61,07 | 61,89 | 62,7  | 63,52 | 64,33 |     |
|                                                                           | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                                                                                                     | %      | 53,19               | 53,55  | 53,92 | 54,28 | 54,64 | 55,01 | 55,37 |     |
|                                                                           | Rasio kepatuhan IMB kabupaten                                                                                                                                                             | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
|                                                                           | Tingkat kemantapan jalan kabupaten                                                                                                                                                        | %      | 41,53               | 41,55  | 43,13 | 44,72 | 46,31 | 47,90 | 49,50 |     |
|                                                                           | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                                | %      | 100                 | 65     | 65    | 65    | 65    | 65    | 65    |     |
|                                                                           | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                                                                                                            | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
| <b>IV URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>                                         |                                                                                                                                                                                           |        |                     |        |       |       |       |       |       |     |
|                                                                           | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten                                                                                                                | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
|                                                                           | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten                                                                                    | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
|                                                                           | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani                                                                                                             | %      | 22,42               | 35     | 45,19 | 60    | 65    | 70    | 75    |     |
|                                                                           | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                                                                                                                                    | %      | 64,74               | 32,26  | 35,21 | 35,17 | 35,13 | 35,08 | 35,04 |     |
|                                                                           | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                                                                                          | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
| <b>V URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |                                                                                                                                                                                           |        |                     |        |       |       |       |       |       |     |
|                                                                           | Presentase gangguan trantibun yang di selesaikan                                                                                                                                          | %      | 72.41               | 80     | 80    | 80    | 80    | 100   | 100   |     |
|                                                                           | Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan                                                                                                                                              | %      | 80                  | 80     | 80    | 80    | 80    | 100   | 100   |     |
|                                                                           | Jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                                                           | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
|                                                                           | Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                                     | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
|                                                                           | Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                                                          | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |







| No   | Indikator                                                                                                                                                   | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target |       |       |       |       |       | Ket |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|      |                                                                                                                                                             |        |                     | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
|      | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                                                             | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
|      | Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran                                                                                                 | Menit  | 15                  | 15     | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    |     |
| VI   | URUSAN SOSIAL                                                                                                                                               |        |                     |        |       |       |       |       |       |     |
|      | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | %      | 21                  | 22     | 22    | 23    | 23    | 23    | 23.5  |     |
|      | Persentase korban bencana alam dan social terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten                       | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
| B    | Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar                                                                                                     |        |                     |        |       |       |       |       |       |     |
| VII  | URUSAN TENAGA KERJA                                                                                                                                         |        |                     |        |       |       |       |       |       |     |
|      | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja                                                                                  | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
|      | Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi                                                                                                           | %      | 0,03                | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |     |
|      | Persentase Tingkat produktifitas tenaga kerja                                                                                                               | %      | 87,41               | 89,17  | 90,94 | 92,70 | 94,47 | 96,23 | 97,99 |     |
|      | Persentase perusahaan yang menetapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)  | %      | 28,94               | 30     | 32    | 34    | 36    | 38    | 40    |     |
|      | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten                              | %      | 95,88               | 95,90  | 96    | 96,2  | 96,4  | 96,8  | 97    |     |
| VIII | URUSAN PEMBERDAYAAN DPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                        |        |                     |        |       |       |       |       |       |     |
|      | Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada Belanja Langsung APBD                                                                                       | %      | 3,8                 | 4      | 4,2   | 4,4   | 4,6   | 4,8   | 5     |     |
|      | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten                                                                                  | %      | 70                  | 75     | 80    | 85    | 90    | 95    | 100   |     |
|      | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                                          | %      | 32                  | 31,5   | 31    | 30,5  | 30    | 29,5  | 29    |     |
| IX   | URUSAN PANGAN                                                                                                                                               |        |                     |        |       |       |       |       |       |     |
|      | Persentase jumlah cadangan pangan                                                                                                                           | %      | 4,54                | 4,75   | 5     | 5,25  | 5,5   | 5,75  | 6     |     |
| X    | URUSAN PERTANAHAN                                                                                                                                           |        |                     |        |       |       |       |       |       |     |
|      | Persentase penyelesaian kasus tanah negara                                                                                                                  | %      | 100                 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
|      | Persentase lahan pemerintah yang bersertifikat                                                                                                              | %      | 39,20               | 41,63  | 43    | 45    | 47    | 49    | 51    |     |
| XI   | URUSAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                     |        |                     |        |       |       |       |       |       |     |
|      | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                            | Indeks | 71,79               | 79,01  | 79,19 | 79,36 | 79,53 | 79,7  | 79,87 |     |
|      | Persentase pengolahan sampah di wilayah kabupaten                                                                                                           | %      | 17,57               | 51,23  | 63,75 | 78,52 | 90,81 | 100   | 100   |     |
|      | Ketaatan penangungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah                      | %      | 25                  | 25     | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    |     |







| No    | Indikator                                                                                                                                          | Satuan | Baseline   | Target |       |       |       |       |       | Ket |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|       |                                                                                                                                                    |        | Tahun 2024 | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| XII   | URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                                              |        |            |        |       |       |       |       |       |     |
|       | Persentase penduduk ber KTP elektronik                                                                                                             | %      | 99,05      | 99,10  | 99,15 | 99,15 | 99,20 | 99,25 | 99,30 |     |
|       | Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                                                                              | %      | 22,18      | 32,18  | 42,18 | 52,18 | 62,18 | 72,66 | 82,66 |     |
|       | Persentase kepemilikan akta kelahiran                                                                                                              | %      | 98,66      | 98,76  | 98,86 | 98,96 | 99,06 | 99,16 | 99,26 |     |
|       | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama                                                          | %      | 3,13       | 10     | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    |     |
| XIII  | URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                                                            |        |            |        |       |       |       |       |       |     |
|       | Persentase pengentasan desa tertinggal                                                                                                             | %      | 58,6       | 56,4   | 46,6  | 43,6  | 32,3  | 21,1  | 7,9   |     |
|       | Persentase peningkatan status desa mandiri                                                                                                         | %      | 0,0        | 0,8    | 0,8   | 1,1   | 1,5   | 1,9   | 3,8   |     |
| XIV   | URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                |        |            |        |       |       |       |       |       |     |
|       | TFR ( <i>Total Fertility Rate</i> ) angka kelahiran Total                                                                                          | %      | 2,88       | 2,83   | 2,78  | 2,73  | 2,68  | 2,63  | 2,58  |     |
|       | Persentase pemakaian kontrasepsi modern ( <i>modern contraceptive prevalence rate</i> /mCPR                                                        | %      | 41,9       | 42,3   | 42,7  | 43,2  | 43,7  | 44,2  | 44,7  |     |
|       | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )                                                                             | %      | 20,5       | 19,9   | 18,9  | 18,1  | 17,5  | 16,8  | 16,1  |     |
| XV    | URUSAN PERHUBUNGAN                                                                                                                                 |        |            |        |       |       |       |       |       |     |
|       | Rasio Konektivitas kabupaten                                                                                                                       | %      | 93,33      | 94,16  | 95    | 95,83 | 96,67 | 98,33 | 100   |     |
| XVI   | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                  |        |            |        |       |       |       |       |       |     |
|       | Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo                               | %      | 100        | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
|       | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi                                                               | %      | 100        | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
|       | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | %      | 100        | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
| XVII  | URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                                                          |        |            |        |       |       |       |       |       |     |
|       | Meningkatnya koperasi yang berkualitas                                                                                                             | %      | 52,9       | 55     | 60    | 65    | 70    | 75    | 80    |     |
|       | Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha                                                                                                    | %      | 13,17      | 15     | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    |     |
| XVIII | URUSAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                             |        |            |        |       |       |       |       |       |     |
|       | Persentase peningkatan Investasi di kabupaten                                                                                                      | %      | 51,2       | 51,8   | 52    | 53    | 54    | 55    | 56    |     |
| XIX   | URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                     |        |            |        |       |       |       |       |       |     |
|       | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                                                                          | %      | 1,5        | 1,5    | 1,7   | 1,8   | 1,9   | 2     | 2     |     |
|       | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                                                        | %      | 4          | 6      | 8     | 9     | 10    | 10    | 10    |     |
|       | Peningkatan prestasi olahraga                                                                                                                      | %      | 11,67      | 13,67  | 15,67 | 17,67 | 19,67 | 21,67 | 23,67 |     |
| XX    | URUSAN STATISTIK                                                                                                                                   |        |            |        |       |       |       |       |       |     |
|       | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah                                                       | %      | 100        | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
|       | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                                                         | %      | 100        | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |







| No     | Indikator                                                                                                                                                                                                   | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target  |         |         |         |         |         | Ket |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|        |                                                                                                                                                                                                             |        |                     | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |     |
| XXI    | URUSAN PERSANDIAN                                                                                                                                                                                           |        |                     |         |         |         |         |         |         |     |
|        | Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah                                                                                                                                                     | Indeks | N/A                 | 1       | 1       | 1.2     | 1.4     | 1.6     | 1.8     |     |
| XXII   | URUSAN KEBUDAYAAN                                                                                                                                                                                           |        |                     |         |         |         |         |         |         |     |
|        | Terlestarikannya cagar budaya                                                                                                                                                                               | %      | 5                   | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |     |
| XXIII  | URUSAN PERPUSTAKAAN                                                                                                                                                                                         |        |                     |         |         |         |         |         |         |     |
|        | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                                                                                                                  | %      | 0,96                | 1,17    | 1,38    | 1,59    | 1,8     | 2,01    | 2,22    |     |
|        | Indeks Literasi masyarakat                                                                                                                                                                                  | %      | 0,14                | 0,53    | 0,45    | 0,37    | 0,45    | 0,53    | 0,61    |     |
| XXIV   | URUSAN KEARSIPAN                                                                                                                                                                                            |        |                     |         |         |         |         |         |         |     |
|        | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional                                                                                         | %      | 5,82                | 11,03   | 16,24   | 21,45   | 26,66   | 31,87   | 37,08   |     |
|        | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara dan pemerintah dan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | %      | 7,38                | 8,38    | 9,38    | 10,38   | 11,38   | 12,38   | 13,38   |     |
| C      | Urusan Pilihan                                                                                                                                                                                              |        |                     |         |         |         |         |         |         |     |
| XXV    | URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                                               |        |                     |         |         |         |         |         |         |     |
|        | Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten (sumber data KKP)                                                                                                                          | Ton    | 1.088,8             | 1.090,2 | 1.101,2 | 1.112,2 | 1.123,2 | 1.134,2 | 1.145,2 |     |
| XXVI   | URUSAN PARIWISATA                                                                                                                                                                                           |        |                     |         |         |         |         |         |         |     |
|        | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan                                                                                                                                           | %      | -0,1                | 0,1     | 0,26    | 0,51    | 0,76    | 1,1     | 1,26    |     |
|        | Persentase peningkatan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten perjalanan                                                                                                                              | %      | -0,24               | 0,24    | 0,49    | 0,74    | 0,99    | 1,24    | 1,49    |     |
|        | Tingkat hunian akomodasi                                                                                                                                                                                    | %      | 100                 | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |     |
|        | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku                                                                                                                                                    | %      | 0,70                | 0,70    | 0,71    | 0,72    | 0,73    | 0,74    | 0,75    |     |
|        | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                                                                                                                                                                   | %      | 0,29                | 0,29    | 0,29    | 0,29    | 0,31    | 0,36    | 0,41    |     |
| XXVII  | URUSAN PERTANIAN                                                                                                                                                                                            |        |                     |         |         |         |         |         |         |     |
|        | Produktivitas pertanian per hektar per tahun                                                                                                                                                                | Ton/Ha | 426                 | 447     | 469     | 492     | 516     | 541     | 568     |     |
|        | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                                                                                                                                       | %      | 2,5                 | 3       | 3,5     | 4       | 4,5     | 5       | 5,5     |     |
| XXVIII | URUSAN PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                          |        |                     |         |         |         |         |         |         |     |
|        | Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS SIUP Toko swalayan                                                                         | %      | 28,7                | 30      | 35      | 40      | 45      | 50      | 55      |     |
|        | Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                                                                                                                          | %      | 100                 | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |     |
|        | Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) tertanda tera sah yang berlaku                                                                                                         | %      | 51,5                | 55      | 60      | 65      | 70      | 75      | 80      |     |
| XXIX   | URUSAN PERINDUSTRIAN                                                                                                                                                                                        |        |                     |         |         |         |         |         |         |     |
|        | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten                                                                                                                                                 | %      | 13,9                | 15      | 20      | 25      | 30      | 35      | 40      |     |
|        | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                                                                   | Unit   | 745                 | 765     | 785     | 805     | 830     | 850     | 870     |     |
| XXX    | URUSAN TRANSMIGRASI                                                                                                                                                                                         |        |                     |         |         |         |         |         |         |     |
|        | Persentase jumlah kawasan satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya                                                                                                                    | %      | 25                  | 30      | 35      | 40      | 45      | 50      | 55      |     |







| No     | Indikator                                                                                                      | Satuan  | Baseline Tahun 2024 | Target |       |       |       |       |       | Ket |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|        |                                                                                                                |         |                     | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| D      | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan                                                                           |         |                     |        |       |       |       |       |       |     |
| XXXI   | PERENCANAAN DAN KEUANGAN                                                                                       |         |                     |        |       |       |       |       |       |     |
|        | Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan                                                         | %       | 21,71               | 21,71  | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,71 |     |
|        | Rasio PAD                                                                                                      | %       | 3,65                | 3,69   | 3,72  | 3,76  | 3,80  | 3,84  | 3,88  |     |
|        | Persentase Maturistas Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (SPIP)                                              | Skor    | 1                   | 1      | 1     | 1     | 1     | 2     | 2     |     |
|        | persentase Peningkatan Kapasitas Aparat pengawasan Inter Pemerintah (APIP)                                     | Skor    | 2                   | 2      | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |     |
|        | Rasio Belanja Urusan Pemerintah umum (dikurangi transfer expenditures)                                         | %       | 0,96                | 0,96   | 0,96  | 0,96  | 0,96  | 0,96  | 0,96  |     |
|        | Opini Laporan Keuangan                                                                                         | Opini   | WTP                 | WTP    | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |     |
| XXXII  | PENGADAAN                                                                                                      |         |                     |        |       |       |       |       |       |     |
|        | Persentase jumlah total proyek konstruksi dibawah ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama | %       | 0                   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |     |
|        | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif                                            | %       | 4,73                | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |     |
|        | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                           | %       | 31,3                | 35     | 40    | 45    | 50    | 55    | 60    |     |
| XXXIII | KEPEGAWAIAN                                                                                                    |         |                     |        |       |       |       |       |       |     |
|        | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar ( %) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan           | %       | 64,94               | 65     | 65,1  | 65,2  | 65,3  | 65,4  | 65,5  |     |
|        | Rasio pegawai fungsional ( %) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan                                     | %       | 12,25               | 12,26  | 12,27 | 12,28 | 12,29 | 12,3  | 12,31 |     |
|        | Rasio jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi ( %) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan            | %       | 1,92                | 2      | 2,01  | 2,02  | 2,03  | 2,04  | 2,05  |     |
| XXXIV  | MANAJEMEN KEUANGAN                                                                                             |         |                     |        |       |       |       |       |       |     |
|        | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                                                    | %       | 75,70               | 76,46  | 77,22 | 77,99 | 78,77 | 79,56 | 80,36 |     |
|        | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                                         | %       | 54,26               | 54,80  | 55,35 | 55,90 | 56,46 | 57,03 | 57,61 |     |
|        | Manajemen Aset                                                                                                 | Dokumen | 4                   | 4      | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |     |
|        | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja APBD tahun sebelumnya                                               | %       | 4,89                | 4,84   | 4,79  | 4,74  | 4,70  | 4,65  | 4,60  |     |

Sumber: Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 (diolah)

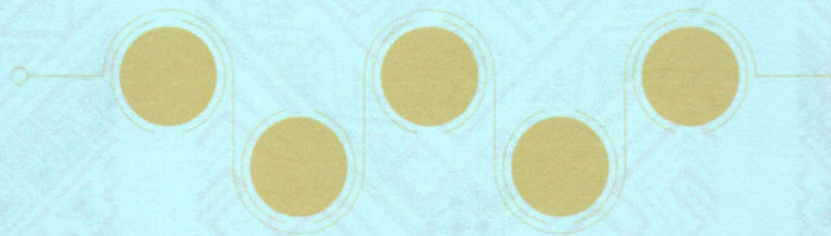






# R P J M D

2023 - 2029



B  
A  
B  
V





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi landasan strategis penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikasi pembiayaan, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*.

RPJMD ini disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta integratif-tematik-spasial. Proses penyusunannya juga memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta berorientasi pada hasil. Dalam pelaksanaannya, RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025–2029 diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah, sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya, untuk menjamin implementasi perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan berkesinambungan, ditetapkan mekanisme pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala sebagai berikut:

#### **5.1. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025–2029. Kaidah ini penting untuk memastikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berjalan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil. Pelaksanaan RPJMD dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah berikut:





a. *Konsistensi dan Keterpaduan Perencanaan*

Pelaksanaan pembangunan daerah harus dilandasi oleh konsistensi antara dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga RKPD tahunan. Setiap program dan kegiatan perangkat daerah harus mencerminkan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional dan provinsi juga menjadi prasyarat penting dalam mengoptimalkan sinergi program dan alokasi sumber daya lintas sektor dan wilayah.

b. *Berbasis Kinerja*

Seluruh proses pelaksanaan pembangunan mengacu pada prinsip penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Ini berarti setiap program dan kegiatan dirancang untuk mencapai output, outcome, dan impact yang terukur. Setiap perangkat daerah wajib menyusun indikator kinerja yang sejalan dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

c. *Akuntabilitas dan Transparansi*

Kaidah akuntabilitas mewajibkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara terbuka kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal, seperti evaluasi berkala, audit kinerja, serta keterlibatan DPRD dan masyarakat sipil, menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

d. *Inklusif dan Responsif terhadap Dinamika*

Kaidah pelaksanaan RPJMD juga menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Pelaksanaan pembangunan harus responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak,

penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok miskin. Di sisi lain, dinamika lingkungan strategis seperti bencana, pandemi, perubahan iklim, dan gejolak ekonomi harus diantisipasi melalui fleksibilitas kebijakan, sehingga pelaksanaan program tetap adaptif dan mampu menjawab tantangan baru tanpa menyimpang dari arah pembangunan yang telah ditetapkan.

*e. Efisiensi dan Efektivitas*

Pelaksanaan RPJMD mengedepankan prinsip efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dan efektivitas dalam pencapaian sasaran. Ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat maksimal, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Efisiensi pelaksanaan juga tercermin dalam pengurangan tumpang tindih program antarperangkat daerah dan optimalisasi koordinasi lintas sektor.

*f. Digitalisasi dan Inovasi*

RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan juga diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sistem informasi pembangunan daerah, integrasi data antarperangkat daerah, dan inovasi layanan publik menjadi pilar penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi birokrasi.

*g. Monitoring dan Pengendalian Berbasis Bukti*

Setiap tahapan pelaksanaan RPJMD harus didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dan bukti (evidence-based). Pelaporan kinerja dilakukan secara berkala dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan korektif bila terjadi deviasi. Evaluasi tengah periode (midterm review) juga dilakukan untuk memastikan bahwa RPJMD tetap relevan terhadap dinamika yang berkembang.



## 5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun sebagai penjabaran tahunan RPJMD. Pengendalian dilakukan melalui monitoring dan pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD).

Evaluasi dilakukan pada pertengahan dan akhir periode pelaksanaan RPJMD, yang meliputi:

- Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah,
- Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan strategis,
- Evaluasi penggunaan anggaran dan efektivitas pembiayaan,
- Evaluasi responsivitas terhadap perubahan lingkungan strategis, termasuk bencana dan dinamika sosial ekonomi.

## 5.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Keterbatasan fiskal daerah mendorong Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menggali alternatif sumber pembiayaan pembangunan melalui:

- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- Pemanfaatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi,
- Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),
- Hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan kreatif lainnya.

Pengembangan pembiayaan diarahkan untuk mendukung program prioritas, pelayanan dasar, dan akselerasi pembangunan infrastruktur daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

#### 5.4. Komitmen Pencapaian Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan berkomitmen untuk:

- Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang efektif, efisien dan berorientasi hasil,
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani,
- Memberikan pelayanan publik yang berkualitas,
- Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RPJMD ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen moral dan politis seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mewujudkan perubahan nyata yang berkesinambungan.



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

EDUARD MARKUS LIOE

| PARAF HIERARKI                                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala Bappeda                                        |  |
| Sekretaris Bappeda                                    |  |
| Kepala Sub Bagian Program, Pengendalian dan Pelaporan |  |

| PARAF HIERARKI            |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah         |  |
| Asisten Administrasi Umum |  |
| Kepala Bagian Hukum       |  |

